

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai entitas pelaporan berkewajiban pula untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pemalang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 101 yang mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya pada Pasal 102 ayat (1) ditentukan batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir bagi Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan antara lain digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



Setiap entitas pelaporan termasuk Pemerintah Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

- (a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- (b) Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2017 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- (c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
- (d) Keseimbangan Antargenerasi (*Intergeneration Equity*)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya. Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Kemudian pada Paragraf 26 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dinyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang dari pungutan pajak dan pinjaman;

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.1. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
16. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi makro
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3 Kebijakan akuntansi pemerintah daerah
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
 - 5.2. Laporan Saldo Anggaran Lebih
 - 5.3. Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan-LO
 - 5.3.2. Beban
 - 5.3.3. Kegiatan Non Operasional
 - 5.3.4. Pos Luar Biasa
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.5. Neraca
 - 5.5.1. Aset
 - 5.5.2. Kewajiban
 - 5.5.3. Ekuitas
 - 5.6. Laporan Arus Kas
 - 5.6.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.6.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.6.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.6.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, kategori industri pengolahan dan kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dominasi ketiganya mencapai 63,51 persen yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,03 persen, kategori industri pengolahan 20,87 persen dan kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,61 persen. Perubahan struktur ekonomi pertahun mulai tahun 2012 hingga 2017 terlihat kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun ketahun fluktuatif dan ada kecenderungan menurun kontribusinya terhadap PDRB, ini berarti walaupun dari tahun ketahun mengalami pertumbuhan namun masih kurang cepat dibandingkan dengan kategori lain yaitu perdagangan dan industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang per kategori seluruhnya mengalami pertumbuhan positif, namun cepat tidaknya pertumbuhan per kategori bervariasi tergantung faktor yang mempengaruhinya. Selama tahun 2017 selain faktor cuaca juga kerusakan infrastruktur khususnya jalan yang menyebabkan biaya transportasi, produksi menjadi lebih mahal dan mengurangi pendapatan serta nilai tambah menyebabkan perekonomian mengalami pelambatan. Faktor yang menyebabkan peningkatan pertumbuhan adalah kenaikan produksi pertanian yang berimbas pada kenaikan perdagangan dan industri yang secara langsung berkaitan dengan pertanian.

Kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang diukur melalui besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mengukur tingkat capaian pembangunan di bidang ekonomi yang menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam rentang waktu satu tahun di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan estimasi atau perkiraan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2017 sebesar Rp21.842.454,13 naik sebesar 9,01 persen dari tahun sebelumnya tahun 2016 yaitu sebesar Rp20.036.515,72.

Kontribusi sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar secara berturut-turut pada tahun 2017 adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 27,03 persen, sektor industri pengolahan 20,87 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,61 persen. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan konstan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK
 Tahun 2016 dan 2017**

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	
		2016	2017	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.490.139,23	5.903.889,48	3.850.771,69	4.012.917,06
2	Pertambangan & Penggalian	866.762,19	938.570,90	715.206,26	752.008,41
3	Industri Pengolahan	4.274.499,88	4.559.376,88	3.185.813,41	3.297.225,12
4	Pengadaan Listrik dan Gas	24.754,85	27.710,70	22.419,09	24.391,01



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	
		2016	2017	2016	2017
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.428,73	15.483,26	13.283,69	13.794,29
6	Konstruksi	839.427,62	936.495,86	662.286,15	701.170,34
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	3.076.300,61	3.410.181,51	2.603.495,09	2.796.271,34
8	Transportasi dan Pergudangan	527.623,34	613.249,39	462.443,60	507.832,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.021.182,75	1.116.650,96	861.503,74	912.238,22
10	Informasi dan Komunikasi	367.924,88	402.605,19	383.543,66	404.732,28
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	620.814,29	676.352,72	463.368,47	488.976,71
12	Real Estate	326.327,85	354.412,45	286.551,82	300.491,71
13	Jasa Perusahaan	68.014,31	74.923,03	55.942,29	59.364,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	671.048,98	768.529,31	505.060,44	547.124,16
15	Jasa Pendidikan	1.121.792,52	1.232.911,41	807.635,75	854.193,96
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	206.705,42	230.491,69	154.696,69	165.634,32
17	Jasa Lainnya	518.767,88	580.619,40	429.778,74	460.788,12
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		20.036.515,72	21.842.454,13	15.463.800,55	16.299.154,01

Sumber : Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2017

**Distribusi PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2016 dan 2017
Kabupaten Pemalang (%)**

NO	LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (persen)		Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (persen)	
		2016	2017	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,40	27,03	2,33	4,21
2	Pertambangan & Penggalan	4,33	4,30	8,89	5,15
3	Industri Pengolahan	21,33	20,87	5,65	3,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	14,50	8,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	2,69	3,84
6	Konstruksi	4,19	4,29	7,17	5,87
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	15,35	15,61	7,57	7,40
8	Transportasi dan Pergudangan	2,63	2,81	6,55	9,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,10	5,11	6,50	5,89
10	Informasi dan Komunikasi	1,84	1,84	5,61	5,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,10	8,51	5,53
12	Real Estate	1,63	1,62	6,20	4,86
13	Jasa Perusahaan	0,34	0,34	6,84	6,12
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	3,35	3,52	1,22	8,33
15	Jasa Pendidikan	5,60	5,64	6,66	5,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,03	1,06	7,94	7,07
17	Jasa Lainnya	2,59	2,66	4,01	7,22
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2017

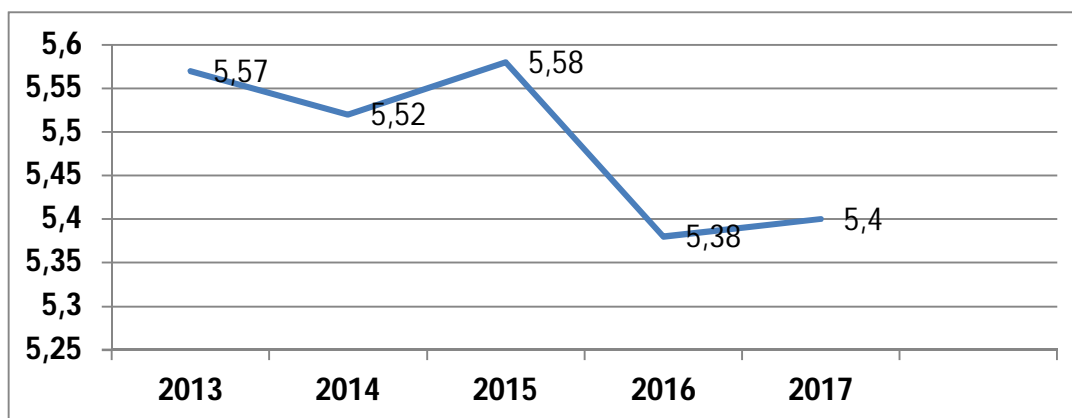


b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan aspek strategis makro ekonomi yang perlu menjadi perhatian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator utama pembangunan ekonomi daerah diukur dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Sebagaimana Tabel 1.4 diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Pemalang mengalami pertumbuhan. Hal ini dilihat berdasarkan PDRB Harga Konstan, dimana pada Tahun 2015 sebesar Rp14.664.608,72; pada Tahun 2016 naik menjadi Rp15.443.417,97 atau naik sebesar 5,31%. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 ini mengalami sedikit perlambatan sebesar 0,19 persen dari 5,50 pada tahun 2015 menjadi 5,31 pada tahun 2016.

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
Tahun 2011-2016 (%)**



Sumber : Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2017

c. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB yang dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk, belum sepenuhnya menunjukkan sebagai indikator kenaikan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut didasari antara lain : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi; dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan, karena dalam prakteknya tidak semua faktor produksi, khususnya SDM, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi.



Untuk melihat gambaran kesejahteraan masyarakat maka indikator yang tepat digunakan adalah pendapatan perkapita. Pertumbuhan pendapatan perkapita Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp16,850.209,01, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp15.545.239,43 atau meningkat sebesar 8,39%. Bila dilihat perkembangan besarnya pendapatan perkapita Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013 sampai dengan 2017, telah meningkat sebesar 43,43%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.6 yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan peningkatan pendapatan di Kabupaten Pemalang.

**Perkembangan dan Pertumbuhan Pendapatan Perkapita ADHB 2013-2017
 Kabupaten Pemalang (%)**

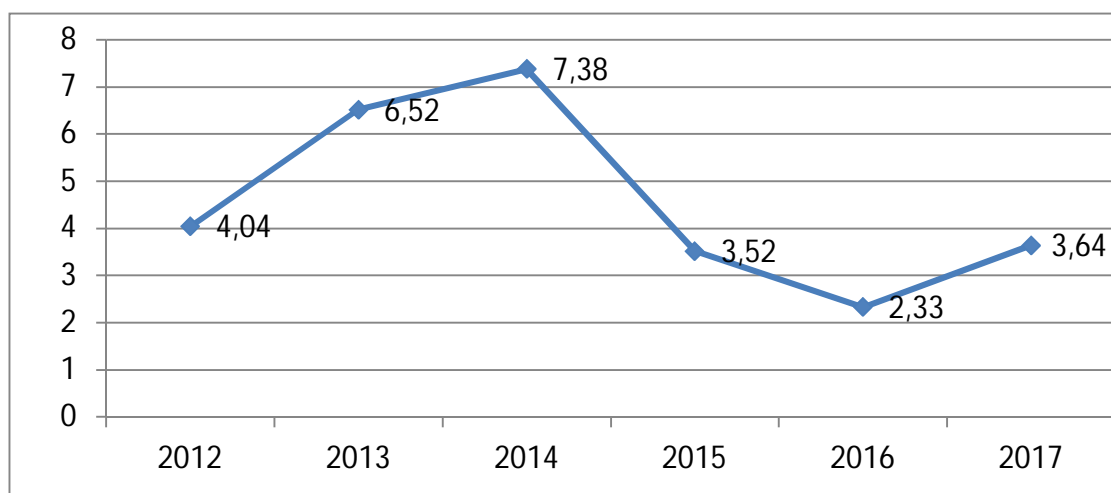
Tahun	Pendapatan Perkapita	Perkembangan (%)	Pertumbuhan (%)
2013	11.747.940,59	0,00	0,00
2014	13.127.516,76	11,73	11,73
2015	14.457.398,23	23,06	10,13
2016	15.545.239,43	32,32	7,52
2017	16.850.209,01	43,43	8,39

Sumber : Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2017

d. Laju Inflasi

Laju inflasi 2017 tergolong terkendali berkat berjalannya kebijakan pemantauan harga dan perbaikan tata niaga komoditas pangan. Tingkat inflasi di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 tercatat sebesar 3,64%. kondisi ini lebih rendah dari target RPJMD pada rentang 6,32-7. penyumbang inflasi yang cukup besar adalah transportasi komunikasi sebesar 5,63, bahan makanan 5,13, perumahan, air, listrik, gas dan Bahan Bakar sebesar 5,05.

**Grafik 1.3
 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pemalang Tahun 2012-2017 (%)**



Sumber : Bappeda Kab.Pemalang Tahun 2017



2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2017 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2017.

Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2017. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2017 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.

Arah Kebijakan Anggaran

Dalam sistem anggaran kinerja, arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran. Disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan Anggaran Pendapatan

Dengan berlakunya otonomi daerah mendorong daerah untuk terus mengoptimalkan kapasitas fiskalnya. Tujuan utamanya untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerah. Hingga saat ini, pajak dan retribusi daerah masih menjadi andalan daerah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya yang dilakukan diantaranya berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan. Tuntutan peningkatan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Selama ini Pemerintah Daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah. Meskipun jumlahnya relatif memadai, yakni sekurang-kurangnya 60 persen dari proporsi total Pendapatan APBD, namun daerah harus lebih kreatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk diantaranya pajak dan retribusi daerah.

Pendapatan Daerah yang ada dalam struktur APBD dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori:

- a. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di luar pemerintah daerah (*external source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. Pihak luar adalah pihak-pihak yang berada di luar pemerintah daerah yang bersangkutan, seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga.



- b. Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Kategori pendapatan daerah ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Yang termasuk dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (*local tax, subnational tax*), retribusi daerah (*local retribution, fees, local licence*) dan hasil-hasil badan usaha (*local owned enterprises*) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan itu merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yuridiksinya. Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya. Retribusi daerah, komponen lain yang juga termasuk komponen PAD, merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan tertentu kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya. Perbedaan tegas antara pajak daerah dan retribusi daerah terletak pada kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jika pajak daerah kontraprestasinya tidak diberikan secara langsung, maka pada retribusi daerah diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut. Baik pajak daerah maupun retribusi daerah, keduanya diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah serta dipungut oleh lembaga yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Daerah yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Pemalang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Alokasi Dana Desa.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah masih berkisar 11-12 persen dari keseluruhan pendapatan dalam APBD. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada APBD Perubahan Tahun 2017 ini terdapat pendapatan yang naik setelah APBD Tahun 2017 ditetapkan, khususnya pada pos Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara umum juga



mengalami peningkatan. Hal tersebut secara normatif akan mempengaruhi total pendapatan dibandingkan dengan pada saat penetapan APBD. Atas gambaran tersebut maka dalam menentukan kebijakan pendapatan daerah perlu mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat di bidang keuangan/fiskal.

Sebagai konsekuensi atas terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana secara substansi ada penataan ulang dan pembatasan atas beberapa obyek pendapatan di daerah, maka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dilaksanakan dengan semakin diintensifikannya pemungutan pajak dan retribusi yang ada, namun diupayakan tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, upaya peningkatan PAD dilakukan dengan upaya-upaya penyehatan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah, serta menjalin kerja sama dengan mitra usaha dalam pengembangan potensi daerah.

Guna meningkatkan laba usaha, BUMD harus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatannya dan melakukan efisiensi biaya. Untuk dapat mencapai hal tersebut harus dilakukan revitalisasi terhadap BUMD yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang. Revitalisasi dapat mengakibatkan BUMD memperluas atau bahkan menambah jenis usahanya. Namun harus diperhatikan bahwa usaha yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui BUMD adalah usaha-usaha yang bersifat rintisan yang biasanya kurang diminati oleh masyarakat pada umumnya karena usaha tersebut memiliki risiko yang tinggi, membutuhkan modal yang besar, dan merupakan usaha-usaha inovatif. Kemudian untuk PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, selain dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi juga perlu dilakukan kaji ulang terhadap dasar pengenaan pajak/retribusi daerah dan mekanisme pemungutan serta mekanisme pengawasannya.

Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Prediksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2017	Prediksi Tahun Anggaran 2017 Perubahan	Bertambah /(Berkurang)
PENDAPATAN DAERAH	2.117.211.252.000,00	2.366.403.484.000,00	249.192.232.000,00
Pendapatan Asli Daerah	249.273.252.000,00	405.333.931.000,00	156.060.679.000,00
Pajak Daerah	45.334.000.000,00	54.232.000.000,00	8.898.000.000,00
Retribusi Daerah	24.358.028.000,00	25.737.744.000,00	1.379.716.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.303.752.000,00	15.471.277.000,00	-1.832.475.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	162.277.472.000,00	309.892.910.000,00	147.615.438.000,00
Dana Perimbangan	1.587.692.533.000,00	1.599.147.048.000,00	11.454.515.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak	31.636.180.000,00	40.591.357.000,00	8.955.177.000,00
Dana Alokasi Umum	1.284.676.435.000,00	1.197.916.501.000,00	(86.759.934.000,00)
Dana Alokasi Khusus	271.379.918.000,00	360.639.190.000,00	89.259.272.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	280.245.467.000,00	361.922.505.000,00	81.677.038.000,00
Pendapatan Hibah	9.060.000.000,00	9.060.000.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	121.578.117.000,00	124.737.092.000,00	3.158.975.000,00
Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	37.123.330.000,00	37.123.330.000,00
Alokasi Dana Desa	149.607.350.000,00	191.002.083.000,00	41.394.733.000,00



a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1, angka 18 adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada Pasal 2, ayat (2), dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah dipungut berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2010 dan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Pada Perubahan Tahun 2017 diperkirakan naik sebesar Rp8.898.000.000,00. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah diprediksi mengalami kenaikan sebesar Rp1.379.716.000,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperkirakan turun sebesar Rp1.832.475.000,00. Sedangkan perkiraan kenaikan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp147.615.428.000,00.

b. Dana Perimbangan

Sumber pembiayaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dana perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Data yang digunakan dalam penghitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah dan/ atau lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional.

Proporsi Dana Perimbangan terhadap APBD masih relatif besar (lebih dari 50 persen), hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pemalang dalam pendanaan daerah masih sangat tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat.

Prediksi kenaikan/penurunan pos-pos Dana Perimbangan pada APBD Perubahan 2017 adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak, mengalami kenaikan sebesar Rp8.955.177.000,00;
2. Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp86.759.934.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp89.259.272.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya: Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; (iii) Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus; (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya; dan (v) Alokasi Dana Desa.

Prediksi besaran pos-pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Perubahan RKPD 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah tetap;
2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp3.158.975.000,00;
3. Adanya bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp37.123.330.000,00;
4. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, meningkat sebesar Rp41.394.733.000,00.

Kebijakan Anggaran Belanja

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, dimana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan pada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman,



belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap PD. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji, tunjangan, honorarium, lembur, tambahan penghasilan lainnya, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.
 - b. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.
 - c. Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, pemerintah daerah hendaknya melakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.
 - d. Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam menentukan alokasi belanja hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mekanismenya berdasarkan/sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
 - e. Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan



- tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Dalam rangka mengatasi kemungkinan terjadinya resiko sosial tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/ anggota masyarakat akan tetapi dilakukan secara selektif/tidak mengikat, tidak terus menerus dan jumlahnya dibatasi sesuai kemampuan keuangan daerah. Adapun mekanismenya juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- f. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
 - g. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kelurahan/pemerintah desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah daerah pemerintah kelurahan/pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan di kelurahan/desa. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - h. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:
- a. Belanja pegawai; merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa; merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja ini merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Yang termasuk dalam kategori belanja barang/jasa adalah Belanja Pengadaan barang/jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas.
 - c. Belanja modal; merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:
 - 1) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas;
 - 2) Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - 3) Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual;



- 4) Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Adapun yang termasuk kategori utama belanja modal ada 5 (lima) yaitu:

- 1) Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta lain-lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah tersebut siap pakai;
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan alat-alat dan mesin-mesin yang dipergunakan dalam kegiatan pembentukan modal termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai termasuk di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan;
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai;
- 5) Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

Penganggaran Belanja Langsung terbagi menjadi dua urusan yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.



Prediksi Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Pemalang Perubahan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Prediksi Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2017	Prediksi Tahun Anggaran 2017 Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
BELANJA	2.141.783.328.000,00	2.502.244.546.000,00	360.461.218.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.491.903.988.000,00	1.395.672.302.000,00	(96.231.686.000,00)
Belanja Pegawai	1.110.896.440.000,00	999.761.681.000,00	(111.134.759.000,00)
Belanja Hibah	69.625.000.000,00	22.990.400.000,00	(46.634.600.000,00)
Belanja Bantuan Sosial	1.680.000.000,00	3.005.000.000,00	1.325.000.000,00
Belanja Bagi Hasil kepada	6.929.702.000,00	7.996.975.000,00	1.067.273.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	300.772.846.000	358.918.246.000	58.145.400.000
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	649.879.340.000	1.106.572.244.000	456.692.904.000
Belanja Pegawai	96.044.972.000	146.698.635.908	50.653.663.908
Belanja Barang dan Jasa	280.116.795.200	508.601.291.378	228.484.496.178
Belanja Modal	273.717.572.800	451.272.316.714	177.554.743.914

Belanja Daerah diprediksi naik sekitar 16,83% dari Rp2.141.783.328.000,00 pada APBD Penetapan Tahun 2017, menjadi Rp2.502.244.546.000,00 di APBD Perubahan 2017. Dengan proporsi Belanja Tidak Langsung turun kurang lebih sebesar 6,45%, dari Rp1.491.903.988.000,00 menjadi Rp1.395.672.302.000,00. Sementara itu, Belanja Langsung diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 70,27% dari Rp649.879.340.000,00 menjadi Rp1.106.572.244.000,00.

Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan pembiayaan mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman;
6. Penerimaan Piutang Daerah;
7. Penerimaan Dana Bergulir; dan
8. Penerimaan Hasil Penarikan



Pengeluaran Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan;
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
3. Pembayaran pokok utang;
4. Pemberian pinjaman daerah;
5. Pemberian Dana Bergulir.

Prediksi pembiayaan daerah dalam APBD Perubahan Tahun 2017 tersaji dalam tabel di bawah ini

Tabel 3.5. Prediksi Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (dalam Satuan Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2017	Prediksi Tahun Anggaran 2017 Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	58.572.076.000,00	170.841.062.000,00	112.268.986.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54.172.076.000,00	166.441.062.000,00	112.268.986.000,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	34.000.000.000,00	35.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000,00	31.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Pemberian Pinjaman Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	24.572.076.000,00	135.841.062.000,00	111.268.986.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)	0,00	0,00	0,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen yang mengarahkan pengelolaan keuangan pada jalur pencapaian target kinerja dari setiap urusan, program dan kegiatan yang telah direncanakan pada setiap level periodisasinya.

Visi jangka panjang Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang 2005-2025 adalah "Kabupaten Pemalang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Berdasarkan visi jangka panjang tersebut dirumuskan visi pembangunan daerah tahun 2016-2021 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu:

"Kabupaten Pemalang yang Sehat, Cerdas, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia"

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun pertama dari implementasi RPJMD 2016–2021.

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada laporan realisasi APBD TA 2017 sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan	2.366.403.484.000,00	2.353.030.274.957,00	99,43
Belanja dan Transfer	2.502.244.546.000,00	2.258.339.872.920,00	90,25
Surplus/(Defisit)	(135.841.062.000,00)	94.690.402.037,00	(69,71)
Penerimaan Pembiayaan	170.841.062.000,00	166.750.302.936,00	97,61
Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	31.000.000.000,00	88,57
Pembiayaan Netto	135.841.062.000,00	135.750.302.936,00	99,93
SILPA	0,00	230.440.704.973,00	

Adapun realisasi pendapatan dan belanja per urusan pemerintahan pada pelaksanaan APBD TA 2017 adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Pemalang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
PENDAPATAN	2.366.403.484.000,00	2.353.030.274.957,00	(13.373.209.043,00)	99,43
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	301.052.160.000,00	302.766.895.191,00	1.714.735.191,00	100,57
Pendidikan	151.582.160.000,00	156.409.942.119,00	4.827.782.119,00	103,18
Kesehatan	149.225.000.000,00	146.018.048.072,00	(3.206.951.928,00)	97,85
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	245.000.000,00	319.905.000,00	74.905.000,00	130,57
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	11.779.000.000,00	11.333.132.210,00	(445.867.790,00)	96,21
Lingkungan Hidup	200.000.000,00	265.977.000,00	65.977.000,00	132,99
Administrasi Kependudukan dan Capil	265.000.000,00	277.170.000,00	12.170.000,00	104,59
Perhubungan	1.550.000.000,00	1.159.224.500,00	(390.775.500,00)	74,79
Komunikasi dan Informatika	39.000.000,00	39.301.000,00	301.000,00	100,77
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.825.000.000,00	7.281.077.010,00	456.077.010,00	106,68
Penanaman Modal	2.900.000.000,00	2.310.382.700,00	(589.617.300,00)	79,67
Urusan Pemerintahan Pilihan	5.040.000.000,00	5.441.481.068,00	401.481.068,00	107,97
Kelautan dan Perikanan	1.600.000.000,00	1.915.632.068,00	315.632.068,00	119,73
Pariwisata	3.200.000.000,00	3.327.572.000,00	127.572.000,00	103,99
Pertanian	240.000.000,00	198.277.000,00	(41.723.000,00)	82,62
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2.048.532.324.000,00	2.033.488.766.488,00	(15.043.557.512,00)	99,27
Keuangan	2.048.532.324.000,00	2.033.488.766.488,00	(15.043.557.512,00)	99,27

b. BELANJA

**Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Pemalang
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Belanja**

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
BELANJA	2.502.244.546.000,00	2.258.339.872.920,00	(243.904.673.080,00)	90,25
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar	1.627.560.997.250,00	1.459.822.444.631,00	(167.738.552.619,00)	89,69
Pendidikan	949.999.233.000,00	896.790.814.772,00	(53.208.418.228,00)	94,40
Kesehatan	356.800.316.000,00	298.649.163.104,00	(58.151.152.896,00)	83,70
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	219.973.163.000,00	176.832.581.685,00	(43.140.581.315,00)	80,39
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	79.018.408.000,00	66.847.298.704,00	(12.171.109.296,00)	84,60
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat	9.216.531.000,00	8.665.523.538,00	(551.007.462,00)	94,02
Sosial	12.553.346.250,00	12.037.062.828,00	(516.283.422,00)	95,89
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar	141.817.372.750,00	130.241.435.856,00	(11.575.936.894,00)	91,84
Tenaga Kerja	8.573.999.000,00	8.171.460.590,00	(402.538.410,00)	95,31
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.097.685.000,00	1.097.186.125,00	(498.875,00)	99,95
Pangan	1.360.000.000,00	1.359.868.600,00	(131.400,00)	99,99
Pertanahan	556.705.000,00	364.967.862,00	(191.737.138,00)	65,56
Lingkungan Hidup	22.178.062.000,00	21.236.727.051,00	(941.334.949,00)	95,76
Administrasi Kependudukan dan Capil	12.183.254.000,00	11.369.343.959,00	(813.910.041,00)	93,32
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.664.856.000,00	11.991.406.217,00	(673.449.783,00)	94,68
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.305.144.000,00	3.215.148.160,00	(89.995.840,00)	97,28
Perhubungan	11.590.116.000,00	10.666.432.321,00	(923.683.679,00)	92,03
Komunikasi dan Informatika	25.464.417.000,00	22.762.369.263,00	(2.702.047.737,00)	89,39
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	20.381.139.750,00	19.398.707.704,00	(982.432.046,00)	95,18
Penanaman Modal	5.251.390.000,00	4.847.843.736,00	(403.546.264,00)	92,32
Kepemudaan dan Olah Raga	2.672.500.000,00	2.665.713.000,00	(6.787.000,00)	99,75
Statistik	432.000.000,00	420.282.152,00	(11.717.848,00)	97,29
Persandian	572.233.000,00	501.865.700,00	(70.367.300,00)	87,70
Kebudayaan	8.887.300.000,00	5.994.258.574,00	(2.893.041.426,00)	67,45
Perpustakaan	858.000.000,00	808.566.000,00	(49.434.000,00)	94,24
Kearsipan	3.788.572.000,00	3.369.288.842,00	(419.283.158,00)	88,93
Urusan Pemerintahan Pilihan	118.034.598.500,00	81.297.132.918,00	(36.737.465.582,00)	68,88
Kelautan dan Perikanan	15.601.186.000,00	13.447.041.045,00	(2.154.144.955,00)	86,19
Pariwisata	38.796.802.500,00	26.312.494.057,00	(12.484.308.443,00)	67,82
Pertanian	29.408.285.000,00	28.239.705.974,00	(1.168.579.026,00)	96,03
Perdagangan	30.808.350.000,00	9.938.072.998,00	(20.870.277.002,00)	32,26
Perindustrian	2.997.975.000,00	2.949.392.844,00	(48.582.156,00)	98,38
Transmigrasi	422.000.000,00	410.426.000,00	(11.574.000,00)	97,26



URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	614.831.577.500,00	586.978.859.515,00	(27.852.717.985,00)	95,47
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	781.044.000,00	755.790.960,00	(25.253.040,00)	96,77
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.858.976.000,00	14.570.029.784,00	(3.288.946.216,00)	81,58
Perencanaan	14.569.281.300,00	13.245.114.451,00	(1.324.166.849,00)	90,91
Keuangan	427.347.103.000,00	418.309.680.455,00	(9.037.422.545,00)	97,89
Kepegawaian dan Diklat	11.978.319.000,00	10.665.990.852,00	(1.312.328.148,00)	89,04
Pengawasan	10.334.032.250,00	9.534.221.395,00	(799.810.855,00)	92,26
Sekretariat DPRD	31.588.899.000,00	29.025.311.736,00	(2.563.587.264,00)	91,88
Sekretariat Daerah	44.172.146.950,00	39.701.965.637,00	(4.470.181.313,00)	89,88
BPBD	3.368.530.000,00	2.848.827.842,00	(519.702.158,00)	84,57
Kebangpolinmas	3.705.129.000,00	3.442.613.162,00	(262.515.838,00)	92,91
Kecamatan	49.128.117.000,00	44.879.313.241,00	(4.248.803.759,00)	91,35

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

3.2.1 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCAPAIAN TARGET REALISASI PENDAPATAN

a. Permasalahan

- 1) Pembaharuan Data Terkini Potensi Pajak Bumi dan Bangunan.
 Sampai dengan saat ini belum semua data nilai jual objek pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang dijadikan dasar perhitungan PBB menggambarkan jumlah dan nilai riil (pasar) pada kondisi terkini. Hal ini menjadi potensi yang belum secara massif dioptimalkan dalam meningkatkan potensi penerimaan pendapatan PBB P2.
- 2) Penerimaan Pendapatan yang Bukan Merupakan Tugas Pokok Fungsi SKPD Tertentu Melainkan Dampak dari Tugas Pokok Pelayanan kepada Masyarakat.
 Secara umum tugas pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD adalah menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan nilai dasar tersebut maka fokus utama dari beberapa SKPD pengelola pendapatan adalah memberikan pelayanan terbaik bukan pada penerimaan pendapatannya. Hal inilah kiranya yang menjadikan beberapa objek retribusi tidak mencapai target seperti retribusi penyediaan/penyedotan kakus di DPU yang dikelola oleh Unit Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan.

b. Solusi

- 1) Optimalisasi Pembaharuan Data Potensi Pendapatan PBB P2
 Pemerintah Kabupaten Pemalang terus melaksanakan beberapa langkah untuk mengoptimalkan pendapatan Pajak PBB dengan memperbarui data objek pajak sesuai dengan kondisi terkini. Dengan demikian diharapkan akan ada penyesuaian/penambahan nilai objek pajak yang sudah ada maupun penambahan wajib pajak yang belum terdaftar. Dengan demikian diharapkan desentralisasi PBB P2 ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah.



- 2) Perubahan Paradigma Pengelolaan Pendapatan dan Percepatan Pembangunan. Bahwa untuk mendukung percepatan peningkatan pelayanan dibutuhkan pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan dana perimbangan. Untuk itu Pemerintah Daerah terus selalu mendorong dan memberikan insentif agar semangat peningkatan pelayanan terus dilaksanakan diiringi dengan usaha peningkatan penerimaan PAD yang pada akhirnya akan digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri.

3.2.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENCAPAIAN TARGET REALISASI BELANJA

a. Permasalahan

- 1) Masih Terbatasnya Ruang Fiskal
Untuk menunjang pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan maka dibutuhkan jumlah belanja daerah yang besar. Tetapi sampai dengan saat ini postur anggaran Pemerintah Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh belanja yang bersifat wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, belanja operasional kantor, dan belanja wajib lainnya seperti belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, pendampingan program-program nasional dan lain-lain.
Kondisi ini menyebabkan alokasi anggaran belanja yang tersedia untuk membiayai program dan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas.
- 2) Permasalahan regulasi
Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berpedoman pada regulasi yang diterbitkan oleh kementerian teknis berkenaan. Jika regulasi dimaksud diterbitkan terlambat maka akan menjadikan pelaksanaan kegiatan terhambat.
- 3) Kesesuaian Kapasitas Kelembagaan
Aspek ini berkenaan dengan dampak dari besarnya rentang kendali dan determinasi pencapaian visi dan misi, serta pelaksanaan program kegiatan. SKPD dengan jumlah anggaran yang besar, menjadi inti dari visi dan dengan jumlah sumberdaya yang besar harus diwadahi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dalam hal struktur, sistem kerja dan kualitas personelnya. Jika tidak, hal ini berpotensi menimbulkan disorientasi pelaksanaan misi tugas pokok dan fungsi suatu SKPD serta kurang optimalnya tingkat penyerapan belanja APBD.
- 4) Gagal Lelang di beberapa paket pekerjaan yang ditawarkan ke penyediaan barang dan jasa;
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Pemalang secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Namun demikian, masih terdapat paket-paket pengadaan barang/jasa yang mengalami gagal lelang pada proses pengadaan di ULP dan putus kontrak pada pelaksanaan pekerjaan.
Penyebab gagal lelang pada pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu keterlambatan jadwal lelang yang disebabkan adanya perubahan dalam dokumen perencanaan, penyedia barang/jasa yang memiliki SBU tertentu jumlahnya terbatas, terbatasnya dukungan bahan dan peralatan dari distributor, terbatasnya waktu pelaksanaan pekerjaan, paket pekerjaan pernah mengalami gagal lelang, dan paket pengadaan barang/jasa kurang menarik.



5) Putus kontrak atas beberapa paket pekerjaan.

Penyebab terjadinya putus kontrak yaitu adanya penambahan volume pekerjaan yang tidak diimbangi dengan penambahan waktu pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan terbatas, paket pengadaan barang/jasa pernah mengalami gagal lelang, dan penyedia barang/jasa yang tidak profesional.

**DAFTAR PEKERJAAN PUTUS KONTRAK
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	SKPD	PEKERJAAN	NOMOR KONTRAK	PELAKSANA
1	DPU TR	Rehab Di Lanjiladang	027.2/15.B.50/SDA/PU TR/2017	CV. IDEY KARYA
2	DPU TR	Rehab Di Tracak	027.2/15.B.51/SDA/PU TR/2017	CV. IDEY KARYA
3	DPU TR	Normalisasi dan Pengaman Tebing Sungai dengan Pas batu kali Sungai Srengseng Hulu	027.2/15.B.54/SDA/PU TR/2017	CV. IDEY KARYA
4	DPU TR	Pemel. Jalan Karang Moncol - Tanahbaya	050/84/PU TR	CV. PERDANA
5	DPU TR	Pemb. Gedung DPRD	050/119/PU TR	PT. MERDEKA INTI
6	Dinkes	Pengurangan tanah pembangunan RS Tipe D Comal dan pembangunan Talud Kec. Comal	027.2/3765/2017	NAUVAL JAYA ABADI CEMERLANG
7	Dispertan	Pembangunan Sumur Dalam di Pagergunung	521.3/847/S.Perjan/VIII/2017	TIRTA AGUNG
8	Disperkim	Pembangunan Gapura Jl.Di Panjaitan	050/254.1/Disperkim	CV. MARGA JAYA RAYA
9	Disparpora	Penataan Kaw asan Obyek Wisata	050/13.01/Disparpora/2017	PT. BAHANA KRIDA
10	Disperkim	Pembangunan Gapura Perbatasan Pemalang - Tegal	050/254/Disperkim	CV. MARGA JAYA RAYA

b. Solusi

1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Untuk mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Pemalang terus mengupayakan upaya peningkatan penerimaan dari pendapatan asli daerah. Berbagai langkah peningkatan daya saing daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan aktifitas perekonomian masyarakat dan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah.

2) Meningkatkan fokus dan prioritas dalam perhitungan alokasi anggaran agar secara efektif dapat mencapai visi Pemalang. Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjati Diri, Mandiri dan Sejahtera diantaranya dengan mengarahkan alokasi sesuai tematik capaian pada tahun anggaran berkenaan.

3) Melakukan analisa beban kerja termasuk jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan sehingga selanjutnya dapat menjadi pertimbangan dalam tatalaksana organisasi pada setiap SKPD guna optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

4) Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi gagal lelang yaitu: (1) membuat dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, jelas, detail, dan terperinci, (2) dukungan pemerintah dalam mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Keterangan Keahlian (SKA), dan Surat Keterangan keterampilan (SKT), (3) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal dan (4) membuat paket pengadaan barang/jasa yang diminati/menarik.

5) Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi putus kontrak yaitu: (1) klarifikasi dan pembuktian terhadap penyedia barang/jasa, (2) pengoptimalan kinerja konsultan pengawas, (3) koordinasi dengan tenaga yang berkompeten/ahli, (4) pelimpahan paket pengadaan barang/jasa lebih awal, dan (5) membuat paket pekerjaan yang diminati/menarik.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretariat Daerah beralamat di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang. Entitas pelaporan ini terdiri dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan 41 entitas akuntansi yaitu:

NO	KODE	NAMA SKPD (ENTITAS AKUNTANSI)
1	1.01.1.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.1.1	Dinas Kesehatan
3	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	1.04.1.1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	1.05.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja
6	1.06.1.1	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	2.01.1.1	Dinas Tenaga Kerja
8	2.05.1.1	Dinas Lingkungan Hidup
9	2.06.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	2.07.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
11	2.09.1.1	Dinas Perhubungan
12	2.10.1.1	Dinas Komunikasi, dan Informatika
13	2.11.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan
14	2.12.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15	2.18.1.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	3.01.1.1	Dinas Perikanan
17	3.02.1.1	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
18	3.03.3.1	Dinas Pertanian
19	4.01.1.1	Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
20	4.02.1.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21	4.03.1.1	BAPPEDA
22	4.04.7.1	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
23	4.04.8.1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
24	4.05.10.1	Badan Kepegawaian Daerah
25	4.06.1.1	Inspektorat
26	4.07.1.1	Sekretariat DPRD
27	4.08.1.1	Sekretariat Daerah
28	4.09.1.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
29	4.10.1.1	Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
30	4.11.1.1	Kecamatan Moga
31	4.11.2.1	Kecamatan Pulosari
32	4.11.3.1	Kecamatan Belik
33	4.11.4.1	Kecamatan Watukumpul
34	4.11.5.1	Kecamatan Bodeh
35	4.11.6.1	Kecamatan Bantarbolang
36	4.11.7.1	Kecamatan Randudongkal
37	4.11.8.1	Kecamatan Pemalang
38	4.11.9.1	Kecamatan Taman
39	4.11.10.1	Kecamatan Petarukan
40	4.11.11.1	Kecamatan Ampelgading
41	4.11.12.1	Kecamatan Comal
42	4.11.13.1	Kecamatan Ulujami
43	4.11.14.1	Kecamatan Warungpring

4.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.



Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 KEBIJAKAN PENGUKURAN

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka harus dikonversi dulu menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Sedangkan apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak



terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Adapun investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut :

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

- 1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara, yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Berdasarkan kualitasnya piutang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut: Kualitas Piutang Lancar; Kualitas Piutang Kurang Lancar; Kualitas Piutang Diragukan; dan Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang 2 sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - (1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang kurang dari 2 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.



- b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - (1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - (2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - (3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
- b) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun;
- c) Kualitas Diragukan, jika umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun;
- d) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak yang bukan disebut objek Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d) Kualitas macet, jika piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan, atau Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a) 0,5% (setengah perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan. Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.



5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Metode pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan disajikan sebesar :

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

6. Aset Untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

7. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu :



- 1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- 2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- 6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode,

Pertama, Metode Biaya, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Kedua, Metode Ekuitas. Metode ini merupakan suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Ketiga, Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur (%)			
		1 s.d 2 Tahun	>2 s.d 3 Tahun	>3 s.d 4 Tahun	Lebih dari 4 Tahun
1.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir	25,00	50,00	75,00	100,00

8. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	<ol style="list-style-type: none">1. Harga pembelian/PembebasanTanah;2. Biaya Pembebasan/Ganti Rugi;3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (Biaya pembuatan sertifikat, Pelepasan Hak, Permohonan Hak Pakai Tanah);4. Biaya Pematangan, Pematokan, Pengukuran, dan Pengurukan/ Penimbunan;5. Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2.	Peralatan dan Mesin a. Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	<ol style="list-style-type: none">1. Harga Pembelian Peralatan & Mesin (PPN&PPH);2. Ongkos Angkut;3. Biaya Asuransi Pengiriman;4. Biaya Instalasi/Pemasangan;5. Biaya Selama Masa Uji Coba.
	b. Pembuatan Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none">1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketigakan):<ol style="list-style-type: none">a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;c. Biaya Perizinan;d. Jasa Konsultan;2. Yang dilaksanakan secara swakelola:<ol style="list-style-type: none">a. Biaya Bahan Baku;b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Jasa Konsultan;f. Biaya Perizinan.
3.	Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none">1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketigakan)<ol style="list-style-type: none">a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;c. Biaya Perizinan;d. Jasa Konsultan;e. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran bangunan lama;2. Yang dilaksanakan secara swakelola<ol style="list-style-type: none">a. Biaya Bahan Baku;b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Biaya Perizinan;f. Biaya Konsultan;g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama;



No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	<ol style="list-style-type: none">1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketiga)<ol style="list-style-type: none">a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;b. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;c. Biaya Perizinan;d. Jasa Konsultan;e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan.2. Yang dilaksanakan secara swakelola<ol style="list-style-type: none">a. Biaya Bahan Baku;b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Biaya Perizinan;f. Biaya Konsultan;g. Biaya Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama.
5.	Aset Tetap Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Yang dilaksanakan melalui kontrak (di pihak ketiga)<ol style="list-style-type: none">a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;b. Biaya perencanaan dan pengawasan danc. Biaya perizinan;2. Yang dilaksanakan secara swakelola<ol style="list-style-type: none">a. Biaya Bahan Baku;b. Upah Tenaga Kerja;c. Sewa Peralatan;d. Biaya Perencanaan dan Pengawasan;e. Biaya Perizinan;f. Jasa Konsultan.
6.	Hibah dari pihak ketiga	Nilai wajar pada saat perolehan;

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:



- 1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c) bertambah volume, dan/atau
 - d) bertambah estetis/keindahan/kenyamanan, dan/atau
 - e) bertambah kapasitas produksi.
- 2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melembi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut :

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp. 400.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp. 10.000.000,00
	- Irigasi	Rp. 5.000.000,00
	- Jaringan	Rp. 400.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Komputer Unit	4
1	3	2	17	Peralatan Komputer	4
1	3	2	18	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	19	Alat Studio	5
1	3	2	20	Alat Komunikasi	5
1	3	2	21	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	22	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	23	Alat Kedokteran	5
1	3	2	24	Alat Kesehatan	5
1	3	2	25	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	26	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	27	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	28	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	29	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	30	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (Badan Tenaga Atom Nasional/ BATAM)	10
1	3	2	31	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	32	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	33	Alat Laboratorium Standarsasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10
1	3	2	34	Senjata Api	10
1	3	2	35	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	36	Senjata Sinar	5
1	3	2	37	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	38	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	39	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	40	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	41	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	42	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	43	Peralatan Sumur	10
1	3	2	44	Peralatan Produksi	10
1	3	2	45	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	46	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	47	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	48	Alat Deteksi	5
1	3	2	49	Alat Pelindung	5



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	50	Alat SAR	2
1	3	2	51	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	52	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	53	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	54	Peralatan Olahraga	3
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	3	12	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Lain	5
1	3	4	21	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	22	Jaringan Listrik	40
1	3	4	23	Jaringan Telepon	20
1	3	4	24	Jaringan Gas	30



Penghitungan penyusutan telah didukung dengan sistem aplikasi Barang Milik Daerah maka penghitungan penyusutan aset sejak tahun 2016 dilakukan secara bulanan dengan mengacu pada tanggal perolehan. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tak berwujud.

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

9. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :

- a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

10. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.



Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

11. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 4) Aset Tidak Berwujud; dan
- 5) Aset Lain-lain.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

12. Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Amortisasi berlaku untuk semua jenis Aset Lainnya, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Adapun Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Sementara itu Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi".

13. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.



14. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

15. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan. Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan. Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan. Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

16. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD. Akun ini menurut Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

17. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta



denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

18. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

19. Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

Utang Beban diakui pada saat, pertama, beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Kedua, terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah. Ketiga, barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

20. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

21. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah :

- 1) Utang Dalam Negeri – sektor perbankan;
- 2) Utang Dalam Negeri – sektor lembaga keuangan non bank;
- 3) Utang Dalam Negeri – obligasi;
- 4) Utang pemerintah pusat;
- 5) Utang pemerintah provinsi; dan
- 6) Utang pemerintah kabupaten/kota.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima



pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

22. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

23. Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, dan ;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan



pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

24. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

25. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

26. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan pembiayaan, dan Pengeluaran pembiayaan.



Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

27. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.

Dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;



- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Opeasional (LO).

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

30. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

Koreksi Kesalahan

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Jika dikelompokkan menurut periodenya, kesalahan yang tidak berulang dapat dikelompokkan menjadi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan pada periode sebelumnya.
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
- 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada



setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN- LRA

Pendapatan - LRA Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA, Pendapatan Transfer - LRA, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2017 serta realisasi TA 2016, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah - LRA	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	405.333.931.000,00	425.893.266.850,00	275.458.054.016,00
2 Pendapatan Transfer - LRA	1.952.009.553.000,00	1.918.137.008.107,00	1.828.008.148.518,00
3 Lain-lain Pendapatan yang sah - LRA	9.060.000.000,00	9.000.000.000,00	9.048.077.840,00
Jumlah	2.366.403.484.000,00	2.353.030.274.957,00	2.112.514.280.374,00

Realisasi Pendapatan Daerah - LRA TA 2017 sebesar Rp2.353.030.274.957,00 atau 99,43% dari anggarannya sebesar Rp2.366.403.484.000,00 dan 111,06% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp2.112.514.280.374,00.

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah - LRA, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi. Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA untuk periode Tahun Anggaran 2017 dan 2016, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Pajak Daerah - LRA	54.232.000.000,00	64.270.887.023,00	45.544.391.390,00
2 Retribusi Daerah - LRA	25.737.744.000,00	27.884.961.093,00	26.074.275.115,00
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	15.471.277.000,00	15.471.278.657,00	37.153.819.470,00
4 Lain-lain PAD yang sah - LRA	309.892.910.000,00	318.266.140.077,00	166.685.568.041,00
Jumlah	405.333.931.000,00	425.893.266.850,00	275.458.054.016,00

Realisasi PAD - LRA TA 2017 sebesar Rp425.893.266.850,00 atau 105,07% dari anggarannya sebesar Rp405.333.931.000,00 dan 152,16% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp275.458.054.016,00.

Realisasi masing-masing jenis PAD - LRA TA 2017 dan 2016 tersaji sebagai berikut :

5.1.1.1.1 Pajak Daerah- LRA

Pajak Daerah berdasar Pasal 1 ayat 1 PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.



Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan realisasi selama TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Pajak Daerah	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Hotel	310.000.000,00	374.277.400,00	308.953.100,00
2 Restoran	640.000.000,00	796.537.585,00	694.258.190,00
3 Hiburan	200.000.000,00	341.475.511,00	180.593.118,00
4 Reklame	1.200.000.000,00	1.430.172.113,00	1.321.627.781,00
5 Penerangan Jalan	30.000.000.000,00	30.675.577.471,00	23.847.396.732,00
6 Mineral Bukan Logam & Batuan (Pasir & Kerikil)	750.000.000,00	1.614.824.700,00	314.599.150,00
7 Parkir	22.000.000,00	32.323.950,00	23.337.050,00
8 Air Bawah Tanah	99.000.000,00	112.424.725,00	97.702.112,00
9 Sarang Burung Walet	11.000.000,00	14.600.000,00	15.250.000,00
10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	7.500.000.000,00	15.029.008.462,00	5.343.774.672,00
11) Bumi & Bangunan	13.500.000.000,00	13.849.665.106,00	13.396.899.485,00
Jumlah	54.232.000.000,00	64.270.887.023,00	45.544.391.390,00

Realisasi pendapatan pajak daerah-LRA TA 2017 sebesar Rp64.270.887.023,00 atau 118,51% dari anggarannya sebesar Rp54.232.000.000,00 dan 141,12% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp45,544,391,390,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah-LRA

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah-LRA merupakan salah satu komponen PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2017 sebesar Rp27.884.961.093,00 atau 108,34% dari anggarannya sebesar Rp25.737.744.000,00 dan 106,94% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp26.074.275.115,00.

Retribusi Daerah Kabupaten Pemalang dikelola oleh 10 (sepuluh) SKPD yaitu:

No	SKPD	Jenis Retribusi Daerah
1	Dinkes	- Retribusi Pelayanan Kesehatan
2	DPU TR	- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Disparpora	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
4	Diskoperindag	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Pasar - Retribusi Terra/Terra Ulang - Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
5	Dishub	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - Retribusi Terminal - Retribusi Izin Trayek
6	Dinas Komunikas dan Informatika	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Iklan RSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	Jenis Retribusi Daerah
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - Retribusi Izin Gangguan/Keramaian - Retribusi Izin Usaha Perikanan
8	Dinas Pertanian	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi Rumah Potong Hewan
9	Dinas Perikanan	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Hasil Tambak Dinas dan Hasil BBI) - Retribusi Tempat Pelelangan
10	Dinas Lingkungan Hidup	- Retribusi Pelayanan Persambahan/Kebersihan - Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus

Realisasi Retribusi Daerah selama TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Yankes di Puskesmas (DKK)	10.000.000.000,00	11.925.644.815,00	10.592.393.730,00
2 Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.357.481.000,00	1.499.534.000,00	1.240.206.500,00
3 Pemakaman & Pengabuan Mayat	4.000.000,00	5.700.000,00	7.000.000,00
4 Parkir Tepi Jalan Umum	410.500.000,00	411.325.000,00	385.659.000,00
5 Pasar	4.304.864.000,00	4.632.714.310,00	4.258.634.125,00
6 Pengujian Kendaraan Bermotor	330.000.000,00	377.365.000,00	386.241.000,00
7 Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00
8 Penyediaan/ Penyedotan Kakus	17.000.000,00	22.910.000,00	8.160.000,00
9 JU Pemakaian Kekayaan Daerah	424.500.000,00	466.667.400,00	539.102.255,00
10 JU Pasar Grosir/Pertokoan	428.899.000,00	559.606.200,00	442.007.300,00
11 JU Tempat Pelelangan	1.584.000.000,00	1.896.320.668,00	1.678.899.555,00
12 JU Terminal	625.000.000,00	294.036.500,00	571.084.000,00
13 JU Penginapan	0,00	0,00	10.250.000,00
14 JU Rumah Potong Hewan	74.500.000,00	71.977.000,00	66.701.000,00
15 JU Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.237.000.000,00	3.360.022.000,00	2.727.545.950,00
16 IMB	1.650.000.000,00	1.528.756.900,00	1.387.331.400,00
17 Izin Gangguan/Keramaian	1.249.710.000,00	781.335.800,00	1.707.793.300,00
18 Ijin Trayek	40.000.000,00	20.932.500,00	56.797.000,00
19 Ijin Usaha Perikanan	290.000,00	290.000,00	4.100.000,00
20 Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	29.823.000,00	4.369.000,00
Jumlah	25.737.744.000,00	27.884.961.093,00	26.074.275.115,00

Adapun realisasi pendapatan retribusi yang pencapaiannya dibawah target adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Perhubungan realisasinya sebesar Rp55.565.500,00 atau 38,45% dari anggarannya sebesar Rp144.500.000,00. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan Terminal Induk Pemalang menjadi Terminal Tipe A yang dikelola oleh Pusat (Kementerian Perhubungan).
2. Retribusi Terminal di Dinas Perhubungan realisasinya sebesar Rp294.036.500,00 atau 47,05% dari anggarannya sebesar Rp625.000.000,00 tidak tercapai realisasinya, Hal ini disebabkan target terlalu tinggi sedangkan potensi semakin menurun dikarenakan semakin sedikitnya kendaraan yang masuk ke terminal dan dikarenakan adanya peralihan Terminal Induk Pemalang menjadi Terminal Tipe A yang dikelola oleh Pusat (Kementerian Perhubungan).
3. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di DPU dan Penataan Ruang realisasinya sebesar Rp32.450.000,00 atau 87,70% dari anggarannya sebesar Rp37.000.000,00. Hal ini dikarenakan pendapatan ini bergantung pada banyaknya event permohonan dari pihak ketiga atau swasta untuk menggunakan sewa pemakaian tanah lapangan Sirandu, Mulyoharjo, dan Alun-alun Kota Pemalang.



4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Dinas Pertanian realisasinya sebesar Rp126.300.000,00 atau 76,31% dari anggarannya sebesar Rp165.500.000,00. Hal ini dikarenakan berkurangnya permohonan dari pihak ketiga untuk sewa lahan dan adanya pengurangan lahan karena adanya jalan tol sekitar 1 hektar untuk demplot dan bibit percontohan.
5. Retribusi Izin Gangguan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) realisasinya sebesar Rp781.335.800,00 atau 62,52% dari anggarannya sebesar Rp1.249.710.000,00. Hal ini dikarenakan per tanggal 31 Agustus 2017 Pemerintah Kabupaten Pemalang menghentikan dan menghapus Retribusi Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari pembagian atas laba perusahaan milik daerah. Laba yang dibagihasilkan merupakan perolehan laba tahun sebelumnya.

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2017 sebesar Rp15.471.278.657,00 atau 100% dari anggarannya sebesar RpRp15.471.277.000,00 dan 41,64% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp37.153.819.470,00.

Adapun realisasinya pada TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disahkan	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bagian Laba PD Air Minum (PDAM)	3.646.839.000,00	3.646.839.356,00	4.124.719.908,00
2 Bagian Laba PD Bank Pemalang	335.910.000,00	335.910.849,00	302.721.044,00
3 Bagian Laba BPD Jaleng	10.488.976.000,00	10.488.975.757,00	30.421.217.025,00
4 BPR-BKK Taman	999.552.000,00	999.552.695,00	815.420.944,00
5 BPR-BKK Pemalang	0,00	0,00	1.489.740.549,00
Jumlah	15.471.277.000,00	15.471.278.657,00	37.153.819.470,00

5.1.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah - LRA merupakan PAD yang bersumber dari selain pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan realisasi selama TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Lain-lain PAD Yang Sah	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Penjualan peralatan /perlengkapan kantor tidak	35.000.000,00	59.195.000,00	0,00
2 Penjualan mesin /alat-alat berat yang tidak terpakai	0,00	0,00	0,00
3 Penjualan kendaraan Roda 2	27.000.000,00	1.750.000,00	0,00
4 Penjualan kendaraan Roda 4	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00
5 Penjualan bahan-bahan bekas bangunan	90.000.000,00	370.601.500,00	320.796.975,00
6 Penjualan Hasil Peternakan	0,00	0,00	176.000.000,00
7 Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00	9.860.882.904,00	7.480.806.242,00
8 Penerimaan bunga deposito	7.250.000.000,00	10.238.665.185,00	17.639.726.217,00
9 Pendapatan bunga Piutang	0,00	10.500.000,00	164.125.000,00
10 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	57.326.000,00	69.365.000,00	30.600.000,00
11 Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0,00	514.354.409,00	376.068.152,00
12 Pendapatan dari pengembalian	891.813.000,00	1.097.398.152,00	6.632.863.292,00
13 Pendapatan Denda Reklame	0,00	10.429.508,00	1.025.817,00
14 Pendapatan Denda Keterlambatan Laporan BPHTB	0,00	0,00	45.250.000,00
15 Pendapatan Denda PBB	77.584.000,00	244.156.788,00	227.326.640,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Lain-lain PAD Yang Sah		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
16	Denda retribusi jasa umum (KTP & Akta)	265.000.000,00	277.170.000,00	223.610.000,00
17	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	889.332.000,00	945.557.351,00	0,00
18	Lain-lain PAD yang sah Lainnya	6.089.000,00	24.734.724,00	11.948.182,00
19	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	82.225.000.000,00	77.324.042.734,00	70.943.883.547,00
20	Pendapatn Sewa	3.317.606.000,00	3.860.034.180,00	5.836.377.977,00
21	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	57.000.000.000,00	56.768.360.523,00	56.575.160.000,00
22	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	151.582.160.000,00	156.409.942.119,00	0,00
Jumlah		309.892.910.000,00	318.266.140.077,00	166.685.568.041,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2017 sebesar Rp318.266.140.077,00 atau 102,70% dari anggarannya sebesar Rp309.892.910.000,00 dan 190,94% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp166.685.568.041,00. Realisasi Dana BOS sebesar Rp156.409.942.119,00 termasuk saldo BOS SD dan SMP tahun 2016 sebesar Rp5.586.237.785,00.

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah di Dinas Kesehatan berupa pengelolaan dana kapitasi berdasarkan Peraturan Presiden No.32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi, dilaksanakan oleh unit Puskesmas yang berkedudukan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Dana kapitasi tersebut langsung ditransfer ke bendahara FKTP dan dapat langsung dibelanjakan oleh FKTP diluar mekanisme SP2D.

Adapun untuk Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP realisasinya sebesar Rp56.768.360.523,00 dari anggarannya sebesar Rp57.000.000.000,00. Pendapatan tersebut terdiri dari 22 puskesmas yaitu :

No	Puskesmas	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banyumudal	3.000.000.000,00	2.852.062.050,00
2	Dana Kapitasi JKN Puskemas Warungpring	1.500.000.000,00	1.465.940.400,00
3	Dana Kapitasi JKN Puskemas Pulosari	3.025.000.000,00	2.987.285.200,00
4	Dana Kapitasi JKN Puskemas Belik	5.175.000.000,00	5.260.975.050,00
5	Dana Kapitasi JKN Puskemas Watukumpul	2.950.000.000,00	2.945.630.700,00
6	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebandaran	2.800.000.000,00	2.769.727.200,00
7	Dana Kapitasi JKN Puskemas Bantarbolang	3.250.000.000,00	3.202.672.950,00
8	Dana Kapitasi JKN Puskemas Randudongkal	1.950.000.000,00	1.973.982.300,00
9	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kalimas	1.375.000.000,00	1.378.814.956,00
10	Dana Kapitasi JKN Puskemas Paduraksa	1.580.000.000,00	1.605.222.300,00
11	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mulyoharjo	1.910.000.000,00	1.899.224.400,00
12	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebondalem	2.425.000.000,00	2.459.337.900,00
13	Dana Kapitasi JKN Puskemas Banjardawa	2.125.000.000,00	2.135.864.100,00
14	Dana Kapitasi JKN Puskemas Kabunan	2.200.000.000,00	2.184.828.900,00
15	Dana Kapitasi JKN Puskemas Jebed	2.350.000.000,00	2.268.533.250,00
16	Dana Kapitasi JKN Puskemas Petarukan	4.010.000.000,00	4.017.151.800,00
17	Dana Kapitasi JKN Puskemas Klareyan	3.340.000.000,00	3.380.487.325,00
18	Dana Kapitasi JKN Puskemas Losari	3.425.000.000,00	3.414.322.950,00
19	Dana Kapitasi JKN Puskemas Purwoharjo	2.800.000.000,00	2.789.296.200,00
20	Dana Kapitasi JKN Puskemas Sarwodadi	1.275.000.000,00	1.270.352.100,00
21	Dana Kapitasi JKN Puskemas Rowosari	1.682.000.000,00	1.759.452.600,00
22	Dana Kapitasi JKN Puskemas Mojo	2.853.000.000,00	2.747.195.892,00
Jumlah		57.000.000.000,00	56.768.360.523,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan Bantuan Keuangan.



Realisasi pendapatan transfer TA 2017 sebesar Rp1.918.137.008.107,00 atau 98,26% dari anggarannya sebesar Rp1.952.009.553.000,00 dan 104,93% dari realisasi TA 2017 sebesar Rp1.828.008.148.518,00.

Pendapatan Transfer - LRA	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.599.147.048.000,00	1.554.319.330.524,00	1.507.813.090.093,00
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA	191.002.083.000,00	191.002.083.000,00	149.607.350.000,00
3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA	124.737.092.000,00	142.831.010.535,00	120.896.166.425,00
4 Bantuan Keuangan-LRA	37.123.330.000,00	29.984.584.048,00	49.691.542.000,00
Jumlah	1.952.009.553.000,00	1.918.137.008.107,00	1.828.008.148.518,00

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Pendapatan Transfer berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bagi Hasil Pajak - LRA	38.032.765.000,00	32.090.565.423,00	38.025.063.794,00
2 Bagi Hasil SDA - LRA	2.558.592.000,00	1.825.078.703,00	1.444.850.091,00
3 Dana Alokasi Umum - LRA	1.197.916.501.000,00	1.176.872.960.000,00	1.197.916.501.000,00
4 Dana Alokasi Khusus - LRA	360.639.190.000,00	343.530.726.398,00	270.426.675.208,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.599.147.048.000,00	1.554.319.330.524,00	1.507.813.090.093,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2017 sebesar Rp1.554.319.330.524,00 atau 97,20% dari anggaran Rp1.599.147.048.000,00 dan 103,08% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp1.507.813.090.093,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2017 terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak TA 2017 realisasi sebesar Rp32.090.565.423,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	2017	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bagi Hasil dari PBB	13.478.284.000,00	10.846.232.096,00
2 Bagi Hasil dari PPh Ps.25 dan Ps.29 WP orang pribadi dalam negeri	17.550.664.000,00	14.343.379.902,00
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	7.003.817.000,00	6.900.953.425,00
Jumlah	38.032.765.000,00	32.090.565.423,00

2. Bagi Hasil SDA TA 2017 realisasi sebesar Rp1.825.078.703,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Bagi Hasil SDA - LRA	2017	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Bagi Hasil dari Sumber Daya Hutan	540.414.000,00	638.101.683,00
2 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00	525.572.127,00
3 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	54.762.000,00	30.278.848,00
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	413.252.000,00	480.660.548,00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	53.945.000,00	146.113.385,00
6 Bagi Hasil dari SDA Mineral dan Batu Bara	3.095.000,00	4.352.112,00
Jumlah	2.558.592.000,00	1.825.078.703,00



3. Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2017 realisasi Rp1.176.872.960.000 atau 98,24% dari anggaran sebesar Rp1.197.916.501.000,00.
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2017 realisasi sebesar Rp343.530.726.398,00 atau 95,26% dari anggaran Rp360.639.190.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - DAK Fisik realisasinya sebesar Rp80.465.097.484,00 dari anggaran sebesar Rp70.470.090.000,00.
 - DAK Non Fisik realisasinya sebesar Rp263.065.628.914,00 dari anggaran sebesar Rp290.169.100.000,00.

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Dana Alokasi Khusus	360.639.190.000,00	343.530.726.398,00	95,26
A	DAK Fisik	70.470.090.000,00	80.465.097.484,00	114,18
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan	14.959.000.000,00	11.967.514.000,00	80,00
2	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB	19.853.000.000,00	15.882.448.000,00	80,00
3	DAK Fisik penugasan irigasi (pendukung kedaulatan)	6.187.000.000,00	4.949.879.000,00	80,00
4	DAK Fisik Bidang Kedaulatan Pangan dan pertanian	4.800.090.000,00	3.840.071.000,00	80,00
5	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	1.311.000.000,00	1.309.414.000,00	99,88
6	DAK Fisik penugasan pasar	852.000.000,00	700.006.000,00	82,16
7	DAK Fisik penugasan jalan (pendukung konektivitas)	22.508.000.000,00	41.815.765.484,00	185,78
B	DAK Non Fisik	290.169.100.000,00	263.065.628.914,00	90,66
1	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	17.220.600.000,00	17.128.800.000,00	99,47
2	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	250.171.702.000,00	229.464.010.262,00	91,72
3	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.732.000.000,00	1.119.600.000,00	30,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	10.236.317.000,00	10.979.291.250,00	107,26
5	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	1.395.124.000,00	0,00	0,00
6	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	3.007.614.000,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	604.170.000,00	578.409.000,00	95,74
8	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	739.234.000,00	733.179.402,00	99,18
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.062.339.000,00	3.062.339.000,00	100,00

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA yaitu Dana Desa, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Dana Desa	191.002.083.000,00	191.002.083.000,00	149.607.350.000,00
Jumlah		191.002.083.000,00	191.002.083.000,00	149.607.350.000,00

Realisasi Penerimaan Dana Desa TA 2017 sebesar Rp191.002.083.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp191.002.083.000,00 dan 127,67% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp149.607.350.000,00.

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2017 sebesar Rp142.831.010.535.000,00 atau 114,51% dari anggaran sebesar Rp124.737.092.000,00 dan 118,14% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp120.896.166.425,00. Adapun rincian realisasi Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.894.891.000,00	30.936.102.824,00	24.835.977.409,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	43.026.647.000,00	30.322.150.347,00	24.181.929.729,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	30.135.143.000,00	31.338.770.033,00	26.462.586.919,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP)	47.695.000,00	93.671.292,00	87.340.000,00
5	Bagi Hasil Retribusi Perikanan	0,00	0,00	12.065.991,00
6	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	29.632.716.000,00	50.140.316.039,00	45.316.266.377,00
Jumlah		124.737.092.000,00	142.831.010.535,00	120.896.166.425,00

5.1.1.2.4 Bantuan Keuangan-LRA

5.1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LRA

Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi TA 2017 sebesar Rp29.984.584.048,00 atau 80,77% dari anggaran sebesar Rp37.123.330.000,00 dan 60,34% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp49.691.542.000,00.

Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah TA 2017, dirinci sebagai berikut:

Pendapatan Bantuan Keuangan - LRA		2017	
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	FEDEP	100.000.000,00	100.000.000,00
2	TMMD	561.600.000,00	561.600.000,00
3	SIPD	50.000.000,00	50.000.000,00
4	PUS (Pendidikan Untuk Semua)	50.000.000,00	50.000.000,00
5	NANGKIS	50.000.000,00	50.000.000,00
6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.090.000,00	62.090.000,00
7	Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	40.000.000,00	40.000.000,00
8	Bantuan Sarana prasana	36.209.640.000,00	29.070.894.048,00
Jumlah		37.123.330.000,00	29.984.584.048,00

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016 sebagai berikut:

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah-LRA

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2017 sebesar Rp9.000.000.000,00 atau 99,34% dari anggaran sebesar Rp9.060.000.000,00 dan 99,47% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp9.000.000.000,00.

Lain-lain Pendapatan yang sah		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah :		9.060.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
1	Pendapatan dari pemerintah	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	48.077.840,00
2	Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	60.000.000,00	0,00	9.000.000.000,00
Jumlah		9.060.000.000,00	9.000.000.000,00	9.048.077.840,00



5.1.2. BELANJA

Belanja dan Transfer Daerah TA 2017 terealisasi sebesar Rp 2.258.339.872.920,00 dari anggaran sebesar Rp2.502.244.546.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017			2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Daerah	2.135.329.325.000,00	1.896.830.515.438,00	88,83	1.843.048.079.592,00
2	Transfer Daerah	366.915.221.000,00	361.509.357.482,00	98,53	320.088.656.371,00
Jumlah		2.502.244.546.000,00	2.258.339.872.920,00	90,25	2.163.136.735.963,00

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga (BTT). Pada TA 2017 dan 2016 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang terdapat 41 SKPD, dimana Kepala SKPD berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran. Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah TA 2017 serta realisasi TA 2016, sebagai berikut :

Belanja Daerah	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Belanja Operasi	1.681.057.008.286,00	1.558.479.332.453,00	1.596.367.882.331,00
2 Belanja Modal	451.272.316.714,00	336.088.968.940,00	246.080.497.261,00
3 Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.262.214.045,00	599.700.000,00
Jumlah	2.135.329.325.000,00	1.896.830.515.438,00	1.843.048.079.592,00

Jumlah realisasi belanja daerah TA 2017 sebesar Rp1.896.830.515.438,00 atau 88,83% dari anggaran sebesar Rp2.135.329.325.000,00 dan 102,92% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp1.843.048.079.592,00.

Belanja daerah sebesar Rp1.896.830.515.438,00 tidak termasuk Dana Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2017. Realisasi Tugas Pembantuan TA 2017 sebesar Rp477.206.000,00 atau 7,36% dari anggarannya sebesar Rp6.480.560.000,00. Rincian realisasi SKPD penerima dana Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Kewenangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Diskoperindag	TP	6.000.000.000,00	0,00	0,00
2	Dipertanhut	TP	480.560.000,00	477.206.000,00	99,30
Jumlah			6.480.560.000,00	477.206.000,00	7,36

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Belanja Operasi	2017		2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Belanja Pegawai	1.146.460.316.908,00	1.075.327.539.055,00	1.133.211.267.192,00
2 Belanja Barang	508.601.291.378,00	457.928.343.398,00	410.135.051.496,00
3 Bunga	0,00	0,00	14.330.850,00
4 Hibah	22.990.400.000,00	22.684.800.000,00	47.030.617.043,00
5 Bantuan Sosial	3.005.000.000,00	2.538.650.000,00	5.976.615.750,00
Jumlah	1.681.057.008.286,00	1.558.479.332.453,00	1.596.367.882.331,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2017 sebesar Rp1.558.479.332.453,00 atau 92,71% dari anggaran Rp1.681.057.008.286,00 dan 97,63% dari realisasi TA 2016 Rp1.596.367.882.331,00.



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp1.075.327.539.055,00 atau 93,80% dari anggaran sebesar Rp1.146.460.316.908,00 dan 94,89% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp1.133.211.267.192,00. Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 sebesar Rp1.075.327.539.055,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja pegawai tidak langsung dan langsung SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan Lainnya	948.649.390.000,00	895.278.299.484,00
2	Tambahan penghasilan PNS	40.505.134.000,00	32.749.235.400,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	7.075.620.000,00	5.029.320.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi	3.531.537.000,00	3.315.538.716,00
5	Uang Lembur	4.090.441.000,00	3.378.973.200,00
6	Belanja Pegawai Dana BOS	22.737.324.000,00	24.435.966.696,00
7	Belanja Pegawai BLUD	42.576.805.500,00	39.520.655.827,00
8	Honorarium PNS	69.145.396.696,00	64.102.315.965,00
9	Honorarium Non PNS	8.148.668.712,00	7.517.233.767,00
Jumlah		1.146.460.316.908,00	1.075.327.539.055,00

Realisasi Belanja Pegawai Dana BOS lebih besar dibandingkan anggarannya dikarenakan dalam merealisasikan belanja menggunakan saldo Kas Dana BOS tahun lalu. Hal ini dikarenakan saldo Kas Dana BOS tahun lalu belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang TA. 2017.

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp457.928.343.398,00 atau 90,04% dari anggaran sebesar Rp508.601.291.378,00 dan 111,65% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp410.135.051.496,00 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp457.928.343.398,00 merupakan gabungan dari realisasi belanja barang dan jasa seluruh SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	24.296.487.185,00	17.103.434.626,00
2	Belanja Bahan/ Material	39.022.153.710,00	32.599.670.943,00
3	Belanja Jasa kantor	77.235.443.273,00	67.282.894.128,00
4	Belanja Premi Asuransi	1.506.070.000,00	1.386.728.925,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.439.263.320,00	9.506.893.651,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.077.825.541,00	11.528.369.814,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.668.959.500,00	2.141.617.215,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	588.425.000,00	538.345.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.608.009.500,00	2.266.492.800,00
10	Belanja Makanan dan Minuman	24.187.741.240,00	21.096.299.675,00
11	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	659.335.000,00	656.063.400,00
12	Belanja Pakaian Kerja	706.835.000,00	602.520.000,00
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.148.500.000,00	1.016.969.200,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	69.719.631.900,00	60.886.133.739,00
15	Belanja Pemeliharaan	70.901.927.072,00	62.878.536.312,00
16	Belanja Jasa Konsultasi	9.828.030.000,00	9.176.070.500,00
17	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.234.775.000,00	18.423.730.593,00
18	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	789.150.000,00	760.250.000,00
19	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.594.896.240,00	2.627.149.500,00
20	Belanja Barang Dana BOS	90.949.296.000,00	95.709.879.748,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
21	Belanja Barang Serupa Modal Non Aset Tetap	2.687.737.397,00	1.985.434.634,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	36.377.449.500,00	35.410.951.995,00
23	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	2.000.000.000,00	1.998.750.000,00
24	Belanja Software	373.350.000,00	345.157.000,00
Jumlah		508.601.291.378,00	457.928.343.398,00

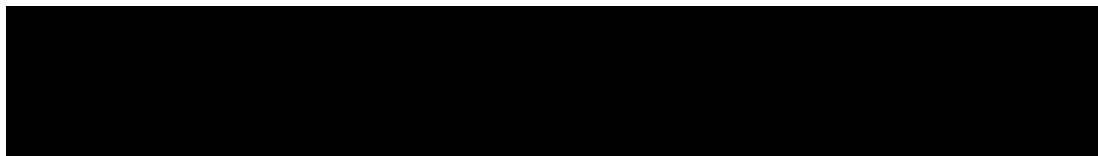
Realisasi Belanja Barang Dana BOS lebih besar dibandingkan anggarannya dikarenakan dalam merealisasikan belanja menggunakan saldo Kas Dana BOS tahun lalu. Hal ini dikarenakan saldo Kas Dana BOS tahun lalu belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pemalang TA. 2017.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Pada tahun 2017 tidak terdapat anggaran Belanja Bunga karena Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak lagi memiliki Utang Jangka Panjang.

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi belanja hibah TA 2017 sebesar Rp22.684.800.000,00 atau 98,67% dari anggaran sebesar Rp22.990.400.000,00 dan 48,23% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp47.030.617.043,00 dengan rincian sebagai berikut:



Keseluruhan Belanja Hibah sebesar Rp22.684.800.000,00 diberikan dalam bentuk uang terdapat pada BPKAD selaku SKPKD terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Hibah kepada Organisasi Masyarakat	5.790.800.000,00
2	Hibah DAK Non Fisik Bid. Pendidikan (BOP PAUD)	16.894.000.000,00
Jumlah		22.684.800.000,00

5.1.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 sebesar Rp2.538.650.000,00 atau 84,48% dari anggaran sebesar Rp3.005.000.000,00 dan 42,48% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp5.976.615.750,00. Realisasi tersebut merupakan belanja bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.225.000.000,00	2.225.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dan/atau Keluarga	780.000.000,00	313.650.000,00
Jumlah		3.005.000.000,00	2.538.650.000,00

Keseluruhan Belanja Hibah sebesar Rp2.538.650.000,00 diberikan dalam bentuk uang terdapat pada BPKAD selaku SKPKD terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendampingan PNPB	1.000.000.000,00
2	Pendampingan Pamsimas	1.225.000.000,00
3	Penyandang Cacat Permanen	200.000.000,00
4	RTSM	88.500.000,00
5	Lainnya (orang terlantar, dll)	25.150.000,00
Jumlah		2.538.650.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal Kabupaten Pemalang meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya dengan realisasi TA 2017 dan 2016, sebagai berikut :

Belanja Modal	2017			2016
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Tanah	12.550.000.000,00	11.884.647.920,00	94,70	1.392.393.450,00
2 Peralatan dan Mesin	75.378.348.240,00	57.680.231.826,00	76,52	61.826.740.863,00
3 Gedung dan Bangunan	214.105.987.974,00	144.210.358.951,00	67,35	88.997.526.329,00
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.657.397.500,00	94.178.467.430,00	85,88	85.302.120.264,00
5 Aset Tetap Lainnya	39.580.583.000,00	28.135.262.813,00	71,08	8.561.716.355,00
6 Aset Lainnya	-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	451.272.316.714,00	336.088.968.940,00	74,48	246.080.497.261,00

Realisasi Belanja Modal TA 2017 sebesar Rp336.088.968.940,00 atau 74,48% dari anggaran sebesar Rp451.272.316.714,00 dan 136,58% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp246.080.497.261,00. Kemudian penjelasan lebih lanjut untuk setiap jenis belanja modal pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi BM - Tanah TA 2017 sebesar Rp11.884.647.920,00 atau 94,70% dari anggaran sebesar Rp12.550.000.000,00 dan 853,54% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp1.392.393.450,00. Untuk TA 2017 realisasi BM – Tanah sebesar Rp11.884.647.920,00 digunakan untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa. SKPD yang mempunyai BM - Tanah TA 2017 adalah:

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinkes	10.250.000.000,00	10.172.026.920,00	99,24
2	Disperik	2.300.000.000,00	1.712.621.000,00	74,46
Jumlah		12.550.000.000,00	11.884.647.920,00	94,70

- Pada Disperik realisasi BM-Tanah 74,46% dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, dimana selebihnya adalah sisa lelang.



5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi BM – Peralatan dan Mesin TA 2017 sebesar Rp57.680.231.826,00 atau 76,52% dari anggaran sebesar Rp75.378.348.240,00 dan 93,29% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp61.826.740.863,00. Realisasi BM – Peralatan dan Mesin tersebut merupakan gabungan dari realisasi SKPD-SKPD sebagai berikut:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	872.470.000,00	742.487.000,00
2	BM Pengadaan Alat-Alat Bantu	2.465.780.000,00	1.797.995.155,00
3	BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.826.212.000,00	12.147.797.400,00
4	BM Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	57.600.000,00	51.600.000,00
5	BM Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	38.650.000,00	38.500.000,00
6	BM Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	72.350.000,00	62.185.000,00
7	BM Pengadaan Alat Ukur	194.850.000,00	173.197.802,00
8	BM Pengadaan Alat Pengolahan	26.175.000,00	25.950.000,00
9	BM Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	140.373.000,00	65.931.250,00
10	BM Pengadaan Alat Kantor	13.535.581.553,00	12.067.585.082,00
11	BM Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.981.976.123,00	6.741.884.313,00
12	BM Pengadaan Komputer	8.811.265.233,00	7.676.598.594,00
13	BM Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	750.490.000,00	643.387.727,00
14	BM Pengadaan Alat Studio	2.562.695.400,00	1.997.485.946,00
15	BM Pengadaan Alat Komunikasi	707.030.000,00	651.924.245,00
16	BM Pengadaan Peralatan Pemancar	964.500.000,00	808.385.650,00
17	BM Pengadaan Alat Kedokteran	18.270.715.533,00	10.258.716.477,00
18	BM Pengadaan Alat Kesehatan	15.900.000,00	15.900.000,00
19	BM Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.032.484.398,00	823.185.481,00
20	BM Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	432.725.000,00	418.982.800,00
21	BM Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	126.750.000,00	96.571.100,00
22	BM Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	925.000,00	925.000,00
23	BM Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	490.850.000,00	373.055.804,00
JUMLAH		75.378.348.240,00	57.680.231.826,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang relatif rendah ini disebabkan karena adanya realisasi BM - Peralatan dan Mesin yang realisasinya di bawah 80% terdapat pada :

SKPD	2017		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	34.275.801.214,00	19.168.431.981,00	55,92
Jumlah	34.275.801.214,00	19.168.431.981,00	55,92

- Pada Dinkes disebabkan karena SiLPA tahun 2016 dari dana Kapitasi JKN untuk FKTP (Puskesmas se-Kabupaten Pemalang) dianggarkan pada Perubahan APBD TA 2017 sehingga realisasi belanja kurang optimal . Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu dan belum adanya juknis dari Pusat (Kemenkes) yang memperbolehkan penggunaan dana kapitasi untuk belanja operasional sesuai kebutuhan yang ada di Puskesmas masing-masing.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi BM – Gedung dan Bangunan TA 2017 sebesar Rp144.210.358.951,00 atau 67,35% dari anggaran sebesar Rp214.105.987.974,00 dan 162,04% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp88.997.526.329,00. Realisasi BM - Gedung dan Bangunan pada TA 2017 tersebut terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	191.856.694.974,00	127.331.186.517,00
2	BM Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.163.265.000,00	8.380.512.700,00
3	BM Pengadaan Bangunan Menara	856.255.000,00	849.762.800,00
4	BM Pengadaan Bangunan Bersejarah	5.242.997.000,00	3.659.303.734,00
5	BM Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	254.555.000,00	246.665.200,00
6	BM Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.384.665.000,00	3.412.388.000,00
7	BM Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	347.556.000,00	330.540.000,00
Jumlah		214.105.987.974,00	144.210.358.951,00



Realisasi BM – Gedung dan Bangunan pada SKPD dengan capaian di bawah 80% terdapat pada:

SKPD	2016		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	18.558.012.000,00	12.371.528.700,00	66,66
2 DPU TR	38.166.552.500,00	15.488.501.478,00	40,58
3 Dinsos KBPP	101.350.000,00	51.290.000,00	50,61
4 Dishub	1.050.976.000,00	788.767.133,00	75,05
5 Diskoperindag	29.437.145.000,00	8.612.701.108,00	29,26
6 Disparpora	16.906.222.500,00	10.216.885.819,00	60,43
Jumlah	104.220.258.000,00	47.529.674.238,00	45,61

- pada Dinkes capaian realisasi 66,66% dikarenakan pekerjaan pengurangan untuk pembangunan RS tipe D Comal putus kontrak;
- pada DPU TR capaian realisasi 40,58% dikarenakan pekerjaan pembangunan stadion Mochtar gagal lelang dan pembangunan gedung DPRD putus kontrak;
- pada Dinsos KBPP capaian realisasi 50,61% dikarenakan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa, dimana rencana semula untuk penyusunan 2 DED namun karena masih dalam 1 lokasi cukup dengan penyusunan 1 DED saja;
- pada Dishub capaian realisasi 75,05% dikarenakan terdapat pekerjaan penyusunan DED Pelabuhan dengan anggaran Rp228.750.000,00 gagal lelang;
- pada Diskoperindag capaian realisasi 29,26% dikarenakan pekerjaan rehab pasar Randudongkal gagal lelang;
- pada Disparpora capaian realisasi 60,43% dikarenakan pekerjaan pembangunan gardu pandang Gn. Slamet gagal lelang dan pekerjaan penataan kawasan obyek wisata putus kontrak.

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi BM – Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 sebesar Rp94.178.467.430,00 atau 85,88% dari anggaran sebesar Rp109.657.397.500,00 dan 110,41% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp85.302.120.264,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Pengadaan Jalan	88.226.555.000,00	74.963.290.530,00
2	BM Pengadaan Jembatan	17.157.622.000,00	15.635.579.000,00
3	BM Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	385.413.000,00	384.830.400,00
4	BM Pengadaan Bangunan Kotor	5.000.000,00	4.400.000,00
5	BM Pengadaan Bangunan Air	2.978.410.500,00	2.897.648.500,00
6	BM Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	50.000.000,00	0,00
7	BM Pengadaan Instalasi Pengaman	20.100.000,00	19.459.000,00
8	BM Pengadaan Jaringan Air Minum	111.647.000,00	0,00
9	BM Pengadaan Jaringan Listrik	713.650.000,00	264.464.000,00
10	BM Pengadaan Jaringan Telepon	9.000.000,00	8.796.000,00
	Jumlah	109.657.397.500,00	94.178.467.430,00

Realisasi BM – Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD dengan capaian di bawah 80% terdapat pada:

SKPD	2017		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dinkes	415.297.000,00	0,00	0,00
2 Disparpora	8.165.037.500,00	3.393.425.400,00	41,56
3 Setda	460.000.000,00	264.464.000,00	57,49
Jumlah	9.040.334.500,00	3.657.889.400,00	40,46



- pada Dinkes tidak terealisasi dikarenakan terkendala syarat PLN yang harus melampirkan sertifikat tanah puskesmas untuk tambah daya listrik;
- pada Disparpora capaian realisasi 41,56% dikarenakan pekerjaan peningkatan jalan track balap motor gagal lelang;
- pada Setda capaian realisasi 57,49 dikarenakan ada sebagian komponen yang belum tersedia di *e-catalog* sehingga belum dapat direalisasikan.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi BM – Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar Rp28.135.262.813,00 atau 71,08% dari anggaran sebesar Rp39.580.583.000,00 dan 328,62% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp8.561.716.355,00. Realisasi BM - Aset Tetap Lainnya TA 2017 terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BM Pengadaan Buku	35.793.447.000,00	25.183.341.361,00
2	BM Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	65.464.000,00	0,00
3	BM Pengadaan Alat Olahraga	20.759.000,00	8.925.000,00
4	BM Pengadaan Tanaman	240.668.000,00	215.761.000,00
5	BM Pengadaan Aset Tetap Renovasi	3.460.245.000,00	2.727.235.452,00
Jumlah		39.580.583.000,00	28.135.262.813,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya yang rendah karena adanya realisasi BM - Aset Tetap Lainnya di bawah 80% yang terdapat pada :

SKPD	2017		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1 Dindikbud	35.698.726.000,00	25.045.447.761,00	70,16
2 Dinkes	3.307.783.000,00	2.538.230.452,00	52,55
3 Dinpermasdes	1.560.000,00	0,00	0,00
4 Diskoperindag	2.000.000,00	650.000,00	32,50
5 Setwan	20.759.000,00	8.925.000,00	42,99
Jumlah	39.030.828.000,00	27.593.253.213,00	70,70

- pada Dindikbud capaian realisasi 70,16 dikarenakan pengadaan buku SD/MI gagal lelang;
- pada Dinkes capaian realisasi 52,55 dikarenakan ketersediaan dana BLUD terbatas;
- pada Dinpermasdes tidak terealisasi dikarenakan sudah mendapatkan souvenir buku dari siswa magang;
- pada Diskoperindag capaian realisasi 42,99% dikarenakan belum diperoleh buku yang sesuai kebutuhan;
- pada Setwan capaian realisasi 42,99 dikarenakan realisasi belanja sudah mencukupi kebutuhan.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

5.1.2.3.1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam rangka penanganan akibat dari bencana alam maupun bencana sosial dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2017 sebesar Rp2.262.214.045,00 atau 75,41% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 dan 377,22% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp599.700.000,00 Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.262.214.045,00 digunakan untuk:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan korban bencana angin kencang, puting beliung, kebakaran, kestrum listrik tanah longsor, tersambar petir, tenggelam di laut dan sungai, dll kepada 195 orang di Kabupaten Pemalang TA 2017	909.500.000,00
2	Pembayaran atas hak penggaduh ternak sapi, 24 orang	44.000.000,00
3	Pengembalian sisa lebih Dana BOS TA. 2011	1.300.719.045,00
4	Pengembalian uang sewa tanah	7.995.000,00
Jumlah		2.262.214.045,00

5.1.3. TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. TA 2017 realisasi transfer sebesar Rp361.509.357.482,00 atau 98,53% dari anggaran sebesar Rp366.915.221.000,00 dan 112,94% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp320.088.656.371,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.996.975.000,00	7.128.202.482,00	4.256.365.204,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	358.918.246.000,00	354.381.155.000,00	315.832.291.167,00
Jumlah		366.915.221.000,00	361.509.357.482,00	320.088.656.371,00

5.1.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2017 sebesar Rp7.128.202.482,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp7.996.975.000,00 dan 167,47% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp4.256.365.204,00. Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari:

No	Uraian	2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	5.423.200.000,00	4.554.438.977,00	3.731.531.001,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.573.775.000,00	2.573.763.505,00	524.834.203,00
Jumlah		7.996.975.000,00	7.128.202.482,00	4.256.365.204,00

5.1.3.1.1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2017 sebesar Rp4.554.438.977,00 atau 83,98% dari anggaran sebesar Rp5.423.200.000,00 dan 122,05% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp3.731.531.001,00. Transfer bagi hasil pajak daerah merupakan bagi hasil pajak daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.1.2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya TA 2017 sebesar Rp2.573.763.505,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp2.573.775.000,00. Transfer bagi hasil pendapatan lainnya merupakan bagi hasil retribusi daerah yang diberikan kepada pemerintah desa.

5.1.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2017 sebesar Rp354.381.155.000,00 atau 98,74% dari anggarannya sebesar Rp358.918.246.000,00 dan 112,21% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp315.832.291.167,00. Transfer Bantuan Keuangan ini terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian	2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	358.009.082.000,00	353.471.993.000,00	315.141.062.840,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	909.164.000,00	909.162.000,00	691.228.327,00
Jumlah		358.918.246.000,00	354.381.155.000,00	315.832.291.167,00

5.1.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa TA 2017 sebesar Rp353.471.993.000,00 atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp358.009.082.000,00 dan 112,16% dari realisasi TA 2016 Rp315.141.062.840,00. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp353.471.993.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD	123.639.433.000,00
2	Bantuan Dana Desa dari APBN (DD APBN)	191.002.083.000,00
3	Bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan desa	29.551.377.000,00
4	Bantuan Keuangan kepada desa untuk penghargaan Kades Purna Tugas	100.000.000,00
5	Bantuan keuangan kepada desa untuk program PMTAS (program makanan tambahan)	1.000.000.000,00
6	Bantuan untuk penempatan transmigrasi	120.000.000,00
7	Bantuan keuangan kepada desa untuk kegiatan fisik pasar desa	300.000.000,00
8	Bantuan untuk program terpadu pemberdayaan masyarakat berperspektif gender	90.000.000,00
9	Bantuan untuk kegiatan modal pemanfaatan TTG (teknologi tepat guna)	100.000.000,00
10	Bantuan Keuangan untuk Badan Usaha Milik Desa	300.000.000,00
11	Bantuan keuangan desa untuk kegiatan LPM (lumbung pangan desa)	120.000.000,00
12	Bantuan keuangan desa untuk kegiatan permodalan UED-SP (unit ekonomi desa simpan pinjam)	100.000.000,00
13	Bantuan keuangan desa untuk kegiatan kelompok UP2K (usaha peningkatan Pendapatan Keluarga)	100.000.000,00
14	Bantuan keuangan desa untuk kegiatan P2LDT	500.000.000,00
15	Bantuan keuangan kepada desa lainnya	3.950.000.000,00
16	Bantuan keuangan untuk pengadaan tanah	1.000.000.000,00
17	Bantuan keuangan untuk TMMD	1.499.100.000,00
Jumlah		353.471.993.000,00

5.1.3.2.2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2017 sebesar Rp909.162.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp909.164.000,00 berupa transfer bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian sebagai berikut:

No	Partai Politik	Jumlah (Rp)
1	Partai PDIP	246.918.000,00
2	Partai GOLKAR	128.853.000,00
3	Partai PPP	95.740.000,00
4	Partai PKB	122.193.000,00
5	Partai PKS	73.043.000,00
6	Partai GERINDRA	126.694.000,00
7	Partai HANURA	45.271.000,00
8	Partai PAN	70.450.000,00
Jumlah		909.162.000,00



5.1.4. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, dengan anggaran dan realisasi TA 2017 dan 2016, termasuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan, adalah sebagai berikut :

Pembiayaan		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	170.841.062.000,00	166.750.302.936,00	264.942.785.076,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	35.000.000.000,00	31.000.000.000,00	47.853.626.551,00
Pembiayaan Neto		135.841.062.000,00	135.750.302.936,00	217.089.158.525,00
SILPA		0,00	230.440.704.973,00	166.466.702.936,00

Realisasi pembiayaan daerah TA 2017 sebesar Rp135.750.302.936,00 atau 99,93% dari anggarannya sebesar Rp135.841.062.000,00 dan 62,53% dari realisasi TA 2016 sebesar Rp217.089.158.525,00.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	166.441.062.000,00	166.466.702.936,00	261.474.585.076,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.400.000.000,00	283.600.000,00	3.468.200.000,00
Jumlah		170.841.062.000,00	166.750.302.936,00	264.942.785.076,00

5.1.4.1.1. Penggunaan SiLPA

Realisasi Penggunaan SiLPA TA 2017 sebesar Rp166.466.702.936,00. Realisasi ini termasuk di dalamnya dropping/transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi yang diterima/masuk rekening kas umum daerah pada tahun 2016 dan tahun sebelumnya dan realisasi belanjanya pada TA 2017, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	DAK Pendidikan (TA. 2011)	18.652.556.000,00
2	DAK Pendidikan (TA. 2012)	4.932.360.000,00
3	DAK Pendidikan (TA. 2013)	3.894.998.040,00
4	DAK Pendidikan (TA. 2014)	14.621.892.272,00
5	DAK Pendidikan (TA. 2015)	1.381.856.000,00
6	DAK Fisik TA. 2016	4.304.354.732,00
7	DAK Non Fisik TA. 2016	1.646.529.390,00
8	Dana Tunjangan Profesi Guru	2.785.730.870,00
9	Dana Tambahan Penghasilan Guru	1.600.385.000,00
10	Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2013	340.000.000,00
11	Bantuan Keuangan Provinsi TA. 2015	839.510.000,00
12	DBHCHT TA. 2016	208.153.075,00
13	Dana BOS SMP TA. 2015	283.150.000,00
14	Dana BOS SD TA. 2013	144.780.000,00
15	Dana BOS SD TA. 2014	104.520.000,00
16	Dana BOS SD TA. 2015	516.360.000,00
17	Dana BOS SD TA. 2016	5.586.237.785,00
Jumlah		61.843.373.164,00

5.1.4.1.2. Pencairan Dana Cadangan

Pada TA 2017 Kabupaten Pemalang tidak menganggarkan Dana Cadangan dan realisasi pencairan atas Dana Cadangan.



5.1.4.1.3. Penerimaan Kembali Piutang

Penerimaan kembali piutang berasal dari penerimaan kembali piutang lainnya yang merupakan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada lembaga lainnya. Realisasi TA 2017 sebesar Rp283.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pengembalian Pinjaman LUEP pada Disperdan yang berasal dari APBD Kabupaten Pemalang	245.000.000,00
2	Pinjaman bergulir kepada koperasi yang dikelola Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	38.600.000,00
Jumlah		283.600.000,00

- Penerimaan Pengembalian Pinjaman LUEP yang dikelola Dinas Pertanian (Kantor Ketahanan Pangan) sebesar Rp245.000.000,00 merupakan pengembalian pinjaman LUEP tahun 2017 dimana dari pemberian pinjaman tahun 2016 sebesar Rp4.000.000.000,00 realisasi pengembalian pinjaman sebesar Rp3.425.000.000,00 sehingga timbul piutang tahun 2016 sebesar Rp575.000.000,00. Sedangkan piutang LUEP atas pemberian pinjaman tahun 2015 masih sebesar Rp250.000.000,00, sehingga besarnya piutang per 31 Desember 2016 adalah Rp825.000.000,00. Dengan adanya realisasi penerimaan pengembalian pinjaman LUEP tahun 2017 maka piutang yang ada per 31 Desember 2017 masih tersisa Rp580.000.000,00.
- Penerimaan Pinjaman Bergulir untuk koperasi yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan merupakan pengembalian atas pemberian pinjaman sejak tahun 2011, dimana besarnya piutang per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp566.300.000,00 dan realisasi pengembaliannya selama tahun 2017 sebesar Rp38.600.000,00, sehingga masih terdapat piutang per 31 Desember 2017 sebesar Rp527.700.000,00.

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Pengeluaran Pembiayaan		2017		2016
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemda	31.000.000.000,00	31.000.000.000,00	43.615.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pempus	0,00	0,00	238.626.551,00
3	Pemberian Pinjaman	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
Jumlah		35.000.000.000,00	31.000.000.000,00	47.853.626.551,00

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah TA 2017 sebesar Rp31.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Penambahan Penyertaan Modal PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang	30.000.000.000,00
2	Penambahan Penyertaan Modal Perusda Aneka Usaha Kabupaten Pemalang	1.000.000.000,00
Jumlah		31.000.000.000,00



5.1.4.2.2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Pada TA 2017 Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah tidak menganggarkan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri karena Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat sudah lunas pada tahun 2016.

5.1.4.2.3. Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dari anggarannya sebesar Rp4.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan pemberian pinjaman tahun lalu masih menyisakan piutang, dimana masih terdapat para penerima pinjaman LUEP yang belum menyelesaikan kewajibannya (mengembalikan pemberian pinjaman).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2017 dan 2016

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		2017 Realisasi (Rp)	2016 Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja		
	a) Realisasi Pendapatan	2.353.030.274.957,00	2.112.514.280.374,00
	b) Realisasi Belanja	1.896.830.515.438,00	1.843.048.079.592,00
	c) Realisasi Transfer	361.509.357.482,00	320.088.656.371,00
	Surplus (Defisit) Anggaran : a) - b)	94.690.402.037,00	(50.622.455.589,00)
2	Pembiayaan		
	a) Penerimaan Pembiayaan Daerah	166.750.302.936,00	264.942.785.076,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	31.000.000.000,00	47.853.626.551,00
	Surplus (Defisit) Pembiayaan : a) - b)	135.750.302.936,00	217.089.158.525,00
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran : 1 + 2	230.440.704.973,00	166.466.702.936,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp230.440.704.973,00 dan Rp166.466.702.936,00 dengan rincian:

Rincian SILPA		2017 Realisasi (Rp)	2016 Realisasi (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	52.932.000,00	55.500.000,00
3	Kas di BLUD	10.262.170.531,00	10.407.616.071,00
4	Kas Dana Bendahara Kapitasi	43.210.784.709,00	41.264.660.906,00
5	Kas Dana BOS	3.973.680.865,00	0,00
6	Rekening Giro BPD Jateng	77.941.136.868,00	104.738.925.959,00
7	Deposito	95.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran : (a)	230.440.704.973,00	166.466.702.936,00

SILPA TA 2017 sebesar Rp230.440.704.973,00 termasuk didalamnya adalah :

1. Saldo BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebesar Rp10.262.170.531,00;
2. Saldo JKN untuk FKTP sebesar Rp43.210.784.709,00;
3. Saldo Dana BOS tahun 2017 sebesar Rp3.973.680.865,00;
4. Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer yang harus dianggarkan kembali TA 2017 sebesar Rp45.669.328.699,00 yang berasal dari dana-dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di TA 2017 dan akan dianggarkan kembali di TA 2018 sebesar Rp190.392.214,00;
 - b. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp683.697.500,00 dan akan dianggarkan kembali di TA 2018;



- c. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan dianggarkan kembali di TA 2018 sebesar Rp9.175.714.901,00;
- d. Dana Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) sebesar Rp68.619.402,00;
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2011 sebesar Rp18.652.556.000,00;
- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2012 sebesar Rp4.159.910.000,00;
- g. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2013 sebesar Rp703.014.500,00;
- h. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2014 sebesar Rp4.190.626.760,00;
- i. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2015 sebesar Rp2.286.592.300,00;
- j. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp1.263.492.578,00;
- k. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Pendidikan tahun 2017 sebesar Rp1.800.664.700,00;
- l. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sebesar Rp12.253.600,00;
- m. DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp24.000.000,00;
- n. DAK Non Fisik untuk Jaminan Persalinan sebesar Rp1.010.806.526,00;
- o. DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kegiatan sebesar Rp82.491.750,00;
- p. DAK Non Fisik untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp370.988.637,00;
- q. Bantuan Provinsi untuk Penataan Kawasan Obyek Wisata Widuri tahun 2017 sebesar Rp997.507.331,00;

Rincian SILPA terikat seperti yang tersebut diatas dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2011	18.652.556.000,00
2	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	4.159.910.000,00
3	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	703.014.500,00
4	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	4.190.626.760,00
5	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	2.282.592.300,00
6	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	1.263.492.578,00
7	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	1.800.664.700,00
8	DAK bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Fisik) TA. 2017	12.253.600,00
9	Dana Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	9.175.714.901,00
10	Dana Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	683.697.500,00
11	Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik)	68.619.402,00
12	Bantuan Operasional Kegiatan (DAK Non Fisik)	82.491.750,00
13	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1.010.806.526,00
14	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	24.000.000,00
15	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	370.988.637,00
16	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Penataan Kawasan Obyek Wisata Widuri	997.507.331,00
17	DBHCHT TA. 2017	190.392.214,00
18	BLUD RSUD TA. 2017	10.262.170.531,00
19	Dana JKN TA. 2017	43.210.784.709,00
20	Dana BOS TA. 2017	3.973.680.865,00
Jumlah		103.115.964.804,00



5.2. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SAL

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan penjumlahan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2017 sebesar Rp166.466.702.936,00.

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2017 penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp166.466.702.936,00.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja-LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2017 sebesar Rp230.440.704.973,00 atau meningkat 38,43% dari SILPA tahun 2016 sebesar Rp166.466.702.936,00.

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Merupakan koreksi kesalahan pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk tahun 2017 tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

SILPA TA 2017 sebesar Rp230.440.704.973,00 termasuk didalamnya adalah :

1. Saldo BLUD RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang sebesar Rp10.262.170.531,00;
2. Saldo JKN untuk FKTP sebesar Rp43.210.784.709,00;
3. Saldo Dana BOS sebesar Rp3.973.680.865,00;
4. Sisa kegiatan dari Dana Perimbangan/Transfer yang harus dianggarkan kembali TA 2017 sebesar Rp45.669.328.699,00 yang berasal dari dana-dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Alokasi DBHCHT yang belum dilaksanakan di TA 2017 dan akan dianggarkan kembali di TA 2018 sebesar Rp190.392.214,00;
 - b. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebesar Rp683.697.500,00 dan akan dianggarkan kembali di TA 2018;
 - c. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan dianggarkan kembali di TA 2018 sebesar Rp9.175.714.901,00;
 - d. Dana Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik) sebesar Rp68.619.402,00;
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2011 sebesar Rp18.652.556.000,00;
 - f. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2012 sebesar Rp4.159.910.000,00;
 - g. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2013 sebesar Rp703.014.500,00;
 - h. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2014 sebesar Rp4.190.626.760,00;
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun 2015 sebesar Rp2.286.592.300,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



- j. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Pendidikan tahun 2016 sebesar Rp1.263.492.578,00;
- k. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Pendidikan tahun 2017 sebesar Rp1.800.664.700,00;
- l. Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik) bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 sebesar Rp12.253.600,00;
- m. DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp24.000.000,00;
- n. DAK Non Fisik untuk Jaminan Persalinan sebesar Rp1.010.806.526,00;
- o. DAK Non Fisik untuk Bantuan Operasional Kegiatan sebesar Rp82.491.750,00;
- p. DAK Non Fisik untuk Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp370.988.637,00;
- q. Bantuan Provinsi untuk Penataan Kawasan Obyek Wisata Widuri tahun 2017 sebesar Rp997.507.331,00;

Rincian SILPA terikat seperti yang tersebut di atas dapat diringkas dalam tabel sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2011	18.652.556.000,00
2	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2012	4.159.910.000,00
3	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2013	703.014.500,00
4	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2014	4.190.626.760,00
5	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2015	2.282.592.300,00
6	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2016	1.263.492.578,00
7	DAK bidang Pendidikan (DAK Fisik) TA. 2017	1.800.664.700,00
8	DAK bidang Kelautan dan Perikanan (DAK Fisik) TA. 2017	12.253.600,00
9	Dana Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	9.175.714.901,00
10	Dana Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	683.697.500,00
11	Tunjangan Khusus Guru (DAK Non Fisik)	68.619.402,00
12	Bantuan Operasional Kegiatan (DAK Non Fisik)	82.491.750,00
13	Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	1.010.806.526,00
14	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	24.000.000,00
15	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)	370.988.637,00
16	Bantuan Keuangan Provinsi untuk Penataan Kawasan Obyek Wisata Widuri	997.507.331,00
17	DBHCHT TA. 2017	190.392.214,00
18	BLUD RSUD TA. 2017	10.262.170.531,00
19	Dana JKN TA. 2017	43.210.784.709,00
20	Dana BOS TA. 2017	3.973.680.865,00
Jumlah		103.115.964.804,00



5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Adapun Kegiatan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan dan Beban-LO. Adapun Pendapatan-LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO. Kegiatan Non Operasional meliputi Surplus Penjualan Aset Non Lancar -LO dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Adapun Pendapatan -LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1. PENDAPATAN – LO

Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional di Kabupaten Pemalang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Pendapatan - LO		SALDO (Rp)	
		2017	2016
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	430.431.080.255,27	277.645.496.672,66
2	Pendapatan Transfer - LO	1.725.646.724.290,00	1.855.868.302.279,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	10.313.054.873,75	12.063.312.240,00
Jumlah		2.166.390.859.419,02	2.145.577.111.191,66

Realisasi Pendapatan - LO TA 2017 sebesar Rp2.166.390.859.419,02 atau 100,97% dari Realisasi Pendapatan - LO TA 2016 sebesar Rp2.145.577.111.191,66. Realisasi masing-masing akun Pendapatan - LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)– LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp430.431.080.255,27 atau 155,03% dari Realisasi PAD - LO TA 2016 Rp277.645.496.672,66. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah - LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)		SALDO (Rp)	
		2017	2016
1	Pajak Daerah - LO	68.622.618.562,33	50.149.951.942,67
2	Retribusi Daerah - LO	27.452.269.242,00	26.629.560.939,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.263.705.113,93	34.469.075.972,13
4	Lain-lain PAD yang sah - LO	326.092.487.337,01	166.396.907.818,86
Jumlah		430.431.080.255,27	277.645.496.672,66

Realisasi masing-masing jenis PAD - LO TA 2017 tersaji sebagai berikut :

5.3.1.1.1. Pajak Daerah-LO

Realisasi Pajak Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp68.622.618.562,33 mengalami kenaikan sebesar Rp18.472.666.619,66 dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp50.149.951.942,67. Realisasi masing-masing akun Pajak Daerah -LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Pajak Daerah - LO		SALDO	
		2017	2016
1	Hotel - LO	374.277.400,00	308.953.100,00
2	Restoran - LO	796.537.585,00	694.258.190,00
3	Tontonan Film/Bioskop - LO	341.475.511,00	180.593.118,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard - LO	1.566.861.517,33	1.255.016.802,67
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri - LO	30.675.577.471,00	23.847.396.732,00
6	Pajak Parkir - LO	32.323.950,00	23.337.050,00
7	Pajak Air Tanah - LO	120.266.874,00	97.702.112,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	14.600.000,00	15.250.000,00
9	Pasir dan kerikil - LO	1.614.824.700,00	314.599.150,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan - LO	18.056.865.092,00	18.069.071.016,00
11	BPHTB - Pemindahan Hak - LO	15.029.008.462,00	5.343.774.672,00
Jumlah		68.622.618.562,33	50.149.951.942,67

Jenis Pajak	2017		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Reklame	1.566.861.517,33	1.430.172.113,00	136.689.404,33
Air Tanah	120.266.874,00	112.424.725,00	7.842.149,00
Pajak Bumi dan Bangunan	18.056.865.092,00	13.849.665.106,00	4.207.199.986,00
	19.743.993.483,33	15.392.261.944,00	4.351.731.539,33

Terdapat selisih Realisasi Pajak-LO dengan Pajak-LRA TA 2017 sebesar Rp4.351.731.539,33. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- Pajak Reklame terdapat selisih sebesar Rp136.689.404,33. Hal ini dikarenakan:
 - Bertambah sebesar Rp528.478.837,33 karena adanya piutang pajak reklame TA 2017 sebesar Rp150.767.239,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka TA 2017 sebesar Rp377.711.598,33;
 - Berkurang sebesar Rp391.413.915,00 karena adanya pelunasan Piutang Pajak Reklame tahun lalu sebesar Rp25.644.720,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame yang masa pajaknya melampaui TA 2017 sebesar Rp366.144.713,00;
- Pajak Air Tanah terdapat selisih sebesar Rp7.842.149,00. Hal ini dikarenakan:
 - Bertambahnya Piutang Pajak Air Tanah TA 2017 sebesar Rp8.992.748,00.
 - Berkurang adanya Pendapatan Diterima Dimuka lainnya sebesar Rp1.150.599,00;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terdapat selisih sebesar Rp4.207.199.986,00. Hal ini dikarenakan :
 - Bertambah karena adanya Piutang PBB TA 2017 sebesar Rp4.804.976.276,00;
 - Berkurang karena adanya pelunasan Piutang PBB tahun lalu sebesar Rp597.776.290,00.

5.3.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Realisasi Retribusi Daerah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp27.452.269.242,00 mengalami kenaikan sebesar Rp822.708.303,00 dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.26.629.560.939,00. Realisasi masing-masing akun Retribusi Daerah -LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Retribusi Daerah - LO		SALDO (Rp)	
		2017	2016
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	11.925.644.815,00	10.592.393.730,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.499.534.000,00	1.240.206.500,00
3	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO	5.700.000,00	7.000.000,00
4	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	411.325.000,00	385.659.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	4.632.714.310,00	4.258.634.125,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -LO	372.404.519,00	290.237.880,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Retribusi Daerah - LO		SALDO (Rp)	
		2017	2016
7	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	22.910.000,00	8.160.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	0,00	4.369.000,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	466.667.400,00	539.102.255,00
10	Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan - LO	552.763.200,00	448.850.300,00
11	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	1.896.320.668,00	1.678.899.555,00
12	Retribusi Jasa Usaha Terminal - LO	294.036.500,00	571.084.000,00
13	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO	0,00	0,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	71.977.000,00	66.701.000,00
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	3.360.022.000,00	2.727.545.950,00
16	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	1.366.930.000,00	1.613.775.900,00
17	Pemberian Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	528.182.700,00	2.183.437.400,00
18	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO	15.109.130,00	9.269.344,00
19	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	29.823.000,00	0,00
20	Pemberian Izin usaha Perikanan - LO	205.000,00	4.235.000,00
	Jumlah	27.452.269.242,00	26.629.560.939,00

Penjelasan Retribusi :		2017		Selisih (Rp)
		Retribusi - LO (Rp)	Retribusi - LRA (Rp)	
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan	1.366.930.000,00	1.528.756.900,00	(161.826.900,00)
2	Pemberian Izin Gangguan/Keramaian	528.182.700,00	781.335.800,00	(253.153.100,00)
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	205.000,00	290.000,00	(85.000,00)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	372.404.519,00	377.365.000,00	(4.960.481,00)
5	Retribusi JU Pasar Grosir/Pertokoan	552.763.200,00	559.486.200,00	(6.723.000,00)
6	Retribusi Izin Trayek	15.109.130,00	20.932.500,00	(5.823.370,00)
	Jumlah	2.835.594.549,00	3.268.166.400,00	(432.571.851,00)

Pendapatan Retribusi - LO dengan Pendapatan Retribusi - LRA terdapat selisih sebesar Rp432.571.851,00. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan (IMB) - LO di DPMPTSP terdapat selisih sebesar Rp161.826.900,00. Hal ini karena:
 - Berkurang karena adanya pelunasan Piutang Pendapatan tahun lalu sebesar Rp243.223.000,00;
 - Bertambah karena adanya penambahan piutang tahun 2017 sebesar Rp81.396.100,00;
- Retribusi Izin Gangguan untuk Tempat Usaha – LO di DPMTSP terdapat selisih sebesar Rp253.153.100,00. Hal ini karena:
 - Berkurang karena adanya pelunasan piutang retribusi tahun lalu sebesar Rp262.353.000,00;
 - Bertambah karena adanya penambahan piutang tahun 2017 sebesar Rp9.199.900,00;
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO di DPMTSP terdapat selisih sebesar Rp85.000,00. Hal ini karena adanya pelunasan piutang tahun lalu sebesar Rp85.000,00.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO di Dishub terdapat selisih sebesar Rp4.960.481,00. Hal ini dikarenakan adanya:
 - Bertambah karena Pengakuan atas Pendapatan – LO atas Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun lalu sebesar Rp96.003.120,00;
 - Berkurang karena Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2017 sebesar Rp100.963.601,00;



5. Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir/Pertokoan – LO di Diskoperindag terdapat selisih kurang sebesar Rp6.723.000,00. Hal ini dikarenakan adanya pelunasan Piutang Retribusi Petak Toko dan KLTL pada Pasar Pemalang.
6. Retribusi Izin Trayek – LO di Dishub terdapat selisih sebesar Rp5.823.370,00. Hal ini dikarenakan adanya:
 - Bertambah karena Pengakuan atas Pendapatan – LO atas Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu atas Retribusi Izin Trayek sebesar Rp10.619.000,00;
 - Berkurang karena Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Izin Trayek tahun 2017 sebesar Rp16.442.370,00.

5.3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp8.263.705.113,93 mengalami penurunan sebesar Rp26.205.370.858,20 dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp34.469.075.972,13. Realisasi masing-masing akun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		Realisasi (Rp)	
		2017	2016
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM - LO	3.331.053.845,00	6.630.617.011,00
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Pemalang	681.246.672,00	671.821.699,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha -	(1.409.952.121,00)	337.629.460,00
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah - LO	10.488.975.757,00	30.421.217.025,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Taman - LO	1.483.379.618,08	1.817.368.535,62
6	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BKK Pemalang - LO	(6.310.998.657,15)	(5.409.577.758,49)
Jumlah		8.263.705.113,93	34.469.075.972,13

Penjelasan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO		2017		Selisih
		Pendapatan - LO	Pendapatan - LRA	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PDAM - LO	3.331.053.845,00	3.646.839.356,00	(315.785.511,00)
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Bank Pemalang - LO	681.246.672,00	335.910.849,00	345.335.823,00
3	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha - LO	(1.409.952.121,00)	0,00	(1.409.952.121,00)
4	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah - LO	10.488.975.757,00	10.488.975.757,00	0,00
5	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Taman - LO	1.483.379.618,08	999.552.695,00	483.826.923,08
6	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD. BKK Pemalang - LO	(6.310.998.657,15)	0,00	(6.310.998.657,15)
Jumlah		8.263.705.113,93	15.471.278.657,00	(7.207.573.543,07)

Terdapat selisih antara Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA sebesar Rp7.207.573.543,07. Hal ini karena :

1. Bagian Laba PDAM Pemalang terdapat selisih kurang sebesar Rp315.785.511,00.
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp3.683.995.075,00 merupakan penerimaan deviden Tahun 2016 yang sudah diakui Tahun 2016.
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp3.368.209.564,00 merupakan bagian laba ditahan Tahun 2017.
2. Bagian Laba Bank Pemalang terdapat selisih lebih Rp345.335.823,00.
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp483.182.972,00 merupakan penerimaan deviden Tahun 2016 yang sudah diakui Tahun 2016.
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp828.518.795,00,00 merupakan bagian laba ditahan Tahun 2017.



3. Bagian Laba PDAU terdapat selisih kurang Rp1.409.952.121,00. Hal ini dikarenakan PDAU mengalami kerugian tahun 2017 sebesar Rp1.409.952.121,00.
4. Bagian Laba Bank Pembangunan Daerah tidak terdapat selisih karena menggunakan metode biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha /badan hukum yang terkait.
5. Bagian Laba BKK Taman tahun 2017 terdapat selisih lebih Rp483.826.923,08.
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.283.538.809,81 merupakan penerimaan deviden Tahun 2016 yang sudah diakui Tahun 2016.
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.767.365.732,89 merupakan bagian laba ditahan Tahun 2017.
6. Bagian Laba BKK Pemalang tahun 2017 terdapat selisih kurang Rp6.310.998.657,15. Hal ini dikarenakan penyesuaian kurang sebesar Rp6.310.998.657,15 Rp6.310.998.657,15 dikarenakan BKK Pemalang mengalami kerugian pada Tahun 2017.

5.3.1.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp326.092.487.337,01 mengalami kenaikan sebesar Rp159.695.579.518,15 dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp166.396.907.818,86. Realisasi masing-masing akun Lain-lain PAD Yang Sah-LO, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Hasil Penjualan Peralatan/Mesin - LO	239.945.000,00	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO	370.601.500,00	320.796.975,00
3	Jasa Giro Kas Daerah - LO	7.594.214.000,00	3.639.343.832,00
4	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	2.266.668.904,00	3.841.462.410,00
5	Pendapatan Bunga Deposito - LO	10.238.665.185,00	17.639.726.217,00
6	Pendapatan Bunga Dana Bergulir - LO	10.500.000,00	164.125.000,00
7	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	37.784.586,00	0,00
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan - LO	8.037.081,00	0,00
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	352.766.742,00	375.949.502,00
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	115.766.000,00	118.650,00
12	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	10.429.508,00	1.025.817,00
13	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -	0,00	45.250.000,00
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Otonomi Daerah - LO	0,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0,00	0,00
16	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO	277.170.000,00	223.610.000,00
17	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO	1.233.061.551,00	889.331.900,00
18	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	294.459.382,00	469.092.270,00
19	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	0,00	10.892.500,00
20	Pendapatan dari pengembalian Non CP/Hasil Laporan Hasil Pemeriksaan - LO	730.601.420,00	1.327.390.440,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Lain-lain PAD Yang Sah - LO		2017 (Rp)	2016 (Rp)
21	Pendapatan dari Pengembalian Sisa Dana Hibah / Bansos - LO	72.337.350,00	4.822.631.082,00
22	pendapatan dari pengembalian BOS - LO	0,00	200.000,00
23	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sewa - LO	6.640.097.596,79	2.506.064.454,78
24	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	87.982.581.950,22	73.520.788.587,08
25	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	24.734.724,00	23.948.182,00
26	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Banyumudal - LO	2.852.062.050,00	2.887.146.000,00
27	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Warungpring - LO	1.465.940.400,00	1.480.820.000,00
28	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Pulosari - LO	2.987.285.200,00	3.053.664.000,00
29	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Belik - LO	5.260.975.050,00	5.291.034.000,00
30	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Watukumpul - LO	2.945.630.700,00	2.895.468.000,00
31	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebandaran - LO	2.769.727.200,00	2.811.402.000,00
32	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Bantarbolang - LO	3.202.672.950,00	3.238.404.000,00
33	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Randudongkal - LO	1.973.982.300,00	1.886.562.000,00
34	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Kalimas - LO	1.378.814.956,00	1.394.321.500,00
35	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Paduraksa - LO	1.605.222.300,00	1.537.656.000,00
36	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Mulyoharjo - LO	1.899.224.400,00	1.942.998.000,00
37	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Kebondalem - LO	2.459.337.900,00	2.390.035.500,00
38	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Banjardawa - LO	2.135.864.100,00	2.068.272.000,00
39	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Kabunan - LO	2.184.828.900,00	2.220.218.000,00
40	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Jebed - LO	2.268.533.250,00	2.363.658.000,00
41	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Petarukan - LO	4.017.151.800,00	3.970.080.000,00
42	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Klareyan - LO	3.380.487.325,00	3.306.297.500,00
43	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Losari - LO	3.414.322.950,00	3.427.458.000,00
44	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Purwoharjo - LO	2.789.296.200,00	2.759.976.000,00
45	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Sarwodadi - LO	1.270.352.100,00	1.269.940.000,00
46	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Rowosari - LO	1.759.452.600,00	1.512.726.000,00
47	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Puskemas Mojo - LO	2.747.195.892,00	2.867.023.500,00
48	Pendapatan Dana BOS SD Negeri - LO	105.736.304.334,00	0,00
49	Pendapatan Dana BOS SMP Negeri - LO	45.087.400.000,00	0,00
	Total	326.092.487.337,01	166.396.907.818,86

Penjelasan	2017		Selisih (Rp)	
	Lain-lain PAD yang Sah - LO (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah - LRA (Rp)		
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(49.025.000,00)	20.340.000,00	(69.365.000,00)
2	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa -	6.640.097.596,79	3.860.034.180,00	2.780.063.416,79
3	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	87.982.581.950,22	77.324.042.734,00	10.658.539.216,22
4	Pendapatan Denda PBB - LO	0,00	244.156.788,00	(244.156.788,00)
5	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	1.233.101.551,00	945.557.351,00	287.544.200,00
6	Pendapatan Dana BOS -LO	150.823.704.334,00	156.409.942.119,00	(5.586.237.785,00)
	Jumlah	246.630.460.432,01	238.804.073.172,00	7.826.387.260,01

Terdapat selisih antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp7.826.387.260,01. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdapat selisih Rp69.365.000,00 dikarenakan pembayaran TGR yang ditetapkan sebelum tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2017. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Tunjangan Purna Bakti anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s/d 2004 sebesar Rp10.000.000,00.
 - TGR dari pengeluaran untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s/d 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai sebesar Rp5.340.000,00.
 - TGR dari pembayaran premi asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s/d 2004 sebesar Rp5.000.000,00.



- TGR hilangnya sepeda motor G 9795 BD pada UPPK Belik An. Achmad Bahrudin sebesar Rp450.000,00.
 - TGR hilangnya komputer pada Kepala SMP N 1 Pemalang (Sri Andayani,Spd) sebesar Rp6.750.000,00.
 - TGR hilangnya 15 CPU pada Mantan Kepala SMP N 5 Pemalang (Hartati,Spd) sebesar Rp38.700.000,00.
 - TGR hilangnya sepeda motor G 9796 CD An. Heriadi SP Dipertanhut Tanggal SK951.05/331/tahun/2015 tanggal 30 April 2015 sebesar Rp950.000,00.
 - Hilangnya kendaraan dinas roda dua NOPOL G 9927 AD merek Honda Supra X 125 Tahun 2008 Kepala Desa Bumi Rejo Kecamatan Ulujami tanggal 10 Mei 2016 sebesar Rp600.000,00.
2. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa-LO terdapat selisih Rp2.780.063.416,79 merupakan pendapatan diterima dimuka dengan rincian sebagai berikut:
- Pendapatan-LO atas Sewa Tanah Bondo Deso di DPPKAD berkurang sebesar Rp2.728.116.139,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Bertambah sebesar Rp2.996.483.381,00 karena adanya pengakuan Pendapatan-LO TA 2017 atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu.
 - Berkurang sebesar Rp268,367.242,00 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2017.
 - Pendapatan-LO atas Sewa Gedung dan Bangunan di Diskoperindag berkurang sebesar Rp51.947.277,79. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Bertambah sebesar Rp429.826.666,67 karena adanya pengakuan Pendapatan-LO TA 2017 atas pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka tahun lalu.
 - Berkurang sebesar Rp377.879.388,88 karena adanya Pendapatan Diterima Dimuka TA 2017.
3. Pendapatan Jasa BLUD-LO terdapat selisih Rp10.658.539.216,22.

Pendapatan Jasa BLUD - LRA :

	Realisasi TA. 2017	
Bertambah		77.324.042.734,00
	1. Piutang TA. 2017	21.677.940.576,00
	2. Pendapatan Diterima Dimuka BLUD (TA.2016)	18.780.821,92
Berkurang		
	1. Pelunasan Piutang TA. 2016	(11.023.419.168,00)
	2. Pendapatan Lain-lain BLUD (Pendapatan Diterima Dimuka TA. 2016)	(14.763.013,70)
Jumlah Penyesuaian		10.658.539.216,22
Pendapatan Jasa BLUD - LO :		10.658.539.216,22

4. Pendapatan Denda PBB terdapat selisih Rp244.156.788,00 merupakan Penerimaan pendapatan denda PBB selama TA 2017 yang mengurangi piutang denda PBB.
5. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa – LO terdapat selisih Rp287.584.200,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
- Bertambah sebesar Rp958.136.400,00 karena penambahan jaminan pelaksanaan pekerjaan karena adanya putus kontrak TA 2017.
 - Bertambah sebesar Rp966.250.200,00 karena piutang jaminan uang muka pekerjaan per 31 Desember 2017 pada Dinas Kesehatan.
 - Berkurang sebesar Rp1.636.802.400,00 karena adanya pelunasan piutang Tahun lalu karena jaminan pelaksanaan pekerjaan sudah dicairkan.



6. Pendapatan BOS terdapat selisih Rp5.586.237.785,00. Hal ini dikarenakan saldo awal Kas Dana BOS TA 2016 sebesar Rp5.586.237.785,00 yang dimasukkan ke dalam LRA tetapi tidak masuk dalam LO karena bukan merupakan Pendapatan Operasional BOS TA 2017.

5.3.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO berasal dari Pemerintah Pusat dan Propinsi, meliputi Transfer Pemerintah Pusat-LO, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO dan Bantuan Keuangan-LO dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer - LO		SALDO	
		2017	2016
1	Transfer Pemerintah Pusat - LO	1.552.831.129.707,00	1.506.862.993.854,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	0,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	142.831.010.535,00	299.313.766.425,00
4	Bantuan Keuangan - LO	29.984.584.048,00	49.691.542.000,00
Jumlah		1.725.646.724.290,00	1.855.868.302.279,00

5.3.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat - LO

Pendapatan Transfer - Pemerintah Pusat		SALDO (Rp)	
		2017	2016
1	Bagi Hasil Pajak - LO	30.602.364.606,00	37.010.603.416,00
2	Bagi Hasil SDA - LO	1.825.078.703,00	1.509.214.230,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	1.176.872.960.000,00	1.197.916.501.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	343.530.726.398,00	270.426.675.208,00
Jumlah		1.552.831.129.707,00	1.506.862.993.854,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil SDA, DAU, DAK dengan realisasi TA 2017 Rp1.552.831.129.707,00 ada kenaikan sebesar Rp45.968.135.853,00 dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.506.862.993.854,00.

Penjelasan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2017		Selisih
		Pendapatan Transfer - LO	Pendapatan Transfer - LRA	
1	Bagi Hasil dari PBB - LO	9.358.031.279,00	10.846.232.096,00	(1.488.200.817,00)
Jumlah				(1.488.200.817,00)

Terdapat selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dengan LRA sebesar Rp1.488.200.817,00. Hal ini adalah realisasi pendapatan Kurang Bayar Bagi Hasil PBB TA 2016 sebesar Rp1.488.200.817,00 yang menjadi pengurang Pendapatan-LO TA 2017. Berdasarkan PMK Nomor 4/PMK.07/2016 atas Dana Bagi Hasil PBB TA 2011,2013 dan 2014 yang dialokasikan dalam APBN TA 2016.

5.3.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO meliputi Dana Desa TA 2016 sebesar Rp0,00. Hal ini karena Penerimaan Dana Desa – LO yang bersumber dari APBN berkurang sebesar Rp191.002.083.000,00 karena bukan merupakan kinerja Pemda berdasarkan SPAP.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Dana Penyesuaian	SALDO 2017 (Rp)		Selisih
	Dana Penyesuaian - LO	Dana Penyesuaian - LRA	
1 Dana Desa	0,00	191.002.083.000,00	(191.002.083.000,00)
Jumlah	0,00	191.002.083.000,00	(191.002.083.000,00)

5.3.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO berasal dari Pemerintah Provinsi, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya, dengan realisasi TA 2017 sebesar Rp142.831.010.535,00 ada penurunan sebesar Rp156.482.755.890,00 dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp299.313.766.425,00.

Adapun rincian realisasinyasebagai berikut :

Rincian Bagi Hasil Pajak dari Provinsi - LO	SALDO (Rp)	
	2017	2016
1 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	30.936.102.824,00	24.835.977.409,00
2 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) - LO	30.322.150.347,00	24.181.929.729,00
3 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) - LO	31.338.770.033,00	26.462.586.919,00
4 Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (P2AP) - LO	93.671.292,00	87.340.000,00
5 Bagi Hasil dari Retribusi Pelayanan Terra/ Tera Ulang - LO	0,00	0,00
6 Bagi Hasil Retribusi Perikanan - LO	0,00	12.065.991,00
7 Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LO	50.140.316.039,00	45.316.266.377,00
8 Dana Bantuan Operasional (BOS)	0,00	178.417.600.000,00
Jumlah	142.831.010.535,00	299.313.766.425,00

5.3.1.2.4. Bantuan Keuangan - LO

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi-LO TA 2017 sebesar Rp29.984.584.048,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.706.957.952,00 dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp49.691.542.000,00.

5.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO terdiri dari Pendapatan Hibah – LO, Pendapatan Dana Darurat – LO dan Pendapatan Lainnya – LO.

5.3.1.3.1. Pendapatan Hibah – LO

Pendapatan Hibah dari Pemerintah dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO TA 2017 dengan realisasi sebesar Rp10.313.054.873,75 mengalami penurunan sebesar Rp1.750.257.366,25 dibandingkan realisasi TA 2016 sebesar Rp12.063.312.240,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	2017		Selisih
	LO	LRA	
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi ke Bapermas	1.313.054.873,75	0,00	1.313.054.873,75
3 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.313.054.873,75	9.000.000.000,00	1.313.054.873,75



Adapun perbedaan antara Pendapatan Hibah – LO dengan Pendapatan Hibah – LRA TA. 2017 sebesar Rp1.313.054.873,75 dikarenakan adanya hibah dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah ke Bapermas KB Kabupaten Pemalang berupa alat kontrasepsi dan alat non kontrasepsi.

5.3.1.3.2. Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO TA 2017 tidak ada realisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



5.3.2. BEBAN

Realisasi Beban Daerah tahun 2017 sebesar Rp1.860.578.747.210,31 turun sebesar Rp208.914.926.957,92 atau 10,09% dibandingkan dengan realisasi beban tahun 2016 sebesar Rp2.069.493.674.168,23. Beban Daerah tahun 2017 terdiri dari:

Beban	Saldo (Rp)	
	2017	2016
1. Beban Pegawai	1.073.936.765.446,00	1.164.156.415.158,00
2. Beban Barang dan Jasa	469.423.999.891,93	547.841.461.303,33
3. Beban Bunga	0,00	14.330.850,00
4. Beban Subsidi	0,00	0,00
5. Beban Hibah	25.066.747.550,00	80.230.222.757,00
6. Beban Bantuan Sosial	2.538.650.000,00	5.976.615.750,00
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.414.575.341,00	95.838.666.883,00
8. Beban Penyisihan Piutang	7.690.734.499,38	4.954.655.095,90
9. Beban Lain-Lain	0,00	0,00
10. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.554.438.977,00	3.731.531.001,00
11. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.573.763.505,00	524.834.203,00
12. Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	162.469.910.000,00	165.533.712.840,00
13. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	909.162.000,00	691.228.327,00
14. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Jumlah	1.860.578.747.210,31	2.069.493.674.168,23

Saldo Beban Daerah sebesar Rp1.860.578.747.210,31 merupakan gabungan saldo beban-beban sebagai berikut:

5.3.2.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.073.936.765.446,00 turun sebesar Rp90.219.649.712,00 atau 7,75% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp1.164.156.415.158,00. Beban Pegawai ini merupakan gabungan beban pegawai di 41 SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Beban	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Gaji dan Tunjangan Lainnya	895.278.299.484,00	987.211.071.390,00
2	Beban Tambahan penghasilan PNS	32.749.235.400,00	32.971.896.209,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.029.320.000,00	4.735.320.000,00
4	Beban Pemungutan Pajak dan Retribusi	3.318.866.426,00	2.672.495.073,00
5	Beban Uang Lembur	3.378.973.200,00	2.795.931.375,00
6	Beban Pegawai Dana BOS	24.435.966.696,00	29.443.369.125,00
7	Beban Pegawai BLUD	38.136.904.508,00	38.329.034.370,00
8	Beban Honorarium PNS	64.091.965.965,00	57.562.654.521,00
9	Beban Honorarium Non PNS	7.517.233.767,00	8.434.643.095,00
	Jumlah	1.073.936.765.446,00	1.164.156.415.158,00

Terdapat selisih kurang beban pegawai sebesar Rp1.390.773.609,00 dibandingkan dengan belanja pegawai pada LRA sebesar Rp1.073.613.164.357,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Penyesuaian tambah sebesar Rp5.542.435.325,00 terdiri dari:
 - Rp72.046.800,00 merupakan pengakuan beban pemungutan pajak dan retribusi pada Diskoperindag tahun 2017 yang masih sebagai utang beban pegawai;
 - Rp5.470.388.525,00 merupakan pengakuan beban pegawai BLUD tahun 2017 yang masih sebagai utang beban pegawai BLUD;
- Penyesuaian kurang sebesar Rp6.933.208.934,00 terdiri dari:
 - Rp68.719.090,00 merupakan pembayaran atas utang pemungutan pajak dan retribusi tahun 2016;
 - Rp6.854.139.844,00 merupakan pembayaran utang pegawai BLUD tahun 2016;
 - Rp10.350.000,00 merupakan honor pengadaan pada Dinpermasdes yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.100.000,00 dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.350.000,00, dan pada BPKAD yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp900.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Gaji dan Tunjangan	895.273.774.484,00			895.273.774.484,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	32.753.760.400,00			32.753.760.400,00
3	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan	5.029.320.000,00			5.029.320.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan	3.315.538.716,00	72.046.800,00	68.719.090,00	3.318.866.426,00
5	Uang Lembur	3.378.973.200,00			3.378.973.200,00
6	Pegawai Dana BOS	24.435.966.696,00			24.435.966.696,00
7	Pegawai BLUD	39.520.655.827,00	5.470.388.525,00	6.854.139.844,00	38.136.904.508,00
8	Honorarium PNS	64.102.315.965,00		10.350.000,00	64.091.965.965,00
9	Honorarium Non PNS	7.517.233.767,00			7.517.233.767,00
	Jumlah	1.075.327.539.055,00	5.542.435.325,00	6.933.208.934,00	1.073.936.765.446,00

5.3.2.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2017 sebesar Rp469.423.999.891,93 turun sebesar Rp78.417.461.411,40 atau 14,31% dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2016 sebesar Rp547.841.461.303,33. Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 merupakan gabungan dari Beban barang dan jasa seluruh SKPD yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Beban	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Bahan Pakai Habis	16.515.113.467,00	12.997.861.452,00
2	Beban Persediaan Bahan/ Material	31.870.205.267,46	37.801.314.346,00
3	Beban Jasa kantor	67.405.852.729,00	56.678.231.272,00
4	Beban Premi Asuransi	1.433.464.810,06	729.350.120,07
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	9.506.893.651,00	7.838.434.943,00
6	Beban Cetak dan Penggandaan	11.512.112.566,00	8.578.329.778,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.182.117.213,00	1.795.049.552,00
8	Beban Sewa Sarana Mobilitas	538.345.000,00	606.237.000,00
9	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.266.492.800,00	1.794.317.600,00
10	Beban Makanan dan Minuman	21.096.299.675,00	17.898.324.331,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	656.063.400,00	552.770.000,00
12	Beban Pakaian Kerja	602.520.000,00	616.239.050,00
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.016.969.200,00	736.593.400,00
14	Beban Perjalanan Dinas	60.886.133.739,00	44.467.232.928,00
15	Beban Pemeliharaan	62.679.801.312,00	161.000.357.655,00
16	Beban Jasa Konsultasi	8.539.324.500,00	6.145.804.700,00
17	Beban Barang untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga	15.842.814.453,00	0,00
18	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	(22.505.000,00)	0,00
19	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	760.250.000,00	1.092.000.000,00
20	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.627.149.500,00	2.927.644.500,00
21	Beban Barang Dana BOS	104.452.451.030,00	119.178.784.947,00
22	Beban Barang Serupa Modal Non Aset Tetap	4.589.843.618,00	26.842.587.769,00
23	Beban Barang dan Jasa BLUD	40.453.536.961,41	35.682.995.960,26
24	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Bagi Anggota DPRD	1.998.750.000,00	1.881.000.000,00
25	Beban Software	14.000.000,00	0,00
	JUMLAH	469.423.999.891,93	547.841.461.303,33

Terdapat selisih lebih sebesar Rp11.495.656.493,93 antara Beban Barang dan Jasa - LO dengan saldo realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA sebesar Rp453.139.296.990,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Bahan Pakai Habis	17.103.434.626,00	912.901.557,00	1.501.222.716,00	16.515.113.467,00
2	Bahan/Material	32.599.670.943,00	13.794.002.254,75	14.523.467.930,29	31.870.205.267,46
3	Jasa Kantor	67.282.894.128,00	1.844.754.499,00	1.721.795.898,00	67.405.852.729,00
4	Premi Asuransi	1.386.728.925,00	150.609.010,93	103.873.125,87	1.433.464.810,06
5	Perawatan Kendaraan Bermotor	9.506.893.651,00			9.506.893.651,00
6	Cetak dan Penggandaan	11.528.369.814,00	1.124.451.420,00	1.140.708.668,00	11.512.112.566,00
7	Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.141.617.215,00	40.499.998,00		2.182.117.213,00
8	Sewa Sarana Mobilitas	538.345.000,00			538.345.000,00
9	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.266.492.800,00			2.266.492.800,00
10	Makanan dan Minuman	21.096.299.675,00			21.096.299.675,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Uraian	BELANJA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		BEBAN (Rp)
			Tambah	Kurang	
11	Pakaian Dinas dan Atributnya	656.063.400,00			656.063.400,00
12	Pakaian Kerja	602.520.000,00			602.520.000,00
13	Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.016.969.200,00			1.016.969.200,00
14	Perjalanan Dinas	60.886.133.739,00			60.886.133.739,00
15	Pemeliharaan	62.878.536.312,00		198.735.000,00	62.679.801.312,00
16	Jasa Konsultansi	9.176.070.500,00		636.746.000,00	8.539.324.500,00
17	Barang untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga	18.423.730.593,00	1.573.008.000,00	4.153.924.140,00	15.842.814.453,00
18	Barang untuk Dijual kepada Masyarakat/ Pihak	0,00		22.505.000,00	(22.505.000,00)
19	Beasiswa Pendidikan PNS	760.250.000,00			760.250.000,00
20	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan	2.627.149.500,00			2.627.149.500,00
21	Barang Dana BOS	95.709.879.748,00	8.879.760.029,00	137.188.747,00	104.452.451.030,00
22	Barang serupa Modal Non Aset Tetap	1.985.434.634,00	2.723.955.284,00	119.546.300,00	4.589.843.618,00
23	Barang dan Jasa BLUD	35.410.951.995,00	13.597.072.553,41	8.554.487.587,00	40.453.536.961,41
24	Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis Anggota DPRD	1.998.750.000,00			1.998.750.000,00
25	Software	345.157.000,00		331.157.000,00	14.000.000,00
Jumlah		457.928.343.398,00	44.641.014.606,09	33.145.358.112,16	469.423.999.891,93

Penyesuaian-penyesuaian di atas yang mempengaruhi saldo beban barang dan jasa pada LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Beban bahan pakai habis selisih kurang sebesar Rp588.321.159,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp912.901.557,00 merupakan pengakuan saldo persediaan ATK, alat listrik, benda pos, alat kebersihan, bahan bakar minyak, dan isi tabung gas tahun 2016 sebagai beban persediaan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.501.222.716,00 merupakan pengakuan persediaan ATK, alat listrik, benda pos, alat kebersihan, bahan bakar minyak, dan isi tabung gas tahun 2017 yang mengurangi beban persediaan;
- 2) Beban bahan/materail selisih kurang sebesar Rp729.465.675,54 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp13.794.002.254,75 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan saldo persediaan bahan baku bangunan, bahan obat-obatan, bahan kimia, dan bahan makanan pokok tahun 2016 sebagai beban persediaan sebesar Rp12.480.947.381,00;
 - pengakuan beban bahan obat-obatan tahun 2017 yang merupakan hibah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.313.054.873,75 yang diterima oleh Dinsos KBPP;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp14.523.467.930,29 terdiri dari :
 - pengakuan persediaan bahan obat-obatan dan bahan kimia tahun 2017 yang mengurangi beban persediaan sebesar Rp14.444.117.630,29;
 - reklasifikasi dari beban persediaan bahan baku bangunan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dispartan sebesar Rp52.480.300,00;
 - reklasifikasi dari Beban Bahan Praktek menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Diskoperindag sebesar Rp26.870.000,00;
- 3) Beban jasa kantor selisih lebih sebesar Rp122.958.601,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.844.754.499,00 merupakan pengakuan beban jasa telepon, air, listrik, internet, dan jasa perawatan kesehatan tahun 2017 yang belum dibayarkan;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.721.795.898,00 terdiri dari :
 - merupakan pembayaran atas utang beban barang dan jasa tahun 2016 yang mengurangi beban jasa telepon, air, listrik, internet, surat kabar, dan jasa perawatan kesehatan sebesar Rp1.719.645.898,00; dan
 - reklasifikasi dari beban surat kabar/majalah menjadi Aset Tetap Lainnya pada Bappeda sebesar Rp2.150.000,00;
- 4) Beban premi asuransi selisih lebih sebesar Rp46.735.885,06 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp150.609.010,93 merupakan pengakuan beban premi asuransi dari premi asuransi dibayar dimuka tahun 2016;



- Penyesuaian kurang sebesar Rp103.873.125,87 merupakan pengurangan beban premi asuransi tahun 2017 karena masih merupakan beban dibayar dimuka;
- 5) Beban cetak dan penggandaan selisih lebih sebesar Rp16.257.248,00 karena:
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.124.451.420,00 merupakan pengakuan persediaan barang cetakan dan karcis tahun 2016 yang menjadi beban cetak;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp1.140.708.668,00 merupakan saldo persediaan barang cetakan dan karcis tahun 2017 yang mengurangi beban cetak;
- 6) Beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir selisih lebih sebesar Rp40.499.998,00 yang merupakan pengakuan beban sewa dari sewa dibayar dimuka tahun sebelumnya pada Dinkes;
- 7) Beban pemeliharaan selisih kurang sebesar Rp198.735.000,00 merupakan reklasifikasi beban pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Bag. Umum Setda;
- 8) Beban jasa konsultasi selisih kurang sebesar Rp636.746.667,00 merupakan reklasifikasi beban konsultasi menjadi Aset Lainnya berupa Software pada Diskominfo dan Bag. Hukum Setda sebesar Rp636.746.000,00;
- 9) Beban Barang untuk Diserahkan ke Pihak Ketiga selisih kurang Rp2.580.916.140,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp1.573.008.000,00 merupakan pengakuan menjadi beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga karena barang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dari DPU TR, dan Kecamatan Warungpring;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp4.153.924.140,00 terdiri dari :
 - masih berupa persediaan yang akan diserahkan ke pihak ketiga sebesar Rp1.401.286.590,00 pada DPU TR karena barang belum diserahkan;
 - reklasifikasi dari beban barang untuk diserahkan ke pihak ketiga menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.600.000,00 dan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp29.850.000,00 pada Dinpusarda karena diserahkan ke SKPD lainnya dan digunakan sendiri;
 - reklasifikasi dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat menjadi beban hibah atas barang yang sudah diserahkan kepada masyarakat dan masih sebagai persediaan sebesar Rp1.811.687.550,00 pada Dindikbud;
 - reklasifikasi dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat menjadi beban hibah atas barang yang telah diserahkan ke masyarakat sebesar Rp722.260.000,00 pada DPU TR;
 - reklasifikasi dari beban barang untuk diserahkan ke masyarakat menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena digunakan sendiri sebesar Rp180.240.000,00 pada Disarpورا;
- 10) Beban Barang untuk Dijual kepada Masyarakat selisih kurang sebesar Rp22.505.000,00 merupakan reklasifikasi beban barang untuk dijual kepada masyarakat menjadi Persediaan yang Akan Dijual ke Masyarakat pada Diskoperindag;
- 11) Beban Barang Dana BOS selisih lebih sebesar Rp8.742.571.282,00 karena :
 - Penyesuaian tambah sebesar Rp9.752.433.321,00 terdiri dari :
 - merupakan pengakuan saldo persediaan ATK tahun 2016 sebesar Rp550.356.900,00 menjadi beban Barang BOS;
 - reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari Dana BOS yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp3.737.365.282,00;
 - reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dari Dana BOS yang tidak menjadi aset tetap sebesar Rp4.592.037.847,00;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp137.188.747,00 merupakan pencatatan sebagai Persediaan ATK tahun 2017 yang berasal dari beban Barang BOS;



- 12) Beban barang serupa modal non aset tetap selisih lebih sebesar Rp2.604.408.984,00 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp2.723.955.284,00 terdiri dari :
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin menjadi beban pengadaan barang peralatan dan mesin non aset tetap sebesar Rp1.928.415.964,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi;
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan menjadi beban pengadaan gedung dan bangunan non aset tetap sebesar Rp55.950.000,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi;
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi beban pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan non aset tetap sebesar Rp213.900.000,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi;
 - reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya menjadi beban pengadaan aset tetap lainnya non aset tetap sebesar Rp525.689.320,00 karena tidak memenuhi kapitalisasi;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp119.546.300,00 terdiri dari :
 - reklasifikasi dari beban pengadaan tanah non aset tetap menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp99.670.800,00 yaitu pada DPU TR sebesar Rp24.761.800,00; Disperkim sebesar Rp3.866.000,00; dan Setwan sebesar Rp71.043.000,00;
 - reklasifikasi dari beban pengadaan peralatan dan mesin non aset tetap menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dispertan sebesar Rp8.800.000,00;
 - reklasifikasi dari beban pengadaan gedung dan bangunan non aset tetap menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kec. Ulujami sebesar Rp8.350.000,00 berupa DED gedung kecamatan;
 - reklasifikasi dari beban pengadaan aset tetap lainnya non aset tetap menjadi Aset Tetap Lainnya pada DPMPTSP sebesar Rp2.725.500,00 berupa buku;
- 13) Beban barang dan jasa BLUD selisih kurang sebesar Rp5.042.584.966,41 karena:
- Penyesuaian tambah sebesar Rp13.597.072.553,41 terdiri dari :
 - pengakuan saldo persediaan ATK tahun 2016 sebagai beban BLUD sebesar Rp17.573.400,00;
 - pengakuan saldo persediaan alat kebersihan tahun 2016 sebagai beban BLUD sebesar Rp46.561.750,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk premi asuransi dari premi asuransi dibayar dimuka tahun 2016 sebesar Rp24.901.090,41;
 - pengakuan beban BLUD untuk jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) tahun 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp127.966.965,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk persediaan bahan obat-obatan tahun 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp10.486.971.836,00;
 - pengakuan beban BLUD untuk persediaan bahan kimia tahun 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp2.893.097.512,00;
 - Penyesuaian kurang sebesar Rp8.554.487.587,00 terdiri dari :
 - pengakuan persediaan bahan obat-obatan tahun 2017 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp1.174.761.516,00;
 - pengakuan persediaan bahan kimia tahun 2017 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp888.251.238,00;
 - pengakuan persediaan barang cetakan tahun 2017 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp34.212.600,00;
 - pengakuan persediaan bahan makanan pasien tahun 2017 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp16.481.854,00;
 - pengakuan premi asuransi dibayar dimuka tahun 2017 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp25.735.180,00;



- pembayaran utang beban jasa kantor (telepon, air, listrik, dan internet) bulan Desember 2016 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp140.074.944,00;
 - pembayaran utang jangka pendek berupa bahan obat-obatan tahun 2016 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp4.323.052.642,00;
 - pembayaran utang jangka pendek berupa bahan kimia tahun 2016 yang mengurangi beban BLUD sebesar Rp1.951.917.613,00;
- 14) Beban Software selisih kurang sebesar Rp331.157.000,00 merupakan reklasifikasi dari beban software menjadi Aset Tak Berwujud, yang berada pada :
- Disnaker sebesar Rp49.500.000,00;
 - Disdukcatpil sebesar Rp12.795.000,00;
 - Diskominfo sebesar Rp191.862.000,00;
 - Diskoperindag sebesar Rp30.000.000,00; dan
 - Bapenda sebesar Rp47.000.000,00.

5.3.2.3. Beban Bunga

Beban bunga adalah saldo beban yang terjadi pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp14.330.850,00 atau 100,00% dibandingkan dengan realisasi beban bunga tahun 2016 sebesar Rp14.330.850,00.

5.3.2.4. Beban Hibah

Beban hibah adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp25.066.747.550,00 turun sebesar Rp55.163.475.207,00 atau 68,76% dibandingkan dengan realisasi beban hibah tahun 2016 Rp80.230.222.757,00. Beban hibah tahun 2017 terdiri dari:

No	Uraian	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Hibah kepada Pemerintah	0,00	985.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	2.381.947.550,00	59.939.141.757,00
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	22.684.800.000,00	19.306.081.000,00
	Jumlah	25.066.747.550,00	80.230.222.757,00

Terdapat selisih sebesar Rp2.381.947.550,00 antara Beban Hibah-LO dengan realisasi Belanja Hibah sebesar Rp22.684.800.000,00 berupa penyesuaian tambah sebesar Rp2.381.947.550,00 karena :

- barang yang sudah diserahkan ke masyarakat dari Dindikbud sebesar Rp1.659.687.550,00
- barang yang sudah diserahkan ke masyarakat dari DPU TR sebesar Rp722.260.000,00.

No	Uraian	LRA (Rp)	Penyesuaian (Rp)		LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	2.381.947.550,00		2.381.947.550,00
2	Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	22.684.800.000,00			22.684.800.000,00
	Jumlah	22.684.800.000,00	2.381.947.550,00	0,00	25.066.747.550,00

5.3.2.5. Beban Bantuan Sosial

Saldo Beban Bantuan Sosial TA 2017 sebesar Rp2.538.650.000,00 turun sebesar Rp3.437.965.750,00 atau 57,52% dibandingkan dengan beban tahun 2016 sebesar Rp5.976.615.750,00. Beban tersebut merupakan beban bantuan sosial yang diberikan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, badan/lembaga yaitu :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No.	Uraian	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	2.225.000.000,00	5.515.015.750,00
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga	313.650.000,00	461.600.000,00
	Jumlah	2.538.650.000,00	5.976.615.750,00

Beban Hibah sebesar Rp2.538.650.000,00 adalah sama dengan realisasi belanja bantuan sosial pada LRA TA 2017.

5.3.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi sejak bulan pertama perolehan dan pengakuan beban secara bulanan mengikuti sistem pencatatan barang milik daerah. Saldo beban penyusutan dan amortisasi tahun 2017 sebesar Rp111.414.575.341,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.459.758.354,00	34.216.379.814,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	21.511.966.815,00	19.970.703.852,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	47.080.759.118,00	41.370.402.461,00
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	362.091.054,00	281.180.756,00
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	111.414.575.341,00	95.838.666.883,00

Adapun rincian beban penyusutan per SKPD adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan & Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
1	Dindikbud	7.080.365.908,00	10.826.790.504,00	57.126.175,00	
2	Dinkes	18.435.620.695,00	2.245.242.359,00	203.670.287,00	17.679.366,00
3	DPU TR	752.025.908,00	216.541.843,00	45.106.308.070,00	12.471.250,00
4	Disperkim	205.317.539,00	393.117.690,00	314.538.449,00	
5	Satpol PP	170.853.939,00	8.402.884,00		
6	Dinsos KBPP	837.871.580,00	61.253.120,00	1.861.818,00	12.791.250,00
7	Disnaker	423.945.110,00	85.646.985,00	4.944.129,00	12.482.500,00
8	DLH	1.037.487.719,00	71.691.240,00	515.039.992,00	
9	Disdukcatpil	780.663.680,00	30.662.744,00	10.789.240,00	24.078.688,00
10	Dinpermasdes	308.694.875,00	27.654.702,00	60.000,00	
11	Dishub	361.838.774,00	1.164.473.268,00	266.352.984,00	10.485.750,00
12	Diskominfo	957.084.595,00	18.382.734,00	162.158,00	42.106.635,00
13	Diskoperindag	605.353.327,00	3.604.246.157,00	9.397.752,00	625.000,00
14	DPMPSTSP	246.305.626,00	36.135.006,00	777.366,00	54.670.375,00
15	Dinpusarda	150.658.356,00	14.661.140,00	626.355,00	
16	Disperik	527.853.697,00	184.441.792,00	36.833.892,00	
17	Disparpora	452.484.244,00	885.388.858,00	487.802.213,00	
18	Disperten	777.060.494,00	370.233.583,00	24.280.100,00	11.237.500,00
19	Bappeda	460.346.495,00	32.639.674,00	2.547.602,00	
20	Bapenda	290.783.849,00	6.549.680,00	1.854.202,00	35.484.167,00
21	BPKAD	1.089.437.289,00	162.935.681,00	7.722.625,00	14.937.500,00
22	BKD	335.150.051,00	32.211.598,00	942.975,00	38.333.646,00
23	Inspektoral	227.919.933,00	17.648.940,00		
24	Setwan	1.596.206.975,00	72.921.232,00	12.009.723,00	
25	Setda	2.385.992.956,00	434.884.630,00	9.042.183,00	74.707.427,00
26	BPBD	333.604.092,00	19.600.000,00		
27	K-Kesbangpolinmas	91.851.205,00		70.834,00	
28	Kec. Moga	94.246.673,00	16.001.251,00	62.500,00	
29	Kec. Pulosari	89.264.825,00	25.483.807,00	187.498,00	
30	Kec. Belik	94.971.959,00	20.002.522,00	62.500,00	
31	Kec. Watukumpul	78.052.968,00	29.639.750,00	75.000,00	
32	Kec. Bodeh	78.346.599,00	13.627.336,00		



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	Beban Penyusutan dan Amortisasi (Rp)			
		Peralatan & Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jembatan & Irigasi	Amortisasi Aset Tak Berwujud
33	Kec. Bantarbolang	88.731.416,00	16.226.265,00	25.000,00	
34	Kec. Randudongkal	87.506.726,00	20.612.563,00	75.000,00	
35	Kec. Pemalang	256.777.162,00	125.107.633,00	4.932.162,00	
36	Kec. Taman	158.832.273,00	30.968.168,00	205.834,00	
37	Kec. Pelarukan	122.921.618,00	32.977.242,00	37.500,00	
38	Kec. Ampelgading	87.505.970,00	13.827.034,00	87.500,00	
39	Kec. Comal	128.332.947,00	108.579.227,00	100.000,00	
40	Kec. Ulujami	97.831.356,00	14.901.733,00	50.000,00	
41	Kec. Warungpring	73.656.951,00	19.654.240,00	97.500,00	
Jumlah		42.459.758.354,00	21.511.966.815,00	47.080.759.118,00	362.091.054,00

5.3.2.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp7.690.734.499,38 naik sebesar Rp2.736.709.403,48 atau 55,22% dari beban tahun 2016 sebesar Rp4.954.655.095,90. Beban penyisihan piutang tahun 2017 terdiri dari :

No	Beban Penyisihan Piutang	Saldo (Rp)	
		2017	2016
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	6.702.075.546,60	4.321.011.734,77
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	41.832.080,00	24.581.113,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain	946.826.872,78	609.062.248,13
Jumlah		7.690.734.499,38	4.954.655.095,90

5.3.2.8. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2017 sebesar Rp4.554.438.977,00 naik sebesar Rp822.907.976,00 atau 22,05% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp3.731.531.001,00.

5.3.2.9. Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya tahun 2017 sebesar Rp2.573.763.505,00 naik sebesar Rp2.048.929.302,00 atau 390,40% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp524.834.203,00.

5.3.2.10. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tahun 2017 sebesar Rp162.469.910.000,00 turun sebesar Rp3.063.802.840,00 atau 1,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp165.533.712.840,00.

Terdapat selisih sebesar Rp191.002.083.000,00 dari realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa pada LRA sebesar Rp353.471.993.000,00 dikarenakan transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa yang berasal dari APBN bukan merupakan kinerja operasional bagi pemerintah daerah.

5.3.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tahun 2017 sebesar Rp909.162.000,00 naik sebesar Rp217.933.673,00 atau 31,53% dari realisasi beban tahun 2016 sebesar Rp691.228.327,00.



5.3.3. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan realisasi sebagai berikut:

Kegiatan Non Operasional	Saldo (Rp)	
	2017	2016
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-Lo	1.575.000,00	7.000.000,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya_LO	295.553.666,58	1.188.587.354,27
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0,00	0,00
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	91.884.275,00
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	297.128.666,58	1.103.703.079,27

5.3.3.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

Surplus penjualan aset non lancar – LO berasal dari tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Realisasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.575.000,00 turun sebesar Rp5.425.000,00 atau 77,50% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp7.000.000,00.

5.3.3.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya – LO berasal dari pengurangan penyisihan piutang yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 karena adanya pelunasan/pembayaran piutang. Realisasi tahun 2017 sebesar Rp295.553.666,58 turun sebesar Rp893.033.687,69 atau 75,13% dari saldo tahun 2016 sebesar Rp1.188.587.354,27. Surplus dari Kegiatan Non Operasional – LO terdiri dari :

- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp7.441.004,08 karena penerimaan pendapatan kurang bayar dana bagi hasil PBB pada PPKD;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp38.600.000,00 karena penerimaan kembali pemberian piutang bantuan modal koperasi pada PPKD;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp875.000,00 karena penerimaan kembali pemberian piutang bantuan modal kerja LUEP pada PPKD;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp244.156.788,00 karena penerimaan pendapatan atas piutang denda PBB pada Bapenda;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp34.215,00 karena pelunasan piutang petak toko pada Diskoperindag;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp3.744.048,00 karena pelunasan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan pada Diskoperindag;
- pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp702.611,50 karena pelunasan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan pada Dinkes;

5.3.3.3. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Saldo tahun 2017 Defisit dari kegiatan non operasional lainnya sebesar 0,00 yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 turun sebesar Rp91.884.275,00 atau 100,00% dari tahun 2016 sebesar Rp91.884.275,00.

5.3.4. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari Pendapatan Luar Biasa – LO dan Beban Luar Biasa - LO. Saldo Defisit dari Pos Luar Biasa adalah sebesar Rp2.218.214.045,00.

5.3.4.1. Pendapatan Luar Biasa – LO

Tahun 2017 tidak ada realisasi Pendapatan Luar Biasa – LO.



5.3.4.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dengan realisasi sebesar Rp2.218.214.045,00 naik sebesar Rp1.618.514.045,00 atau 269,89% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp599.700.000,00. Terdapat selisih sebesar Rp44.000.000,00 dari Belanja Tak Terduga karena merupakan pembayaran Utang Jangka Pendek tahun 2016 kepada para penggaduh ternak yang dibiayai dari Belanja Tak Terduga, sehingga mengurangi Beban Luar Biasa.



5.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Pemalang pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Pemalang. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.204.638.010.492,67 mengalami peningkatan sebesar Rp250.604.878.025,29 atau 8,48% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.954.033.132.467,38.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1. Saldo Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.954.033.132.467,38 dan Rp2.700.466.468.265,55 meningkat sebesar Rp253.566.664.201,83 atau 9,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Saldo awal ekuitas diperoleh dari saldo akhir ekuitas laporan keuangan tahun sebelumnya.

5.4.2. Surplus/Defisit–LO

Surplus/Defisit–LO tahun 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp303.891.026.830,29 dan Rp76.587.440.102,70 meningkat sebesar Rp227.303.586.727,59 atau 296,79% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan surplus atas operasional entitas yang menambah nilai ekuitas.

5.4.3. Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan tahun 2017 dan 2016 masing-masing sebesar (Rp53.286.148.805,00) dan Rp176.979.224.099,13 turun sebesar Rp230.265.372.904,13 atau (130,11)%. Koreksi Kesalahan berupa koreksi pencatatan aset yang terjadi pada tahun pelaporan dan mutasi aset dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi nilai persediaan sebesar (Rp58.534.374,00) merupakan koreksi atas nilai persediaan dikarenakan masih terdapat persediaan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa sebesar Rp58.534.374,00 pada Dinkes masih tercatat sebagai persediaan, sehingga perlu dikoreksi yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas pemda;
- b. Selisih revaluasi aset tetap sebesar Rp0,00;
- c. Koreksi ekuitas lainnya tahun 2017 sebesar (Rp53.227.614.431,00) yang terdiri dari:
 - Berkurangnya Ekuitas karena Pencatatan Aset sebesar Rp1.490.428.028,00 berupa:
 - koreksi atas saldo Kas Dana BOS SMA/SMK pada Dindikbud sebesar Rp2.211.807.087,00 yang pada tahun 2017 sudah ikut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga dikeluarkan dari saldo Dana BOS Pemerintah Kabupaten Pemalang, dan koreksi karena pencatatan aset tetap sebesar Rp635.413.377,00 yang baru dicatat pada tahun 2017;
 - koreksi atas kelebihan pencatatan pada Dinpusarda tahun 2016 sebesar Rp20.125.000,00 berupa penghapusan aset lain-lain, sehingga menambah ekuitas pemda;
 - koreksi karena dobel pencatatan aset pada Dispartan sebesar Rp314.019.000,00 sehingga mengurangi ekuitas pemda;



- koreksi karena pencatatan kelebihan pembayaran gaji pegawai sebelum menjadi piutang sebesar Rp148.969.682,00 yang dicatat pada BPKAD;
- koreksi atas aset yang belum dicatat sebelumnya pada Setda sebesar Rp230.890.000,00 sehingga menambah ekuitas pemda;
- Bertambahnya Ekuitas karena koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp447.563.487,00 terdiri dari :
 - adanya perbaikan dalam pencatatan aset tetap gedung dan bangunan pada Dispartan dan pengaruh pembulatan penyusutan aset tetap pada beberapa SKPD sebesar Rp10.833.301,00, mengakibatkan berkurangnya ekuitas pemda;
 - adanya kapitalisasi aset yang menambah masa manfaat dan mempengaruhi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp458.396.788,00 yang terdapat pada 24 SKPD, mengakibatkan bertambahnya ekuitas pemda;
- Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset saat Perubahan SKPD sebesar Rp0,00, karena adanya mutasi aset saat perubahan SKPD hanya mempengaruhi ekuitas pada SKPD tetapi secara keseluruhan tidak mempengaruhi ekuitas pemda;
- Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset antar SKPD selama tahun 2017 sebesar Rp0,00, karena adanya mutasi aset saat perubahan SKPD hanya mempengaruhi ekuitas pada SKPD tetapi secara keseluruhan tidak mempengaruhi ekuitas pemda;
- Bertambahnya Ekuitas karena Hibah sebesar Rp11.808.832.232,00 berupa :
 - pencatatan aset yang diterima oleh Dinkes atas hibah dari pihak ketiga sebesar Rp119.162.000,00 berupa penyelesaian pekerjaan pembangunan puskesmas dan hibah dari Kemenkes sebesar Rp1.545.769.000,00 berupa bangunan air;
 - pencatatan aset yang diterima oleh Diskoperindag atas hibah dari PDAU sebesar Rp10.143.901.232,00 berupa bangunan, peralatan, dan saluran irigasi pada pasar yang sebelumnya dibangun oleh PDAU;
- Berkurangnya Ekuitas karena Penghapusan Aset sebesar Rp63.993.582.122,00 adalah berkurangnya ekuitas pemda karena penghapusan aset pada SKPD yang masih memiliki nilai buku, terdiri dari :
 - Dinkes sebesar Rp513.206.072,00 adalah aset tetap berupa gedung puskesmas dan tempat tinggal;
 - Dinsos KBPP sebesar Rp6.021.917,00 adalah aset tetap lainnya berupa buku sebesar Rp4.574.000,00 dan aset lain-lain sebesar Rp1.447.917,00;
 - Diskoperindag sebesar Rp4.727.403.151,00 adalah aset tetap berupa bangunan pasar di 3 (tiga) lokasi karena akan direhab total sebesar Rp4.712.983.151,00 dan aset lain-lain berupa peralatan sebesar Rp520.000,00 dan tanaman sebesar Rp13.900.000,00;
 - Disperik sebesar Rp939.261.193,00 adalah aset tetap lainnya berupa ikan dan gambar sebesar Rp9.543.000,00 dan aset lain-lain sebesar Rp929.718.193,00;
 - Disparpora sebesar Rp146.759.083,00 adalah aset tetap berupa bangunan hotel;
 - Dispartan sebesar Rp185.484.984,00 adalah aset lain-lain berupa peralatan sebesar Rp737.800,00 dan bangunan sebesar Rp184.787.184,00;
 - BPKAD sebesar Rp57.317.255.732,00 berupa aset lain-lain yang terdiri dari tanah sebesar Rp57.304.238.000,00 dan peralatan sebesar Rp13.017.732,00;
 - Inspektorat sebesar Rp12.657.000,00 berupa aset lain-lain berupa buku;
 - Setwan sebesar Rp600.000,00 adalah aset lain-lain berupa peralatan;
 - Setda sebesar Rp136.499.656,00 adalah aset lain-lain berupa buku sebesar Rp75.000.000,00; alat olahraga sebesar Rp2.874.000,00; lukisan sebesar Rp36.670.000,00; alat musik sebesar Rp15.000.000,00; peralatan sebesar Rp1.945.418,00; dan kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp5.010.238,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



- Kec. Belik sebesar Rp4.135.000,00 adalah aset lain-lain berupa tanda penghargaan, gambar, pahatan, dan peta wilayah;
- Kec. Randudongkal sebesar Rp465.000,00 adalah aset lain-lain berupa tanaman;
- Kec. Petarukan sebesar Rp3.833.334,00 adalah aset lain-lain berupa peralatan.

No	SKPD	Koreksi Ekuitas Lainnya TA. 2017							Jumlah
		Koreksi Pencatatan	Koreksi Akumulasi Penyusunan Aset Tetap	Mutasi Aset karena Perubahan SKPD	Mutasi Aset antar SKPD	Hibah	Reklas	Penghapusan	
1	Dindikbud	(1.576.393.710,00)	33,00	(105.933.333,00)	1.407.311.348,00				(275.015.662,00)
2	Dinkes		180.283.480,00	-	1.495.287.540,00	1.664.931.000,00		(513.206.072,00)	2.827.295.948,00
3	GPU TR		6.668.280,00	(46.365.676.830,00)	(2.223.436.715,00)				(48.582.445.265,00)
4	Disperkim			34.388.288.488,00	762.094.406,00				35.150.382.894,00
5	Satpol PP		2.994.234,00	31.550.405,00	508.940.995,00				543.485.634,00
6	DMSOS KBPP		14.164.044,00	(670.491.609,00)	289.662.287,00			(6.021.917,00)	(372.687.195,00)
7	Disnaker		8.558.779,00	(201.122.868,00)	316.616.358,00				124.052.269,00
8	DH			12.647.876.311,00	2.538.774.217,00				15.186.650.528,00
9	Disdukcapil		1.969.541,00	(75.000.000,00)	291.290.042,00				218.259.583,00
10	Dispermasdes			2.639.517.038,00	414.552.320,00				3.054.069.358,00
11	DisHub		11.193.202,00	854.366.385,00	675.526.902,00				1.541.086.489,00
12	Diskominfo		1,00	1.594.625.837,00	(211.537.140,00)				1.383.088.698,00
13	Diskoperindag		37.166.072,00	-	2.750.000,00	10.143.901.232,00		(4.727.403.151,00)	5.456.414.153,00
14	DPMPTSP			50.768.948,00	185.356.709,00				236.125.657,00
15	Dipusarda	20.125.000,00		-	264.298.375,00				284.423.375,00
16	Disperik			-	-			(939.261.193,00)	(939.261.193,00)
17	Disparpora		85.359.835,00	-	291.290.042,00			(146.759.083,00)	(61.399.248,00)
18	Disperian	(314.019.000,00)	(5.350.955,00)	266.974.328,00	(125.491.667,00)			(185.484.984,00)	(363.372.278,00)
19	Bappeda		5.808.919,00	-	(64.232.745,00)				(58.423.826,00)
20	Bapenda		361.952,00	24.605.360.732,49	303.126.917,00				24.908.849.601,49
21	BPKAD	148.969.682,00		(7.477.995.377,00)	(8.793.846.393,00)			(57.317.255.732,00)	(73.440.127.820,00)
22	BKD		1.191.433,00	-	291.290.042,00				292.481.475,00
23	Inspektorat		4.478.475,00	-	801.691.573,00			(12.657.000,00)	793.513.048,00
24	Selwan		6.817.403,00	(91.185.506,00)	(1.449.162.826,00)			(600.000,00)	(1.534.130.929,00)
25	Seida	230.890.000,00	11.729.744,00	1.011.721.565,00	3.558.382.915,00			(136.499.656,00)	4.676.220.568,00
26	BPPD			(31.550.405,00)	-				(31.550.405,00)
27	Kesbangpolmas			-	(1.642.857,00)				(1.642.857,00)
28	Kec. Moja			-	9.312.700,00				9.312.700,00
29	Kec. Pulosari			-	9.312.700,00				9,312,700,00
30	Kec. Belik			-	9,312,700,00			(4.135.000,00)	5,177,700,00
31	Kec. Watukumpul		4.918.694,00	-	9,312,700,00				14,231,394,00
32	Kec. Bodeh			-	9,312,700,00				9,312,700,00
33	Kec. Bantarbelang		12.980.685,00	-	9,576,100,00				22,556,785,00
34	Kec. Randudongkal		6.088.187,00	-	12.269.637,00			(465.000,00)	17,892,824,00
35	Kec. Pemalang		21.272.317,00	-	9,576,100,00				30,848,417,00
36	Kec. Taman		1.794.988,00	-	27.037.700,00				28,832,688,00
37	Kec. Petarukan			397.913.000,00	27.301.100,00			(3.833.334,00)	421.380.766,00
38	Kec. Ampelgading		26.185.008,00	-	9,312,700,00				35,497,708,00
39	Kec. Comal		(1.514.600,00)	-	(1.397.864.840,00)				(1,399,379,440,00)
40	Kec. Ulujami		2.443.736,00	-	9,312,700,00				11,756,436,00
41	Kec. Warungring			-	9,312,700,00				9,312,700,00
	PPKD			(21.527.311.227,49)					(21,527,311,227,49)
	KKP (hapus)			(1.942.695.882,00)					(1,942,695,882,00)
	Jumlah Total	(1.490.428.028,00)	447.563.487,00	-	-	11.808.832.232,00	-	(63.993.582.122,00)	(53.227.614.431,00)

d. Koreksi kesalahan pencatatan sebesar Rp0,00;



5.5. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.5.1. ASET

5.5.1.1. ASET LANCAR

Kas merupakan pos neraca yang paling likuid. Pos ini menunjukkan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2016 yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), BLUD RSUD dr. M. Ashari dan Kapitasi JKN (FKTP) pada Dinas Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta bendahara pada SKPD, baik berupa uang tunai, rekening giro bank, tabungan dan deposito bank, dengan rincian sebagai berikut :

Kas dan Setara Kas		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	172.941.136.868,00	114.738.925.959,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	52.932.000,00	55.500.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.006.387,00	27.718.346,00
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	10.262.170.531,00	10.407.616.071,00
5	Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP	43.210.784.709,00	41.264.660.906,00
6	Kas Dana Bantuan Operasioanal Sekolah	3.973.680.865,00	7.798.044.872,00
Jumlah		230.441.711.360,00	174.292.466.154,00

5.5.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Akun ini menggambarkan saldo Kas Daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah/Pemegang Kas Daerah (BUD/PKD), baik berupa uang tunai maupun dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, tabungan maupun deposito, dengan rincian saldo per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

1. Rekening Giro Bank

Kas di Kas Daerah		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Rekening Giro	77.941.136.868	104.738.925.959,00
2	Deposito	95.000.000.000	10.000.000.000,00
Jumlah		172.941.136.868,00	114.738.925.959,00

Rekening giro bank adalah dana yang merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Rekening Giro		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Bank Jateng A/C No. 1.025.00793.2	77.941.154.868,00	104.738.925.959,00
Jumlah		77.941.154.868,00	104.738.925.959,00

Rekening giro Bank Jateng Cabang Pemalang atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan Rekening Kas Umum Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah.

Rekening giro bank jateng sebesar Rp77.941.154.868,00 ini berbeda pencatatan pada Bank Jateng Rp77.941.136.868,00 selisih sebesar Rp18.000,00 dikarenakan Bank Jateng salah mencatat pajak pada SP2D nomer B02108/SP2D-LS/1.1.1.1/09/2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.164.719,00 dicatat sebesar Rp5.146.719,00 dan sudah dilakukan koreksi pada tanggal 22 Februari 2018.



2. Deposito

Saldo deposito per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp95.000.000.000,00 dan Rp10.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penempatan dana ini untuk jangka waktu satu bulan, diperpanjang secara otomatis atau *Automatic Roll Over* (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2017 dan 2016 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang pada rekening Lain-lain PAD yang sah.

Deposito		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Bank Jateng Cabang Pemalang	25.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2	Bank BRI Cabang Pemalang	35.000.000.000,00	0,00
3	Bank BNI 1946 Cabang Tegal	19.000.000.000,00	0,00
4	Bank BNI Kantor Kas Comal	6.000.000.000,00	0,00
5	Bank BTN Cabang Pekalongan Kantor Kas Pemalang	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah		95.000.000.000,00	10.000.000.000,00

5.5.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp52.932.000,00 dan Rp55.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kas di Bendahara Penerimaan		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.379.500,00	1.167.000,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	1.110.000,00
3	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	34.550.500,00	27.583.000,00
4	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	17.002.000,00	25.640.000,00
Jumlah		52.932.000,00	55.500.000,00

Saldo kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2017 merupakan penerimaan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan tetapi belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan saldo sebesar Rp1.379.500,00 merupakan penerimaan tanggal 31 Desember 2017 pada bendahara penerimaan pembantu yang ada di lokasi terminal dan perparkiran yang diterima setelah ditutupnya rekening kas daerah sehingga baru bisa disetorkan pada 11 Januari 2018.
- Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp34.550.500,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tanggal 31 Desember 2017 yang diterima setelah ditutupnya rekening kas daerah sehingga baru disetor pada 2 Januari 2018.
- Saldo kas di bendahara penerimaan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp17.002.000,00 merupakan penerimaan yang bersumber dari retribusi pasar – pasar tanggal 31 Desember 2016 yang diterima setelah ditutupnya rekening kas daerah, dengan rincian retribusi harian sebesar Rp13.900.500, retribusi kebersihan sebesar Rp2.982.000,00 dan retribusi pasar grosir/toko sebesar Rp120.000,00. Retribusi tersebut telah disetor pada bulan Januari 2018.

5.5.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.006.387,00 dan Rp27.718.346,00 dengan rincian sebagai berikut:



Kas di Bendahara Pengeluaran		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.965.190,00
2	Kecamatan Moga	0,00	535.950,00
3	Kecamatan Belik	0,00	2.443.636,00
4	Kecamatan Ulujami	800.000,00	0,00
5	Kecamatan Randudongkal	206.387,00	206.387,00
6	Kelurahan Mulyoharjo	0,00	2.429.978,00
7	Kelurahan Wanarejan Selatan	0,00	7.778.241,00
8	Kelurahan Pelutan	0,00	12.358.964,00
Jumlah		1.006.387,00	27.718.346,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per tanggal 31 Desember 2017.

- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Ulujami sebesar Rp800.000,00 merupakan kelebihan pencatatan belanja belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017 dan baru disetor pada tanggal 10 Januari 2018.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Randudongkal sebesar Rp206.387,00 merupakan pajak yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2017 dan baru disetor pada bulan 8 Februari 2018.

5.5.1.1.4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah saldo kas yang berada di SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

SKPD yang menerapkan PPK-BLUD memiliki fleksibilitas untuk dapat langsung menggunakan pendapatan yang diterimanya tanpa terlebih dulu menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Daerah.

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp10.262.170.531,00 dan Rp10.407.616.071,00.

Kas di Badan Layanan Umum Daerah		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	RSUD dr. M. Ashari	10.262.170.531,00	10.407.616.071,00
Jumlah		10.262.170.531,00	10.407.616.071,00

5.5.1.1.5. Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah saldo kas yang berada di 22 Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Saldo Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp43.210.784.709,00 dan Rp41.264.660.906,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Puskesmas Banyumudal	2.768.465.215,00	2.056.064.594,00
2	Puskesmas Warungpring	671.192.511,00	475.180.068,00
3	Puskesmas Pulosari	1.669.567.952,00	2.133.858.926,00
4	Puskesmas Belik	3.934.378.924,00	3.651.691.092,00
5	Puskesmas Watukumpul	1.378.846.070,00	1.649.892.846,00
6	Puskesmas Kebandaran	1.521.115.983,00	1.744.580.498,00
7	Puskesmas Bantarbolang	4.058.549.710,00	3.153.593.719,00
8	Puskesmas Randudongkal	624.896.635,00	538.539.365,00
9	Puskesmas Kalimas	728.777.387,00	854.322.276,00
10	Puskesmas Paduraksa	1.402.581.379,00	1.251.363.854,00



Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		2017 (Rp)	2016 (Rp)
11	Puskesmas Mulyoharjo	787.738.122,00	1.032.186.814,00
12	Puskesmas Kebondalem	1.657.858.980,00	1.518.914.323,00
13	Puskesmas Banjardawa	1.449.246.700,00	1.817.394.800,00
14	Puskesmas Kabunan	2.003.739.882,00	2.341.044.354,00
15	Puskesmas Jebed	1.937.130.485,00	1.993.629.600,00
16	Puskesmas Petarukan	2.469.090.935,00	2.928.060.253,00
17	Puskesmas Klareyan	3.223.985.293,00	2.853.360.077,00
18	Puskesmas Losari	3.688.675.674,00	3.108.753.851,00
19	Puskesmas Purwoharjo	2.322.004.154,00	2.217.124.525,00
20	Puskesmas Sarwodadi	674.222.548,00	589.519.640,00
21	Puskesmas Rowosari	1.227.060.801,00	843.062.162,00
22	Puskesmas Mojo	3.011.659.369,00	2.512.523.269,00
Jumlah		43.210.784.709,00	41.264.660.906,00

5.5.1.1.6. Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Saldo Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah saldo kas yang berada di bendahara pengelola dana BOS Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.973.680.865,00 dan Rp7.798.044.872,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.973.680.865,00	7.798.044.872,00
Jumlah		3.973.680.865,00	7.798.044.872,00

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp3.973.680.865,00 terdiri dari :

- Saldo Kas – Bank sebesar Rp2.643.125.153,00
- Saldo Kas – Tunai sebesar Rp1.330.555.712,00

yang berada pada sekolah-sekolah.

Saldo Kas Dana BOS berkurang sebesar Rp3.824.364.007,00 dibanding saldo tahun lalu dikarenakan ada koreksi atas Saldo Dana BOS SMA dan SMK sebesar Rp2.211.807.085,00 karena SMA dan SMK sudah menjadi bagian dari pemerintah provinsi. Selain itu juga adanya penggunaan atas saldo awal Dana BOS sebesar Rp1.612.556.920,00 untuk realisasi belanja BOS 2017.



Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Akun ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang belum diterima, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	63.596.822.105,41	50.563.187.809,41
2	Piutang Lainnya	4.676.967.482,00	3.898.876.322,00
3	Penyisihan Piutang	(24.654.317.718,52)	(17.259.136.885,72)
Jumlah Piutang yang dapat direalisasikan		43.619.471.868,89	37.202.927.245,69

Dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyisihan piutang dalam laporan keuangan ini sejak tahun 2015.

5.5.1.1.7. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang BLUD, dan Piutang Transfer Pemerintah Pusat. Saldo Piutang Pendapatan pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang Pajak	38.803.817.738,00	34.462.502.485,00
2	Piutang Retribusi	461.528.175,00	883.436.175,00
3	Piutang BLUD	23.625.398.481,41	13.022.970.621,41
4	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	706.077.711,00	2.194.278.528,00
Jumlah		63.596.822.105,41	50.563.187.809,41

1. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan pajak yang sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 belum dibayar oleh Wajib Pajak bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	PBB	38.644.057.751,00	34.436.857.765,00
2	Reklame	150.767.239,00	25.644.720,00
3	Air Bawah Tanah	8.992.748,00	0,00
Jumlah		38.803.817.738,00	34.462.502.485,00

- Saldo Piutang PBB per 31 Desember 2017 sebesar Rp38.644.057.751,00 adalah piutang atas pengelolaan PBB yang sekarang dilimpahkan pada Pemerintah Kabupaten Pemalang dan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang sejak tahun 2013. Saldo Piutang PBB bertambah sebesar Rp4.207.199.986,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp597.776.290,00 dan penambahan piutang baru sebesar Rp4.804.976.276,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pelimpahan PBB sebelum tahun 2013 sebesar Rp14.056.669.487,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp14.065.374.019,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp8.704.532,00



- Piutang tahun 2013 sebesar Rp4.790.266.019,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.887.034.942,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp96.768.923,00
 - Piutang tahun 2014 sebesar Rp4.402.624.795,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp4.495.892.027,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp93.267.232,00
 - Piutang tahun 2015 sebesar Rp5.564.937.101,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.695.152.185,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp130.215.084,00
 - Piutang tahun 2016 sebesar Rp5.024.584.073,00 adalah saldo tahun lalu sebesar Rp5.293.404.592,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp268.820.519,00
 - Penambahan piutang tahun 2017 sebesar Rp4.804.976.276,00.
- Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2017 sebesar Rp150.767.239,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Reklame yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum terealisasi atas Penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Saldo Piutang Pajak Reklame bertambah sebesar Rp125.122.519,00 dibanding tahun lalu terdiri dari pengurangan piutang sebesar Rp25.644.720,00 berupa pelunasan piutang tahun lalu dan penambahan piutang baru sebesar Rp150.767.239,00.
- Saldo Piutang Pajak Air Bawah Tanah tahun 2017 sebesar Rp8.992.748,00 adalah piutang dari Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum terealisasi atas penetapan besaran pajak tahun 2017 yang harus dibayarkan.

2. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi adalah hak Pemerintah Daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, adapun piutang retribusi yang dimaksud adalah hak pendapatan atas pelayanan yang telah diberikan namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum dibayar oleh penerima pelayanan atau Wajib Retribusi bersangkutan. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp461.528.175,00 dan Rp883.436.175,00 dengan rincian :

Piutang Retribusi		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Izin Gangguan (DPMPSTSP)	366.702.175,00	618.917.175,00
2	IMB (DPMPSTSP)	93.881.000,00	256.646.000,00
3	Izin Perikanan (DPMPSTSP)	520.000,00	605.000,00
4	Izin Usaha Pariwisata (DPMPSTSP)	375.000,00	375.000,00
5	Izin Usaha Industri (DPMPSTSP)	50.000,00	50.000,00
6	Retribusi Petak Toko (Diskoperindag)	0,00	6.843.000,00
Jumlah		461.528.175,00	883.436.175,00

Piutang Retribusi sebesar Rp461.528.175,00 berkurang sebesar Rp421.908.000,00 dibanding saldo piutang tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Piutang Retribusi pada DPMPSTSP tahun 2017 sebesar Rp461.528.175,00 berkurang sebesar Rp415.065.000,00 dibanding saldo piutang tahun lalu, yang terdiri dari :
 - Saldo Piutang Izin Gangguan TA 2017 sebesar Rp366.702.175,00 adalah saldo piutang tahun lalu sebesar Rp618.917.175,00 dikurangi : pelunasan piutang sebesar Rp262.353.000,00 ditambah : penambahan piutang di tahun 2017 sebesar Rp10.138.000,00;



- Saldo Piutang IMB TA 2017 sebesar Rp93.881.000,00 adalah saldo piutang tahun lalu sebesar Rp256.646.000,00
 dikurangi : pelunasan sebesar Rp243.223.000,00;
 ditambah : penambahan piutang di tahun 2017 sebesar Rp80.458.000,00;
 - Saldo Piutang Izin Usaha Perikanan TA 2017 sebesar Rp520.000,00 adalah saldo piutang tahun lalu sebesar Rp605.000,00
 dikurangi : pelunasan sebesar Rp85.000,00;
 - Saldo Piutang Izin Usaha Pariwisata TA 2017 sebesar Rp375.000,00 adalah sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pelunasan atas piutang yang ada; dan
 - Saldo Piutang Izin Usaha Industri TA 2017 sebesar Rp50.000,00 adalah sama dengan saldo tahun lalu karena tidak ada pelunasan atas piutang yang ada.
- Piutang Retribusi Petak Toko pada Diskoperindag berupa Piutang kepada pedagang di pasar atas Retribusi Petak Toko yang menempati petak toko dan menempati loos (menggunakan KLTL) sebesar Rp0,00 karena sudah dilakukan pelunasan pada tahun 2017 sebesar Rp6.843.000,00.

3. Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Piutang BLUD		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang BLUD	23.625.398.481,41	13.022.970.621,41
Jumlah		23.625.398.481,41	13.022.970.621,41

Piutang BLUD pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp23.625.398.481,41 dan Rp13.022.970.621,41 adalah piutang yang dikelola oleh RSUD dr. M. Ashari merupakan piutang yang terdiri dari :

- jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp23.624.872.481,41; dan
- jasa sewa tempat/kios PKL di lokasi RSUD sebesar Rp526.000,00.

Saldo Piutang BLUD sebesar Rp23.625.398.481,41 bertambah sebesar Rp10.602.427.860,00 dibanding tahun lalu dengan rincian saldo piutang tahun lalu sebesar Rp13.022.970.621,41

dikurangi : pembayaran atas piutang sebesar Rp11.023.419.168,00

ditambah : penambahan piutang di tahun 2017 sebesar Rp21.625.847.028,00.

4. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Piutang Pendapatan		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	706.077.711,00	2.194.278.528,00
Jumlah		706.077.711,00	2.194.278.528,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp706.077.711,00 dan Rp2.194.278.528,00 adalah Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.07/2016 tentang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan TA. 2011, TA. 2013, dan TA. 2015 yang dialokasikan dalam APBN TA. 2016 dan 2017. Adapun realisasi penerimaan atas Piutang Transfer Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB tersebut pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.488.200.817,00.



5.5.1.1.8. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp4.676.967.482,00 dan Rp3.898.876.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

Piutang Lain-lain		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Koperasi BMT	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Piutang Permodalan Agribisnis	26.500.000,00	26.500.000,00
3	Bantuan Modal Koperasi	527.700.000,00	566.300.000,00
4	Piutang Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00
5	Piutang LUEP	580.000.000,00	825.000.000,00
6	Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00
7	Piutang Denda Pajak	1.306.264.844,00	1.550.421.632,00
8	Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	1.176.836.100,00	889.331.900,00
9	Piutang Jaminan Uang Muka Pekerjaan	966.250.200,00	0,00
10	Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim	52.093.548,00	0,00
Jumlah		4.676.967.482,00	3.898.876.322,00

- Saldo Piutang Koperasi BMT tahun 2017 sebesar Rp25.000.000,00 merupakan sejenis pinjaman bantuan modal yang direalisasikan pada TA. 2004 dalam pengelolaan Bappeda dan disalurkan kepada Puskopyah Kabupaten Pemalang;
- Saldo Piutang Pengembangan Agribisnis tahun 2017 sebesar Rp26.500.000,00 merupakan pinjaman untuk pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) Gombang kepada petani dan pedagang yang berusaha di bidang hortikultura yang diterimakan kepada Asosiasi Petani dan Pedagang Hortikultura (APPH) Kawasan Agropolitan "Waliksarimadu" pada Tahun 2009. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Pengembangan Sub Terminal Agribisnis Gombang. Berdasarkan ketentuan maka APPH menyetor pengembalian dana satu tahun berikutnya sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 6% (4% disetor ke Rekening Kas Umum Daerah + 2% biaya operasional APPH dan Tim Teknis).
- Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2017 sebesar Rp527.700.000,00 berasal dari pengurangan/pelunasan sebesar Rp38.600.000,00 dari saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp566.300.000,00 yang merupakan penerimaan kembali dari pemberian pinjaman selama tahun 2017. Pemberian Bantuan Modal Koperasi ini dalam pengelolaan Diskoperindag dalam usaha menciptakan wirausahawan-wirausahawan di Kabupaten Pemalang. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada Tahun 2006. Koperasi penerima pinjaman yang terpilih berdasarkan seleksi oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Dana Bergulir, membuat surat pernyataan pengakuan hutang dan berkewajiban membayar angsuran pokok selama lima kali pembayaran dalam jangka waktu tiga tahun dengan angsuran jasa sebesar 6% setahun dibayarkan per bulan.
- Piutang Petak Toko tahun 2017 sebesar Rp15.200.000,00 merupakan hasil dari pengelolaan petak toko/ruko di tiap-tiap pasar yang dikelola Diskoperindag adalah saldo piutang tahun lalu.
- Piutang LUEP tahun 2017 sebesar Rp580.000.000,00 berasal dari pengurangan/pelunasan berupa penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp245.000.000,00 dari saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp825.000.000,00.
- Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai tahun 2017 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan piutang yang terjadi karena adanya kelebihan pemberian Gaji dan Tunjangan kepada Pegawai, adalah saldo piutang tahun lalu.



- Piutang Denda Pajak merupakan piutang denda atas pembayaran PBB tahun 2013 dan 2014 yang diperhitungkan per 31 Desember 2014, dan tidak termasuk atas tambahan piutang denda atas PBB Tahun 2017. Hal ini dikarenakan nilai piutang denda akan berbeda dengan nilai pelunasan piutang, tergantung kapan Wajib Pajak membayar pelunasan sehingga tidak dimasukkan ke nilai piutangnya. Saldo Piutang Denda Pajak tahun 2017 sebesar Rp1.306.264.844,00 merupakan saldo piutang tahun 2016 sebesar Rp1.550.421.632,00 setelah dikurangi adanya pembayaran Denda PBB pada tahun 2017 sebesar Rp244.156.788,00.
- Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.176.836.100,00 dan Rp889.331.900,00. Saldo piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan bertambah sebesar Rp68.804.500,00 terdiri dari pengurangan sebesar Rp889.331.900,00 berupa pelunasan atas piutang tahun lalu karena jaminan pelaksanaan pekerjaan sudah dicairkan dan bertambah sebesar Rp1.176.836.100,00 berupa penambahan jaminan pelaksanaan pekerjaan karena adanya putus kontrak, terdiri dari :
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan rehabilitasi DI Lanjiladang pada DPU TR sebesar Rp28.035.000,00 (sudah dicairkan pada 25 Januari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan rehabilitasi DI Tracak pada DPU TR sebesar Rp20.027.000,00 (sudah dicairkan pada 25 Januari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan normalisasi dan pengaman tebing sungai pada DPU TR sebesar Rp16.901.500,00 (sudah dicairkan pada 25 Januari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan gedung DPRD pada DPU TR sebesar Rp455.507.900,00 (sudah dicairkan pada 16 Januari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pengurugan tanah untuk pembangunan rumah sakit tipe D Comal dan pembangunan talud pada Dinkes sebesar Rp241.562.550,00 (sudah dicairkan pada 15 Februari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan sumur dalam pada Dispertan sebesar Rp12.560.800,00 (sudah dicairkan pada 10 Januari 2018);
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan Gapura Jalan DI Panjaitan sebesar Rp92.885.000,00 (sudah dicairkan pada 31 Januari 2018);
 - Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan Gapura Perbatasan Pemalang – Tegal sebesar Rp90.616.650,00 (sudah dicairkan pada 31 Januari 2018);
 - Pelaksanaan Pekerjaan atas pekerjaan pembangunan penataan kawasan obyek wisata sebesar Rp218.739.700,00 (sudah dicairkan pada 31 Januari 2018);
- Piutang Jaminan Uang Muka Pekerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp966.250.200,00 dan Rp0,00. Saldo piutang jaminan uang muka pekerjaan bertambah sebesar Rp966.250.200,00 karena adanya putus kontrak pekerjaan pada Dinkes atas pekerjaan pengurugan dan pembuatan talud untuk pembangunan RS tipe D di Comal dimana uang muka sudah diberikan, sehingga timbul piutang uang muka pekerjaan. Jaminan uang muka pekerjaan ini sudah dicairkan pada 12 Januari 2018.
- Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp52.093.548,00 dan Rp0,00 adalah piutang yang timbul karena BPJS terlambat memberikan pencairan dana atas klaim biaya pengobatan pasien pada RSUD dr. M. Ashari Pemalang.



5.5.1.1.9. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Dengan adanya Penyisihan Piutang Tak Tertagih maka dapat diketahui besarnya Nilai Piutang yang Dapat Direalisasikan (*net realizable value*). Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih dengan menyiapkan perhitungan umur piutang (*aging schedule*) atas saldo piutang yang ada pada 31 Desember sesuai jenis piutang menjadi beberapa kategori kualitas piutang. Besarnya prosentase penyisihan piutang untuk masing-masing kualitas piutang adalah : Lancar (0,5%); Kurang Lancar (10%); Diragukan (50%); dan Macet (100%)

Sedangkan penetapan umur piutang berbeda untuk masing-masing jenis piutang, yaitu Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya.

Besarnya Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tak Tertagih		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang Pajak	19.259.555.205,78	12.557.479.659,18
2	Piutang Retribusi	93.913.145,00	52.115.280,00
3	Piutang Lain-lain	5.300.849.367,74	4.649.541.946,54
Jumlah		24.654.317.718,52	17.259.136.885,72

Penyisihan Piutang Tak Tertagih meningkat sebesar Rp7.395.180.832,80 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan Beban Penyisihan Piutang selama tahun 2017 adalah sebesar Rp7.690.734.499,38 terdapat perbedaan sebesar Rp295.553.666,58. Perbedaan ini dikarenakan adanya Surplus dari Kegiatan Non Operasional atas pembayaran/ pelunasan piutang yang akan mengurangi saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Adapun Surplus dari Kegiatan Non Operasional tersebut terdiri dari :

- pembayaran atas Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB sebesar Rp7.441.004,08;
- pembayaran atas Piutang Bantuan Modal Koperasi sebesar Rp38.600.000,00;
- pembayaran atas Piutang Bantuan Modal Kerja LUEP sebesar Rp875.000,00;
- pembayaran atas Piutang Denda PBB sebesar Rp244.156.788,00;
- pembayaran atas Piutang Petak Toko sebesar Rp34.215,00;
- pembayaran atas Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp4.446.659,50.

1. Penyisihan Piutang Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Pajak pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp19.259.555.205,78 dan Rp12.557.479.659,18 terdiri dari :

Penyisihan Piutang Pajak		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Piutang PBB	19.258.756.405,84	12.557.351.435,58
2	Piutang Pajak Reklame	753.836,20	128.223,60
3	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	44.963,74	0,00
Jumlah		19.259.555.205,78	12.557.479.659,18



Rincian Penyisihan Piutang Pajak tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Piutang Pajak	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar < 2 th	Kurang Lancar 2 - 3 th	Diragukan 3 - 5 th	Macet >5 th
PBB	38.644.057.751,00	9.829.560.349,00	5.564.937.101,00	9.192.890.814,00	14.056.669.487,00
Reklame	150.767.239,00	150.767.239,00	-	-	-
Air Bawah Tanah	8.992.748,00	8.992.748,00	-	-	-
Jumlah	38.803.817.738,00	9.989.320.336,00	5.564.937.101,00	9.192.890.814,00	14.056.669.487,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	19.259.555.205,78	49.946.601,68	556.493.710,10	4.596.445.407,00	14.056.669.487,00

Penjelasan :

- Piutang Pajak PBB adalah piutang tahun 1993 – 2017, sehingga terbagi dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Pajak Reklame adalah piutang tahun 2016 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar;
- Piutang Pajak Air Bawah Tanah adalah piutang tahun 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar.

Penyisihan piutang pajak bertambah sebesar Rp6.702.120.962,37 dibanding saldo tahun lalu karena bertambahnya piutang dan menurunnya kualitas piutang pada Piutang PBB.

2. Penyisihan Piutang Retribusi

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp93.913.145,00 dan Rp52.115.280,00 terdiri dari :

Penyisihan Piutang Retribusi		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Retribusi Gangguan (HO)	91.291.055,00	50.070.160,00
2	Retribusi IMB	1.744.590,00	1.283.230,00
3	Retr. Izin Usaha Perikanan	452.500,00	302.675,00
4	Retr. Izin Usaha Pariwisata	375.000,00	375.000,00
5	Retr. Izin Usaha Industri	50.000,00	50.000,00
6	Retr. Petak Toko	0,00	34.215,00
Jumlah		93.913.145,00	52.115.280,00

Jumlah Piutang Retribusi berkurang sebesar Rp421.908.000,00 dibanding tahun sebelumnya akan tetapi Penyisihan Piutang Retribusi bertambah Rp41.797.865,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp52.115.200,00 dibanding tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan menurunnya kualitas piutang atas piutang tahun lalu.

Rincian Penyisihan Piutang Retribusi untuk masing-masing obyek retribusi adalah:

Piutang Retribusi	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar < 1 th	Kurang Lancar 1 - 2 th	Diragukan 2 - 3 th	Macet > 3 th
HO	366.702.175,00	15.856.000,00	281.126.000,00	13.242.000,00	56.478.175,00
IMB	93.881.000,00	80.458.000,00	13.423.000,00	-	-
Perikanan	520.000,00	-	50.000,00	45.000,00	425.000,00
Pariwisata	375.000,00	-	-	-	375.000,00
Industri	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Jumlah	461.528.175,00	96.314.000,00	294.599.000,00	13.287.000,00	57.328.175,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	93.913.145,00	481.570,00	29.459.900,00	6.643.500,00	57.328.175,00



Penjelasan :

- Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO) adalah piutang tahun 2009 – 2017, sehingga terbagi dalam kategori Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Retribusi IMB adalah piutang yang timbul pada tahun 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah piutang tahun 2013 – 2017, sehingga masuk dalam kategori kualitas Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai tahun timbulnya piutang;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah piutang tahun 2009 – 2010, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang Retribusi Izin Usaha Industri adalah piutang tahun 2009, sehingga masuk dalam kualitas Macet;

3. Penyisihan Piutang Lain-lain

Penyisihan piutang lain-lain dikenakan pada selain piutang pajak maupun piutang retribusi. Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp5.300.849.367,74 dan Rp4.649.541.946,54 terdiri dari :

Penyisihan Piutang Lain-lain		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Koperasi BMT	25.000.000,00	25.000.000,00
2	Piutang Permodalan Agribisnis	26.500.000,00	26.500.000,00
3	Bantuan Modal Koperasi	527.700.000,00	566.300.000,00
4	Piutang Petak Toko	15.200.000,00	15.200.000,00
5	Piutang LUEP	580.000.000,00	252.875.000,00
6	Piutang atas Kelebihan Gaji Pegawai	1.122.790,00	1.122.790,00
7	Piutang Denda Pajak	1.306.264.844,00	1.550.421.632,00
8	Piutang BLUD	2.804.555.445,94	2.196.704.472,40
9	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	3.530.388,56	10.971.392,64
10	Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	5.884.180,50	4.446.659,50
11	Piutang Jaminan Uang Muka Pekerjaan	4.831.251,00	0,00
12	Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim	260.467,74	0,00
Jumlah		5.300.849.367,74	4.649.541.946,54

Penjelasan untuk masing-masing obyek Penyisihan Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

a. Penyisihan Piutang Koperasi BMT

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
Puskopyah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
Jumlah	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	25.000.000,00	-	-	-	25.000.000,00

Piutang kepada BMT Puskopyah adalah piutang sejak tahun 2004 yang sampai sekarang belum ada usaha pengembalian piutang, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

b. Penyisihan Piutang Permodalan Agribisnis

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
APPH	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
Jumlah	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	26.500.000,00	-	-	-	26.500.000,00



Piutang kepada APPH pada STA Gombang adalah piutang sejak tahun 2009, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

c. Penyisihan Piutang Bantuan Modal Koperasi

Jatuh Tempo	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2009	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000,00
2011	110.000.000,00	-	-	-	110.000.000,00
2012	110.000.000,00	-	-	-	110.000.000,00
2013	127.700.000,00	-	-	-	127.700.000,00
2014	175.000.000,00	-	-	-	175.000.000,00
Jumlah	527.700.000,00	-	-	-	527.700.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	527.700.000,00	-	-	-	527.700.000,00

Piutang Bantuan Modal Koperasi diberikan dengan masa pengembalian dalam tiga tahun. Dari Saldo piutang tersebut di atas, maka keseluruhan dari piutang masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Piutang Bantuan Modal Koperasi tahun 2017 sebesar Rp527.700.000,00 berkurang sebesar Rp38.600.000,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp566.300.000,00 karena adanya karena adanya realisasi pengembalian pemberian pinjaman selama tahun 2017.

d. Penyisihan Piutang Petak Toko

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
Jumlah	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	15.200.000,00	-	-	-	15.200.000,00

Piutang Petak Toko adalah piutang atas pembangunan Petak Toko yang timbul sejak tahun 2013, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

e. Penyisihan Piutang LUEP

Debitur	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PB Sari Bumi	250.000.000,00	-	-	-	250.000.000,00
PB. Margo Mulyo	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
PB. Sidodadi Muda	150.000.000,00	-	-	-	150.000.000,00
PB. Mekar Jaya	30.000.000,00	-	-	-	30.000.000,00
Jumlah	580.000.000,00	-	-	-	580.000.000,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	580.000.000,00	-	-	-	580.000.000,00

Saldo Penyisihan Piutang LUEP tahun 2017 sebesar Rp580.000.000,00 bertambah sebesar Rp327.125.000,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp252.875,00 karena menurunnya kualitas piutang dari Lancar menjadi Macet.

Pada tahun 2017 terdapat penambahan penyisihan piutang karena penurunan kualitas piutang sebesar Rp328.000.000,00 dan pengurangan penyisihan piutang sebesar Rp875.000,00 karena adanya pelunasan piutang.



Penjelasan :

- Piutang kepada PB. Sari Bumi merupakan pemberian bantuan untuk LUEP yang diberikan pada bulan April 2015 yang sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada realisasi pengembalian, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet;
- Piutang kepada PB. Margo Mulyo, PB. Sidodadi Muda, dan PB. Mekar Jaya adalah pemberian bantuan untuk LUEP yang diberikan pada bulan Mei 2016, sehingga masuk dalam kualitas Macet. Pada tahun 2017 PB Mekar Jaya telah melakukan pengembalian piutang sebesar Rp70.000.000,00 sehingga masih terdapat piutang sebesar Rp30.000.000,00.

f. Penyisihan Piutang Kelebihan Gaji

Nama Pegawai	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
PNS	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
Jumlah	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.122.790,00	-	-	-	1.122.790,00

Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar Rp1.122.790,00 merupakan saldo penyisihan piutang tahun lalu, timbul karena piutang kelebihan pemberian Tunjangan Gaji tahun 2007 – 2013 sehingga masuk dalam kategori Macet.

g. Penyisihan Piutang Denda Pajak

Nama	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
-	1.306.264.844,00	-	-	-	1.306.264.844,00
Jumlah	1.306.264.844,00	-	-	-	1.306.264.844,00
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	1.306.264.844,00	-	-	-	1.306.264.844,00

Saldo Piutang Denda Pajak merupakan saldo tahun 2013 dan 2014, sehingga masuk dalam kategori kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang Denda Pajak tahun 2017 sebesar Rp1.306.264.844,00 berkurang sebesar Rp244.156.788,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp1.550.421.632,00 karena adanya realisasi pendapatan Denda PBB selama tahun 2017.

h. Penyisihan Piutang BLUD

Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain (selain piutang pajak dan retribusi), sehingga perhitungan dapat disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2007	74.355.678,77	-	-	-	74.355.678,77
2008	172.189.951,00	-	-	-	172.189.951,00
2009	365.265.293,46	-	-	-	365.265.293,46
2010	286.076.463,07	-	-	-	286.076.463,07
2011	248.026.790,15	-	-	-	248.026.790,15
2012	186.911.367,35	-	-	-	186.911.367,35
2013	164.971.736,61	-	-	-	164.971.736,61
2014	135.788.870,00	-	-	-	135.788.870,00
2015	193.460.862,00	-	-	-	193.460.862,00
2016	172.504.441,00	-	-	-	172.504.441,00
2017	21.625.847.028,00	14.928.628.705,00	6.628.767.145,00	1.934.087,00	66.517.091,00
Jumlah	23.625.398.481,41	14.928.628.705,00	6.628.767.145,00	1.934.087,00	2.066.068.544,41
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	2.804.555.445,94	74.643.143,53	662.876.714,50	967.043,50	2.066.068.544,41



Piutang BLUD adalah piutang kepada pasien RSUD dr. M. Ashari baik pasien umum, pasien BPJS, maupun dari instansi tertentu. Piutang yang timbul pada tahun 2017 dibagi ke dalam beberapa kategori menurut bulan timbulnya piutang, sedangkan piutang tahun 2007 – 2016 masuk dalam kualitas Macet.

Saldo Penyisihan Piutang BLUD bertambah sebesar Rp607.850.973,54 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp2.196.704.472,40 karena bertambahnya Piutang pada tahun 2017 dan menurunnya kualitas Piutang menjadi Macet untuk piutang tahun 2016.

i. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain (selain piutang pajak dan retribusi), sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2015	706.077.711,00	706.077.711,00	-	-	-
Jumlah	706.077.711,00	706.077.711,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	3.530.388,56	3.530.388,56	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2017 sebesar Rp3.530.388,56 berkurang sebesar Rp7.441.004,09 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp10.971.392,64 karena adanya realisasi penerimaan sebesar Rp1.488.200.817,00 selama tahun 2017 atas Piutang Kurang Bayar Dana Bagi Hasil PBB.

j. Penyisihan Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyisihan Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut :

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bln ST-1	Diragukan 1 bln ST-2	Macet 1 bln ST-3
2017	28.035.000,00	28.035.000,00			
2017	20.027.000,00	20.027.000,00			
2017	16.901.500,00	16.901.500,00			
2017	455.507.900,00	455.507.900,00			
2017	241.562.550,00	241.562.550,00			
2017	12.560.800,00	12.560.800,00			
2017	92.885.000,00	92.885.000,00			
2017	90.616.650,00	90.616.650,00			
2017	218.739.700,00	218.739.700,00			
Jumlah	1.176.836.100,00	1.176.836.100,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	5.884.180,50	5.884.180,50	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2017 sebesar Rp5.884.180,50 bertambah sebesar Rp1.437.521,00 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu terdiri dari pengurangan sebesar Rp4.446.659,50 karena sudah ada realisasi pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dan penambahan sebesar Rp5.884.180,50 karena adanya penambahan Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan.

k. Penyisihan Denda Keterlambatan Pencairan Klaim

Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim termasuk dalam jenis Penyisihan Piutang Lain-lain, sehingga perhitungan disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Tahun	Saldo Piutang per 31 Des 2017	Kualitas Piutang			
		Lancar	Kurang Lancar 1 bin ST-1	Diragukan 1 bin ST-2	Macet 1 bin ST-3
2017	52.093.548,00	52.093.548,00			
Jumlah	52.093.548,00	52.093.548,00	-	-	-
		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Piutang	260.467,74	260.467,74	-	-	-

Saldo Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim tahun 2017 sebesar Rp260.467,74 bertambah sebesar Rp260.467,74 dari saldo penyisihan piutang tahun lalu yaitu adanya penambahan Piutang Denda Keterlambatan Pencairan Klaim karena adanya keterlambatan dari BPJS dalam pencairan klaim biaya pengobatan pasien pada RSUD dr. M. Ashari.



5.5.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum dikonsumsi sehingga menyisakan hak tagih bagi pemerintah daerah. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Asuransi Kendaraan Roda Empat (BPKAD)	86.531.331,25	129.181.203,00
2	Asuransi Alat Berat (BPKAD)	17.341.794,62	21.427.807,93
3	Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter (Dinkes - RSUD)	25.735.180,00	24.901.090,41
4	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (Dinkes)	0,00	40.499.998,00
Jumlah		129.608.305,87	216.010.099,34

1. Asuransi Kendaraan Roda Empat

Pembayaran premi asuransi kendaraan dinas roda empat Tahun 2017 kepada PT. Asuransi Bumiputra Muda 1967 Cabang Purwokerto senilai Rp148.339.425,00 dengan masa pertanggungan 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Juli 2018. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2017 adalah tujuh bulan senilai Rp86.531.331,25.

2. Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment*)

Pembayaran premi asuransi alat berat tahun 2016 kepada PT Asuransi Bumiputra Muda 1967 Cabang Purwokerto senilai Rp34.683.589,23 dengan masa pertanggungan 15 Juli 2017 sampai dengan 15 Juli 2018. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2017 adalah enam bulan senilai Rp17.341.794,62.

3. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter RSUD dr. M Ashari

Pembayaran premi asuransi tanggung gugat profesi dokter tahun 2017 kepada PT. Bumiputera Muda Cabang Semarang senilai Rp187.828.000,00 dengan masa pertanggungan 17 Februari 2017 sampai dengan 17 Februari 2018 sebesar Rp22.487.671,23 dan 1 Juli 2017 sampai dengan 13 Februari 2018 sebesar Rp3.247.508,77. Dengan demikian sisa hak pemerintah daerah terhadap pertanggungan asuransi tersebut per 31 Desember 2017 adalah 48 hari dan 44 hari senilai Rp25.735.180,00.

4. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran

Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Rumah Tunggu Kelahiran oleh Dinas Kesehatan tahun 2017 adalah senilai Rp0,00 karena pembayaran atas sewa rumah tunggu kelahiran berakhir pada 31 Desember 2017.



5.5.1.1.11. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Persediaan		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	ATK	1.669.435.263,00	1.438.878.257,00
2	Alat Listrik	3.560.200,00	69.314.400,00
3	Benda pos	366.000,00	402.000,00
4	Alat dan bahan Kebersihan	246.648.350,00	292.093.700,00
5	Bahan Bakar	10.908.000,00	19.211.600,00
6	Tabung Gas	18.000,00	18.000,00
7	Bahan Cetakan	1.000.558.075,00	962.794.020,00
8	Karcis	174.363.193,00	161.657.400,00
9	Bahan Baku Bangunan	0,00	14.610.000,00
10	Bahan Bibit ternak	1.260.000,00	1.260.000,00
11	Bahan Obat-obatan	19.747.429.675,29	17.459.888.120,00
12	Bahan Kimia	2.504.777.747,00	795.192.548,00
13	Makan Pokok	39.318.077,00	40.294.723,00
14	Persediaan yang akan di serahkan ke pihak lain	7.088.279.743,44	7.537.582.553,44
15	Barang Pameran	34.105.000,00	11.600.000,00
Jumlah		32.521.027.323,73	28.804.797.321,44

- Saldo Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) adalah pengadaan TA 2017 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, belum terpakai habis masing-masing sebesar Rp1.669.435.263,00 dan Rp1.438.878.257,00. Pengadaan ATK tersebut oleh masing-masing Satker dilakukan melalui Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	PERSEDIAAN ATK	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DINDIKBUD	140.244.447,00	550.356.900,00
2	DINKES	585.694.706,00	445.159.753,00
3	DPU TR	10.298.460,00	227.631.130,00
4	DISPERKIM	2.185.000,00	0,00
5	SATPOL PP	271.100,00	139.000,00
6	DISNAKER	4.856.400,00	3.172.850,00
7	DLH	0,00	650.000,00
8	DISDUKCATPIL	845.297.000,00	7.599.500,00
9	DINPERMASDES	553.000,00	0,00
10	DISHUB	2.363.000,00	0,00
11	DISKOMINFO	6.922.500,00	3.371.500,00
12	DISKOPERINDAG	824.450,00	1.609.450,00
13	DPMPTSP	4.353.500,00	3.482.800,00
14	DINPUSARDA	1.644.500,00	1.556.800,00
15	DISPERIK	1.742.000,00	6.265.500,00
16	DISPARPORA	3.746.000,00	2.495.500,00
17	DIPERTAN	7.277.000,00	9.340.300,00
18	BAPPEDA	697.000,00	3.903.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	PERSEDIAAN ATK	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
19	BAPENDA	900.000,00	128.975.000,00
20	BPKAD	21.694.500,00	22.946.904,00
21	BKD	1.054.000,00	1.763.000,00
22	INSPEKTORAT	6.084.000,00	4.194.500,00
23	SETWAN	4.571.500,00	3.465.570,00
24	SETDA	7.329.500,00	3.228.200,00
25	BPBD	325.000,00	0,00
26	KESBANGPOLINMAS	5.488.000,00	6.142.800,00
27	KEC. PULOSARI	270.000,00	0,00
28	KEC. PEMALANG	1.497.150,00	858.000,00
29	KEC. TAMAN	766.550,00	170.000,00
30	KEC. PETARUKAN	100.000,00	100.000,00
31	KEC. COMAL	385.000,00	300.000,00
	JUMLAH	1.669.435.263,00	1.438.878.257,00

2. Saldo persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp3.560.200,00 dan Rp69.314.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan Alat Listrik		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	SEKRETARIAT DPRD	1.329.200,00	0,00
2	BAPPEDA	1.014.000,00	1.565.000,00
3	DINPUSARDA	625.000,00	1.711.000,00
4	DPU TR	0,00	65.054.400,00
5	SEKRETARIAT DPRD	0,00	269.500,00
6	DISPARPORA	367.000,00	714.500,00
7	BAPPENDA	225.000,00	0,00
	Jumlah	3.560.200,00	69.314.400,00

3. Saldo persediaan Benda Pos per 31 Desember 2017 sebesar Rp366.000,00 dan 2016 sebesar Rp402.000,00. Pada Tahun 2017 sebesar Rp366.000,00 terdiri dari SKPD Dinas Perhubungan sebesar Rp210.000,00 dan Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga sebesar Rp156.000,00.
4. Saldo persediaan Alat dan bahan kebersihan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp246.648.350,00 dan Rp292.093.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan alat dan bahan kebersihan di		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DINPUSARDA	329.300,00	1.131.000,00
2	DINAS KESEHATAN	239.607.500,00	286.169.250,00
3	SEKRATRIAT DPRD	5.381.300,00	1.165.175,00
4	DISPARPORA	776.000,00	834.000,00
5	KECAMATAN PEMALANG	25.000,00	83.500,00
6	BAPPEDA	529.250,00	2.410.775,00
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	300.000,00
	Jumlah	246.648.350,00	292.093.700,00

5. Saldo persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp10.908.000 dan Rp19.211.600,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



6. Saldo persediaan Bahan isi tabung gas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp18.000,00 dan Rp18.000,00 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
7. Rincian saldo persediaan barang cetakan yang belum terpakai di SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.000.558.075,00 dan Rp962.794.020,00 sebagai berikut :

No	SKPD	Persediaan Barang Cetakan	
		2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	SEKRETARIAT DAERAH	1.130.000,00	3.925.000,00
2	DINAS KESEHATAN	786.646.625,00	669.724.380,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	87.734.050,00	74.484.590,00
4	DISPARPORA	0,00	10.120.000,00
5	BAPPENDA	6.500.000,00	169.600.000,00
6	BPKAD	1.212.500,00	7.487.500,00
7	DISDUKCATPIL	112.862.800,00	11.426.250,00
8	INSPEKTORAT	2.722.100,00	2.381.300,00
9	BKD	520.000,00	0,00
10	RSUD Dr. M. Ashari	0,00	13.527.500,00
11	KECAMATAN PEMALANG	765.000,00	117.500,00
12	DISPERKIM	465.000,00	0,00
Jumlah		1.000.558.075,00	962.794.020,00

8. Rincian saldo persediaan barang karcis yang belum terpakai di SKPD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp174.363.193,00 dan Rp161.657.400,00 sebagai berikut :

No	SKPD	Persediaan Karcis	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DISKOPERINDAG	88.664.193,00	85.068.750,00
2	DINAS PERTANIAAN	408.000,00	612.000,00
3	DINAS PERIKANAN	53.400.000,00	16.478.900,00
4	DISPARPORA	31.891.000,00	59.497.750,00
Jumlah		174.363.193,00	161.657.400,00

9. Saldo persediaan Bahan Baku Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00 dan 2016 sebesar Rp14.610.000,00.
10. Saldo persediaan Bibit ternak per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.260.000,00 dan Rp1.260.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan.
11. Saldo persediaan Obat-obatan dan peralatan kesehatan pakai habis per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp19.747.429.675,29 dan Rp17.459.888.120,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Persediaan Obat-obatan dan Peralatan Kesehatan Pakai Habis	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DINAS KESEHATAN	18.045.069.897,29	15.256.852.083,00
2	DINAS PERTANIAN	447.143.660,00	354.714.575,00
3	BKD	2.137.500,00	8.746.372,00
4	DINSOSKBPP	1.252.631.618,00	1.838.858.090,00
5	DISPARPORA	447.000,00	717.000,00
Jumlah		19.747.429.675,29	17.459.888.120,00



- Saldo persediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan pakai habis di Dinas Kesehatan sebesar Rp18.045.069.897,29 saldo ini sudah dikurangi persediaan obat sebesar Rp58.534.374,00 berupa obat yang sudah kadaluarsa pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan rincian pada Instalasi farmasi ada 8 jenis obat sebesar Rp13.202.726,00 dan 21 Puskesmas sebesar Rp45.331.648,00.
12. Saldo persediaan Bahan Kimia per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp2.504.777.747,00 dan Rp795.192.548,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Persediaan Bahan Kimia	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	1.785.000,00
2	DINAS KESEHATAN	2.134.440.747,00	568.166.548,00
3	DISPARPORA	370.337.000,00	225.241.000,00
Jumlah		2.504.777.747,00	795.192.548,00

13. Saldo persediaan Makanan Pokok per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp39.318.077,00 dan Rp40.294.723,00 persediaan per 31 Desember 2017 berupa makanan untuk pasien pada RSUD dr. M. Ashari.
14. Saldo persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.088.279.743,44 dan Rp7.537.582.553,44 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	Persediaan yang akan Diserahkan ke Pihak Lain	
		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	DINDIKBUD	752.152.200,00	942.144.600,00
2	DPU PR	4.313.834.133,00	5.480.803.543,00
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	176.297.410,44	176.297.410,44
4	KECAMATAN WARUNGPRING	0,00	791.348.000,00
5	DISKOMINFO	0,00	87.589.000,00
6	DINSOS KBPP	0,00	59.400.000,00
7	DISPERKIM	1.845.996.000,00	0,00
Jumlah		7.088.279.743,44	7.537.582.553,44

- Saldo persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain di Dindikbud sebesar Rp752.162.200,00 yang belum diserahkan ke pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat peraga bidang IPA dasar yang dihibahkan ke sekolah swasta (SMP/SMTs)	0,00	19.930.000,00
2	Belanja modal Perlalatan dan mesin pengadaan alat peraga bidang studi IPA menengah dasar yang dihibahkan ke sekolah swasta (SMA/SMK)	0,00	112.048.400,00
3	Belanja modal aset tetap lainnya a pengadaan buku ilmu pengetahuan umum ke SMAN/SMKN swasta	0,00	200.014.000,00
4	Belanja Modal aset tetap lainnya a pengadaan buku ilmu pengetahuan umum ke Taman bacaan masyarakat	0,00	10.000.000,00
5	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat TA 2016	600.152.200,00	600.152.200,00
6	Belanja Hibah kepada kelompok masyarakat TA 2017 gedung untuk SMP Satya Praja 2 Pemalang	152.000.000,00	0,00
Jumlah		752.152.200,00	942.144.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



- Saldo persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain di DPU sebesar Rp4.313.834.133,00 yang belum diserahkan ke pihak lain per 31 Desember 2017 yang akan diberikan kepada masyarakat berupa:

No	Keterangan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Islamic Center(2015)	1.724.053.000,00	1.724.053.000,00
2	Aspal TA 2015	0,00	722.260.000,00
3	Rehabilitasi Polsek Moga (Belanja Hibah 2016)	218.975.000,00	218.975.000,00
4	Islamic Center (Belanja Hibah 2016)	969.519.543,00	969.519.543,00
5	Pembangunan Jaringan Listrik (Belanja Hibah 2016)	0,00	1.845.996.000,00
6	Perencanaan finising islamic center (Belanja Hibah 2017)	39.897.000,00	0,00
7	Belanja penunjang hibah islamic centre dan masjid agung (Belanja Hibah 2017)	22.879.500,00	0,00
8	Pembuatan UKL/UPL masjid agung (Belanja Hibah 2017)	49.387.000,00	0,00
9	Pengembangan sarana air bersih desa banjarulya kec. Pemalang (Belanja Hibah 2017)	199.800.000,00	0,00
10	Pembangunan sarana air bersih desa gunungjaya kec belik (Belanja Hibah 2017)	199.883.000,00	0,00
11	Pembangunan sarana air bersih desa Badak kec belik (Belanja Hibah 2017)	199.850.000,00	0,00
12	Pembangunan sarana air bersih desa Bulak kec belik (Belanja Hibah 2017)	199.854.000,00	0,00
13	Pembangunan sarana air bersih desa Kalisaleh kec belik (Belanja Hibah 2017)	199.825.000,00	0,00
14	Pembangunan sarana air bersih desa Pabuaran kec Bantarbolang (Belanja Hibah 2017)	199.846.000,00	0,00
15	Pengawasan pembangunan sarana dan prasarana air bersih (Belanja Hibah 2017)	29.898.000,00	0,00
16	Belanja penunjang hibah air bersih (Belanja Hibah 2017)	56.217.090,00	0,00
17	Belanja penunjang kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Belanja Hibah 2017)	3.950.000,00	0,00
Jumlah		4.313.834.133,00	5.480.803.543,00

- Saldo persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain di KLH sebesar Rp176.297.410,44 yang belum diserahkan ke pihak lain per 31 Desember 2017 berupa Taman Gandulan diperoleh pada tahun 2014 dari belanja hibah sebesar Rp154.875.000,00 dan koreksi inspektorat kurang catat gedung bangunan pihak ketiga sebesar Rp21.422.410,44.
 - Saldo awal persediaan yang akan diserahkan ke pihak lain di Disperkim sebesar Rp1.845.996.000,00 berupa pembangunan jaringan listrik dari belanja hibah tahun 2016 yang belum di serahkan ke pihak lain.
15. Saldo persediaan Barang Pameran per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp11.600.000,00 dan Rp11.600.000,00 perolehan TA 2015 berupa barang pameran milik Diskoperindagkop.



5.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh nilai ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut :

Investasi Jangka Panjang		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	13.110.000,00	13.110.000,00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	202.855.873.340,65	179.063.446.883,72
Jumlah		202.868.983.340,65	179.076.556.883,72

5.5.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

5.5.1.2.1.1. Investasi Non Permanen Lainnya

Saldo investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2017 sama dengan tahun lalu, yaitu sebesar Rp13.110.000,00 adalah investasi yang terdapat pada Dispartan. Terdiri dari 23 ekor ternak kambing. Tidak terdapat perubahan.

5.5.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

5.5.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp202.855.873.340,65 dan Rp179.063.446.883,72 dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Permanen		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	PT. Bank Jateng	61.138.000.000,00	61.138.000.000,00
2	Perusahaan Daerah	141.212.673.340,65	117.420.246.883,72
3	PT. PRPP Jawa Tengah	505.200.000,00	505.200.000,00
Jumlah		202.855.873.340,65	179.063.446.883,72

- 1) Penyertaan Modal pada PT Bank Jateng tahun 2017 tidak ada penambahan. Berdasarkan metode *cost* penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada PT. Bank Jateng sampai dengan tahun 2017 adalah sama dengan tahun lalu yaitu sebesar Rp61.138.000.000,00.
- 2) Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan berdasarkan metode ekuitas masing-masing sebesar Rp141.212.673.340,65 dan Rp 117.420.246.883,72 dengan perincian sebagai berikut :



Perusahaan Daerah		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	PDAM Pemalang	106.028.134.176,00	76.343.919.687,00
2	PD. BKK Pemalang	1.145.833.190,63	7.456.831.847,78
3	PD. BPR BKK Taman	11.886.168.616,02	11.402.341.692,94
4	PD Bank Pasar/Bank Pemalang	12.861.533.766,00	12.516.197.943,00
5	PD Aneka Usaha	9.291.003.592,00	9.700.955.713,00
Jumlah		141.212.673.340,65	117.420.246.883,72

Perusahaan-perusahaan Daerah yang komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Pemalang di atas 20% dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah kebijakan pengelolaannya metode penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas. Perusahaan-perusahaan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

i. Investasi Permanen pada PDAM Tirta Mulia

Perkembangan nilai investasi pada PDAM Tirta Mulia dengan kepemilikan saham 100% selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	76.343.919.687,00
Dikurangi : Penerimaan deviden pada TA 2017		(3.646.839.356,00)
Ditambah :		
- Penambahan penyertaan modal TA 2017		30.000.000.000,00
- Bagian laba tahun 2017 = 100% x Rp3.331.053.845,00		3.331.053.845,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	106.028.134.176,00

ii. Investasi Permanen pada PD. BKK Pemalang

Uraian	Modal yang disetor (Rp)	%
Pemprov Jawa Tengah	3.190.000.000,00	24,56
Pemkab Pemalang	9.800.000.000,00	75,44
Jumlah	12.990.000.000,00	100,00

Perkembangan nilai investasi pada PD. BKK Pemalang selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	7.456.831.847,78
Dikurangi : Penerimaan deviden pada TA 2017		-
Ditambah :		
- Penambahan penyertaan modal TA 2017		-
- Bagian laba/rugi tahun 2017 = 75,44% x (Rp8.365.293.118)		(6.310.998.657,15)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	1.145.833.190,63

iii. Investasi Permanen pada PD. BPR BKK Taman

Uraian	Modal yang disetor (Rp)	%
Pemprov Jawa Tengah	7.650.000.000,00	51,00
Pemkab Pemalang	7.350.000.000,00	49,00
Jumlah	15.000.000.000,00	100,00

Perkembangan nilai investasi pada PD. BPR BKK Taman selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Saldo per 31 Desember 2016	Rp	11.402.341.692,94
Dikurangi : Penerimaan deviden pada TA 2017		(999.552.695,00)
Ditambah :		
- Penambahan penyertaan modal TA 2017		-
- Bagian laba tahun 2017 = 49,00% x Rp3.027.305.343,02		1.483.379.618,08
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	11.886.168.616,02

iv. Investasi Permanen pada PD. BPR Bank Pemalang (Bank Pasar)

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PD. BPR Bank Pemalang (Bank Pasar) sebesar 100% dan perkembangan nilai investasi pada PD. BPR Bank Pemalang (Bank Pasar) selama Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	12.516.197.943,00
Dikurangi : Penerimaan deviden pada TA 2017		(335.910.849,00)
Ditambah :		
- Penambahan penyertaan modal TA 2017		-
- Bagian laba tahun 2017 = 100% x Rp681.246.672,00		681.246.672,00
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	12.861.533.766,00

v. Investasi Permanen pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Pemalang

Kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Pemalang pada PD. Aneka Usaha sebesar 100% dan perkembangan nilai investasi pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) selama tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	Rp	9.700.955.713,00
Dikurangi : Penerimaan deviden pada TA 2017		0,00
Ditambah :		
- Penambahan penyertaan modal TA 2017		1.000.000.000,00
- Bagian laba tahun 2017 = 100% x (Rp1.409.952.121,00)		(1.409.952.121,00)
Saldo per 31 Desember 2017	Rp	9.291.003.592,00

- 3) Investasi Permanen pada PT PRPP Jawa Tengah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah tetap yaitu sebesar Rp505.200.000,00. Dasar hukum penyertaan modal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 09 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (PT. PRPP).

Perhitungan nilai Investasi Permanen untuk seluruh BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Investasi pada BUMD	Saldo Investasi per 31 Des 2016 (Rp)	Pengurangan	Penambahan		Saldo Investasi per 31 Des 2017 (Rp)
		Penerimaan Deviden (Rp)	Penyertaan Modal (Rp)	Bagian Laba tahun 2017 (Rp)	
1 PDAM Tirta Mulia (Audited)	76.343.919.687,00	3.646.839.356,00	30.000.000.000,00	3.331.053.845,00	106.028.134.176,00
2 PD. BPR BKK Taman (Audited)	11.402.341.692,94	999.552.695,00	0,00	1.483.379.618,08	11.886.168.616,02
3 PD. BKK Pemalang (Audited)	7.456.831.847,78	0,00	0,00	(6.310.998.657,15)	1.145.833.190,63
4 PD. BPR Bank Pemalang/ Bank Pasar (Audited)	12.516.197.943,00	335.910.849,00	0,00	681.246.672,00	12.861.533.766,00
5 PD. Aneka Usaha (Audited)	9.700.955.713,00	0,00	1.000.000.000,00	(1.409.952.121,00)	9.291.003.592,00
6 Bank Jateng	61.138.000.000,00	0,00	0,00	10.488.975.757,00	61.138.000.000,00
7 PT. PRPP Jateng	505.200.000,00	0,00	0,00	0,00	505.200.000,00
Cost vs Ekuitas	179.063.446.883,72	4.982.302.900,00	31.000.000.000,00	8.263.705.113,93	202.855.873.340,65



5.5.1.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016, tersaji sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2017	Saldo per 31 Desember 2016	Tambah/Kurang
1	Tanah	1.001.267.480.885,00	985.525.971.671,00	15.741.509.214,00
2	Peralatan Mesin	405.749.453.963,00	351.664.214.435,00	54.085.239.528,00
3	Gedung Bangunan	1.110.002.743.254,00	987.056.554.385,00	122.946.188.869,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	797.795.196.188,00	678.004.030.171,00	119.791.166.017,00
5	AT-Lainnya	81.172.202.063,00	60.597.563.813,00	20.574.638.250,00
6	Konstruksi Dlm Pengerjaan	43.151.327.311,00	54.279.445.114,00	(11.128.117.803,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(955.956.236.271,00)	(847.148.406.671,00)	(108.807.829.600,00)
Jumlah		2.483.182.167.393,00	2.269.979.372.918,00	213.202.794.475,00

Nilai bersih aset per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.483.182.167.393,00 terdiri Nilai Perolehan Aset sebesar Rp3.439.138.403.664,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp955.956.236.271,00. Terjadi Penambahan Nilai Aset Tetap pada tahun 2017 sebesar Rp213.202.794.475,00 atau 9,39% dibandingkan tahun lalu adalah berupa penambahan Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap masing-masing sebesar Rp322.010.624.075,00 dan Rp108.807.829.600,00. Penambahan Aset Tetap diperoleh dari Realisasi Belanja Modal TA. 2017 sebesar Rp336.088.968.940,00 dan penambahan sebesar Rp548.600.485.903,00 berupa mutasi masuk karena Perubahan SKPD, kapitalisasi non belanja modal/reklas sesama Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Persediaan, mutasi masuk antar SKPD, koreksi pencatatan aset dan hibah, serta pengurangan sebesar Rp562.678.830.768,00 berupa pengurangan mutasi keluar karena Perubahan SKPD, reklas sesama Aset Tetap, diserahkan ke pihak lain/hibah, tidak memenuhi kapitalisasi, mutasi keluar antar SKPD, koreksi pencatatan aset, penghapusan dan reklas menjadi Aset Lainnya/Persediaan.

No		So Per 31 Des 2016	Mutasi (Rp)		So Per 31 Des 2017
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	985.525.971.671,00	234.255.422.175,00	218.513.912.961,00	1.001.267.480.885,00
2	Peralatan Mesin	351.664.214.435,00	194.625.814.358,00	140.540.574.830,00	405.749.453.963,00
3	Gedung Bangunan	987.056.554.385,00	250.870.065.070,00	127.923.876.201,00	1.110.002.743.254,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	678.004.030.171,00	142.687.231.335,00	22.896.065.318,00	797.795.196.188,00
5	Aset Tetap Lainnya	60.597.563.813,00	28.914.783.770,00	8.340.145.520,00	81.172.202.063,00
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	54.279.445.114,00	33.336.138.135,00	44.464.255.938,00	43.151.327.311,00
7	Akumulasi Penyusutan	(847.148.406.671,00)	(198.274.089.153,00)	(89.466.259.553,00)	(955.956.236.271,00)
Jumlah		2.269.979.372.918,00	686.415.365.690,00	473.212.571.215,00	2.483.182.167.393,00

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 terbentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) baru. Dengan terbentuknya SKPD baru tersebut, terjadi mutasi atas akun-akun riil pada neraca antar SKPD, diantaranya adalah mutasi aset tetap. Dengan adanya mutasi aset antar SKPD maka akan diperoleh data saldo per 31 Desember 2016 atas SKPD lama dan saldo per 3 Januari 2017 yang merupakan saldo awal atas SKPD baru untuk tahun berjalan 2017.

Pemetaan SKPD lama dan baru dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu :

- SKPD baru merupakan kelanjutan dari SKPD lama dengan nomenklatur yang baru karena sebagai SKPD induk atas SKPD lama. Untuk SKPD-SKPD ini, saldo awal pada 3 Januari 2017 merupakan kelanjutan dari saldo 31 Desember 2016 ditambah/dikurang mutasi masuk dan keluar. SKPD tersebut terdiri dari :



No	SKPD lama	SKPD baru
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud)
2	Dinas Pekerjaan Umum (DPU)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TR)
3	Saluan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Saluan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
4	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas KB)	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos KBPP)
5	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans)	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
6	Kantor Lingkungan Hidup (KLH)	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil)
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)	Dinas Perhubungan (Dishub)
9	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag)	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag)
10	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
11	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (K-Perpusarda)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dinpusarda)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	Dinas Perikanan (Disperik)
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora)
14	Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertanhut)	Dinas Pertanian (Dispertan)
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
17	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
18	Inspektorat	Inspektorat
19	Sekretariat DPRD (Setwan)	Sekretariat DPRD (Setwan)
20	Sekretariat Daerah (Setda)	Sekretariat Daerah (Setda)
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
22	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas)	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas)
23	Kecamatan Moga	Kecamatan Moga
24	Kecamatan Pulosari	Kecamatan Pulosari
25	Kecamatan Belik	Kecamatan Belik
26	Kecamatan Watukumpul	Kecamatan Watukumpul
27	Kecamatan Bodeh	Kecamatan Bodeh
28	Kecamatan Bantarbolang	Kecamatan Bantarbolang
29	Kecamatan Randudongkal	Kecamatan Randudongkal
30	Kecamatan Ampelgading	Kecamatan Ampelgading
31	Kecamatan Ulujami	Kecamatan Ulujami
32	Kecamatan Warungpring	Kecamatan Warungpring

- SKPD baru merupakan pecahan dari SKPD lama/induknya, sehingga saldo awal pada 3 Januari 2017 merupakan saldo baru setelah mendapat mutasi dari SKPD induknya atau SKPD lain, sedangkan saldo 31 Desember 2016 adalah nol. SKPD tersebut terdiri dari :

No	SKPD baru	Keterangan
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim)	pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinpermades)	pecahan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (Bapermas KB)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)	pecahan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda)	pecahan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- SKPD lama menjadi bagian dari SKPD baru, sehingga saldo awal SKPD baru pada 3 Januari 2017 merupakan saldo gabungan dari SKPD induk dan SKPD lama yang menjadi bagiannya. SKPD tersebut terdiri dari :

No	SKPD lama	SKPD baru
1	Dinas Kesehatan (Dinkes)	Dinas Kesehatan (Dinkes), seluruh saldo RSUD dimutasi ke Dinkes
2	RSUD dr. M. Ashar (RSUD)	
3	Kecamatan Pemalang	
4	Kelurahan Kebondalem	
5	Kelurahan Pelutan	
6	Kelurahan Sugihwaras	
7	Kelurahan Mulyoharjo	
8	Kelurahan Bojongbata	
9	Kelurahan Paduraksa	
10	Kelurahan Widuri	



No	SKPD lama	SKPD baru
11	Kecamatan Taman	Kecamatan Taman, seluruh saldo dari 2 kelurahan tersebut dimutasi ke Kecamatan Taman
12	Kelurahan Wanarejan Selatan	
13	Kelurahan Beji	
14	Kecamatan Petarukan	Kecamatan Petarukan, seluruh saldo Kelurahan Petarukan dimutasi ke Kecamatan Petarukan
15	Kelurahan Petarukan	
16	Kecamatan Comal	Kecamatan Comal, seluruh saldo dari Kelurahan Purwoharjo dimutasi ke Kecamatan Comal
17	Kelurahan Purwoharjo	

- SKPD lama dihapuskan, aset dimutasi ke beberapa SKPD, sehingga saldo 3 Januari 2017 menjadi nol. SKPD tersebut adalah Kantor Ketahanan Pangan (KKP) dimana aset dimutasi ke Dispersan dan Dinpermasdes.

Selain mutasi aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap juga dimutasi sesuai dengan perpindahan aset tetapnya.

Jumlah aset tetap pada SKPD dapat mengalami perubahan namun untuk laporan konsolidasian pemda tidak mengalami perubahan baik saldo per 31 Desember 2016 maupun saldo per 3 Januari 2017.

No	SKPD lama	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 3 Januari 2017
			Masuk	Keluar	
1	Tanah	985.525.971.671,00	212.988.732.421,00	212.988.732.421,00	985.525.971.671,00
2	Peralatan dan Mesin	351.664.214.435,00	116.972.365.315,00	116.972.365.315,00	351.664.214.435,00
3	Gedung dan Bangunan	987.056.554.385,00	66.980.428.081,00	66.980.428.081,00	987.056.554.385,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	678.004.030.171,00	9.394.991.025,00	9.394.991.025,00	678.004.030.171,00
5	Aset Tetap Lainnya	60.597.563.813,00	232.914.280,00	232.914.280,00	60.597.563.813,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.279.445.114,00	3.711.610.700,00	3.711.610.700,00	54.279.445.114,00
7	Akumulasi Penyusutan	(847.148.406.671,00)	(79.138.854.487,00)	(79.138.854.487,00)	(847.148.406.671,00)
		2.269.979.372.918,00	331.142.187.335,00	331.142.187.335,00	2.269.979.372.918,00

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.439.138.403.664,00. Nilai tersebut sudah termasuk aset yang bersumber dari Dana BOS 2013 – 2017 dan nilai aset yang berkurang karena direklasifikasi menjadi Aset Lainnya. Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap sebesar Rp322.010.624.075,00 atau 10,33%. Realisasi Belanja Modal TA. 2017 sebesar Rp336.088.968.940,00, terdapat perbedaan sebesar Rp14.078.344.865,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp548.600.485.903,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp562.678.830.768,00.

Mutasi Penambahan sebesar Rp548.600.485.903,00 terdiri dari :

- Mutasi Masuk karena Perubahan SKPD pada tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp410.281.041.822,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal, Reklas dari sesama Aset Tetap, Reklas dari Aset Lainnya, dan Reklas dari Persediaan sebesar Rp102.271.945.537,00 terdiri dari:
 - Kapitalisasi dari Belanja Non Modal sebesar Rp631.411.975,00 berupa kapitalisasi dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa;
 - Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp95.960.114.562,00;
 - Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp5.632.769.000,00;
 - Reklas dari Persediaan sebesar Rp47.650.000,00;
- Mutasi Masuk antar SKPD di lingkungan Pemda sebesar Rp23.070.778.309,00;
- Koreksi Pencatatan/Penilaian Aset/Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp12.976.720.235,00 terdiri dari :
 - Koreksi nilai aset atas salah pencatatan/kurang saji pada tahun sebelumnya dan pencatatan atas progres pekerjaan berupa KDP sebesar Rp1.167.888.003,00;
 - Hibah dari luar pemerintah daerah sebesar Rp11.808.832.232,00.



Mutasi Pengurangan sebesar Rp563.551.504.060,00 terdiri dari:

- Mutasi Keluar karena Perubahan SKPD pada tanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp410.281.041.822,00;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp95.960.114.562,00;
- Tidak memenuhi kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp11.926.031.705,00;
- Mutasi Keluar antar SKPD di lingkungan Pemda sebesar Rp23.070.778.309,00;
- Koreksi pencatatan aset sebesar Rp1.350.000.200,00;
- Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp8.975.044.779,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp11.988.492.683,00 berupa reklas ke Aset Lain-lain karena Barang Rusak Berat serta Aset yang Tidak Ditemukan hasil verifikasi Inspektorat. Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan terdiri dari :
 - Reklas ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp15.415.000,00;
 - Reklas ke Aset Lainnya karena Barang Rusak Berat, Tidak Ditemukan, Barang akan diserahkan ke pihak ketiga, dan sudah tidak sesuai lagi sebesar Rp11.973.077.683,00;

Ringkasan penambahan Aset Tetap tahun 2017 :

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	410.281.041.822,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	410.281.041.822,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	23.070.778.309,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	23.070.778.309,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	102.271.945.537,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	12.976.720.235,00
	115.248.665.772,00
Kurang :	
- Reklas Aset	95.960.114.562,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	11.053.358.413,00
- Koreksi Pencatatan Aset	1.350.000.200,00
- Penghapusan	8.975.044.779,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	11.988.492.683,00
	129.327.010.637,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	(14.078.344.865,00)
Belanja Modal	336.088.968.940,00
Penambahan Aset Tetap TA. 2017	322.010.624.075,00



Saldo konsolidasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

No	SKPD	Aset Tetap						Jumlah
		Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
1	Dindikbud	106.220.176.494,00	73.867.039.239,00	620.783.234.287,00	3.145.533.276,00	78.021.130.282,00	1.581.500.676,00	883.618.614.254,00
2	Dinkes	63.476.473.960,00	152.139.819.718,00	125.835.204.881,00	7.416.311.483,00	180.579.980,00	4.193.601.326,00	353.241.991.348,00
3	DPU TP	408.630.625.000,00	18.390.317.433,00	11.172.031.054,00	744.131.991.861,00	192.950.010,00	20.507.232.890,00	1.203.025.148.248,00
4	Disperkim	17.631.523.800,00	2.509.188.121,00	31.796.446.706,00	21.209.673.500,00	3.866.000,00	3.223.446.000,00	76.374.144.127,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	3.711.838.899,00	444.985.000,00	-	180.960.000,00	-	5.230.283.899,00
6	Dinsos KBPP	1.254.000.000,00	7.774.418.637,00	3.062.656.000,00	72.806.000,00	7.255.000,00	101.042.000,00	12.272.177.637,00
7	Disnaker	3.570.800.000,00	4.065.872.498,00	5.078.599.000,00	197.657.800,00	8.647.500,00	-	12.921.576.798,00
8	DLH	7.245.185.000,00	13.106.060.996,00	4.017.577.896,00	6.511.548.425,00	10.646.500,00	-	30.891.018.817,00
9	Disdukcapil	1.963.000.000,00	6.418.757.877,00	1.747.186.586,00	319.977.750,00	20.711.690,00	49.877.000,00	10.519.510.903,00
10	Dinpermasdes	806.400.000,00	2.972.503.218,00	1.574.730.646,00	2.400.000,00	-	-	5.356.033.864,00
11	Dishub	5.990.175.450,00	4.419.259.592,00	19.159.569.664,00	3.029.861.000,00	2.271.900,00	100.765.000,00	32.701.902.606,00
12	Diskominfo	-	9.699.982.946,00	2.382.992.800,00	19.459.000,00	-	-	12.102.434.746,00
13	Diskoperindag	63.824.879.850,00	4.733.387.838,00	123.917.215.818,00	631.634.750,00	17.138.700,00	3.611.212.000,00	196.735.468.956,00
14	DPMPTSP	1.143.000.000,00	1.982.589.422,00	1.828.800.333,00	31.094.650,00	19.302.500,00	-	5.004.786.905,00
15	Dinpusarda	1.810.500.000,00	2.112.493.657,00	733.057.000,00	20.567.390,00	1.085.278.540,00	44.000.000,00	5.805.896.587,00
16	Disperik	4.688.606.000,00	4.466.832.149,00	9.282.673.294,00	1.335.310.153,00	17.353.000,00	74.850.000,00	19.865.624.596,00
17	Disparpora	35.328.893.450,00	5.908.259.804,00	61.834.603.873,00	6.438.840.900,00	66.687.500,00	9.655.450.419,00	119.232.735.946,00
18	Disperta	25.867.488.000,00	6.283.983.815,00	18.529.437.728,00	1.506.876.500,00	35.477.480,00	-	52.223.263.523,00
19	Bappeda	2.604.000.000,00	4.440.638.222,00	1.739.990.000,00	101.320.700,00	93.430.900,00	-	8.979.379.822,00
20	Bapenda	1.575.000.000,00	3.930.638.368,00	334.204.000,00	74.168.100,00	-	-	5.914.010.468,00
21	BPKAD	61.518.600.800,00	14.790.943.178,00	9.423.818.010,00	240.405.000,00	61.483.600,00	-	86.035.250.588,00
22	BKD	-	3.706.777.011,00	1.624.198.431,00	37.719.000,00	20.525.000,00	-	5.389.219.442,00
23	Inspektorat	3.809.000.000,00	2.630.008.274,00	976.388.530,00	-	9.451.000,00	-	7.424.847.804,00
24	Setwan	5.032.500.000,00	13.041.327.598,00	3.798.739.893,00	294.856.125,00	381.297.590,00	-	22.548.721.206,00
25	Setda	3.980.326.000,00	22.295.244.896,00	22.590.983.000,00	569.958.500,00	602.155.591,00	-	50.038.667.987,00
26	BPBD	5.002.510.000,00	2.245.576.756,00	980.000.000,00	-	1.869.300,00	-	8.229.956.056,00
27	K-Kesbangpolinmas	-	851.048.550,00	-	3.500.000,00	4.200.000,00	-	858.748.550,00
28	Kec. Moga	2.712.750.000,00	747.819.249,00	819.168.900,00	2.000.000,00	107.500,00	-	4.281.845.649,00
29	Kec. Pulosari	113.100.000,00	795.486.699,00	1.361.015.000,00	7.000.000,00	-	-	2.276.601.699,00
30	Kec. Belik	673.750.000,00	814.026.207,00	1.071.335.400,00	2.000.000,00	10.000,00	-	2.561.121.607,00
31	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	759.225.699,00	1.572.026.300,00	3.000.000,00	30.000,00	-	2.417.881.999,00
32	Kec. Bodeh	292.400.000,00	673.674.724,00	736.095.249,00	-	6.030.000,00	-	1.708.199.973,00
33	Kec. Bantarbolang	-	759.713.699,00	809.008.000,00	500.000,00	-	-	1.569.221.699,00
34	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	711.923.699,00	1.251.481.400,00	3.000.000,00	65.000,00	-	2.666.470.099,00
35	Kec. Pemalang	133.946.469.600,00	2.353.504.971,00	6.381.235.675,00	414.574.325,00	60.014.250,00	-	143.155.798.821,00
36	Kec Taman	10.740.893.000,00	1.276.239.043,00	1.672.283.900,00	6.200.000,00	20.557.500,00	-	13.716.173.443,00
37	Kec. Petarukan	7.162.650.621,00	1.023.856.599,00	1.689.909.000,00	1.500.000,00	38.455.250,00	-	9.916.371.470,00
38	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	835.988.999,00	884.838.500,00	3.000.000,00	650.000,00	-	1.946.977.499,00
39	Kec. Comal	9.836.703.860,00	1.033.293.099,00	5.353.099.500,00	3.500.000,00	1.480.000,00	-	16.228.076.459,00
40	Kec. Ulujami	694.000.000,00	816.324.315,00	769.210.000,00	2.000.000,00	35.000,00	8.350.000,00	2.289.919.315,00
41	Kec. Warungpring	222.500.000,00	653.568.249,00	982.712.000,00	3.450.000,00	98.000,00	-	1.862.328.249,00
	Jumlah	1.001.267.480.885,00	405.749.453.963,00	1.110.002.743.254,00	797.795.196.188,00	81.172.202.063,00	43.151.327.311,00	3.439.138.403.864,00

Seluruh saldo Aset Tetap masing-masing SKPD per 31 Desember 2016 tersebut telah sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah(BMD) Tahun 2017. Adapun saldo masing-masing jenis Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut :



5.5.1.3.1. Tanah

Saldo Tanah pada TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.001.267.480.885,00 dan Rp985.525.971.671,00 yang terdapat pada masing-masing SKPD dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	Aset Tetap Tanah		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	106.220.176.494,00	100.873.438.200,00	5.346.738.294,00
2	Dinkes	63.476.473.960,00	23.945.269.500,00	39.531.204.460,00
3	DPU TP	408.630.625.000,00	432.380.083.800,00	(23.749.458.800,00)
4	Disperkim	17.631.523.800,00	0,00	17.631.523.800,00
5	Satpol PP	892.500.000,00	892.500.000,00	0,00
6	Dinsos KBPP	1.254.000.000,00	1.254.000.000,00	0,00
7	Disnaker	3.570.800.000,00	3.570.800.000,00	0,00
8	DLH	7.245.185.000,00	503.250.000,00	6.741.935.000,00
9	Disdukcapil	1.963.000.000,00	1.963.000.000,00	0,00
10	Dinpermasdes	806.400.000,00	0,00	806.400.000,00
11	Dishub	5.990.175.450,00	4.733.070.450,00	1.257.105.000,00
12	Diskominfo	0,00	0,00	0,00
13	Diskoperindag	63.824.879.850,00	63.824.879.850,00	0,00
14	DPMPSTP	1.143.000.000,00	1.143.000.000,00	0,00
15	Dinpusarda	1.810.500.000,00	1.810.500.000,00	0,00
16	Disperik	4.688.606.000,00	2.975.985.000,00	1.712.621.000,00
17	Disparpora	35.328.893.450,00	35.328.893.450,00	0,00
18	Dispertan	25.867.488.000,00	25.867.488.000,00	0,00
19	Bappeda	2.604.000.000,00	2.604.000.000,00	0,00
20	Bapenda	1.575.000.000,00	0,00	1.575.000.000,00
21	BPKAD	61.518.600.800,00	69.490.621.800,00	(7.972.021.000,00)
22	BKD	0,00	0,00	0,00
23	Inspektorat	3.809.000.000,00	3.809.000.000,00	0,00
24	Setwan	5.032.500.000,00	5.032.500.000,00	0,00
25	Setda	3.980.326.000,00	1.412.326.000,00	2.568.000.000,00
26	BPBD	5.002.510.000,00	5.002.510.000,00	0,00
27	K-Kesbangpolinmas	0,00	0,00	0,00
28	Kec. Moga	2.712.750.000,00	2.712.750.000,00	0,00
29	Kec. Pulosari	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00
30	Kec. Belik	673.750.000,00	673.750.000,00	0,00
31	Kec. Watukumpul	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00
32	Kec. Bodeh	292.400.000,00	292.400.000,00	0,00
33	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00	0,00
34	Kec. Randudongkal	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
35	Kec. Pemalang	133.946.469.600,00	653.000.000,00	133.293.469.600,00
36	Kec Taman	10.740.893.000,00	225.000.000,00	10.515.893.000,00
37	Kec, Petarukan	7.162.650.621,00	3.010.000.000,00	4.152.650.621,00
38	Kec. Ampelgading	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00
39	Kec. Comal	9.836.703.860,00	2.121.000.000,00	7.715.703.860,00
40	Kec. Ulujami	694.000.000,00	694.000.000,00	0,00
41	Kec. Warungpring	222.500.000,00	222.500.000,00	0,00
	RSUD	0,00	27.952.000.000,00	(27.952.000.000,00)
	KKP	0,00	806.400.000,00	(806.400.000,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	11.684.457.000,00	(11.684.457.000,00)
	Kel. Pelutan	0,00	25.888.108.000,00	(25.888.108.000,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	2.094.416.000,00	(2.094.416.000,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	67.316.933.600,00	(67.316.933.600,00)
	Kel. Bojongsata	0,00	20.401.100.000,00	(20.401.100.000,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	900.585.000,00	(900.585.000,00)
	Kel. Widuri	0,00	5.007.870.000,00	(5.007.870.000,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	3.180.183.000,00	(3.180.183.000,00)
	Kel. Beji	0,00	7.335.710.000,00	(7.335.710.000,00)
	Kel. Pelarukan	0,00	3.694.611.621,00	(3.694.611.621,00)
	Kel. Purw oharjo	0,00	9.122.881.400,00	(9.122.881.400,00)
	Jumlah	1.001.267.480.885,00	985.525.971.671,00	15.741.509.214,00

Pada Tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap Tanah sebesar Rp15.741.509.214,00 atau 1,60%. Realisasi Belanja Modal Tanah TA. 2017 sebesar Rp11.884.647.920,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp3.856.861.294,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp222.370.774.255,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp218.513.912.961,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2017 sebesar Rp222.370.774.255,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp212.988.732.421,00;
- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp3.701.858.294,00 yang merupakan reklas dari Gedung dan Bangunan pada Dindikbud berupa pembelian rumah budaya dan pada Kec. Petarukan berupa pengurangan tanah;
- Mutasi Masuk antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp5.525.180.540,00;
- Koreksi pencatatan sebesar Rp155.003.000,00 yaitu koreksi atas nilai aset Tanah yang belum tercatat pada tahun sebelumnya, yang berada pada Dindikbud.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Tanah tahun 2017 sebesar Rp218.513.912.961,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp212.988.732.421,00 yaitu :
 - DPU TR yang dimutasi ke Disperkim dan DLH;
 - RSUD karena menjadi bagian dari Dinkes;
 - Kelurahan : Kebondalem, Pelutan, Sugihwaras, Mulyoharjo, Bojongbata, Paduraksa, Widuri menjadi bagian dari Kecamatan Pemalang;
 - Kelurahan : Wanarejan Selatan dan Beji, menjadi bagian dari Kecamatan Taman;
 - Kelurahan Petarukan menjadi bagian Kecamatan Petarukan;
 - Kelurahan Purwoharjo menjadi bagian dari Kecamatan Comal; dan
 - KKP karena SKPD dihapuskan, aset dimutasi ke Dispersan dan Dinpermasdes;
- Mutasi Keluar antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp5.525.180.540,00 yaitu :
 - BPKAD dimutasi ke Dindikbud sebesar Rp1550.003.000,000,00 dan ke Setda Bag. Umum sebesar Rp2.558.000.000,00
 - Kec. Comal dimutasi ke Dinkes (Puskesmas) sebesar Rp1.407.177.540,00.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2017 :

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	212.988.732.421,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	212.988.732.421,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	5.525.180.540,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	5.525.180.540,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	3.701.858.294,00
- Koreksi Pencatatan Ase/Hibah	155.003.000,00
	3.856.861.294,00
Kurang :	
	0,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	<u>3.856.861.294,00</u>
Belanja Modal	<u>11.884.647.920,00</u>
Penambahan Aset Tetap TA. 2017	<u><u>15.741.509.214,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Tanah TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - TANAH 2017							Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN			MUTASI PENGURANGAN			
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Mutasi Keluar antar SKPD	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12=5+11	13=6+10-12
1	Dindikbud	100.873.438.200	-	-	-	3.641.732.294	1.550.003.000	155.003.000	5.346.738.294	-	-	106.220.176.494
2	Dinkes	23.945.269.500	27.952.000.000	-	10.172.026.920	-	1.407.177.540	-	29.359.177.540	-	-	63.476.473.960
3	DPU TR	432.380.083.800	-	23.749.458.800	-	-	-	-	-	-	23.749.458.800	408.630.625.000
4	Disperkim	-	17.631.523.800	-	-	-	-	-	17.631.523.800	-	-	17.631.523.800
5	Satpol PP	892.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892.500.000
6	Dinsos KBPP	1.254.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.254.000.000
7	Disnaker	3.570.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.570.800.000
8	DLH	503.250.000	6.741.935.000	-	-	-	-	-	6.741.935.000	-	-	7.245.185.000
9	Disdukcapil	1.963.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.963.000.000
10	Dinpermasdes	-	806.400.000	-	-	-	-	-	806.400.000	-	-	806.400.000
11	Dishub	4.733.070.450	1.257.105.000	-	-	-	-	-	1.257.105.000	-	-	5.990.175.450
12	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Diskoperindag	63.824.879.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.824.879.850
14	DPMPPTSP	1.143.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.143.000.000
15	Dinpusarda	1.810.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.810.500.000
16	Disperik	2.975.985.000	-	-	1.712.621.000	-	-	-	-	-	-	4.688.606.000
17	Disparpora	35.328.893.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.328.893.450
18	Dispertan	25.867.488.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.867.488.000
19	Bappeda	2.604.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.604.000.000
20	Bapenda	-	1.575.000.000	-	-	-	-	-	1.575.000.000	-	-	1.575.000.000
21	BPKAD	69.490.621.800	-	3.854.018.000	-	-	-	-	-	4.118.003.000	7.972.021.000	61.518.600.800
22	BKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Inspektorat	3.809.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.809.000.000
24	Setwan	5.032.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.032.500.000
25	Setda	1.412.326.000	-	-	-	-	2.568.000.000	-	2.568.000.000	-	-	3.980.326.000
26	BPBD	5.002.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.002.510.000
27	Kesbangpolinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - TANAH 2017							Saldo Per 31-Des-2017	
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN			MUTASI PENGURANGAN				
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Ase/ Hibah	Total Penambahan	Mutasi Keluar antar SKPD	Total Pengurangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12=5+11	13=6+10-12	
28	Kec. Moga	2.712.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.750.000
29	Kec. Pulosari	113.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.100.000
30	Kec. Belik	673.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673.750.000
31	Kec. Watukumpul	83.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.600.000
32	Kec. Bodeh	292.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.400.000
33	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. Randudongkal	700.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700.000.000
35	Kec. Pemalang	653.000.000	133.293.469.600	-	-	-	-	-	133.293.469.600	-	-	-	133.946.469.600
36	Kec. Taman	225.000.000	10.515.893.000	-	-	-	-	-	10.515.893.000	-	-	-	10.740.893.000
37	Kec. Petarukan	3.010.000.000	4.092.524.621	-	-	-	60.126.000	-	4.152.650.621	-	-	-	7.162.650.621
38	Kec. Ampelgading	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
39	Kec. Comal	2.121.000.000	9.122.881.400	-	-	-	-	-	9.122.881.400	1.407.177.540	1.407.177.540	-	9.836.703.860
40	Kec. Ulujami	694.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694.000.000
41	Kec. Warungpring	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.500.000
	RSUD	27.952.000.000	-	27.952.000.000	-	-	-	-	-	-	-	27.952.000.000	-
	KKP	806.400.000	-	806.400.000	-	-	-	-	-	-	-	806.400.000	-
	Kel. Kebondalem	11.684.457.000	-	11.684.457.000	-	-	-	-	-	-	-	11.684.457.000	-
	Kel. Pelutan	25.888.108.000	-	25.888.108.000	-	-	-	-	-	-	-	25.888.108.000	-
	Kel. Sugihwaras	2.094.416.000	-	2.094.416.000	-	-	-	-	-	-	-	2.094.416.000	-
	Kel. Mulyoharjo	67.316.933.600	-	67.316.933.600	-	-	-	-	-	-	-	67.316.933.600	-
	Kel. Bojongsata	20.401.100.000	-	20.401.100.000	-	-	-	-	-	-	-	20.401.100.000	-
	Kel. Paduraksa	900.585.000	-	900.585.000	-	-	-	-	-	-	-	900.585.000	-
	Kel. Widuri	5.007.870.000	-	5.007.870.000	-	-	-	-	-	-	-	5.007.870.000	-
	Kel. WanSel	3.180.183.000	-	3.180.183.000	-	-	-	-	-	-	-	3.180.183.000	-
	Kel. Beji	7.335.710.000	-	7.335.710.000	-	-	-	-	-	-	-	7.335.710.000	-
	Kel. Petarukan	3.694.611.621	-	3.694.611.621	-	-	-	-	-	-	-	3.694.611.621	-
	Kel. Purwoharjo	9.122.881.400	-	9.122.881.400	-	-	-	-	-	-	-	9.122.881.400	-
	JUMLAH	985.525.971.674	212.988.732.425	212.988.732.426	11.884.647.926	3.701.858.301	5.525.180.548	155.003.009	222.370.774.255	5.525.180.551	218.513.912.961	-	1.001.267.480.885



5.5.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada TA 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp405.749.453.963,00 dan Rp351.664.214.435,00.

No	SKPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	73.867.039.239,00	67.051.130.460,00	6.815.908.779,00
2	Dinkes	152.139.819.718,00	44.103.553.006,00	108.036.266.712,00
3	DPU TR	18.390.317.433,00	28.709.600.073,00	(10.319.282.640,00)
4	Disperkim	2.509.188.121,00	0,00	2.509.188.121,00
5	Satpol PP	3.711.838.899,00	1.488.254.857,00	2.223.584.042,00
6	Dinsos KBPP	7.774.418.637,00	8.094.465.950,00	(320.047.313,00)
7	Disnaker	4.065.872.498,00	3.726.334.590,00	339.537.908,00
8	DLH	13.106.060.996,00	2.129.773.800,00	10.976.287.196,00
9	Disdukcatpil	6.418.757.877,00	5.402.567.155,00	1.016.190.722,00
10	Dinpermasdes	2.972.503.218,00	0,00	2.972.503.218,00
11	Dishtub	4.419.259.592,00	4.252.794.710,00	166.464.882,00
12	Diskominfo	9.699.982.946,00	0,00	9.699.982.946,00
13	Diskoperindag	4.733.387.838,00	3.709.796.338,00	1.023.591.500,00
14	DPMPTSP	1.982.589.422,00	1.621.463.380,00	361.126.042,00
15	Dinpusarda	2.112.493.657,00	1.437.728.752,00	674.764.905,00
16	Disperik	4.466.832.149,00	4.280.749.149,00	186.083.000,00
17	Disparpora	5.908.259.804,00	3.919.137.549,00	1.989.122.255,00
18	Disperlan	6.283.983.815,00	5.189.061.765,00	1.094.922.050,00
19	Bappeda	4.440.638.222,00	4.104.818.616,00	335.819.606,00
20	Bapenda	3.930.638.368,00	0,00	3.930.638.368,00
21	BPKAD	14.790.943.178,00	17.794.043.149,00	(3.003.099.971,00)
22	BKD	3.706.777.011,00	2.990.502.761,00	716.274.250,00
23	Inspektorat	2.630.008.274,00	1.606.763.830,00	1.023.244.444,00
24	Setwan	13.041.327.598,00	16.042.629.790,00	(3.001.302.192,00)
25	Setda	22.295.244.896,00	19.729.338.781,00	2.565.906.115,00
26	BPBD	2.245.576.756,00	3.522.820.756,00	(1.277.244.000,00)
27	K-Kesbangpolinmas	851.048.550,00	820.481.550,00	30.567.000,00
28	Kec. Moga	747.819.249,00	680.506.549,00	67.312.700,00
29	Kec. Pulosari	795.486.699,00	672.373.999,00	123.112.700,00
30	Kec. Belik	814.026.207,00	688.497.928,00	125.528.279,00
31	Kec. Watukumpul	759.225.699,00	661.736.999,00	97.488.700,00
32	Kec. Bodeh	673.674.724,00	633.281.399,00	40.393.325,00
33	Kec. Bantarbolang	759.713.699,00	713.597.599,00	46.116.100,00
34	Kec. Randudongkal	711.923.699,00	665.439.999,00	46.483.700,00
35	Kec. Pemalang	2.353.504.971,00	767.098.609,00	1.586.406.362,00
36	Kec Taman	1.276.239.043,00	795.126.738,00	481.112.305,00
37	Kec. Petarukan	1.023.856.599,00	717.608.099,00	306.248.500,00
38	Kec. Ampelgading	835.988.999,00	774.111.899,00	61.877.100,00
39	Kec. Comal	1.033.293.099,00	753.384.399,00	279.908.700,00
40	Kec. Ulujami	816.324.315,00	746.461.615,00	69.862.700,00
41	Kec. Warungpring	653.568.249,00	580.655.549,00	72.912.700,00
	RSUD	0,00	87.372.891.701,00	(87.372.891.701,00)
	KKP	0,00	771.692.550,00	(771.692.550,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	149.299.800,00	(149.299.800,00)
	Kel. Pelutan	0,00	210.886.137,00	(210.886.137,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	89.140.250,00	(89.140.250,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	196.340.500,00	(196.340.500,00)
	Kel. Bojongsata	0,00	160.144.000,00	(160.144.000,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	231.168.700,00	(231.168.700,00)
	Kel. Widuri	0,00	191.491.000,00	(191.491.000,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	128.992.750,00	(128.992.750,00)
	Kel. Beji	0,00	169.994.000,00	(169.994.000,00)
	Kel. Petarukan	0,00	193.119.900,00	(193.119.900,00)
	Kel. Purwoharjo	0,00	221.361.000,00	(221.361.000,00)
	Jumlah	405.749.453.963,00	351.664.214.435,00	54.085.239.528,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp54.085.239.528,00 atau 15,38%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2017 sebesar Rp57.680.231.826,00, terdapat perbedaan sebesar Rp3.594.992.298,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp136.945.582.532,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp140.540.574.830,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp136.945.582.532,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp116.972.365.315,00;
- Kapitalisasi, Reklas dari sesama Aset Tetap, dan Reklas dari Persediaan sebesar Rp2.488.431.448,00;
- Mutasi Masuk antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp16.850.943.769,00;
- Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp633.842.000,00 yang merupakan hibah dari instansi di luar Pemda yang diterima oleh Diskoperindag sebesar Rp219.982.000,00 serta koreksi pencatatan atas aset yang belum dicatat sebelumnya pada Dindikbud sebesar Rp182.970.000,00 dan Setda sebesar Rp230.890.000,00.

Penambahan karena Kapitalisasi, Reklas sesama Aset Tetap, dan Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp2.488.431.448,00 terdiri dari :

- Kapitalisasi dari Belanja Pegawai sebesar Rp9.000.000,00 yaitu pada :
 - Dinpermasdes sebesar Rp8.100.000,00 berupa honor pengadaan barang/jasa;
 - BPKAD sebesar Rp900.000,00 berupa honor pengadaan barang/jasa;
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp69.860.375,00 yaitu pada :
 - DPU TR sebesar Rp23.000.000,00 berupa tenda dan mimbar/podium;
 - Diskoperindag sebesar Rp26.870.000,00 berupa alat bantu, alat bengkel, dan alat rumah tangga;
 - Dinpusarda sebesar Rp8.600.000,00 berupa rak besi;
 - Dispertan sebesar Rp8.800.000,00 berupa printer; dan
 - Bapenda sebesar Rp2.590.375,00 berupa alat pendingin dan dispenser;
- Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp2.361.921.073,00 terdiri dari :
Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp209.163.000,00, yaitu pada :
 - Diskoperindag sebesar Rp209.163.000,00 berupa alat kantor dan alat rumah tangga;
- Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.796.000,00, yaitu pada :
 - Disperkim sebesar Rp8.796.000,00 berupa pesawat telepon;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.143.962.073,00, yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.125.537.073,00 berupa alat kantor, alat rumah tangga, dan peralatan medis;
 - Setwan sebesar Rp8.925.000,00 berupa sepeda statis alat fitness; dan
 - Kec. Pemalang sebesar Rp9.500.000,00 berupa papan instansi, struktur, dan monografi;
- Reklas dari Persediaan sebesar Rp47.650.000,00 yaitu pada Diskominfo berasal dari Persediaan yang Akan Diserahkan ke Pihak Ketiga berupa peralatan komputer yang akhirnya akan diserahkan ke Bag. Umum Setda;

Mutasi pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 sebesar Rp140.540.574.830,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp116.972.365.315,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp100.960.000,00 adalah reklas menjadi Gedung dan Bangunan, yaitu pada Dindikbud berupa bangunan pada sekolah, dan Diskominfo berupa penataan taman;
- Aset yang tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp5.665.781.246,00 diantaranya pembelian barang pakai habis dari Belanja Modal BOS sebesar Rp3.423.663.128;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



- Mutasi keluar antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp16.850.943.769,00 berupa kendaraan dinas dan peralatan kerja;
- Koreksi pencatatan nilai aset sebesar Rp800.000,00 pada Kec. Ulujami karena dicatat terlalu banyak sehingga perlu dilakukan koreksi;
- Penghapusan aset sebesar Rp926.359.500,00 pada DPU TR berupa peralatan kerja, Dispartan berupa kendaraan bermotor dan peralatan kerja, dan Setda berupa kendaraan bermotor;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp23.365.000,00 yaitu pada Diskoperindag sebesar Rp4.150.000,00 berupa gerobak yang direklas ke Aset Lain-lain karena kondisi rusak berat, pada Inspektorat sebesar Rp3.800.000,00 berupa sepeda motor yang direklas ke Aset Lain-lain karena masuk dalam usulan penghapusan, dan pada BKD sebesar Rp15.415.000,00 berupa Software yang direklas ke Aset Tak Berwujud.

Ringkasan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2017 :

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	116.972.365.315,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	116.972.365.315,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	16.850.943.769,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	16.850.943.769,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	2.488.431.448,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	633.842.000,00
	3.122.273.448,00
Kurang :	
- Reklas Aset	100.960.000,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	5.665.781.246,00
- Koreksi Pencatatan Aset	800.000,00
- Penghapusan	926.359.500,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	23.365.000,00
	6.717.265.746,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	<u>(3.594.992.298,00)</u>
Belanja Modal	<u>57.680.231.826,00</u>
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2017	<u><u>54.085.239.528,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Compleable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
1	Dindikbud	67.051.130.460	-	319.240.000	11.562.500.810	-	238.429.448	182.970.000	421.399.448	59.290.000	4.789.461.479	-	-	-	-	5.167.991.479	73.867.039.239
2	Dinkes	44.103.553.006	87.372.891.701	171.969.000	19.168.431.981	2.125.537.073	120.150.000	-	89.618.578.774	-	430.275.043	148.500.000	-	-	-	750.744.043	152.139.819.718
3	DPU TR	28.709.600.073	-	9.936.212.844	1.632.189.308	903.577.446	-	926.577.446	-	8.821.700	2.766.715.350	-	-	166.299.500	-	12.878.049.394	18.390.317.433
4	Disperkim	-	1.658.684.844	-	206.370.400	8.796.000	638.039.677	-	2.305.520.521	-	2.702.800	-	-	-	-	2.702.800	2.509.188.121
5	Salpol PP	1.488.254.857	1.434.844.000	-	244.150.000	-	544.590.042	-	1.979.434.042	-	-	-	-	-	-	-	3.711.838.899
6	Dinsos KBPP	8.094.465.950	974.795.950	1.909.475.550	264.746.260	-	482.772.287	-	1.457.568.237	-	12.736.260	120.150.000	-	-	-	2.042.361.810	7.774.418.637
7	Disnaker	3.726.334.590	671.944.000	944.795.950	413.484.500	-	316.616.358	-	988.560.358	-	117.711.000	-	-	-	-	1.062.506.950	4.065.872.498
8	DLH	2.129.773.800	8.440.085.704	-	238.196.100	-	3.058.005.392	-	11.498.091.096	-	-	760.000.000	-	-	-	760.000.000	13.106.060.996
9	Disdukcapil	5.402.567.155	296.116.000	180.000.000	650.900.680	-	445.290.042	-	741.406.042	-	-	196.116.000	-	-	-	376.116.000	6.418.757.877
10	Dinpermasdes	-	1.777.139.164	-	861.222.380	8.100.000	326.423.674	-	2.111.662.838	-	382.000	-	-	-	-	382.000	2.972.503.218
11	Dishub	4.252.794.710	244.820.500	986.900.055	376.910.535	-	777.894.402	-	1.022.714.902	-	1.440.000	244.820.500	-	-	-	1.233.160.555	4.419.259.592
12	Diskominfo	-	3.337.479.407	-	6.740.389.830	47.650.000	564.605.561	-	3.949.734.968	41.670.000	141.480.000	806.991.852	-	-	-	990.141.852	9.699.982.946
13	Diskoperindag	3.709.796.338	-	40.000.000	384.257.500	236.033.000	227.469.000	219.982.000	683.484.000	-	-	-	-	-	4.150.000	44.150.000	4.733.387.838
14	DPMPTSP	1.621.463.380	254.240.000	131.071.500	77.907.500	-	414.290.042	-	668.530.042	-	-	254.240.000	-	-	-	385.311.500	1.982.589.422
15	Dinpusarda	1.437.728.752	70.000.000	-	237.974.863	8.600.000	365.790.042	-	444.390.042	-	2.000.000	5.600.000	-	-	-	7.600.000	2.112.493.657
16	Disperik	4.280.749.149	-	-	186.453.000	-	-	-	-	-	370.000	-	-	-	-	370.000	4.466.832.149
17	Disparpora	3.919.137.549	35.000.000	-	1.964.010.255	-	-	-	35.000.000	-	9.888.000	-	-	-	-	9.888.000	5.908.259.804
18	Dispartan	5.189.061.765	614.880.800	-	531.641.250	8.800.000	-	-	623.680.800	-	-	-	-	60.400.000	-	60.400.000	6.283.983.815
19	Bappeda	4.104.818.616	32.921.500	-	380.076.000	-	-	-	32.921.500	-	-	77.177.894	-	-	-	77.177.894	4.440.638.222
20	Bapenda	-	3.303.605.151	-	509.115.300	2.590.375	303.327.542	-	3.609.523.068	-	-	188.000.000	-	-	-	188.000.000	3.930.638.368
21	BPKAD	17.794.043.149	442.034.000	5.705.375.269	6.170.771.500	900.000	1.303.557.979	-	1.746.491.979	-	160.410	5.214.827.771	-	-	-	10.920.363.450	14.790.943.178
22	BKD	2.990.502.761	-	157.000.000	483.949.208	-	406.240.042	-	406.240.042	-	1.500.000	-	-	15.415.000	-	173.915.000	3.706.777.011
23	Inspektoral	1.606.763.830	-	-	74.504.045	-	1.077.253.399	-	1.077.253.399	-	1.713.000	123.000.000	-	-	3.800.000	128.513.000	2.630.008.274
24	Setwan	16.042.629.790	-	735.009.500	785.635.585	8.925.000	-	-	8.925.000	-	8.219.000	3.052.634.277	-	-	-	3.795.862.777	13.041.327.598
25	Setda	19.729.338.781	4.068.944.557	4.318.949.359	2.081.006.702	-	4.188.682.394	230.890.000	8.488.516.951	-	98.838.054	2.886.170.125	-	-	699.660.000	8.003.617.538	22.295.244.896
26	BPBD	3.522.820.756	-	1.349.844.000	72.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.349.844.000	2.245.576.756
27	Kesbangpolinmas	820.481.550	-	-	31.567.000	-	5.000.000	-	5.000.000	-	-	6.000.000	-	-	-	6.000.000	851.048.550



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Asef/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Ex tra Comptable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan/ Penilaian Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
28	Kec. Moga	680.506.549	-	-	71.000.000	-	9.312.700	-	9.312.700	-	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	747.819.249
29	Kec. Pulosari	672.373.999	-	-	113.800.000	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	795.486.699
30	Kec. Belik	688.497.928	-	-	116.215.579	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	814.026.207
31	Kec. Watukumpul	661.736.999	-	-	88.176.000	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	759.225.699
32	Kec. Bodeh	633.281.399	-	-	31.080.625	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	673.674.724
33	Kec. Bantarbolang	713.597.599	-	-	36.540.000	-	9.576.100	-	9.576.100	-	-	-	-	-	-	-	759.713.699
34	Kec. Randudongkal	665.439.999	-	-	35.000.000	-	15.483.700	-	15.483.700	-	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	711.923.699
35	Kec. Pemalang	767.098.609	1.228.470.387	-	354.844.875	9.500.000	9.576.100	-	1.247.546.487	-	15.985.000	-	-	-	-	15.985.000	2.353.504.971
36	Kec. Taman	795.126.738	298.986.750	-	175.110.355	-	12.112.700	-	311.099.450	-	5.097.500	-	-	-	-	5.097.500	1.276.239.043
37	Kec. Petarukan	717.608.099	193.119.900	-	100.752.500	-	12.376.100	-	205.496.000	-	-	-	-	-	-	-	1.023.856.599
38	Kec. Ampelgading	774.111.899	-	-	52.564.400	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	835.988.999
39	Kec. Comal	753.384.399	221.361.000	-	49.235.000	-	9.312.700	-	230.673.700	-	-	-	-	-	-	-	1.033.293.099
40	Kec. Ulujami	746.461.615	-	-	61.350.000	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	800.000	-	-	800.000	816.324.315
41	Kec. Warungpring	580.655.549	-	-	63.600.000	-	9.312.700	-	9.312.700	-	-	-	-	-	-	-	653.568.249
	RSUD	87.372.891.701	-	87.372.891.701	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.372.891.701	0,00
	KKP	771.692.550	-	771.692.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.692.550	0,00
	Kel. Kebondalem	149.299.800	-	149.299.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.299.800	0,00
	Kel. Pelulan	210.886.137	-	210.886.137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.886.137	0,00
	Kel. Sugihwaras	89.140.250	-	89.140.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.140.250	0,00
	Kel. Mulyoharjo	196.340.500	-	196.340.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.340.500	0,00
	Kel. Bojongsala	160.144.000	-	160.144.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.144.000	0,00
	Kel. Paduraksa	231.168.700	-	231.168.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.168.700	0,00
	Kel. Widuri	191.491.000	-	191.491.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.491.000	0,00
	Kel. WanSel	128.992.750	-	128.992.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.992.750	0,00
	Kel. Beji	169.994.000	-	169.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.994.000	0,00
	Kel. Petarukan	193.119.900	-	193.119.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.119.900	0,00
	Kel. Purwoharjo	221.361.000	-	221.361.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221.361.000	0,00
	JUMLAH	351.664.214.435	116.972.365.315	116.972.365.315	57.680.231.826	2.488.431.448	16.850.943.769	633.842.000	136.945.582.532	100.960.000	5.665.781.246	16.850.943.769	800.000	926.359.500	23.365.000	140.540.574.830	405.749.453.963



5.5.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.110.002.743.254,00 dan Rp987.056.554.385,00 dengan rincian :

No	SKPD	Aset Tetap Peralatan dan Mesin		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	620.783.234.287,00	571.997.141.018,00	48.786.093.269,00
2	Dinkes	125.835.204.881,00	72.527.134.594,00	53.308.070.287,00
3	DPU TR	11.172.031.054,00	22.426.557.358,00	(11.254.526.304,00)
4	Disperkim	31.796.446.706,00	0,00	31.796.446.706,00
5	Satpol PP	444.985.000,00	444.985.000,00	0,00
6	Dinsos KBPP	3.062.656.000,00	3.237.656.000,00	(175.000.000,00)
7	Disnaker	5.078.599.000,00	3.995.115.500,00	1.083.483.500,00
8	DLH	4.017.577.896,00	2.321.309.896,00	1.696.268.000,00
9	Disdukcapil	1.747.186.586,00	1.747.186.586,00	0,00
10	Dinpermasdes	1.574.730.646,00	0,00	1.574.730.646,00
11	Dishub	19.159.569.664,00	18.421.587.531,00	737.982.133,00
12	Diskominfo	2.382.992.800,00	0,00	2.382.992.800,00
13	Diskoperindag	123.917.215.818,00	101.530.999.517,00	22.386.216.301,00
14	DPMPPTSP	1.828.800.333,00	1.828.800.333,00	0,00
15	Dinpusarda	733.057.000,00	733.057.000,00	0,00
16	Disperik	9.282.673.294,00	9.282.673.294,00	0,00
17	Disparpora	61.834.603.873,00	47.362.249.688,00	14.472.354.185,00
18	Disperlan	18.529.437.728,00	18.927.707.428,00	(398.269.700,00)
19	Bappeda	1.739.990.000,00	1.739.990.000,00	0,00
20	Bapenda	334.204.000,00	0,00	334.204.000,00
21	BPKAD	9.423.818.010,00	9.926.022.010,00	(502.204.000,00)
22	BKD	1.624.198.431,00	1.624.198.431,00	0,00
23	Inspektorat	976.388.530,00	976.388.530,00	0,00
24	Setwan	3.798.739.893,00	3.798.739.893,00	0,00
25	Setda	22.590.983.000,00	22.392.248.000,00	198.735.000,00
26	BPBD	980.000.000,00	980.000.000,00	0,00
27	Kec. Moga	819.168.900,00	792.918.900,00	26.250.000,00
28	Kec. Pulosari	1.361.015.000,00	1.311.043.000,00	49.972.000,00
29	Kec. Belik	1.071.335.400,00	1.022.490.400,00	48.845.000,00
30	Kec. Watukumpul	1.572.026.300,00	1.572.026.300,00	0,00
31	Kec. Bodeh	736.095.249,00	672.091.449,00	64.003.800,00
32	Kec. Banjarbolang	809.008.000,00	757.958.000,00	51.050.000,00
33	Kec. Randudongkal	1.251.481.400,00	1.051.481.400,00	200.000.000,00
34	Kec. Pemalang	6.381.235.675,00	1.699.225.650,00	4.682.010.025,00
35	Kec. Taman	1.672.283.900,00	653.121.900,00	1.019.162.000,00
36	Kec. Petarukan	1.689.909.000,00	754.416.000,00	935.493.000,00
37	Kec. Ampelgading	884.838.500,00	884.838.500,00	0,00
38	Kec. Comal	5.353.099.500,00	1.249.482.500,00	4.103.617.000,00
39	Kec. Ulujami	769.210.000,00	734.265.000,00	34.945.000,00
40	Kec. Warungpring	982.712.000,00	982.712.000,00	0,00
	RSUD	0,00	42.876.716.754,00	(42.876.716.754,00)
	KKP	0,00	1.088.737.000,00	(1.088.737.000,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	579.005.000,00	(579.005.000,00)
	Kel. Pelutan	0,00	732.213.500,00	(732.213.500,00)
	Kel. Sugihw aras	0,00	403.676.300,00	(403.676.300,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	768.173.000,00	(768.173.000,00)
	Kel. Bojongbata	0,00	900.125.200,00	(900.125.200,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	940.521.525,00	(940.521.525,00)
	Kel. Widuri	0,00	349.295.500,00	(349.295.500,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	511.907.000,00	(511.907.000,00)
	Kel. Beji	0,00	507.255.000,00	(507.255.000,00)
	Kel. Petarukan	0,00	935.493.000,00	(935.493.000,00)
	Kel. Purwoharjo	0,00	4.103.617.000,00	(4.103.617.000,00)
	Jumlah	1.110.002.743.254,00	987.056.554.385,00	122.946.188.869,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp122.946.188.869,00 atau 12,46%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2017 sebesar Rp144.210.358.951,00, terdapat perbedaan sebesar Rp21.264.170.082,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp106.659.706.119,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp127.923.876.201,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2017 sebesar Rp106.659.706.119,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp66.980.428.081,00;
 - Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa, Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp29.105.982.806,00 berupa Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa, dan Reklas dari sesama Aset Tetap;
 - Mutasi Masuk Antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp484.884.000,00 berupa bangunan gedung kantor pada Disperkim dan Diskominfo, serta gudang arsip pada Dinpermasdes; dan
 - Koreksi Pencatatan dan/atau Hibah sebesar Rp10.088.411.232,00 terdiri dari :
Koreksi Pencatatan Aset sebesar Rp191.162.000,00 yaitu pada :
 - koreksi pencatatan gedung pada UPPK Taman Dindikbud sebesar Rp72.000.000,00 yang baru dicatat pada tahun ini;
 - koreksi pencatatan berupa penyelesaian pekerjaan oleh pihak ketiga sebesar Rp119.162.000,00 pada Dinkes;
- Penerimaan Hibah dari Instansi di luar Pemda sebesar Rp9.897.249.232,00 yaitu pada:
- hibah dari PDAU berupa gedung/bangunan, pos jaga, dan selasar di lokasi pasar sebesar Rp9.897.249.232,00 yang diterima oleh Diskoperindag yang baru dicatat pada tahun ini.

Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa, Reklas dari sesama Aset Tetap, dan Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp29.105.982.806,00 terdiri dari :

- Kapitalisasi dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.350.000,00 yaitu pada Dinpermasdes berupa honor pengadaan barang/jasa;
 - Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp431.455.300,00 yaitu pada :
 - Disparpora sebesar Rp180.240.000,00 berupa gedung sanggar kesenian;
 - Dispartan sebesar Rp52.480.300,00 berupa gedung percontohan;
 - Setda sebesar Rp198.735.000,00 berupa bangunan gedung kantor ULP; dan
 - Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp28.673.177.506,00 terdiri dari :
Reklas dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp100.960.000,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp59.290.000,00 berupa bangunan pada sekolah yang berasal dari Peralatan dan Mesin Dana BOS
 - Diskominfo sebesar Rp41.670.000,00 berupa
- Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.935.313,085,00 yaitu pada :
- Dinpermasdes sebesar Rp4.400.000,00 berasal dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa bangunan pembuang air hujan; dan
 - Disparpora sebesar Rp10.930.913,085,00 berupa prasarana pendukung obyek wisata;
- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp497.016.000,00 yaitu pada :
- Dindikbud sebesar Rp179.855.000,00 berupa rehab bangunan kantor;
 - DLH sebesar Rp210.810.000,00 berupa bangunan tugu peringatan;
 - Disparpora sebesar Rp106.351.000,00 berupa gazebo di obyek wisata;
- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.139.888.421,00 yaitu pada :
- Dinkes sebesar Rp2.587.055.281,00 berupa Puskesmas Randudongkal dan Watukumpul karena telah selesai pembangunan;
 - Disnaker sebesar Rp10.000.000,00 berupa DED bangunan kantor BLK karena gedung sudah selesai dibangun;
 - Diskoperindag sebesar Rp11.643.998.740,00 karena bangunan pasar sudah dapat digunakan;
 - Disparpora sebesar Rp2.898.834.400,00 berupa bangunan kolam renang.



Mutasi pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2017 sebesar Rp127.923.876.201,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp66.980.428.081,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp50.299.767.851,00 terdiri dari :
Reklas menjadi Tanah sebesar Rp3.701.858.294,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp3.641.732.294,00 berupa tanah atas bangunan rumah budaya;
 - Kec. Petarukan sebesar Rp60.126.000,00 berupa pengurangan tanah;Reklas menjadi Peralatan dan Mesin sebesar Rp209.163.000,00 yaitu pada :
 - Diskoperindag sebesar Rp209.163.000,00 berupa peralatan kerja;Reklas menjadi Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp17.187.777.748,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.719.270.748,00 berupa IPAL di puskesmas;
 - Disperkim sebesar Rp14.468.507.000,00 berupa LPJU;Reklas menjadi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp29.200.968.809,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp1.112.243.000,00 berupa pembangunan gedung kesenian;
 - Dinkes sebesar Rp134.383.000,00 berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan RS tipe D di Comal;
 - DPU TR sebesar Rp14.868.318.390,00 berupa pembangunan gedung SKPD;
 - Disperkim sebesar Rp3.223.446.000,00 berupa gapura perbatasan;
 - Dinsos KBPP sebesar Rp51.290.000,00 berupa DED gedung kantor;
 - Dishub sebesar Rp50.785.000,00 berupa perencanaan rehab terminal grosir Comal;
 - Diskoperindag sebesar Rp697.165.000,00 berupa pembangunan pasar;
 - Disparpora sebesar Rp9.063.338.419,00 berupa penataan kawasan obyek wisata, gardu pandang gunung Slamet, dan bangunan hotel Moga;
- Nilai aset yang tidak memenuhi kapitalisasi/masuk ke *extracomptable* sebesar Rp55.950.000,00 pada Kec. Bantarbolang berupa pengaspalan halaman kantor;
- Mutasi keluar antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp484.884.000,00 berupa bangunan gedung dari Setda yang diserahkan ke Disperkim dan Dinpermasdes, dan bangunan gedung dari Dispartan yang diserahkan ke Diskominfo;
- Koreksi Pencatatan Aset sebesar Rp1.349.200.200,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp966.250.200,00 berupa Uang Muka Pekerjaan yang terjadi putus kontrak sehingga diakui sebagai Piutang Uang Muka;
 - Dispartan sebesar Rp382.950.000,00 berupa double pencatatan atas bangunan gedung;
- Penghapusan Aset berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang sebesar Rp8.034.568.279,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp826.488.500,00 berupa bangunan gedung puskesmas;
 - Diskoperindag sebesar Rp6.861.404.779,00 berupa bangunan pasar; dan
 - Disparpora sebesar Rp346.675.000,00 berupa bangunan pesanggrahan Moga.
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp719.077.790,00 adalah reklas ke Aset Lain-lain atas Aset yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2017 dan baru dapat dihapuskan pada tahun berikutnya, terdiri dari :
 - DPU TR sebesar Rp268.221.090,00 merupakan aset yang akan diserahkan ke pihak ketiga, antara lain berupa :
 - ✓ Rehab gedung kantor Kajari sebesar Rp217.780.305,00; dan
 - ✓ DED masjid Agung sebesar Rp50.440.785,00.



- Disparpora sebesar Rp450.856.700,00 merupakan aset yang sudah diserahkan ke pemerintah desa setempat dan baru akan dihapuskan pada tahun 2018, antara lain berupa :
 - ✓ Bangunan Aula di Desa Wisnu sebesar Rp201.555.500,00;
 - ✓ Pemeliharaan OW Silating di Desa Sikasur sebesar Rp121.485.000,00; dan
 - ✓ Gapura Masuk OW Kaliprau sebesar Rp127.816.200,00;

Ringkasan penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2017 :

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	66.980.428.081,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	66.980.428.081,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	484.884.000,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	484.884.000,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	29.105.982.806,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	10.088.411.232,00
	39.194.394.038,00
Kurang :	
- Reklas Aset	50.299.767.851,00
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	55.950.000,00
- Koreksi Pencatatan Aset	1.349.200.200,00
- Penghapusan	8.034.568.279,00
- Reklas ke Aset Lainnya	719.077.790,00
	60.458.564.120,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	<u>(21.264.170.082,00)</u>
Belanja Modal	<u>144.210.358.951,00</u>
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2017	<u><u>122.946.188.869,00</u></u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Ase/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
1	Dindikbud	571.997.141.018	-	-	53.228.923.563	239.145.000	-	72.000.000	311.145.000	4.753.975.294	-	-	-	-	-	4.753.975.294	620.783.234.287
2	Dinkes	72.527.134.594	42.876.716.754	-	12.371.528.700	2.587.055.281	-	119.162.000	45.582.934.035	2.853.653.748	-	-	966.250.200	826.488.500	-	4.646.392.448	125.835.204.881
3	DPU TR	22.426.557.358	-	11.606.488.302	15.488.501.478	-	-	-	14.868.318.390	-	-	-	-	268.221.090	26.743.027.782	11.172.031.054	
4	Disperkim	-	10.588.930.302	-	38.687.714.050	-	211.755.354	-	10.800.685.656	17.691.953.000	-	-	-	-	17.691.953.000	31.796.446.706	
5	Satpol PP	444.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444.985.000	
6	Dinsos KBPP	3.237.656.000	-	175.000.000	51.290.000	-	-	-	51.290.000	-	-	-	-	-	226.290.000	3.062.656.000	
7	Disnaker	3.995.115.500	-	-	1.073.483.500	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	5.078.599.000	
8	DLH	2.321.309.896	1.185.558.000	-	299.900.000	210.810.000	-	-	1.396.368.000	-	-	-	-	-	-	4.017.577.896	
9	Disdukcapil	1.747.186.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.747.186.586	
10	Dinpermasdes	-	1.263.737.000	-	217.115.000	5.750.000	88.128.646	-	1.357.615.646	-	-	-	-	-	-	1.574.730.646	
11	Dishub	18.421.587.531	-	-	788.767.133	-	-	-	50.785.000	-	-	-	-	-	50.785.000	19.159.569.664	
12	Diskominfo	-	-	-	2.156.322.800	41.670.000	185.000.000	-	226.670.000	-	-	-	-	-	-	2.382.992.800	
13	Diskoperindag	101.530.999.517	-	-	8.612.701.108	11.643.998.740	-	9.897.249.232	21.541.247.972	906.328.000	-	-	6.861.404.779	-	7.767.732.779	123.917.215.818	
14	DPMPPTSP	1.828.800.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.828.800.333	
15	Dinpusarda	733.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.057.000	
16	Disperik	9.282.673.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.282.673.294	
17	Disparpora	47.362.249.688	-	-	10.216.885.819	14.116.338.485	-	-	14.116.338.485	9.063.338.419	-	-	346.675.000	450.856.700	9.860.870.119	61.834.603.873	
18	Disperian	18.927.707.428	-	-	117.200.000	52.480.300	-	-	52.480.300	-	-	185.000.000	382.950.000	-	567.950.000	18.529.437.728	
19	Bappeda	1.739.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.739.990.000	
20	Bapenda	-	334.204.000	-	-	-	-	-	334.204.000	-	-	-	-	-	-	334.204.000	
21	BPKAD	9.926.022.010	-	502.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.204.000	9.423.818.010	
22	BKD	1.624.198.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.624.198.431	
23	Inspektoralat	976.388.530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	976.388.530	
24	Selwan	3.798.739.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.798.739.893	
25	Selda	22.392.248.000	-	-	299.884.000	198.735.000	-	-	198.735.000	-	-	299.884.000	-	-	299.884.000	22.590.983.000	
26	BPBD	980.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980.000.000	
27	Kesbangpolimas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mulasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mulasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPAT)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
28	Kec. Moga	792.918.900	-	-	26.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.168.900
29	Kec. Pulosari	1.311.043.000	-	-	49.972.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.361.015.000
30	Kec. Belik	1.022.490.400	-	-	48.845.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071.335.400
31	Kec. Watukumpul	1.572.026.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.572.026.300
32	Kec. Bodeh	672.091.449	-	-	64.003.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736.095.249
33	Kec. Bantarbolang	757.958.000	-	-	107.000.000	-	-	-	-	-	55.950.000	-	-	-	-	55.950.000	809.008.000
34	Kec. Randudongkal	1.051.481.400	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.251.481.400
35	Kec. Pemalang	1.699.225.650	4.673.010.025	-	9.000.000	-	-	-	4.673.010.025	-	-	-	-	-	-	-	6.381.235.675
36	Kec. Taman	653.121.900	1.019.162.000	-	-	-	-	-	1.019.162.000	-	-	-	-	-	-	-	1.672.283.900
37	Kec. Petarukan	754.416.000	935.493.000	-	60.126.000	-	-	-	935.493.000	60.126.000	-	-	-	-	-	60.126.000	1.689.909.000
38	Kec. Ampelgading	884.838.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	884.838.500
39	Kec. Comal	1.249.482.500	4.103.617.000	-	-	-	-	-	4.103.617.000	-	-	-	-	-	-	-	5.353.099.500
40	Kec. Ulujami	734.265.000	-	-	34.945.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769.210.000
41	Kec. Warungpring	982.712.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	982.712.000
	RSUD	42.876.716.754	-	42.876.716.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.876.716.754	0,00
	KKP	1.088.737.000	-	1.088.737.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.088.737.000	0,00
	Kel. Kebondalem	579.005.000	-	579.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	579.005.000	0,00
	Kel. Pelutan	732.213.500	-	732.213.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	732.213.500	0,00
	Kel. Sugihwaras	403.676.300	-	403.676.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.676.300	0,00
	Kel. Mulyoharjo	768.173.000	-	768.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	768.173.000	0,00
	Kel. Bojongbata	900.125.200	-	900.125.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.125.200	0,00
	Kel. Paduraksa	940.521.525	-	940.521.525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	940.521.525	0,00
	Kel. Widuri	349.295.500	-	349.295.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.295.500	0,00
	Kel. WanSel	511.907.000	-	511.907.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511.907.000	0,00
	Kel. Beji	507.255.000	-	507.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.255.000	0,00
	Kel. Petarukan	935.493.000	-	935.493.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	935.493.000	0,00
	Kel. Purwoharjo	4.103.617.000	-	4.103.617.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.103.617.000	0,00
	JUMLAH	987.056.554.385	66.980.428.081	66.980.428.081	144.210.358.951	29.105.982.806	484.884.000	10.088.411.232	106.659.706.119	50.299.767.851	55.950.000	484.884.000	1.349.200.200	8.034.568.279	719.077.790	127.923.876.201	1.110.002.743.254



5.5.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp797.795.196.188,00 dan Rp678.004.030.171,00.

No	SKPD	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	3.145.533.276,00	2.939.645.776,00	205.887.500,00
2	Dinkes	7.416.311.483,00	1.281.289.635,00	6.135.021.848,00
3	DPU TR	744.131.991.861,00	651.431.847.092,00	92.700.144.769,00
4	Disperkim	21.209.673.500,00	0,00	21.209.673.500,00
5	Dinsos KBPP	72.806.000,00	72.806.000,00	0,00
6	Disnaker	197.657.800,00	197.657.800,00	0,00
7	DLH	6.511.548.425,00	6.394.273.425,00	117.275.000,00
8	Disdukcatpil	319.977.750,00	319.977.750,00	0,00
9	Dinpermasdes	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	Dishub	3.029.861.000,00	3.029.861.000,00	0,00
11	Diskominfo	19.459.000,00	0,00	19.459.000,00
12	Diskoperindag	631.634.750,00	604.964.750,00	26.670.000,00
13	DPMPSTP	31.094.650,00	31.094.650,00	0,00
14	Dinpusarda	20.567.390,00	20.567.390,00	0,00
15	Disperik	1.335.310.153,00	1.165.438.153,00	169.872.000,00
16	Disparpora	6.438.840.900,00	6.438.840.900,00	0,00
17	Disperten	1.506.876.500,00	694.196.000,00	812.680.500,00
18	Bappeda	101.320.700,00	101.320.700,00	0,00
19	Bapenda	74.168.100,00	0,00	74.168.100,00
20	BPKAD	240.405.000,00	314.573.100,00	(74.168.100,00)
21	BKD	37.719.000,00	37.719.000,00	0,00
22	Selwan	294.856.125,00	294.856.125,00	0,00
23	Selda	569.958.500,00	305.494.500,00	264.464.000,00
24	K-Kesbangpolinmas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
25	Kec. Moga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
26	Kec. Pulosari	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
27	Kec. Belik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
28	Kec. Watukumpul	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
29	Kec. Bantarbolang	500.000,00	500.000,00	0,00
30	Kec. Randudongkal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
31	Kec. Pemalang	414.574.325,00	10.000.000,00	404.574.325,00
32	Kec Taman	6.200.000,00	2.500.000,00	3.700.000,00
33	Kec. Petarukan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
34	Kec. Ampelgading	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
35	Kec. Comal	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
36	Kec. Ulujami	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	Kec. Warungpring	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
	RSUD	0,00	1.869.982.100,00	(1.869.982.100,00)
	KKP	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)
	Kel. Pelutan	0,00	0,00	0,00
	Kel. Sugihwaras	0,00	13.468.325,00	(13.468.325,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	Kel. Bojombata	0,00	378.400.000,00	(378.400.000,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	1.300.000,00	(1.300.000,00)
	Kel. Widuri	0,00	2.906.000,00	(2.906.000,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)
	Kel. Beji	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)
	Kel. Petarukan	0,00	0,00	0,00
	Kel. Purw oharjo	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)
	Jumlah	797.795.196.188,00	678.004.030.171,00	119.791.166.017,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp119.791.166.071,00 atau 17,67%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2017 sebesar Rp94.178.467.430,00, terdapat perbedaan sebesar Rp25.612.698.587,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp48.508.763.905,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp22.896.065.318,00.



Mutasi penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2017 sebesar Rp48.508.763.905,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp9.394.991.025,00;
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa, Reklas dari sesama Aset Tetap, dan Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp37.541.333.880,00 terdiri dari :
Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.187.777.748,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.719.270.748,00 berupa IPAL di puskesmas;
 - Disperkim sebesar Rp14.468.507.000,00 berupa LPJU;Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp14.720.787.132,00 yaitu pada :
 - DPU TR sebesar Rp14.720.787.132,00 berupa jembatan Juwet karena pekerjaan sudah selesai;Reklas dari Aset Lain-lain sebesar Rp5.632.769.000,00 yaitu pada :
 - DPU TR sebesar Rp5.632.769.000,00 berupa Daerah Irigasi;
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp1.572.439.000,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp1.545.769.000,00 adalah hibah dari Kemenkes berupa bangunan pengambilan air bersih;
 - Diskoperindag sebesar Rp26.670.000,00 adalah hibah dari PDAU berupa bangunan membuang irigasi di lokasi pasar yang baru dicatat pada tahun 2017.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2017 sebesar Rp22.896.065.318,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp9.394.991.025,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp2.979.631.400,00 terdiri dari :
Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.796.000,00 yaitu pada :
 - Disperkim sebesar Rp8.796.000,00 berupa pesawat telepon;Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.903.234.400,00 yaitu pada :
 - Dinpermasdes sebesar Rp4.400.000,00 berupa bangunan pembuangan air hujan;
 - Disparpora sebesar Rp2.898.834.400,00 berupa bangunan obyek wisata;Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp67.601.000,00 yaitu pada :
 - Disparpora sebesar Rp67.601.000,00 berupa jalan track balap;
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp213.900.000,00 berupa pengecatan kolam renang pada Disparpora;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp10.307.542.893,00 terdiri dari :
Reklas ke Aset Lain-lain hasil verifikasi barang tidak ditemukan sebesar Rp1.211.725.000,00 yaitu pada :
 - DPU TR sebesar Rp1.032.000.000,00 berupa jalan;
 - DLH sebesar Rp179.725.000,00 berupa bangunan waduk/embung;Reklas ke Aset Lain-lain atas Aset yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2017 dan baru dapat dihapuskan pada tahun berikutnya sebesar Rp9.095.817.893,00, terdiri dari :
 - DPU TR sebesar Rp8.882.727.893,00 berupa peningkatan jalan evakuasi Gn. Slamet yang akan diserahkan ke pemerintah desa setempat;
 - Disparpora sebesar Rp213.090.000,00 adalah aset yang sudah diserahkan ke pemerintah desa setempat berupa peningkatan jalan Turangga Seta di Desa Cikendung;



Ringkasan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2017 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	9.394.991.025,00	
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	9.394.991.025,00	
		0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	0,00	
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	0,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	37.541.333.880,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	1.572.439.000,00	
		39.113.772.880,00
Kurang :		
- Reklas Aset	2.979.631.400,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	213.900.000,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	0,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	10.307.542.893,00	
		13.501.074.293,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		<u>25.612.698.587,00</u>
Belanja Modal		<u>94.178.467.430,00</u>
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA. 2017		<u><u>119.791.166.017,00</u></u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2017												Saldo Per 31-Des-2017	
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan		
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17				
1	Dindikbud	2.939.645.776	-	-	205.887.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.145.533.276
2	Dinkes	1.281.289.635	1.869.982.100	-	-	-	2.719.270.748	-	1.545.769.000	6.135.021.848	-	-	-	-	-	-	-	7.416.311.483
3	DPU TR	651.431.847.092	-	7.038.166.500	89.299.483.030	20.353.556.132	-	-	20.353.556.132	-	-	-	-	-	9.914.727.893	16.952.894.393	-	744.131.991.861
4	Disperkim	-	6.741.166.500	-	8.796.000	14.468.507.000	-	-	21.209.673.500	8.796.000	-	-	-	-	-	8.796.000	-	21.209.673.500
5	Saipol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinsos KBPP	72.806.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.806.000
7	Disnaker	197.657.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.657.800
8	DLH	6.394.273.425	297.000.000	-	-	-	-	-	297.000.000	-	-	-	-	-	179.725.000	179.725.000	-	6.511.548.425
9	Disdukcapil	319.977.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.977.750
10	Dinpermasdes	-	2.400.000	-	4.400.000	-	-	-	2.400.000	4.400.000	-	-	-	-	-	-	4.400.000	2.400.000
11	Dishub	3.029.861.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.029.861.000
12	Diskominfo	-	-	-	19.459.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.459.000
13	Diskoperindag	604.964.750	-	-	-	-	-	26.670.000	26.670.000	-	-	-	-	-	-	-	-	631.634.750
14	DPMPTSP	31.094.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.094.650
15	Dinpusarda	20.567.390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.567.390
16	Disperik	1.165.438.153	-	-	169.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.335.310.153
17	Disparpora	6.438.840.900	-	-	3.393.425.400	-	-	-	-	2.966.435.400	213.900.000	-	-	-	213.090.000	3.393.425.400	-	6.438.840.900
18	Disperlan	694.196.000	-	-	812.680.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.506.876.500
19	Bappeda	101.320.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.320.700
20	Bapenda	-	74.168.100	-	-	-	-	-	74.168.100	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100
21	BPKAD	314.573.100	-	74.168.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.168.100	-	240.405.000
22	BKD	37.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.719.000
23	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Setwan	294.856.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.856.125
25	Selida	305.494.500	-	-	264.464.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.958.500
26	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kesbangpolinmas	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Telap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Asew/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Telap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Compleable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
28	Kec. Moga	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
29	Kec. Pulosari	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000
30	Kec. Belik	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
31	Kec. Watukumpul	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
32	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Banlarbolang	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000
34	Kec. Randudongkal	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
35	Kec. Pemalang	10.000.000	404.574.325	-	-	-	-	-	404.574.325	-	-	-	-	-	-	-	414.574.325
36	Kec. Taman	2.500.000	3.700.000	-	-	-	-	-	3.700.000	-	-	-	-	-	-	-	6.200.000
37	Kec. Petarukan	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000
38	Kec. Ampelgading	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000
39	Kec. Comal	1.500.000	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
40	Kec. Ulujami	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000
41	Kec. Warungpring	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.000
	RSUD	1.869.982.100	-	1.869.982.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.869.982.100	0,00
	KKP	2.400.000	-	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000	0,00
	Kel. Kebondalem	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.500.000	0,00
	Kel. Pelulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kel. Sugihw aras	13.468.325	-	13.468.325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.468.325	0,00
	Kel. Mulyoharjo	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00
	Kel. Bojongsala	378.400.000	-	378.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.400.000	0,00
	Kel. Paduraksa	1.300.000	-	1.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.000	0,00
	Kel. Widuri	2.906.000	-	2.906.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.906.000	0,00
	Kel. WanSel	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	0,00
	Kel. Beji	2.200.000	-	2.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	0,00
	Kel. Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kel. Purwoharjo	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	0,00
	JUMLAH	678.004.030.171	9.394.991.025	9.394.991.025	94.178.467.430	37.541.333.880	-	1.572.439.000	48.508.763.905	2.979.631.400	213.900.000	-	-	-	10.307.542.893	22.896.065.318	797.795.196.188



5.5.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp81.172.202.063,00 dan Rp60.597.563.183,00.

No	SKPD	Aset Tetap Lainnya		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	78.021.130.282,00	57.856.472.932,00	20.164.657.350,00
2	Dinkes	180.579.980,00	37.071.400,00	143.508.580,00
3	DPU TR	192.950.010,00	191.188.210,00	1.761.800,00
4	Disperkim	3.866.000,00	0,00	3.866.000,00
5	Satpol PP	180.960.000,00	1.040.000,00	179.920.000,00
6	Dinsos KBPP	7.255.000,00	11.829.000,00	(4.574.000,00)
7	Disnaker	8.647.500,00	8.647.500,00	0,00
8	DLH	10.646.500,00	10.646.500,00	0,00
9	Disdukcapil	20.711.690,00	19.384.690,00	1.327.000,00
10	Dishub	2.271.900,00	2.271.900,00	0,00
11	Diskoperindag	17.138.700,00	16.488.700,00	650.000,00
12	DPMPSTP	19.302.500,00	16.577.000,00	2.725.500,00
13	Dinpusarda	1.085.278.540,00	964.828.540,00	120.450.000,00
14	Disperik	17.353.000,00	26.896.000,00	(9.543.000,00)
15	Disparpora	66.687.500,00	66.687.500,00	0,00
16	Dispartan	35.477.480,00	21.215.280,00	14.262.200,00
17	Bappeda	93.430.900,00	91.280.900,00	2.150.000,00
18	BPKAD	61.483.600,00	61.483.600,00	0,00
19	BKD	20.525.000,00	20.525.000,00	0,00
20	Inspektorat	9.451.000,00	9.451.000,00	0,00
21	Setwan	381.297.590,00	310.254.590,00	71.043.000,00
22	Setda	602.155.591,00	602.155.591,00	0,00
23	BPBD	1.869.300,00	1.114.700,00	754.600,00
24	K-Kesbangpolinmas	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
25	Kec. Moga	107.500,00	107.500,00	0,00
26	Kec. Belik	10.000,00	10.000,00	0,00
27	Kec. Watukumpul	30.000,00	30.000,00	0,00
28	Kec. Bodeh	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00
29	Kec. Randudongkal	65.000,00	65.000,00	0,00
35	Kec. Pemalang	60.014.250,00	9.076.500,00	50.937.750,00
36	Kec. Taman	20.557.500,00	915.000,00	19.642.500,00
37	Kec. Petarukan	38.455.250,00	1.831.000,00	36.624.250,00
38	Kec. Ampelgading	650.000,00	650.000,00	0,00
39	Kec. Comal	1.480.000,00	840.000,00	640.000,00
40	Kec. Ulujami	35.000,00	35.000,00	0,00
41	Kec. Warungpring	98.000,00	98.000,00	0,00
	RSUD	0,00	143.158.580,00	(143.158.580,00)
	KKP	0,00	5.012.200,00	(5.012.200,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	165.000,00	(165.000,00)
	Kel. Pelutan	0,00	418.000,00	(418.000,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	3.580.000,00	(3.580.000,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	22.674.250,00	(22.674.250,00)
	Kel. Bojongbata	0,00	353.250,00	(353.250,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	21.622.250,00	(21.622.250,00)
	Kel. Widuri	0,00	2.125.000,00	(2.125.000,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	2.835.000,00	(2.835.000,00)
	Kel. Beji	0,00	1.882.500,00	(1.882.500,00)
	Kel. Petarukan	0,00	21.699.250,00	(21.699.250,00)
	Kel. Purw oharjo	0,00	640.000,00	(640.000,00)
	Jumlah	81.172.202.063,00	60.597.563.183,00	20.574.638.250,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp20.574.638.250,00 atau 33,95%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 sebesar Rp28.135.262.813,00, terdapat perbedaan sebesar Rp7.560.624.563,00, hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp779.520.957,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp8.340.145.520,00.

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2017 sebesar Rp779.520.957,00 antara lain terdiri dari :



- Tindak Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp232.914.280,00;
- Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa Rp111.396.300,00 berupa pembelian buku dari belanja barang dan jasa; dan
- Mutasi Masuk antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp209.770.000,00 yaitu :
 - Drumband set pada Satpol PP sebesar Rp179.920.000,00 dari Dindikbud;
 - Buku pada Kec. Taman dan Kec. Petarukan masing-masing sebesar Rp14.925.000,00 dari Dinpusarda;
- Koreksi Pencatatan/Hibah sebesar Rp225.440.377,00 berupa pencatatan atas buku dan alat kesenian pada Dindikbud yang baru dicatat pada tahun ini.

Mutasi pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2017 sebesar Rp8.340.145.520,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan SKPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp232.914.280,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp2.687.001.073,00 terdiri dari :
 - Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.143.962.073,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.125.537.073,00 berupa peralatan dan perlengkapan kantor berasal dari Aset Tetap Renovasi pada RSUD;
 - Setwan sebesar Rp8.925.000,00 berupa sepeda statis alat fitness; dan
 - Kec. Pemalang sebesar Rp9.500.000,00 berupa papan informasi;
 - Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp497.016.000,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp179.855.000,00 berupa rehab gedung kantor yang berasal dari Aset Tetap Renovasi;
 - DLH sebesar Rp210.810.000,00 berupa tugu peringatan;
 - Disparpora sebesar Rp106.351.000,00 berupa gazebo di obyek wisata;
 - Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp46.023.000,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp46.023.000,00 berupa DED Lanjutan IGD RSUD;
- Tidak memenuhi Kapitalisasi/ke *extracomptable* sebesar Rp5.117.727.167,00 yaitu pada :
 - Dindikbud sebesar Rp4.746.455.788,00 berupa atk dan bahan pakai habis lainnya yang berasal dari Dana BOS;
 - Dinkes sebesar Rp366.320.379,00 berupa peralatan dan perlengkapan kantor, banner, brosur, dan papan akrilik yang berasal dari Aset Tetap Renovasi pada RSUD;
 - BPBD sebesar Rp4.951.000,00 berupa tanaman hias;
- Mutasi Keluar antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar Rp209.770.000,00 yaitu :
 - Drumband set pada Dindikbud sebesar Rp179.920.000,00 yang diserahkan ke Satpol PP; dan
 - Buku sebesar Rp29.850.000,00 pada Dinpusarda yang diserahkan ke Kec. Taman dan Kec. Petarukan masing-masing sebesar Rp14.925.000,00;
- Penghapusan berdasarkan SK Bupati sebesar Rp14.117.000,00 berupa Buku pada Dinsos KBPP sebesar Rp4.574.000,00 dan binatang ikan dan lambang garuda pada Disperik sebesar Rp9.543.000,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp78.616.000,00 adalah reklas ke Aset Lain-lain pada Disparpora berupa sarana permainan di obyek wisata Kaliprau yang diserahkan ke pemerintah desa setempat yang berasal dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2017 sehingga direklas terlebih dahulu ke Aset Lain-lain dan baru dihapuskan pada tahun 2018;



Ringkasan penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2017 :

<u>Uraian</u>		<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	232.914.280,00	
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	232.914.280,00	
		0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	209.770.000,00	
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	209.770.000,00	
		0,00
Tambah :		
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	111.396.300,00	
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	225.440.377,00	
		336.836.677,00
Kurang :		
- Reklas Aset	2.687.001.073,00	
- Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extracomptable	5.117.727.167,00	
- Koreksi Pencatatan Aset	0,00	
- Penghapusan	14.117.000,00	
- Reklas ke Aset Lainnya	78.616.000,00	
		7.897.461.240,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap		<u>(7.560.624.563,00)</u>
Belanja Modal		<u>28.135.262.813,00</u>
Penambahan Aset Tetap Lainnya TA. 2017		<u><u>20.574.638.250,00</u></u>



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2017												Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN							
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mulasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mulasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17			
1	Dindikbud	57.856.472.932	-	-	25.045.447.761	-	-	225.440.377	225.440.377	179.855.000	4.746.455.788	179.920.000	-	-	-	5.106.230.788	78.021.130.282
2	Dinkes	37.071.400	143.158.580	-	2.538.230.452	-	-	-	143.158.580	2.171.560.073	366.320.379	-	-	-	-	2.537.880.452	180.579.980
3	DPU TR	191.188.210	-	-	-	1.761.800	-	-	1.761.800	-	-	-	-	-	-	-	192.950.010
4	Disperkim	-	-	-	-	3.866.000	-	-	3.866.000	-	-	-	-	-	-	-	3.866.000
5	Salpol PP	1.040.000	-	-	-	-	179.920.000	-	179.920.000	-	-	-	-	-	-	-	180.960.000
6	Dinsos KBPP	11.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.574.000	-	4.574.000	7.255.000
7	Disnaker	8.647.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.647.500
8	DLH	10.646.500	-	-	210.810.000	-	-	-	-	210.810.000	-	-	-	-	-	210.810.000	10.646.500
9	Disdukcapil	19.384.690	-	-	1.327.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.711.690
10	Dinpermasdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dishub	2.271.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.271.900
12	Diskominfo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Diskoperindag	16.488.700	-	-	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.138.700
14	DPMP TSP	16.577.000	-	-	-	2.725.500	-	-	2.725.500	-	-	-	-	-	-	-	19.302.500
15	Dinpusarda	964.828.540	-	-	120.450.000	29.850.000	-	-	29.850.000	-	-	29.850.000	-	-	-	29.850.000	1.085.278.540
16	Disperik	26.896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.543.000	-	9.543.000	17.353.000
17	Disparpora	66.687.500	-	-	184.967.000	-	-	-	-	106.351.000	-	-	-	-	78.616.000	184.967.000	66.687.500
18	Disperlan	21.215.280	5.012.200	-	9.250.000	-	-	-	5.012.200	-	-	-	-	-	-	-	35.477.480
19	Bappeda	91.280.900	-	-	-	2.150.000	-	-	2.150.000	-	-	-	-	-	-	-	93.430.900
20	Bapenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	BPKAD	61.483.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.483.600
22	BKD	20.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.525.000
23	Inspektorat	9.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.451.000
24	Setwan	310.254.590	-	-	8.925.000	71.043.000	-	-	71.043.000	8.925.000	-	-	-	-	-	8.925.000	381.297.590
25	Selda	602.155.591	6.749.000	6.749.000	-	-	-	-	6.749.000	-	-	-	-	-	-	6.749.000	602.155.591
26	BPBD	1.114.700	-	-	5.705.600	-	-	-	-	-	4.951.000	-	-	-	-	4.951.000	1.869.300
27	Kesbangpolnmas	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI ASET TETAP - LAINNYA 2017												Saldo Per 31-Des-2017	
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	BM 2017	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN								
						Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Tidak Memenuhi Kapitalisasi/ke Extra Comptable	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPAT)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan		
4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15	16	17=5+11+12+13+14+15+16	18=6+10-17				
28	Kec. Moga	107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.500
29	Kec. Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Kec. Belik	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
31	Kec. Watukumpul	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000
32	Kec. Bodeh	6.030.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.030.000
33	Kec. Bantarbolang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kec. Randudongkal	65.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.000
35	Kec. Pemalang	9.076.500	50.937.750	-	9.500.000	-	-	-	50.937.750	9.500.000	-	-	-	-	-	-	9.500.000	60.014.250
36	Kec. Taman	915.000	4.717.500	-	-	-	14.925.000	-	19.642.500	-	-	-	-	-	-	-	-	20.557.500
37	Kec. Petarukan	1.831.000	21.699.250	-	-	-	14.925.000	-	36.624.250	-	-	-	-	-	-	-	-	38.455.250
38	Kec. Ampelgading	650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000
39	Kec. Comal	840.000	640.000	-	-	-	-	-	640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.480.000
40	Kec. Ulujami	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000
41	Kec. Warungpring	98.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.000
	RSUD	143.158.580	-	143.158.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.158.580	0
	KKP	5.012.200	-	5.012.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.012.200	0
	Kel. Kebondalem	165.000	-	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000	0
	Kel. Peluan	418.000	-	418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.000	0
	Kel. Sugihwaras	3.580.000	-	3.580.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.580.000	0
	Kel. Mulyoharjo	22.674.250	-	22.674.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.674.250	0
	Kel. Bojongbata	353.250	-	353.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.250	0
	Kel. Paduraksa	21.622.250	-	21.622.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.622.250	0
	Kel. Widuri	2.125.000	-	2.125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125.000	0
	Kel. WanSel	2.835.000	-	2.835.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.835.000	0
	Kel. Beji	1.882.500	-	1.882.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.882.500	0
	Kel. Petarukan	21.699.250	-	21.699.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.699.250	0
	Kel. Purwoharjo	640.000	-	640.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640.000	0
	JUMLAH	60.597.563.813	232.914.280	232.914.280	28.135.262.813	111.396.300	209.770.000	225.440.377	779.520.957	2.687.001.073	5.117.727.167	209.770.000	-	14.117.000	78.616.000	8.340.145.520	81.172.202.063	



5.5.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp43.151.327.311,00 dan Rp54.279.445.114,00.

No	SKPD	Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tambah/Kurang
		2017	2016	
1	Dindikbud	1.581.500.676,00	469.257.676,00	1.112.243.000,00
2	Dinkes	4.193.601.326,00	2.587.055.281,00	1.606.546.045,00
3	DPU TR	20.507.232.890,00	21.219.592.632,00	(712.359.742,00)
4	Disperkim	3.223.446.000,00	0,00	3.223.446.000,00
6	Dinsos KBPP	101.042.000,00	49.752.000,00	51.290.000,00
7	Disnaker	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
8	Disdukcapil	49.877.000,00	49.877.000,00	0,00
9	Dishub	100.765.000,00	49.980.000,00	50.785.000,00
10	Diskoperindag	3.611.212.000,00	14.558.045.740,00	(10.946.833.740,00)
11	Dinpusarda	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
12	Disperik	74.850.000,00	74.850.000,00	0,00
13	Disparpora	9.655.450.419,00	11.455.424.085,00	(1.799.973.666,00)
14	Kec. Ulujami	8.350.000,00	0,00	8.350.000,00
	RSUD	0,00	3.711.610.700,00	(3.711.610.700,00)
	Jumlah	43.151.327.311,00	54.279.445.114,00	(11.128.117.803,00)

Pada tahun 2017 terdapat pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp11.128.117.803,00 atau 20,50% hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp33.336.138.135,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp44.464.255.938,00.

Penambahan Aset Tetap KDP selama tahun 2017 sebesar Rp33.336.138.135,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Masuk antar SKPD karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp3.711.610.700,00;
- Kapitalisasi dari Non Belanja Modal dan Reklas dari sesama Aset Tetap/Persediaan sebesar Rp29.322.942.809,00 terdiri dari Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp8.350.000,00 yaitu berupa gambar RAB gedung kantor kecamatan pada Kec. Ulujami dan Reklas dari sesama Aset Tetap sebesar Rp29.314.592.809,00.

Reklas dari sesama Aset Tetap terdiri dari :

Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.200.968.809,00 yaitu pada :

- Dindikbud sebesar Rp1.112.243.000,00 berupa pembangunan gedung kesenian;
- Dinkes sebesar Rp134.383.000,00 berupa biaya pendukung pada pekerjaan pembangunan RS tipe D dan talud di Comal;
- DPU TR sebesar Rp14.868.318.390,00 berupa pembangunan gedung SKPD;
- Disperkim sebesar Rp3.223.446.000,00 berupa bangunan gapura perbatasan;
- Dinsos KBPP sebesar Rp51.290.000,00 berupa DED gedung kantor Dinsos KBPP;
- Dishub sebesar Rp50.785.000,00 berupa perencanaan pembangunan Terminal Grosir Comal;
- Diskoperindag sebesar Rp697.165.000,00 berupa :
 - ✓ DED pembangunan pasar sebesar Rp428.794.200,00; dan
 - ✓ penataan lahan pasar unggas sebesar Rp268.730.800,00;
- Disparpora sebesar Rp9.063.338.419,00 berupa :
 - ✓ Penataan kawasan OW Widuri sebesar Rp3.219.579.669,00;
 - ✓ Bangunan Gardu pandang gunung Slamet sebesar Rp61.731.500,00; dan
 - ✓ Bangunan Hotel Moga sebesar Rp5.782.027.250,00;

Reklas dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp67.601.000,00 yaitu pada :

- Disparpora sebesar Rp67.601.000,00 berupa peningkatan jalan balap track;



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



- Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp46.023.000,00 yaitu pada :
- Dinkes sebesar Rp46.023.000,00 berupa DED Lanjutan IGD RSUD;
 - Koreksi Pencatatan Aset/Hibah sebesar Rp301.584.626,00 yaitu pada Dinkes berupa progres pekerjaan pengurangan tanah dan pembangunan talud untuk RS Tipe D di Comal setelah dikurangi koreksi hasil pemeriksaan.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama tahun 2017 sebesar Rp44.464.255.938,00 terdiri dari :

- Mutasi Keluar antar SKPD karena Perubahan SKPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp3.711.610.700,00 yaitu dari RSUD yang sekarang menjadi bagian dari Dinkes;
- Reklas ke sesama Aset Tetap sebesar Rp39.892.754.238,00 terdiri dari :
Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp25.171.967.106,00 yaitu pada :
 - Dinkes sebesar Rp2.587.055.281,00 berupa bangunan puskesmas Randudongkal dan Watukumpul yang sudah selesai proses pembangunan;
 - Disnaker sebesar Rp10.000.000,00 berupa DED bangunan gedung kantor dimana pembangunan gedung telah selesai sehingga menambah nilai aset gedung kantor tersebut;
 - Diskoperindag sebesar Rp11.643.998.740,00 berupa bangunan pasar Petarukan dan Randudongkal karena sudah dapat digunakan; dan
 - Disparpora sebesar Rp10.930.913.085,00 berupa DED dan bangunan kolam renang karena sudah selesai pengerjaan;

Reklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp14.720.787.132,00 yaitu pada :

- DPU TR sebesar Rp14.720.787.132,00 berupa jembatan Juwet yang sudah selesai proses pembangunan;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp859.891.000,00 pada DPU TR berupa DED gedung dan bangunan yang direklas ke Aset Lainnya karena sudah tidak sesuai lagi.

Ringkasan pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2017 :

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	3.711.610.700,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	3.711.610.700,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	0,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	0,00
	0,00
Tambah :	
- Kapitalisasi Non BM dan Reklas Aset	29.322.942.809,00
- Koreksi Pencatatan Aset/Hibah	301.584.626,00
	29.624.527.435,00
Kurang :	
- Reklas Aset	39.892.754.238,00
- Reklas ke Aset Lainnya	859.891.000,00
	40.752.645.238,00
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap	<u>(11.128.117.803,00)</u>
Belanja Modal	0,00
Pengurangan KDP TA. 2017	<u>(11.128.117.803,00)</u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Kontruksi Dalam Pengerjaan TA.2017 dari seluruh SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI PENAMBAHAN			MUTASI PENGURANGAN			Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Kapitalisasi Non BM/ Reklas dari Sesama Aset Tetap	Koreksi Pencatatan Ase/ Hibah	Total Penambahan	Reklas ke Sesama Aset Tetap	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	Dindikbud	469.257.676	-	-	1.112.243.000	-	1.112.243.000	-	-	-	1.581.500.676
2	Dinkes	2.587.055.281	3.711.610.700	-	180.406.000	301.584.626	4.193.601.326	2.587.055.281	-	2.587.055.281	4.193.601.326
3	DPU TR	21.219.592.632	-	-	14.868.318.390	-	14.868.318.390	14.720.787.132	859.891.000	15.580.678.132	20.507.232.890
4	Disperkim	0	-	-	3.223.446.000	-	3.223.446.000	-	-	-	3.223.446.000
5	Dinsos KBPP	49.752.000	-	-	51.290.000	-	51.290.000	-	-	-	101.042.000
6	Disnaker	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	0
7	Disdukcatpil	49.877.000	-	-	-	-	-	-	-	-	49.877.000
8	Dishub	49.980.000	-	-	50.785.000	-	50.785.000	-	-	-	100.765.000
9	Diskoperindag	14.558.045.740	-	-	697.165.000	-	697.165.000	11.643.998.740	-	11.643.998.740	3.611.212.000
10	Dinpusarda	44.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000.000
11	Disperik	74.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	74.850.000
12	Disparpora	11.455.424.085	-	-	9.130.939.419	-	9.130.939.419	10.930.913.085	-	10.930.913.085	9.655.450.419
13	Kec. Ulujami	0	-	-	8.350.000	-	8.350.000	-	-	-	8.350.000
	RSUD	3.711.610.700	-	3.711.610.700	-	-	-	-	-	3.711.610.700	0
	JUMLAH	54.279.445.114	3.711.610.700	3.711.610.700	29.322.942.809	301.584.626	33.336.138.135	39.892.754.238	859.891.000	44.464.255.938	43.151.327.311



Daftar Pekerjaan yang masih berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

1	DINDIKBUD		1.581.500.676	
		Bangunan SMPN 4 Randudongkal	75.191.876	2012
		Bangunan SDN 3 Gunungjaya	30.829.000	2012
		Bangunan SDN 2 Bodas	40.256.000	2012
		Bangunan SMPN Satu Alap Tlagasana	63.814.000	2012
		Perencanaan APBD II PAUD Desa Tumbal	9.000.000	2013
		Perencanaan APBD II PAUD	9.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 4 Ampelgading	54.000.000	2013
		Rehabilitasi DAK 2013 dan APBD II SMPN 2 Warungpring	54.000.000	2013
		Rehabilitasi ruang kelas DAK 2013 dan APBD II SDN 1 Surajaya	81.672.400	2013
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	14.997.400	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	9.999.000	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	4.999.500	2014
		Tanah Bangunan Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000	2014
		Dindik 2017 (URUGAN) Rencana di bangun Gedung Kesenian Taman Budaya	1.112.243.000	2017
2	DINKES		4.193.601.326	
		KDP pengurangan tanah untuk rumah sakit comal DED + Progres penyelesaian fisik 8,437 % dari nilai kontrak	435.967.626	2017
		DED Pembangunan IGD+Gedung IGD(BLUD 2016)	3.711.610.700	2016
		46.023.000	2017	
		20.507.232.890		
3	DPU TR		30.000.000	2010
		Pematangan tanah rusunawa	50.000.000	2011
		Pematangan tanah rusunawa	167.547.000	2012
		Perencanaan Teknis Pematangan tanah rusunawa	7.200.000	2012
		DED Review Kantor BKD	49.720.000	2013
		Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Sekda	49.898.000	2014
		Perencanaan Gedung Sasana Bhakti Praja	49.880.000	2014
		Perencanaan Rehabilitasi/Renovasi Pasar Pagi	49.980.000	2015
		Urugan lahan rencana pembangunan rusunawa 2017	199.189.000	2016
		Pengurangan tanah untuk gedung DPRD	2.790.076.000	2016
		DED Gedung DPRD Kabupaten Pemalang	49.885.000	2016
		DED Bangunan Gedung BKD Kabupaten Pemalang	49.560.000	2016
		DED Kantor Kelurahan Widuri	52.598.000	2016
		DED kantor kelurahan kebondalem	49.929.000	2016
		Penataan Lingkungan Rusunawa	230.564.000	2016
		DED Masjid Agung dan Sayembara design Masjid Agung	467.659.500	2016
		Review Master Plan Sport Centre	49.850.000	2016
		Perkerasan jalan ruko Stadion Mochtar	217.968.000	2016
		Lanjutan Penataan Kawasan Stadion Mochtar	976.091.000	2016
		DED Wisma Pemalang di Yogyakarta	51.320.000	2016
		Pengurangan tanah untuk gedung DPRD	2.252.432.032	2017
		Pembangunan Gedung DPRD Kab. Pemalang	7.861.532.022	2017
		Pembangunan gedung BKD Kabupaten Pemalang	1.649.918.912	2017
		Pembuatan masterplan lingkungan Kantor Bupati Pemalang	50.735.117	2017
		Penataan Kawasan Stadion Mochtar	587.816.855	2017
		Pembangunan Wisma Pemalang di Yogyakarta	2.465.883.452	2017
		4	DISPERKIM	
Gapura Perbatasan Tegal-Pemalang	1.521.483.500			2017
Tugu Batas Jalan Di. Panjaitan Pemalang	1.701.962.500			2017
5	DINSOS KBPP		101.042.000	
		Design Engineering Detail	49.752.000	2016
		Detail Engineering Design (DED)	51.290.000	2017
6	DISDUKCATPIL		49.877.000	
		Masterplan	49.877.000	2012
7	DISHUB		100.765.000	
		DED di Sub Terminal Angkutan	49.980.000	2016
		Perencanaan Rehabilitasi Sub Terminal Grosir Comal	50.785.000	2017
8	DISKOPERINDAG		3.611.212.000	
		Pengurangan Pasar Unggas	2.914.047.000	2016
		Perataan dan pemadatan lahan pasar unggas, pembuatan senderan pasar unggas	268.370.800	2017
		DED Pasar Pemalang	299.117.400	2017
		Perencanaan Rehab Pasar Randudongkal I dan II	129.676.800	2017
9	DINPUSARDA		44.000.000	
		DED Gedung Perpustakaan	44.000.000	2003
10	DISPERIK		74.850.000	
		Jembatan Penyebrangan Orang	29.900.000	2013
		Bangunan	44.950.000	2014



NO	SKPD	PEKERJAAN	NILAI	TAHUN PEROLEHAN
11	DISPARPORA		9.655.450.419	
		DED Pembangunan Gedung Kesenian	49.967.000	2014
		penataan kawasaan road race	34.970.000	2015
		DED GK	44.000.000	2015
		Pagar Kel Widuri	34.970.000	2015
		DED Gardu Selamat Dalang	20.000.000	2015
		DED Gardu Pandang Gg Slamet Pulosari	49.940.000	2016
		DED Rumah Budaya	83.400.000	2016
		DED Pesanggrahan / OW Moga Kec. Moga	128.820.000	2016
		DED Susur kali comal	78.444.000	2016
		Kios Sirkuit	3.219.579.669	2017
		Pos Jaga Gunung Slamet	61.731.500	2017
		Hotel Moga	5.782.027.250	2017
		Peningkatan Jalan Road Race	67.601.000	2017
12	KEC. ULUJAMI		8.350.000	
		DED Gedung Kantor	8.350.000	2017
		JUMLAH	43.151.327.311	

5.5.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp955.956.236.271,00 dan Rp847.148.406.671,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Penyusutan Aset Tetap	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	243.457.336.526,00	201.957.180.037,00	41.500.156.489,00
2	Gedung dan Bangunan	340.222.856.372,00	321.848.320.484,00	18.374.535.888,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	372.276.043.373,00	323.342.906.150,00	48.933.137.223,00
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	955.956.236.271,00	847.148.406.671,00	108.807.829.600,00

Selain mutasi Aset Tetap, juga terdapat mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tanggal 3 Januari 2017 karena aset-aset yang dimutasikan juga termasuk akumulasi penyusutan aset tetapnya yang ada didalamnya. Secara konsolidasian tidak terdapat perbedaan antara saldo 31 Desember 2017 dengan saldo 3 Januari 2017 pada saat terjadinya perubahan OPD.

No	Akumulasi Penyusutan	Saldo per 31 Desember 2016	Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		Saldo per 31 Desember 2017
			Masuk	Keluar	
1	Peralatan dan Mesin	201.957.180.037,00	110.074.438.091,00	68.574.281.602,00	243.457.336.526,00
2	Gedung dan Bangunan	321.848.320.484,00	36.184.735.140,00	17.810.199.252,00	340.222.856.372,00
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	323.342.906.150,00	52.014.915.922,00	3.081.778.699,00	372.276.043.373,00
		847.148.406.671,00	198.274.089.153,00	89.466.259.553,00	955.956.236.271,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp108.807.829.600,00 atau 12,84%. Penambahan sebesar Rp198.274.089.153,00 terdiri dari Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp111.052.484.287,00 dan mutasi penambahan sebesar Rp87.221.604.866,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp2.244.654.687,00 antara Beban Penyusutan Aset Tetap dengan Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp87.221.604.866,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp89.466.259.553,00.

Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp87.221.604.866,00, antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk karena Perubahan OPD sebesar Rp79.138.854.487,00;
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp2.911.277.411,00;



- Mutasi Masuk antar SKPD sebesar Rp5.156.730.951,00;
- Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp14.742.017,00.

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 sebesar Rp89.466.259.553,00 berupa :

- Mutasi Keluar karena Perubahan OPD sebesar Rp79.138.854.487,00;
- Mutasi Keluar Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp5.156.730.951,00;
- Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp531.236.504,00 terdiri dari :
 - Koreksi pencatatan aset sebesar Rp59,00;
 - Koreksi pencatatan karena dobel pencatatan sebesar Rp68.931.000,00;
 - Koreksi pencatatan karena adanya kapitalisasi aset tetap yang menambah masa manfaat sehingga mempengaruhi saldo akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp462.305.445,00.
- Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp3.582.969.235,00; dan
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp1.056.468.376,00,

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan tahun 2017 :

Uraian	Perubahan Nilai
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	79.138.854.487,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	79.138.854.487,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	5.156.730.951,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	5.156.730.951,00
	0,00
Tambah :	
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	2.911.277.411,00
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	14.742.017,00
	2.926.019.428,00
Kurang :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	531.236.504,00
- Penghapusan	3.582.969.235,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	1.056.468.376,00
	5.170.674.115,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan	<u>(2.244.654.687,00)</u>
Beban Penyusutan	<u>111.052.484.287,00</u>
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2017	<u><u>108.807.829.600,00</u></u>



Adapun saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2017 dan 2016 yang merupakan saldo konsolidasi dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Dindikbud	293.564.376.978,00	275.612.199.991,00	17.952.176.987,00
2	Dinkes	115.595.620.615,00	38.356.743.557,00	77.238.877.058,00
3	DPU TR	377.345.626.922,00	335.911.500.903,00	41.434.126.019,00
4	Disperkim	3.975.399.889,00	0,00	3.975.399.889,00
5	Satpol PP	2.921.376.469,00	1.126.251.238,00	1.795.125.231,00
6	Dinsos KBPP	5.600.789.567,00	5.054.612.584,00	546.176.983,00
7	Disnaker	3.340.008.751,00	2.931.342.888,00	408.665.863,00
8	DLH	7.966.936.915,00	2.587.452.772,00	5.379.484.143,00
9	Disdukcapil	4.216.055.224,00	3.246.909.101,00	969.146.123,00
10	Dinpermasdes	1.544.522.185,00	0,00	1.544.522.185,00
11	Dishub	11.711.065.588,00	10.498.976.704,00	1.212.088.884,00
12	Diskominfo	2.921.533.905,00	0,00	2.921.533.905,00
13	Diskoperindag	26.832.028.227,00	24.613.899.691,00	2.218.128.536,00
14	DPMPTSP	1.219.990.474,00	889.679.591,00	330.310.883,00
15	Dinpusarda	1.650.201.836,00	1.348.214.318,00	301.987.518,00
16	Disperik	4.266.806.753,00	3.517.677.372,00	749.129.381,00
17	Disparpora	13.534.626.603,00	11.959.227.040,00	1.575.399.563,00
18	Dispartan	6.496.272.118,00	5.155.267.647,00	1.341.004.471,00
19	Bappeda	3.151.385.239,00	2.641.684.036,00	509.701.203,00
20	Bapenda	2.687.539.150,00	0,00	2.687.539.150,00
21	BPKAD	15.116.950.975,00	15.675.602.771,00	(558.651.796,00)
22	BKD	2.826.656.638,00	2.501.593.447,00	325.063.191,00
23	Inspektorat	1.835.885.099,00	1.446.032.875,00	389.852.224,00
24	Setwan	8.391.965.570,00	8.964.940.488,00	(572.974.918,00)
25	Setda	19.907.337.197,00	18.994.588.947,00	912.748.250,00
26	BPBD	2.111.954.757,00	3.077.044.260,00	(965.089.503,00)
27	K-Kesbangpolinmas	722.068.860,00	629.503.964,00	92.564.896,00
28	Kec. Moga	536.784.891,00	426.474.467,00	110.310.424,00
29	Kec. Pulosari	729.163.232,00	614.227.102,00	114.936.130,00
30	Kec. Belik	743.497.071,00	628.460.090,00	115.036.981,00
31	Kec. Watukumpul	892.606.776,00	789.757.752,00	102.849.024,00
32	Kec. Bodeh	705.038.979,00	613.065.044,00	91.973.935,00
33	Kec. Bantarbolang	726.711.393,00	634.709.397,00	92.001.996,00
34	Kec. Randudongkal	600.641.627,00	495.321.462,00	105.320.165,00
35	Kec. Pemalang	3.309.102.240,00	797.022.287,00	2.512.079.953,00
36	Kec Taman	1.031.309.655,00	425.016.508,00	606.293.147,00
37	Kec. Petarukan	934.232.002,00	613.839.642,00	320.392.360,00
38	Kec. Ampelgading	716.807.654,00	641.572.158,00	75.235.496,00
39	Kec. Comal	2.149.074.515,00	818.358.010,00	1.330.716.505,00
40	Kec. Ulujami	803.550.063,00	693.210.710,00	110.339.353,00
41	Kec. Warungpring	622.733.669,00	529.324.978,00	93.408.691,00
	RSUD	0,00	57.136.338.625,00	(57.136.338.625,00)
	KKP	0,00	729.499.350,00	(729.499.350,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	230.002.545,00	(230.002.545,00)
	Kel. Pelutan	0,00	302.731.226,00	(302.731.226,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	156.555.570,00	(156.555.570,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	273.019.333,00	(273.019.333,00)
	Kel. Bojongbata	0,00	734.866.505,00	(734.866.505,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	275.535.175,00	(275.535.175,00)
	Kel. Widuri	0,00	173.824.959,00	(173.824.959,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	209.962.281,00	(209.962.281,00)
	Kel. Beji	0,00	208.119.579,00	(208.119.579,00)
	Kel. Petarukan	0,00	164.456.000,00	(164.456.000,00)
	Kel. Purwoharjo	0,00	1.092.189.731,00	(1.092.189.731,00)
	Jumlah	955.956.236.271,00	847.148.406.671,00	108.807.829.600,00

Jenis Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk masing-masing SKPD dapat dirinci sebagai berikut :



1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp243.457.336.526,00 dan Rp201.957.180.037,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Dindikbud	51.648.358.825,00	44.580.098.519,00	7.068.260.306,00
2	Dinkes	86.025.679.119,00	21.871.428.085,00	64.154.251.034,00
3	DPU TR	14.240.118.416,00	17.476.089.672,00	(3.235.971.256,00)
4	Disperkim	1.441.282.232,00	0,00	1.441.282.232,00
5	Salpol PP	2.722.429.027,00	932.712.446,00	1.789.716.581,00
6	Dinsos KBPP	5.322.481.014,00	4.805.990.800,00	516.490.214,00
7	Disnaker	2.420.793.302,00	2.102.718.553,00	318.074.749,00
8	DLH	5.478.321.786,00	1.374.160.750,00	4.104.161.036,00
9	Disdukcatpil	3.799.415.572,00	2.869.751.892,00	929.663.680,00
10	Dinpermasdes	1.197.708.132,00	0,00	1.197.708.132,00
11	Dishub	2.341.861.867,00	2.549.406.034,00	(207.544.167,00)
12	Diskominfo	2.843.480.680,00	0,00	2.843.480.680,00
13	Diskoperindag	3.255.487.643,00	2.465.415.316,00	790.072.327,00
14	DPMPTSP	1.145.823.818,00	852.425.307,00	293.398.511,00
15	Dinpusarda	1.192.414.999,00	905.714.976,00	286.700.023,00
16	Disperik	2.586.439.907,00	2.058.586.210,00	527.853.697,00
17	Disparpora	2.824.428.429,00	2.336.944.185,00	487.484.244,00
18	Dispartan	3.772.413.725,00	2.702.834.559,00	1.069.579.166,00
19	Bappeda	2.779.839.095,00	2.299.516.248,00	480.322.847,00
20	Bapenda	2.647.693.774,00	0,00	2.647.693.774,00
21	BPKAD	10.902.086.625,00	11.589.233.282,00	(687.146.657,00)
22	BKD	2.385.846.709,00	2.092.746.658,00	293.100.051,00
23	Inspektoral	1.582.073.119,00	1.205.391.360,00	376.681.759,00
24	Setwan	6.311.291.975,00	6.962.380.445,00	(651.088.470,00)
25	Selda	13.320.766.842,00	12.851.945.405,00	468.821.437,00
26	BPBD	1.385.121.424,00	2.369.810.927,00	(984.689.503,00)
27	K-Kesbangpolinmas	719.358.789,00	626.864.727,00	92.494.062,00
28	Kec. Moga	378.673.475,00	284.426.802,00	94.246.673,00
29	Kec. Pulosari	398.018.914,00	308.754.089,00	89.264.825,00
30	Kec. Belik	403.295.474,00	308.323.515,00	94.971.959,00
31	Kec. Watukumpul	405.312.428,00	327.259.460,00	78.052.968,00
32	Kec. Bodeh	359.922.323,00	281.575.724,00	78.346.599,00
33	Kec. Bantarbolang	396.073.261,00	307.341.845,00	88.731.416,00
34	Kec. Randudongkal	368.335.309,00	277.614.520,00	90.720.789,00
35	Kec. Pemalang	1.399.315.008,00	405.512.148,00	993.802.860,00
36	Kec Taman	680.573.612,00	322.673.108,00	357.900.504,00
37	Kec. Pelarukan	557.540.652,00	318.897.739,00	238.642.913,00
38	Kec. Ampelgading	473.470.779,00	385.964.809,00	87.505.970,00
39	Kec. Comal	605.589.777,00	313.302.688,00	292.287.089,00
40	Kec. Ulujami	400.406.232,00	302.574.876,00	97.831.356,00
41	Kec. Warungpring	337.792.437,00	264.135.486,00	73.656.951,00
	RSUD	0,00	46.007.059.339,00	(46.007.059.339,00)
	KKP	0,00	443.828.168,00	(443.828.168,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	93.324.886,00	(93.324.886,00)
	Kel. Pelutan	0,00	129.370.224,00	(129.370.224,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	62.353.292,00	(62.353.292,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	121.380.543,00	(121.380.543,00)
	Kel. Bojongsata	0,00	89.821.915,00	(89.821.915,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	130.932.049,00	(130.932.049,00)
	Kel. Widuri	0,00	109.842.788,00	(109.842.788,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	87.090.058,00	(87.090.058,00)
	Kel. Beji	0,00	111.978.173,00	(111.978.173,00)
	Kel. Petarukan	0,00	115.721.295,00	(115.721.295,00)
	Kel. Purwoharjo	0,00	163.954.142,00	(163.954.142,00)
	Jumlah	243.457.336.526,00	201.957.180.037,00	41.500.156.489,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp41.500.156.489,00 atau 20,55%. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2017 adalah sebesar Rp42.459.758.354,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp959.601.865,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp67.614.679.737,00 dan pengurangan sebesar Rp68.574.281.602,00.



Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp67.614.679.737,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp62.517.457.097,00;
- Mutasi masuk Aset antar SKPD sebesar Rp5.097.222.618,00;
- Koreksi atas pencatatan aset sebesar Rp22,00 berupa koreksi pencatatan atas Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin .

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp68.574.281.602,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp62.517.457.097,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Mutasi Aset antar SKPD sebesar Rp5.097.222.618,00;
- Koreksi Pencatatan Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.452.625,00 terdiri dari :
 - Koreksi akumulasi penyusutan karena pengaruh pembulatan sebesar Rp58,00;
 - Koreksi akumulasi penyusutan karena pencatatan aset tetap yang menambah masa manfaat sehingga mempengaruhi saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.452.567,00.
- Penghapusan sebesar Rp921.349.262,00;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp3.800.000,00, yaitu reklas atas aset yang rusak berat, akan dihapuskan, maupun yang akan diserahkan/dihibahkan.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2017 :

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	62.517.457.097,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	62.517.457.097,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	5.097.222.618,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	5.097.222.618,00
	0,00
Tambah :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	22,00
	22,00
Kurang :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	34.452.625,00
- Penghapusan	921.349.262,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	3.800.000,00
	959.601.887,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan	<u>(959.601.865,00)</u>
Beban Penyusutan	42.459.758.354,00
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2017	<u><u>41.500.156.489,00</u></u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Telap/Aset Lainnya	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
1	Dindikbud	44.580.098.519	-	213.306.667	7.080.365.908		201.201.100	20	201.201.120	-	55	-	-	213.306.722	51.648.358.825
2	Dinkes	21.871.428.085	46.007.059.339	171.969.000	18.435.620.695		32.040.000	-	46.039.099.339	148.500.000	-	-	-	320.469.000	86.025.679.119
3	DPU TR	17.476.089.672	-	4.181.996.475	752.025.908		879.529.986	-	879.529.986	519.231.175	-	166.299.500	-	4.867.527.150	14.240.118.416
4	Disperkim	-	1.148.264.068	-	205.317.539		87.700.625	-	1.235.964.693	-	-	-	-	-	1.441.282.232
5	Salpol PP	932.712.446	1.403.293.595	-	170.853.939		215.569.047	-	1.618.862.642	-	-	-	-	-	2.722.429.027
6	Dinsos KBPP	4.805.990.800	657.599.034	1.037.776.356	837.871.580		105.000.000	-	762.599.034	32.040.000	14.164.044	-	-	1.083.980.400	5.322.481.014
7	Disnaker	2.102.718.553	530.287.452	627.599.034	423.945.110		-	-	530.287.452	-	8.558.779	-	-	636.157.813	2.420.793.302
8	DLH	1.374.160.750	3.307.442.142	-	1.037.487.719		519.231.175	-	3.826.673.317	760.000.000	-	-	-	760.000.000	5.478.321.786
9	Disdukcapil	2.869.751.892	296.116.000	105.000.000	780.663.680		154.000.000	-	450.116.000	196.116.000	-	-	-	301.116.000	3.799.415.572
10	Dinpermasdes	-	889.013.257	-	308.694.875		-	-	889.013.257	-	-	-	-	-	1.197.708.132
11	Dishub	2.549.406.034	142.811.959	569.741.899	361.838.774		358.959	-	143.170.918	142.811.959	1	-	-	712.553.859	2.341.861.867
12	Diskominfo	-	1.831.692.570	-	957.084.595		160.125.563	-	1.991.818.133	105.422.047	1	-	-	105.422.048	2.843.480.680
13	Diskoperindag	2.465.415.316	-	40.000.000	605.353.327		224.719.000	-	224.719.000	-	-	-	-	40.000.000	3.255.487.643
14	DPMPSTSP	852.425.307	148.306.667	75.907.115	246.305.626		123.000.000	-	271.306.667	148.306.667	-	-	-	224.213.782	1.145.823.818
15	Dinpusarda	905.714.976	70.000.000	-	150.658.356		66.041.667	-	136.041.667	-	-	-	-	-	1.192.414.999
16	Disperik	2.058.586.210	-	-	527.853.697		-	-	-	-	-	-	-	-	2.586.439.907
17	Disparpora	2.336.944.185	35.000.000	-	452.484.244		-	-	35.000.000	-	-	-	-	-	2.824.428.429
18	Disperlan	2.702.834.559	352.918.672	-	777.060.494		-	-	352.918.672	-	-	60.400.000	-	60.400.000	3.772.413.725
19	Bappeda	2.299.516.248	32.921.500	-	460.346.495		-	-	32.921.501	12.945.149	-	-	-	12.945.149	2.779.839.095
20	Bapenda	-	2.544.709.301	-	290.783.849		200.625	-	2.544.909.926	188.000.000	1	-	-	188.000.001	2.647.693.774
21	BPKAD	11.589.233.282	442.034.000	2.983.191.547	1.089.437.289		881.542.601	-	1.323.576.601	116.969.000	-	-	-	3.100.160.547	10.902.086.625
22	BKD	2.092.746.658	-	157.000.000	335.150.051		114.950.000	-	114.950.000	-	-	-	-	157.000.000	2.385.846.709
23	Inspektoralat	1.205.391.360	-	-	227.919.933		275.561.826	-	275.561.826	123.000.000	-	-	3.800.000	126.800.000	1.582.073.119
24	Setwan	6.962.380.445	-	643.823.994	1.596.206.975		-	-	-	1.603.471.451	-	-	-	2.247.295.445	6.311.291.975
25	Setda	12.851.945.405	1.462.218.176	2.725.194.543	2.385.992.956		1.048.236.381	-	2.510.454.557	996.052.027	11.729.744	694.649.762	-	4.427.626.076	13.320.766.842
26	BPBD	2.369.810.927	-	1.318.293.595	333.604.092		-	-	-	-	-	-	-	1.318.293.595	1.385.121.424
27	Kesbangpolinmas	626.864.727	-	-	91.851.205		5.000.000	-	5.000.000	4.357.143	-	-	-	4.357.143	719.358.789



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
 Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	Mulasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Asef/ Hibah	Total Penambahan	Mulasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
28	Kec. Moga	284.426.802	-	-	94.246.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.673.475
29	Kec. Pulosari	308.754.089	-	-	89.264.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.018.914
30	Kec. Belik	308.323.515	-	-	94.971.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.295.474
31	Kec. Watukumpul	327.259.460	-	-	78.052.968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405.312.428
32	Kec. Bodeh	281.575.724	-	-	78.346.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.922.323
33	Kec. Bantarbolang	307.341.845	-	-	88.731.416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396.073.261
34	Kec. Randudongkal	277.614.520	-	-	87.506.726	-	3.214.063	-	3.214.063	-	-	-	-	-	368.335.309
35	Kec. Pemalang	405.512.148	737.025.697	-	256.777.162	-	-	1	737.025.698	-	-	-	-	-	1.399.315.008
36	Kec. Taman	322.673.108	199.068.231	-	158.832.273	-	-	-	199.068.231	-	-	-	-	-	680.573.612
37	Kec. Pelarukan	318.897.739	115.721.295	-	122.921.618	-	-	-	115.721.295	-	-	-	-	-	557.540.652
38	Kec. Ampelgading	385.964.809	-	-	87.505.970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473.470.779
39	Kec. Comal	313.302.688	163.954.142	-	128.332.947	-	-	-	163.954.142	-	-	-	-	-	605.589.777
40	Kec. Ulujami	302.574.876	-	-	97.831.356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.406.232
41	Kec. Warungpring	264.135.486	-	-	73.656.951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337.792.437
	RSUD	46.007.059.339	-	46.007.059.339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.007.059.339	0,00
	KKP	443.828.168	-	443.828.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443.828.168	0,00
	Kel. Kebondalem	93.324.886	-	93.324.886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.324.886	0,00
	Kel. Pelutan	129.370.224	-	129.370.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.370.224	0,00
	Kel. Sugihw aras	62.353.292	-	62.353.292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.353.292	0,00
	Kel. Mulyoharjo	121.380.543	-	121.380.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.380.543	0,00
	Kel. Bojongbata	89.821.915	-	89.821.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.821.915	0,00
	Kel. Paduraksa	130.932.049	-	130.932.049	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.932.049	0,00
	Kel. Widuri	109.842.788	-	109.842.788	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.842.788	0,00
	Kel. WanSel	87.090.058	-	87.090.058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.090.058	0,00
	Kel. Beji	111.978.173	-	111.978.173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.978.173	0,00
	Kel. Pelarukan	115.721.295	-	115.721.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.721.295	0,00
	Kel. Purwoharjo	163.954.142	-	163.954.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.954.142	0,00
	JUMLAH	201.957.180.037	62.517.457.097	62.517.457.097	42.459.758.354	-	5.097.222.618	22	67.614.679.737	5.097.222.618	34.452.625	921.349.262	3.800.000	68.574.281.602	243.457.336.526



2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp340.222.856.372,00 dan Rp321.848.420.484,00 dengan sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Dindikbud	240.068.810.333,00	229.242.019.829,00	10.826.790.504,00
2	Dinkes	28.624.821.801,00	16.194.007.320,00	12.430.814.481,00
3	DPU TR	3.491.946.022,00	4.487.121.633,00	(995.175.611,00)
4	Disperkim	1.156.193.277,00	0,00	1.156.193.277,00
5	Satpol PP	198.947.442,00	193.538.792,00	5.408.650,00
6	Dinsos KBPP	266.329.091,00	238.504.140,00	27.824.951,00
7	Disnaker	894.409.243,00	808.762.258,00	85.646.985,00
8	DLH	725.256.071,00	201.231.246,00	524.024.825,00
9	Disdukcapil	332.693.550,00	304.000.347,00	28.693.203,00
10	Dinpermasdes	345.969.053,00	0,00	345.969.053,00
11	Dishub	6.589.322.250,00	5.436.042.183,00	1.153.280.067,00
12	Diskominfo	77.891.067,00	0,00	77.891.067,00
13	Diskoperindag	23.211.758.419,00	21.793.099.962,00	1.418.658.457,00
14	DPMPPTSP	71.769.777,00	35.634.771,00	36.135.006,00
15	Dinpusarda	452.275.122,00	437.613.982,00	14.661.140,00
16	Disperik	1.169.031.087,00	984.589.295,00	184.441.792,00
17	Disparpora	8.356.995.746,00	7.752.508.490,00	604.487.256,00
18	Dispartan	2.623.956.024,00	2.376.810.819,00	247.145.205,00
19	Bappeda	354.381.607,00	327.550.853,00	26.830.754,00
20	Bapenda	31.294.847,00	0,00	31.294.847,00
21	BPKAD	4.169.667.839,00	4.042.199.276,00	127.468.563,00
22	BKD	439.081.141,00	408.060.976,00	31.020.165,00
23	Inspektorat	253.811.980,00	240.641.515,00	13.170.465,00
24	Setwan	1.996.358.079,00	1.928.397.466,00	67.960.613,00
25	Setda	6.525.285.426,00	6.090.400.796,00	434.884.630,00
26	BPBD	726.833.333,00	707.233.333,00	19.600.000,00
27	Kec. Moga	157.231.208,00	141.229.957,00	16.001.251,00
28	Kec. Pulosari	328.503.697,00	303.019.890,00	25.483.807,00
29	Kec. Belik	339.321.389,00	319.318.867,00	20.002.522,00
30	Kec. Watukumpul	486.238.098,00	461.517.042,00	24.721.056,00
31	Kec. Bodeh	345.116.656,00	331.489.320,00	13.627.336,00
32	Kec. Bantarbolang	330.411.049,00	327.165.469,00	3.245.580,00
33	Kec. Randudongkal	231.250.068,00	216.725.692,00	14.524.376,00
34	Kec. Pemalang	1.657.593.706,00	386.954.581,00	1.270.639.125,00
35	Kec. Taman	347.777.222,00	101.198.608,00	246.578.614,00
36	Kec. Petarukan	376.463.225,00	294.751.278,00	81.711.947,00
37	Kec. Ampelgading	241.754.584,00	254.112.558,00	(12.357.974,00)
38	Kec. Comal	1.541.476.405,00	503.777.197,00	1.037.699.208,00
39	Kec. Ulujami	401.256.331,00	388.798.334,00	12.457.997,00
40	Kec. Warungpring	283.373.107,00	263.718.867,00	19.654.240,00
	RSUD	0,00	10.679.138.030,00	(10.679.138.030,00)
	KKP	0,00	284.886.182,00	(284.886.182,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	135.788.770,00	(135.788.770,00)
	Kel. Pelutan	0,00	173.361.002,00	(173.361.002,00)
	Kel. Sugihwaras	0,00	92.108.140,00	(92.108.140,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	150.766.569,00	(150.766.569,00)
	Kel. Bojongbata	0,00	408.630.144,00	(408.630.144,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	143.462.918,00	(143.462.918,00)
	Kel. Widuri	0,00	62.686.267,00	(62.686.267,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	122.125.348,00	(122.125.348,00)
	Kel. Beji	0,00	95.280.086,00	(95.280.086,00)
	Kel. Petarukan	0,00	48.734.705,00	(48.734.705,00)
	Kel. Purwoharjo	0,00	927.605.381,00	(927.605.381,00)
	Jumlah	340.222.856.372,00	321.848.320.484,00	18.374.535.888,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp18.374.535.888,00 atau 5,71%. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2017 adalah sebesar Rp21.511.966.815,00, terdapat perbedaan sebesar Rp3.137.430.927,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp14.672.768.325,00 dan pengurangan sebesar Rp17.810.199.252,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.672.768.325,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp14.598.518.001,00;
- Mutasi Masuk Aset antar SKPD sebesar Rp59.508.333,00; dan
- Koreksi Akumulasi Penyusutan dan Hibah sebesar Rp14.741.991,00 berupa koreksi pencatatan aset.

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.810.199.252,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp14.598.518.001,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Mutasi Keluar Aset antar SKPD sebesar Rp59.508.333,00;
- Koreksi Pencatatan Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp490.552.945,00 terdiri dari :
 - Koreksi akumulasi penyusutan karena pengaruh pembulatan sebesar Rp1,00;
 - Koreksi karena dobel pencatatan aset sebesar Rp68.931.000,00;
 - Koreksi akumulasi penyusutan karena pencatatan aset tetap yang menambah masa manfaat sehingga mempengaruhi saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp421.621.944,00
- Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.661.619.973,00;

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2017:

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	14.598.518.001,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	14.598.518.001,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	59.508.333,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	59.508.333,00
	0,00
Tambah :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	14.741.991,00
	14.741.991,00
Kurang :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	490.552.945,00
- Penghapusan	2.661.619.973,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	0,00
	3.152.172.918,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan	<u>(3.137.430.927,00)</u>
Beban Penyusutan	<u>21.511.966.815,00</u>
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2017	<u><u>18.374.535.888,00</u></u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Telap/Aset Lainnya	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
1	Dindikbud	229.242.019.829	-	-	10.826.790.504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.068.810.333
2	Dinkes	16.194.007.320	10.679.138.030	-	2.245.242.359	-	-	1	10.679.138.031	-	180.283.481	313.282.428	-	493.565.909	28.624.821.801
3	DPU TR	4.487.121.633	-	1.205.049.172	216.541.843	-	-	-	-	-	6.668.282	-	-	1.211.717.454	3.491.946.022
4	Disperkim	-	763.075.587	-	393.117.690	-	-	-	763.075.587	-	-	-	-	-	1.156.193.277
5	Satpol PP	193.538.792	-	-	8.402.884	-	-	-	-	-	2.994.234	-	-	2.994.234	198.947.442
6	Dinsos KBPP	238.504.140	-	33.428.169	61.253.120	-	-	-	-	-	-	-	-	33.428.169	266.329.091
7	Disnaker	808.762.258	-	-	85.646.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894.409.243
8	DLH	201.231.246	452.333.585	-	71.691.240	-	-	-	452.333.585	-	-	-	-	-	725.256.071
9	Disdukcapil	304.000.347	-	-	30.662.744	-	-	-	-	-	1.969.541	-	-	1.969.541	332.693.550
10	Dinpermasdes	-	318.314.351	-	27.654.702	-	-	-	318.314.351	-	-	-	-	-	345.969.053
11	Dishub	5.436.042.183	-	-	1.164.473.268	-	-	-	-	-	11.193.201	-	-	11.193.201	6.589.322.250
12	Diskominfo	-	-	-	18.382.734	-	59.508.333	-	59.508.333	-	-	-	-	-	77.891.067
13	Diskoperindag	21.793.099.962	-	-	3.604.246.157	-	-	-	-	-	37.166.072	2.148.421.628	-	2.185.587.700	23.211.758.419
14	DPMPTSP	35.634.771	-	-	36.135.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.769.777
15	Dinpusarda	437.613.982	-	-	14.661.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.275.122
16	Disperik	984.589.295	-	-	184.441.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.169.031.087
17	Disparpora	7.752.508.490	-	-	885.388.858	-	-	-	-	-	80.985.685	199.915.917	-	280.901.602	8.356.995.746
18	Disperian	2.376.810.819	-	-	370.233.583	-	-	10.833.333	10.833.333	59.508.333	74.413.378	-	-	133.921.711	2.623.956.024
19	Bappeda	327.550.853	-	-	32.639.674	-	-	-	-	-	5.808.920	-	-	5.808.920	354.381.607
20	Bapenda	-	25.107.118	-	6.549.680	-	-	-	25.107.118	-	361.951	-	-	361.951	31.294.847
21	BPKAD	4.042.199.276	-	35.467.118	162.935.681	-	-	-	-	-	-	-	-	35.467.118	4.169.667.839
22	BKD	408.060.976	-	-	32.211.598	-	-	-	-	-	1.191.433	-	-	1.191.433	439.081.141
23	Inspektoral	240.641.515	-	-	17.648.940	-	-	-	-	-	4.478.475	-	-	4.478.475	253.811.980
24	Setwan	1.928.397.466	-	-	72.921.232	-	-	-	-	-	4.960.619	-	-	4.960.619	1.996.358.079
25	Setda	6.090.400.796	-	-	434.884.630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.525.285.426
26	BPBD	707.233.333	-	-	19.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726.833.333
27	Kesbangpolinmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Telap/Aset Lainnya	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Asef/ Hibah	Total Penambahan	Mutasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
28	Kec. Moga	141.229.957	-	-	16.001.251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.231.208
29	Kec. Pulosari	303.019.890	-	-	25.483.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.503.697
30	Kec. Belik	319.318.867	-	-	20.002.522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339.321.389
31	Kec. Wakukumpul	461.517.042	-	-	29.639.750	-	-	-	-	-	4.918.694	-	-	4.918.694	486.238.098
32	Kec. Bodeh	331.489.320	-	-	13.627.336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.116.656
33	Kec. Banlarbolang	327.165.469	-	-	16.226.265	-	-	-	-	-	12.980.685	-	-	12.980.685	330.411.049
34	Kec. Randudongkal	216.725.692	-	-	20.612.563	-	-	-	-	-	6.088.187	-	-	6.088.187	231.250.068
35	Kec. Pemalang	386.954.581	1.166.803.810	-	125.107.633	-	-	-	1.166.803.810	-	-	-	-	21.272.318	1.657.593.706
36	Kec. Taman	101.198.608	217.405.434	-	30.968.168	-	-	-	217.405.434	-	1.794.988	-	-	1.794.988	347.777.222
37	Kec. Petarukan	294.751.278	48.734.705	-	32.977.242	-	-	-	48.734.705	-	-	-	-	-	376.463.225
38	Kec. Ampelgading	254.112.558	-	-	13.827.034	-	-	-	-	-	26.185.008	-	-	26.185.008	241.754.584
39	Kec. Comal	503.777.197	927.605.381	-	108.579.227	-	-	3.908.657	931.514.038	-	2.394.057	-	-	2.394.057	1.541.476.405
40	Kec. Ulujami	388.798.334	-	-	14.901.733	-	-	-	-	-	2.443.736	-	-	2.443.736	401.256.331
41	Kec. Warungpring	263.718.867	-	-	19.654.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.373.107
	RSUD	10.679.138.030	-	10.679.138.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.679.138.030	0,00
	KKP	284.886.182	-	284.886.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.886.182	0,00
	Kel. Kebondalem	135.788.770	-	135.788.770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.788.770	0,00
	Kel. Pelutan	173.361.002	-	173.361.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.361.002	0,00
	Kel. Sugihwas	92.108.140	-	92.108.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.108.140	0,00
	Kel. Mulyoharjo	150.766.569	-	150.766.569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.766.569	0,00
	Kel. Bojongbala	408.630.144	-	408.630.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.630.144	0,00
	Kel. Paduraksa	143.462.918	-	143.462.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.462.918	0,00
	Kel. Widuri	62.686.267	-	62.686.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.686.267	0,00
	Kel. WanSel	122.125.348	-	122.125.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.125.348	0,00
	Kel. Beji	95.280.086	-	95.280.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.280.086	0,00
	Kel. Petarukan	48.734.705	-	48.734.705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.734.705	0,00
	Kel. Purwoharjo	927.605.381	-	927.605.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927.605.381	0,00
	JUMLAH	321.848.320.484	14.598.518.001	14.598.518.001	21.511.966.815	-	59.508.333	14.741.991	14.672.768.325	59.508.333	490.552.945	2.661.619.973	-	17.810.199.252	340.222.856.372



3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp372.276.043.373,00 dan Rp323.342.906.150,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)	Tambah/Kurang (Rp)
1	Dindikbud	1.847.207.820,00	1.790.081.643,00	57.126.177,00
2	Dinkes	945.119.695,00	291.308.152,00	653.811.543,00
3	DPU TR	359.613.562.484,00	313.948.289.598,00	45.665.272.886,00
4	Disperkim	1.377.924.380,00	0,00	1.377.924.380,00
5	Dinsos KBPP	11.979.462,00	10.117.644,00	1.861.818,00
6	Disnaker	24.806.206,00	19.862.077,00	4.944.129,00
7	DLH	1.763.359.058,00	1.012.060.776,00	751.298.282,00
8	Disdukcapil	83.946.102,00	73.156.862,00	10.789.240,00
9	Dinpermasdes	845.000,00	0,00	845.000,00
10	Dishub	2.779.881.471,00	2.513.528.487,00	266.352.984,00
11	Diskominfo	162.158,00	0,00	162.158,00
12	Diskoperindag	364.782.165,00	355.384.413,00	9.397.752,00
13	DPMPTSP	2.396.879,00	1.619.513,00	777.366,00
14	Dinpusarda	5.511.715,00	4.885.360,00	626.355,00
15	Disperik	511.335.759,00	474.501.867,00	36.833.892,00
16	Disparpora	2.353.202.428,00	1.869.774.365,00	483.428.063,00
17	Disperlan	99.902.369,00	75.622.269,00	24.280.100,00
18	Bappeda	17.164.537,00	14.616.935,00	2.547.602,00
19	Bapenda	8.550.529,00	0,00	8.550.529,00
20	BPKAD	45.196.511,00	44.170.213,00	1.026.298,00
21	BKD	1.728.788,00	785.813,00	942.975,00
22	Setwan	84.315.516,00	74.162.577,00	10.152.939,00
23	Setda	61.284.929,00	52.242.746,00	9.042.183,00
24	K-Kesbangpolinmas	2.710.071,00	2.639.237,00	70.834,00
25	Kec. Moga	880.208,00	817.708,00	62.500,00
26	Kec. Pulosari	2.640.621,00	2.453.123,00	187.498,00
27	Kec. Belik	880.208,00	817.708,00	62.500,00
28	Kec. Watukumpul	1.056.250,00	981.250,00	75.000,00
29	Kec. Banjarbolang	227.083,00	202.083,00	25.000,00
30	Kec. Randudongkal	1.056.250,00	981.250,00	75.000,00
31	Kec. Pemalang	252.193.526,00	4.555.558,00	247.637.968,00
32	Kec Taman	2.958.821,00	1.144.792,00	1.814.029,00
33	Kec. Petarukan	228.125,00	190.625,00	37.500,00
34	Kec. Ampelgading	1.582.291,00	1.494.791,00	87.500,00
35	Kec. Comal	2.008.333,00	1.278.125,00	730.208,00
36	Kec. Ulujami	1.887.500,00	1.837.500,00	50.000,00
37	Kec. Warungpring	1.568.125,00	1.470.625,00	97.500,00
	RSUD	0,00	450.141.256,00	(450.141.256,00)
	KKP	0,00	785.000,00	(785.000,00)
	Kel. Kebondalem	0,00	888.889,00	(888.889,00)
	Kel. Pelutan	0,00	0,00	0,00
	Kel. Sugihwaras	0,00	2.094.138,00	(2.094.138,00)
	Kel. Mulyoharjo	0,00	872.221,00	(872.221,00)
	Kel. Bojongbata	0,00	236.414.446,00	(236.414.446,00)
	Kel. Paduraksa	0,00	1.140.208,00	(1.140.208,00)
	Kel. Widuri	0,00	1.295.904,00	(1.295.904,00)
	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	746.875,00	(746.875,00)
	Kel. Beji	0,00	861.320,00	(861.320,00)
	Kel. Petarukan	0,00	0,00	0,00
	Kel. Purwoharjo	0,00	630.208,00	(630.208,00)
	Jumlah	372.276.043.373,00	323.342.906.150,00	48.933.137.223,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp48.933.137.223,00 atau 15,13%. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2017 adalah sebesar Rp47.080.759.118,00, terdapat perbedaan sebesar Rp1.852.378.105,00 hal ini karena pengaruh adanya mutasi penambahan sebesar Rp2.022.879.393,00 dan pengurangan sebesar Rp3.081.778.699,00.



Mutasi penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.022.879.393,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Masuk karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar sebesar Rp2.022.879.389,00;
- Koreksi akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan karena pencatatan aset sebesar Rp4,00.

Mutasi pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.081.778.699,00 antara lain terdiri dari :

- Mutasi Keluar karena Perubahan OPD pada 3 Januari 2017 sebesar Rp2.022.879.389,00 terutama SKPD-SKPD yang menjadi bagian dari Dinkes dan Kecamatan, serta SKPD yang dihapuskan;
- Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp6.230.934,00 karena pencatatan aset tetap yang menambah masa manfaat sehingga mempengaruhi saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- Reklas ke Aset Lainnya/Persediaan sebesar Rp1.052.668.376,00 berupa reklas akumulasi penyusutan atas aset yang direklas ke Aset Lain-lain pada DPU TR dan DLH hasil verifikasi aset.

Ringkasan penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2017:

<u>Uraian</u>	<u>Perubahan Nilai</u>
Mutasi Masuk karena Perubahan OPD	2.022.879.389,00
Mutasi Keluar karena Perubahan OPD	2.022.879.389,00
	0,00
Mutasi Masuk antar SKPD TA. 2017	0,00
Mutasi Keluar antar SKPD TA. 2017	0,00
	0,00
Tambah :	
- Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	2.911.277.411,00
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	4,00
	2.911.277.415,00
Kurang :	
- Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan	6.230.934,00
- Penghapusan	0,00
- Reklas ke Aset Lain-lain	1.052.668.376,00
	1.058.899.310,00
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan	<u>1.852.378.105,00</u>
Beban Penyusutan	<u>47.080.759.118,00</u>
Penambahan Akumulasi Penyusutan TA. 2017	<u><u>48.933.137.223,00</u></u>



Akumulasi/penjumlahan mutasi penambahan dan pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2017 dari beberapa SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Tetap/Aset Lainnya	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset/ Hibah	Total Penambahan	Mulasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
1	Dindikbud	1.790.081.643	-	-	57.126.175	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1.847.207.820
2	Dinkes	291.308.152	450.141.256	-	203.670.287	-	-	-	450.141.256	-	-	-	-	-	945.119.695
3	DPU TR	313.948.289.598	-	1.320.312.597	45.106.308.070	2.911.277.411	-	2	2.911.277.413	-	-	-	1.032.000.000	2.352.312.597	359.613.562.484
4	Disperkim	-	1.063.385.931	-	314.538.449	-	-	-	1.063.385.931	-	-	-	-	-	1.377.924.380
5	Satpol PP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dinsos KBPP	10.117.644	-	-	1.861.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.979.462
7	Disnaker	19.862.077	-	-	4.944.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.806.206
8	DLH	1.012.060.776	256.926.666	-	515.039.992	-	-	-	256.926.666	-	-	-	20.668.376	20.668.376	1.763.359.058
9	Disdukcapil	73.156.862	-	-	10.789.240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.946.102
10	Dinpermasdes	-	785.000	-	60.000	-	-	-	785.000	-	-	-	-	-	845.000
11	Dishub	2.513.528.487	-	-	266.352.984	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779.881.471
12	Diskominfo	-	-	-	162.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.158
13	Diskoperindag	355.384.413	-	-	9.397.752	-	-	-	-	-	-	-	-	-	364.782.165
14	DPMPTSP	1.619.513	-	-	777.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.396.879
15	Dinpusarda	4.885.360	-	-	626.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.511.715
16	Disperik	474.501.867	-	-	36.833.892	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511.335.759
17	Disparpora	1.869.774.365	-	-	487.802.213	-	-	-	-	-	4.374.150	-	-	4.374.150	2.353.202.428
18	Disperian	75.622.269	-	-	24.280.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.902.369
19	Bappeda	14.616.935	-	-	2.547.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.164.537
20	Bapenda	-	6.696.327	-	1.854.202	-	-	-	6.696.327	-	-	-	-	-	8.550.529
21	BPKAD	44.170.213	-	6.696.327	7.722.625	-	-	-	-	-	-	-	-	6.696.327	45.196.511
22	BKD	785.813	-	-	942.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.728.788
23	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Setwan	74.162.577	-	-	12.009.723	-	-	-	-	-	1.856.784	-	-	1.856.784	84.315.516
25	Setda	52.242.746	-	-	9.042.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.284.929
26	BPBD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Kesbangpolinmas	2.639.237	-	-	70.834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.710.071



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

No	SKPD	Saldo Per 31-Des-2016	MUTASI PERUBAHAN OPD		MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2017										Saldo Per 31-Des-2017
			MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	Beban Penyusutan	MUTASI PENAMBAHAN				MUTASI PENGURANGAN					
						Reklas dari Aset Telap/Aset Lainnya	Mutasi Masuk antar SKPD	Koreksi Pencatatan Ase/ Hibah	Total Penambahan	Mulasi Keluar antar SKPD	Koreksi Pencatatan Aset	Penghapusan (SK BUPATI)	Reklas ke Aset Lainnya/ Persediaan	Total Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7+8+9	11	12	13	14	15=5+11+12+13+14	16=3+6+10-15
28	Kec. Moga	817.708	-	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.208
29	Kec. Pulosari	2.453.123	-	-	187.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.640.621
30	Kec. Belik	817.708	-	-	62.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.208
31	Kec. Watukumpul	981.250	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.250
32	Kec. Bodeh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kec. Banjarbolang	202.083	-	-	25.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	227.083
34	Kec. Randudongkal	981.250	-	-	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.056.250
35	Kec. Pemalang	4.555.558	242.705.806	-	4.932.162	-	-	-	242.705.806	-	-	-	-	-	252.193.526
36	Kec. Taman	1.144.792	1.608.195	-	205.834	-	-	-	1.608.195	-	-	-	-	-	2.958.821
37	Kec. Petarukan	190.625	-	-	37.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.125
38	Kec. Ampelgading	1.494.791	-	-	87.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.582.291
39	Kec. Comal	1.278.125	630.208	-	100.000	-	-	-	630.208	-	-	-	-	-	2.008.333
40	Kec. Ulujami	1.837.500	-	-	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.887.500
41	Kec. Warungpring	1.470.625	-	-	97.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.568.125
	RSUD	450.141.256	-	450.141.256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.141.256	0,00
	KKP	785.000	-	785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785.000	0,00
	Kel. Kebondalem	888.889	-	888.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	888.889	0,00
	Kel. Pelulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kel. Sugihwaras	2.094.138	-	2.094.138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094.138	0,00
	Kel. Mulyoharjo	872.221	-	872.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	872.221	0,00
	Kel. Bojongsala	236.414.446	-	236.414.446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.414.446	0,00
	Kel. Paduraksa	1.140.208	-	1.140.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.140.208	0,00
	Kel. Widuri	1.295.904	-	1.295.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295.904	0,00
	Kel. WanSel	746.875	-	746.875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746.875	0,00
	Kel. Beji	861.320	-	861.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	861.320	0,00
	Kel. Petarukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Kel. Purwoharjo	630.208	-	630.208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630.208	0,00
	JUMLAH	323.342.906.150	2.022.879.389	2.022.879.389	47.080.759.118	2.911.277.411	-	4	4.934.156.804	-	6.230.934	-	1.052.668.376	3.081.778.699	372.276.043.373



4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dikarenakan Aset Tetap Lainnya yang berupa Buku, Terbitan, Hewan, dan Tanaman tidak dilakukan penyusutan, sedangkan Aset Tetap Lainnya yang berupa Aset Renovasi sudah direklas ke Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya sehingga telah disusutkan sebagai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.



5.3.1.4. ASET LAINNYA

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Pemalang Per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp234.788.353.442,00 dan Rp284.090.279.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Lainnya		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	599.760.000,00	667.550.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Aset dalam Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
4	Aset Tidak Berwujud	5.282.471.462,00	4.259.214.462,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.935.849.310,00)	(3.573.758.256,00)
6	Aset lain-lain	293.474.635.950,00	352.516.101.233,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(69.162.164.660,00)	(78.308.328.165,00)
Jumlah		234.788.353.442,00	284.090.279.274,00

5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp599.760.000,00 dan Rp667.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kerugian	Saldo 2016	Mutasi 2017		Saldo 2017
			Tambah	Kurang	
1	Tunjangan Purna Bhakti DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	237.220.000,00	0,00	10.000.000,00	227.220.000,00
2	TGR dari Pembayaran Premi Asuransi CAR Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 1999 s.d. 2004	164.500.000,00	0,00	5.000.000,00	159.500.000,00
3	TGR dari Pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s.d. 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah	138.270.000,00	0,00	5.340.000,00	132.930.000,00
4	TGR atas hilangnya kendaraan bermotor roda empat Nopol G 8 D	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9603 CD pada UPPK Moga a.n.	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9740 M pada UPPU Belik a.n. Slamet	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9795 AD pada UPPK Belik a.n.	2.245.000,00	0,00	450.000,00	1.795.000,00
6	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9973 AD pada Kepala Desa Gintung Kec. Comal a.n. Rijono	7.315.000,00	0,00	0,00	7.315.000,00
7	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9945 AD pada Kepala Desa Singkang Kec. Pelarukan a.n. Hari Pamungkas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
8	TGR hilangnya komputer pada Kepala SMPN 1 Pemalang a.n. Sri	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	0,00
9	TGR hilangnya 12 CPU pada Kepala SMPN 4 Banjarbolang a.n. Nasari,	43.800.000,00	0,00	0,00	43.800.000,00
10	TGR hilangnya 15 CPU pada mantan Kepala SMPN 5 Pemalang a.n.	38.700.000,00	0,00	38.700.000,00	0,00
11	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9796 CD a.n. Heriadi, S.P.	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
12	TGR atas hilangnya Sepeda Motor G 9927 AD pada Kepala Desa Bumirejo Kec. Ulujami a.n. Untung Suroso	5.800.000,00	0,00	600.000,00	5.200.000,00
13	TGR atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak An. Jamal Abdul Aziz, S.Pd.M.Si Kepala sekolah SMP N 3 Bantarbolang sebesar Rp.1.575.000	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
Jumlah		667.550.000,00	1.575.000,00	69.365.000,00	599.760.000,00

- Pengurangan TGR dari Tunjangan Purna Bakti Anggota DPRD Kab. Pemalang periode 1999 s/d 2004 berkurang sebesar Rp10.000.000,00 berasal dari setoran tanggal 6 Maret 2017 An. H. Abu Sujangi;
- Pengurangan TGR dari pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Pemalang periode 1999 s/d 2004 yang berasal dari Pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan berkurang sebesar Rp5.000.000,00 berasal dari setoran tanggal 6 Maret 2017 An. H. Abu Sujangi;



- Pengurangan TGR dari pengurangan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pemalang periode 2004 s/d 2009 yang berasal dari pos Sekretariat Daerah yang tidak sesuai ketentuan berkurang sebesar Rp5.340.000,00 berasal dari setoran tanggal 31 Oktober 2017 sebesar Rp5.340.000,00;
- Pengurangan TGR hilangnya Sepeda Motor G 9795 BD terhadap Sdr. Achmad Bahrudin Pengawas TK/SD UPPK Belik pada Dindikbud berkurang sebesar Rp450.000,00 berasal dari setoran tanggal 2 Agustus 2017 sebesar Rp450.000,00;
- Pengurangan TGR hilangnya 1 Unit keyboard merk Yamaha, 1 unit monitor LCD merk LG, 2 unit PC merk Compaq, 1 unit CPU merk Compaq, 1 unit CPU merk LG dan 1 unit monitor merk Acer terhadap Sdr. Sri Andayani, S.Pd Kepala SMP N 1 Pemalang, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 1 Juni 2016 berkurang sebesar Rp6.750.000,00 berasal dari setoran tanggal 24 Januari 2017, setoran tanggal 7 Februari 2017, setoran 10 Maret 2017, setoran tanggal 19 April 2017, setoran tanggal 16 Mei 2017, setoran tanggal 8 Juni 2017, setoran tanggal 6 Juli 2017, setoran tanggal 23 Agustus 2017, setoran tanggal 12 September 2017 masing-masing sebesar @Rp750.000,00;
- Pengurangan TGR hilangnya 15 CPU pada Mantan Kepala SMP N 5 Pemalang An. Hartati. S.Pd sebesar Rp38.700.000,00 berasal dari setoran tanggal 24 Januari 2017 berkurang sebesar Rp8.075.000,00, Setoran tanggal 9 februari 2017 sebesar Rp4.951.000,00, setoran tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp8.000.000,00 setoran tanggal 29 Mei 2017 sebesar Rp8.000.000,00 setoran tanggal 31 Mei 2017 sebesar Rp8.000.000,00 setoran tanggal 4 Desember 2017 sebesar Rp1.674.000,00;
- Pengurangan TGR hilangnya sepeda motor G 9796 CD An. Heriadi SP dari Dipertanhut sebesar Rp950.000,00 berasal dari setoran tanggal 21 Maret 2017;
- Pengurangan TGR hilangnya Sepeda Motor G 9927 AD terhadap Sdr. Untung Suroso Kepala Desa Bumi Rejo Kecamatan Ulujami sebesar Rp600.000,00 berasal dari setoran tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp600.000,00;
- Penambahan TGR hilangnya 15 unit mesin jahit merk butterfly tahun 2003 dan 3 unit mesin obras merek butterfly tahun 2003 pertanggal 2 Agustus 2017, berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 2 Agustus 2017 An. Jamal Abdul Aziz, S.Pd. M.Si kepala sekolah SMP N 3 bantarbolang berkurang sebanyak Rp1.575.000,00 setoran pertanggal 7 Agustus 2017 sebanyak Rp1.575.000,00,;

5.3.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	No Sertifikat & Tanggal	Luas (m ²)	Saldo 2017	Saldo 2016
Tanah Sirandu Mall	Hak Pengelolaan No. 2 Tgl 10 Maret 2003	12.185	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00
Jumlah	-	-	8.529.500.000,00	8.529.500.000,00

- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengelola Kemitraan dengan Pihak Ketiga antara pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan pihak PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta untuk kerjasama bagi tempat usaha dalam pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di kawasan bekas Terminal Sirandu. Kemitraan tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 17/KBBP/III/2002 tentang Surat Perjanjian Kerjasama



Kontrak Bagi Tempat Usaha dalam rangka Pembangunan Pusat Perdagangan, Grosir dan Rekreasi Pemalang yang ditandatangani hari Kamis tanggal 14 Maret 2002 oleh Bupati Pemalang Bapak H.M. Macroes, SH dengan Direktur Utama PT. KARSA BAYU BANGUN PERKASA Jakarta, Bapak T. Susilo Handoko. Masa berlaku Surat perjanjian kerjasama adalah 30 tahun atau dari tahun 2002 s/d 2032. PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa menyertakan modalnya berupa modal kerja untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana senilai Rp14.524.250.500,00 berupa:

1. Rumah dan toko (ruko) 2 (dua) lantai;
2. Toko 1 (satu) lantai;
3. Departemen store/Swalayan/Pusat Grosir 2 (dua) lantai;
4. Selaras Ruko;
5. Selaras Toko;
6. Selasar Departemen store/Swalayan/Pusat Grosir;
7. Pager keliling $\pm 64,5 \text{ M}^2$;
8. Lapangan parkir dan jalan $\pm 5.153,56 \text{ M}^2$;
9. Pos jaga $\pm 4 \text{ M}^2$;
10. Selasar jaga $\pm 8 \text{ M}^2$;
11. MCK/kamar mandi $\pm 18 \text{ M}^2$;
12. Lampu taman HPL 125 watt 8 unit;
13. Lampu taman HPL 250 watt 25 unit;
14. Mushola $\pm 30 \text{ M}^2$;
15. Tempat wudhu $\pm 12 \text{ M}^2$;
16. Taman lingkungan 1 LS;
17. Trotoar $\pm 147,5 \text{ M}^2$;
18. Kansteen trotoar $\pm 238,5 \text{ M}^2$;
19. Rambu lalu lintas 18 unit;
20. Instalasi listrik jalan dan taman 1 LS;
21. Saluran induk tutup plat beton 1.036 M;
22. Saluran anak (MD-40) tutup gril besi $\pm 708,70 \text{ M}$;
23. Saluran drainase lapangan $\pm 58 \text{ M}$;
24. Pengadaan air bersih 1 LS;
25. Papan nama dan gapura 1 LS;
26. Selasar MCK dan musholla seluas $\pm 20 \text{ M}^2$;
27. Titik kran hydrant 4 unit (tanpa instalasi) ;
28. Gerobak dan tong sampah 1 LS.

5.3.1.4.3. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.282.471.462,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp4.259.214.462,00. Perolehan tahun 2017 sebesar Rp5.282.471.462,00 merupakan nilai Aset Tidak Berwujud berasal dari *Software* sebesar Rp5.232.586.462,00 dan kajian sebesar Rp49.885.000,00. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	Aset Tidak Berwujud TA 2017	
		Software	Kajian
1	DINDIKBUD	1.932.900.000,00	0,00
2	DINAS KESEHATAN	419.354.462,00	0,00
3	DINSOS KBPP	51.165.000,00	0,00
4	DINAS TENAGA KERJA	121.580.000,00	0,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	0,00
6	DISDUKCATPIL	305.520.000,00	0,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	56.893.000,00	0,00
8	DISKOMINFO	785.125.500,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	Aset Tidak Berwujud TA 2017	
		Software	Kajian
9	DISKOPERINDAG	30.000.000,00	0,00
10	DPMPPTSP	267.857.000,00	0,00
11	DINSERPUSARSIP	94.166.000,00	0,00
12	DIPERTANHUT	44.950.000,00	0,00
13	BAPPEDA	4.235.000,00	0,00
14	BAPPENDA	347.192.000,00	0,00
15	BPKAD	113.489.000,00	0,00
16	BKD	226.815.000,00	0,00
17	SEKRETARIAT DAERAH	390.676.500,00	0,00
18	KECAMATAN PEMALANG	5.743.000,00	0,00
19	DPU	0,00	49.885.000,00
Jumlah		5.232.586.462,00	49.885.000,00

Penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud TA. 2017 :

No	Aset Tak Berwujud	So 31 Des 2016	Mutasi 2017		So 31 Des 2017
			Bertambah	Berkurang	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	1.932.900.000,00	0,00	0,00	1.932.900.000,00
2	DINAS KESEHATAN	419.354.462,00	0,00	0,00	419.354.462,00
3	DINSOSKB PP	51.165.000,00	0,00	0,00	51.165.000,00
4	DINAS TENAGA KERJA	72.080.000,00	49.500.000,00	0,00	121.580.000,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	0,00	0,00	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	292.725.000,00	12.795.000,00	0,00	305.520.000,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	56.893.000,00	0,00	0,00	56.893.000,00
8	DISKOMINFO	5.000.000,00	820.064.500,00	39.939.000,00	785.125.500,00
9	DPMPPTSP	267.857.000,00	0,00	0,00	267.857.000,00
10	DINSPEPUSARSIP	94.166.000,00	0,00	0,00	94.166.000,00
11	DINAS PERTANIAN	44.950.000,00	0,00	0,00	44.950.000,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
13	BAPPENDA	300.192.000,00	47.000.000,00	0,00	347.192.000,00
14	BPKAD	113.489.000,00	0,00	0,00	113.489.000,00
15	BKD	211.400.000,00	15.415.000,00	0,00	226.815.000,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	302.255.000,00	88.421.500,00	0,00	390.676.500,00
17	KECAMATAN PEMALANG	5.743.000,00	0,00	0,00	5.743.000,00
18	DISKOPERINDAG	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Jumlah Software (1)		4.209.329.462,00	1.063.196.000,00	39.939.000,00	5.232.586.462,00
2. KAJIAN					
1	DPU	49.885.000,00	0,00	0,00	49.885.000,00
Jumlah Kajian (2)		49.885.000,00	0,00	0,00	49.885.000,00
Jumlah Total (1 + 2)		4.259.214.462,00	1.063.196.000,00	39.939.000,00	5.282.471.462,00

Pada tahun 2017 terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.063.196.000,00 dan pengurangan sebesar Rp39.939.000,00 berupa penambahan dan pengurangan berupa Software terdiri dari :

1. *Software*

- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Dinas Tenaga Kerja Rp49.500.000,00 berasal dari koreksi pengadaan *software/aplikasi* pelayanan ketenagakerjaan terintegrasi yang dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa *software* dan dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Disdukcatpil sebesar Rp12.795.000,00 berasal dari koreksi pengadaan Belanja Barang dan jasa berupa *software* pelayanan terpadu TA 2017 dikategorikan sebagai Belanja Barang dan jasa dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;



- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Diskominfo sebesar Rp820.064.500,00 berasal dari koreksi pengadaan Belanja Barang dan jasa berupa *software* penyusunan SIM PKK kegiatan penyelenggaraan ekosistem *smart city* Rp49.984.000,00; pengembangan website Opd bapenda dan Diskominfo sebesar Rp49.775.000,00; aplikasi *citizen complaint* sebesar Rp49.989.500,00; Sistem informasi monitoring intranet sebesar Rp46.805.000,00; Aplikasi info PBB sebesar Rp48.675.000,00, Sistem informasi manajemen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (SIM LPPD) sebesar Rp49.555.000,00; pengembangan *website* Sekretariat Daerah sebesar Rp49.500.000,00; pengembangan *website* Kelurahan dan Kecamatan sebesar Rp49.500.000,00; aplikasi *single database* kemiskinan sebesar Rp49.500.000,00, aplikasi SIM *executive* sebesar Rp48.345.000,00; Pengembangan *website* Dinas, Badan dan Kantor sebesar Rp49.500.000,00; Penyusunan *geographic information system* (GIS) sebesar Rp47.135.000,00; Aplikasi sistem informasi monografi sebesar Rp48.097.500,00; Sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB) sebesar Rp48.097.500,00; Sistem informasi manajemen Kecamatan dan Kelurahan sebesar Rp48.455.000,00; dan aplikasi *commandroom center* sebesar Rp47.212.000,00 TA 2017 dikategorikan sebagai Belanja Barang dan jasa dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud, dan *software* PKK pengadaan tahun 2015 dulu masuk persediaan pada Dishubkominfo sebesar Rp39.939.000,00 dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud di Diskominfo sebesar Rp39.939.000,00 berupa *software* penyusunan SIM PKK yang di serahkan ke bagian umum pada Sekretariat Daerah;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Bappenda sebesar Rp47.000.000,00 berasal dari koreksi pengadaan *software/aplikasi* BPHTB *Online* dari Belanja Barang dan Jasa TA 2017 dan dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud.
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di BKD sebesar Rp15.415.000,00 berasal dari koreksi pengadaan *software/aplikasi* kepegawaian dari Belanja Barang dan jasa sebesar Rp15.415.000,00 dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Sekretariat Daerah sebesar Rp88.421.500,00 terdapat pada bagian Hukum sebesar Rp48.482.500,00 berasal dari koreksi pengadaan *software/aplikasi* website jaringan dokumentasi dan informasi hokum (Website JDIH) dari Belanja Barang dan Jasa TA 2017 dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan *software* penyusunan SIM PKK yang di serahkan ke bagian umum pada Sekretariat Daerah sebesar Rp39.939.000,00 berasal dari persediaan pada tahun 2016 pada Dishubkominfo dan dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud;
- Penambahan Aset Tidak Berwujud di Diskoperindag sebesar Rp30.000.000,00 berasal dari koreksi pengadaan *software/aplikasi* penunjang monev pasar daerah dari Belanja Barang dan Jasa TA 2017 dikategorikan sebagai Belanja Barang dan Jasa dan dikorolari sebagai Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud.

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.935.849.310,00 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.573.758.256,00, Amortisasi penambahan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	Amortisasi Aset Tak Berwujud	So Amortisasi 31 Des 2016	Akumulasi Amortisasi 2017		So Amortisasi 31 Des 2017
			Bertambah	Berkurang	
1. SOFTWARE					
1	DIKBUD	1.932.900.000,00	0,00	0,00	1.932.900.000,00
2	DINAS KESEHATAN	356.003.402,00	17.679.366,00	0,00	373.682.768,00
3	DINSOSKB PP	25.582.500,00	12.791.250,00	0,00	38.373.750,00
4	DINAS TENAGA KERJA	29.137.813,00	12.482.500,00	0,00	41.620.313,00
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	34.925.000,00	0,00	0,00	34.925.000,00
6	DISDUKCATPIL	258.622.250,00	24.078.688,00	0,00	282.700.938,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	35.921.500,00	10.485.750,00	0,00	46.407.250,00
8	DISKOMINFO	3.750.000,00	42.106.635,00	0,00	45.856.635,00
9	DPMPSTP	140.552.354,00	54.670.375,00	0,00	195.222.729,00
10	DINSPUSARSIP	94.166.000,00	0,00	0,00	94.166.000,00
11	DINAS PERTANIAN	936.458,00	11.237.500,00	0,00	12.173.958,00
12	BAPPEDA	4.235.000,00	0,00	0,00	4.235.000,00
13	BAPPENDA	231.182.000,00	35.484.167,00	0,00	266.666.167,00
14	BPKAD	91.114.000,00	14.937.500,00	0,00	106.051.500,00
15	BKD	173.387.500,00	38.333.646,00	0,00	211.721.146,00
16	SEKRETARIAT DAERAH	154.560.208,00	74.707.427,00	0,00	229.267.635,00
17	KECAMATAN PEMALANG	5.743.000,00	0,00	0,00	5.743.000,00
18	DISKOPERINDAG	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
Jumlah Software (1)		3.572.718.985,00	349.619.804,00	0,00	3.922.338.789,00
2. KAJIAN					
1	DPU	1.039.271,00	12.471.250,00	0,00	13.510.521,00
Jumlah Kajian (2)					0,00
Jumlah Total (1 + 2)		3.573.758.256,00	362.091.054,00	0,00	3.935.849.310,00

5.3.1.4.4. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lainnya-Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp293.474.635.950,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp352.516.101.233,00 dengan rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

NO	SKPD	So 31 Des 2016	Mutasi 2017		So 31 Des 2017
			Bertambah	Berkurang	
1	DINDIKBUD	125.638.984.513,00	341.992.400,00	0,00	125.980.976.913,00
2	DINKES	11.910.874.228,00	0,00	1.157.104.220,00	10.753.770.008,00
3	DPU TR	114.773.503.637,00	11.042.839.983,00	5.632.769.000,00	120.183.574.620,00
4	DISPERKIM	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
5	SATPOL PP	147.285.417,00	0,00	37.729.000,00	109.556.417,00
6	DINSOS KBPP	315.976.000,00	0,00	241.853.000,00	74.123.000,00
7	DISNAKER	383.375.000,00	0,00	0,00	383.375.000,00
8	DLH	607.574.200,00	179.725.000,00	0,00	787.299.200,00
9	DISDUKCATPIL	287.671.000,00	0,00	182.875.000,00	104.796.000,00
10	DINPERMASDES	74.716.000,00	0,00	0,00	74.716.000,00
11	DISHUB	25.069.787.750,00	0,00	0,00	25.069.787.750,00
12	DISKOMINFO	208.453.000,00	0,00	0,00	208.453.000,00
13	DISKOPERINDAG	78.915.000,00	4.150.000,00	48.965.000,00	34.100.000,00
14	DPMPSTP	50.756.500,00	0,00	0,00	50.756.500,00
15	DINPUSARDA	324.738.500,00	0,00	0,00	324.738.500,00
16	DISPERIK	8.323.299.166,00	0,00	4.143.523.566,00	4.179.775.600,00
17	DISPARPORA	604.121.170,00	742.562.700,00	0,00	1.346.683.870,00
18	DIPERTAN	1.442.775.545,00	0,00	311.427.000,00	1.131.348.545,00
19	BAPPEDA	168.371.000,00	0,00	0,00	168.371.000,00
20	BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BPKAD	58.497.514.536,00	148.969.682,00	58.290.624.536,00	355.859.682,00
22	BKD	57.304.000,00	0,00	0,00	57.304.000,00
23	INSPEKTORAT	20.057.000,00	3.800.000,00	20.057.000,00	3.800.000,00
24	SETWAN	972.711.420,00	0,00	80.332.000,00	892.379.420,00
25	SETDA	1.800.761.112,00	0,00	1.288.390.726,00	512.370.386,00
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KESBANGPOLINMAS	22.422.500,00	0,00	4.500.000,00	17.922.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



NO	SKPD	So 31 Des 2016	Mutasi 2017		So 31 Des 2017
			Bertambah	Berkurang	
28	KEC. MOGA	22.744.800,00	0,00	0,00	22.744.800,00
29	KEC. PULOSARI	76.363.000,00	0,00	500.000,00	75.863.000,00
30	KEC. BELIK	49.847.662,00	0,00	6.520.000,00	43.327.662,00
31	KEC. WATUKUMPUL	3.035.000,00	0,00	0,00	3.035.000,00
32	KEC. BODEH	92.857.500,00	0,00	0,00	92.857.500,00
33	KEC. BANTARBOLANG	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	47.972.500,00	0,00	9.175.000,00	38.797.500,00
35	KEC. PEMALANG	137.386.000,00	0,00	11.000.000,00	126.386.000,00
36	KEC. TAMAN	60.806.577,00	0,00	0,00	60.806.577,00
37	KEC. PETARUKAN	49.300.000,00	0,00	9.150.000,00	40.150.000,00
38	KEC. AMPELGADING	40.605.000,00	0,00	29.010.000,00	11.595.000,00
39	KEC. COMAL	36.965.000,00	0,00	0,00	36.965.000,00
40	KEC. ULUJAMI	71.320.000,00	0,00	0,00	71.320.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Jumlah		352.516.101.233,00	12.464.039.765,00	71.505.505.048,00	293.474.635.950,00

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dindikbud sebesar Rp341.992.400,00 berupa alat peraga bidang IPA dasar yang akan di hibahkan ke sekolah swasta (SMP/SMTS) sebesar Rp19.930.000,00; pengadaan alat peraga bidang studi IPA menengah dasar yang dihibahkan ke sekolah swasta SMK/SMA sebesar Rp112.048.400,00; pengadaan buku ilmu pengetahuan umum ke SMA/SMK swasta sebesar Rp200.014.000,00; pengadaan buku ilmu pengetahuan umum ke taman bacaan masyarakat sebesar Rp10.000.000,00 yang akan di berikan ke pihak swasta masuk kategori Belanja Modal – Gedung bangunan direklasifikasi sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-lain.
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.157.104.220,00 berupa barang yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/853/Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 berupa Peralatan Kantor dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/784/tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DPU PR sebesar Rp11.042.839.983,00,00 berupa Jalan Kabupaten Kelas III yang sudah di Verifikasi Inspektorat Jalan Tidak Ditemukan yang diusulkan di hapus sebesar Rp1.032.000.000,00 masuk kategori Aset Tetap – Jalan Irigasi Jaringan dan Aset tetap dari Kontsruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp859.891.000,00 masuk kategori Aset Tetap – KDP; Review DED arsitektural pembangunan masjid agung pemalang sebesar Belanja modal Gedung Bnagunan sebesar Rp50.440.785,00; Rehabilitasi gedung kantor pemerintah kantor kajari pemalang dari Belanaj modal Gedung Bnagunan sebesar Rp217.780.305,00; peningkatan jalan evaluasi I 2017 dari belanja modal jalan irigasi jaringan sebesar Rp8.882.727.893,00, ini semua akan di hibahkan ke swasta hal ini menyebabkan harus direklasifikasi sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DPU PR sebesar Rp5.632.769.000,00 merupakan Aset Lain-lain berupa bangunan daerah irigasi yang di reklasifikasi ke Aset Tetap- Jalan Irigasi jaringan karena menindak lanjuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Satpol PP sebesar Rp37.729.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 berupa peralatan mesin;



- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinsos KB PP sebesar Rp241.853.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/853/Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di DLH sebesar Rp179.725.000,00 berupa Konstruksi Waduk / Embung Verifikasi Barang Tidak Ditemukan Oleh Inspektorat yang diusulkan di hapus masuk sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Disdukcatpil sebesar Rp182.875.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 berupa peralatan mesin;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Diskoperindagkop sebesar Rp4.150.000,00 berupa gerobak yang sudah rusak yang diusulkan di hapus masuk kategori Aset Tetap – Peralatan Mesin direklasifikasi sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Diskoperindagkop sebesar Rp48.965.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/853/Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Perikanan sebesar Rp4.143.523.566,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Disparpora sebesar Rp742.562.700,00,00 berupa Belanja Modal gedung bangunan Tahun Naggaran 2017 berupa pembangunan aula di desa Wisnu sebesar Rp201.555.500,00 selain itu juga terdapat Pemeliharaana Obyek Wisata di Silating sebesar Rp121.485.000,00 dan gapura masuk obyek wisata di Kaliparau sebesar Rp127.816.200,00. Ada juga dari Belanja Modal jalan irigasi jaringan Tahun Anggaran 2017 berupa peningkatan Turangga Seto sebesar Rp213.090.000,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 berupa permainan di tempat wisata Kaliprau sebesar Rp78.616.000,00 yang semuanya ini akan di serahkan ke masyarakat yang sudah ada berita acaranya sehingga di reklas ke Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Dinas Pertanian sebesar Rp299.427.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan dan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/784/Tahun 2017 tanggal 15 Oktober 2017;
- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD sebesar Rp148.969.682,00 berupa kelebihan pembayaran gaji pegawai yang di catat sebagai Aset Lainnya-Aset Lain-lain;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di BPKAD sebesar Rp58.290.624.536,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dan tanah sawah yang di serahkan ke desa-desa dengan dasar Berita acara Serah terima tentang penyerahan tanah dana pendidikan/tanah grantungan di Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pemalang; serta aset yang di hapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017; Keputusan Bupati Pemalang Nomor :188.4/784/tahun 2017



Tanggal 15 Oktober 2017 dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor :
188.4/853/Tahun 2017 tanggal 8 November 2017;

- Penambahan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Inspektorat sebesar Rp3.800.000,00 berupa Sepeda Motor G 9943 D Honda Astrea perolehan tanggal 24 April 2003 yang sudah rusak dan di usulan dengan surat usulan penghapusan Nomor : 030/2159/2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Inspektorat sebesar Rp20.057.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Sekretariat DPRD sebesar Rp80.332.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Sekretariat Daerah sebesar Rp1.288.390.726,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/853/Tahun 2017 tanggal 8 November 2017 dan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017 pada Bagian Umum sebesar Rp1.097.291.926,00; Bagian Organisasi sebesar Rp104.339.000,00; Bagian Pembangunan Rp68.885.800,00; Bagian Kesra sebesar Rp17.874.000,00;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kesbangpolinmas sebesar Rp4.500.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Pulosari sebesar Rp500.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Belik sebesar Rp6.520.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Randudongkal sebesar Rp9.175.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Pemalang sebesar Rp11.000.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Petarukan sebesar Rp9.150.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Pengurangan Aset Lainnya-Aset Lain-lain di Kecamatan Ampelgading sebesar Rp29.010.000,00 merupakan Aset Lain-lain yang dihapus dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/916/Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017;

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Pemalang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp69.162.164.660,00 dan Rp78.308.328.165,00 Akumulasi berkurang karena adanya penghapusan pada Aset Lain-lain dan penambahan karena adanya penghentian masa manfaat pada Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	SO AKUMULASI PENYUSUTAN 31 DESEMBER 2016	MUTASI 2017		SO AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2017
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	DINDIKBUD	24.139.493.165,00	0,00	0,00	24.139.493.165,00
2	DINKES	11.906.488.513,00	0,00	1.157.104.220,00	10.749.384.293,00
3	DPU TR	26.686.585.262,00	1.032.000.000,00	2.911.277.411,00	24.807.307.851,00
4	DISPERKIM	29.400.000,00	0,00	0,00	29.400.000,00
5	SATPOL PP	146.851.427,00	0,00	37.729.000,00	109.122.427,00
6	DINSOS KBPP	314.528.083,00	0,00	240.405.083,00	74.123.000,00
7	DISNAKER	374.375.000,00	0,00	0,00	374.375.000,00
8	DLH	602.406.012,00	20.668.376,00	0,00	623.074.388,00
9	DISDUKCATPIL	287.671.000,00	0,00	182.875.000,00	104.796.000,00
10	DINPERMASDES	74.361.400,00	0,00	0,00	74.361.400,00
11	DISHUB	3.029.123.517,00	0,00	0,00	3.029.123.517,00
12	DISKOMINFO	208.453.000,00	0,00	0,00	208.453.000,00
13	DISKOPERINDAG	64.495.000,00	0,00	34.545.000,00	29.950.000,00
14	DPMPSTSP	50.756.500,00	0,00	0,00	50.756.500,00
15	DINPUSARDA	322.668.500,00	0,00	20.125.000,00	302.543.500,00
16	DISPERIK	3.821.158.430,00	0,00	3.213.805.373,00	607.353.057,00
17	DISPARPORA	532.090.600,00	0,00	0,00	532.090.600,00
18	DIPERTAN	989.139.448,00	0,00	125.942.016,00	863.197.432,00
19	BAPPEDA	163.862.666,00	0,00	0,00	163.862.666,00
20	BAPENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	BPKAD	1.180.258.804,00	0,00	973.368.804,00	206.890.000,00
22	BKD	57.304.000,00	0,00	0,00	57.304.000,00
23	INSPEKTORAT	7.400.000,00	0,00	3.600.000,00	3.800.000,00
24	SETWAN	962.298.911,00	0,00	79.732.000,00	882.566.911,00
25	SETDA	1.656.329.388,00	0,00	1.156.901.308,00	499.428.080,00
26	BPBD	0,00	0,00	0,00	0,00
27	KESBANGPOLINMAS	22.422.500,00	0,00	4.500.000,00	17.922.500,00
28	KEC. MOGA	21.404.340,00	0,00	0,00	21.404.340,00
29	KEC. PULOSARI	74.919.668,00	0,00	500.000,00	74.419.668,00
30	KEC. BELIK	44.192.078,00	0,00	2.385.000,00	41.807.078,00
31	KEC. WATUKUMPUL	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
32	KEC. BODEH	92.310.626,00	0,00	0,00	92.310.626,00
33	KEC. BANTARBOLANG	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00
34	KEC. RANDUDONGKAL	47.507.500,00	0,00	8.710.000,00	38.797.500,00
35	KEC. PEMALANG	133.986.000,00	0,00	11.000.000,00	122.986.000,00
36	KEC. TAMAN	59.367.827,00	0,00	0,00	59.367.827,00
37	KEC. PETARUKAN	41.815.000,00	0,00	5.316.666,00	36.498.334,00
38	KEC. AMPELGADING	40.605.000,00	0,00	29.010.000,00	11.595.000,00
39	KEC. COMAL	34.565.000,00	0,00	0,00	34.565.000,00
40	KEC. ULUJAMI	69.284.000,00	0,00	0,00	69.284.000,00
41	KEC. WARUNGPRING	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
		78.308.328.165,00	1.052.668.376,00	10.198.831.881,00	69.162.164.660,00



5.5.2. KEWAJIBAN

5.5.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Beban dan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek		2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Utang PFK	206.387,00	27.718.346,00
2	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	1.716.295.391,47	4.500.009.051,81
4	Utang Beban	7.318.244.132,00	8.545.861.673,00
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.878.566.631,00	6.555.688.358,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		22.913.312.541,47	19.629.277.428,81

Saldo-saldo akun Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.5.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun 2017 sebesar Rp,00 merupakan pajak-pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara yang terdapat pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Saldo Utang PFK (Rp)	
		2017	2016
1	RSUD dr. M Ashari	0,00	0,00
2	Kec. Moga	0,00	535.950,00
3	Kec. Belik	0,00	2.443.636,00
4	Kec. Watukumpul	0,00	0,00
5	Kec. Bantarbolang	0,00	0,00
6	DPPKAD (PPKD)	0,00	0,00
7	Kec. Randudongkal	206.387,00	206.387,00
8	Kel. Mulyoharjo	0,00	2.429.978,00
9	Satpol PP	0,00	1.965.190,00
10	Kel. Pelutan	0,00	12.358.964,00
11	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	7.778.241,00
Jumlah		206.387,00	27.718.346,00

Adapun Utang PFK Tahun 2016 telah disetor ke Kas Negara pada tahun 2017 antara lain;

1. Rp535.950,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Kecamatan Moga dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2017;
2. Rp2.443.636,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Kecamatan Belik dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2017;
3. Rp2.429.978,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Kelurahan Mulyoharjo dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 26 Januari 2017;
4. Rp1.965.190,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Satpol PP dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 5 Januari 2017;
5. Rp12.358.964,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Kelurahan Pelutan dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Pebruari dan April 2017;
6. Rp7.778.241,00 merupakan utang PFK (PPh dan PPN) pada Kelurahan Wanarejan Selatan dan telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan 9 Mei 2017;
7. Rp206.387,00 merupakan utang PFK yaitu PPN pada Kecamatan Randudongkal dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 8 Februari 2018;



5.5.2.1.2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang Penerusan Pinjaman (*Sub Loan Agreement-SLA*) dari Pemerintah Pusat d.h.i. Departemen Keuangan yang jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2017, yakni untuk angsuran ke-30 dari 30 angsuran pokok sampai dengan tahun 2017. Angsuran terakhir ini jatuh tempo tanggal 31 Januari 2017. Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2017 dan 2016 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp1.716.295.391,47 turun sebesar Rp2.783.713.660,34 atau 38,14% dibandingkan dengan pendapatan diterima dimuka Tahun 2016 sebesar Rp4.500.009.051,81. Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 sebesar Rp1.715.144.792,47 dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)
DINKES	20.179.680,37	24.197.488,59
Diskop, UKM , Perindag	882.637.111,10	934.584.388,89
BPKAD	291.868.661,00	3.397.696.398,33
DISHUB	154.314.627,00	143.530.776,00
BAPENDA	367.295.312,00	0,00
Jumlah	1.716.295.391,47	4.500.009.051,81

- Pada Dinas Kesehatan (RSUD dr.M. Ashari) sebesar Rp20.179.680,37 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan sewa tahun lalu sebesar Rp5.416.666,67;
 - Sewa tempat kantor dan ATM Bank Jateng di RSUD sebesar Rp6.449.315,07;
 - Sewa tempat kantin dan koperasi di RSUD sebesar Rp8.313.698,63.
- Pada Diskop,UKM, Perindag sebesar Rp882.637.111,10 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Sewa gedung dan bangunan Pasar beras sebesar Rp696.828.611,11;
 - Sewa tanah untuk Bank Pemalang sebesar Rp40.760.000,00;
 - Sewa kuliner di Pasar beras sebesar Rp15.498.000,00;
 - Sewa di Blok SPA/Ex-PPS Pasar Pemalang sebesar Rp17.388.000,00;
 - Sewa di Blok Bongkar Muat sebesar Rp28.492.500,00;
 - Sewa kios Sirandu sebesar Rp41.670.000,00;
 - Sewa kios GCC sebesar Rp41.999.999,99.
- Pada BPKAD sebesar Rp291.868.661,00 merupakan sewa tanah sebesar Rp268.367.242,00 dan sewa tanah dan bangunan sebesar Rp23.501.419,00;
- Pada BAPENDA sebesar Rp367.295.312,00 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Rp366.144.713,00 merupakan Pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame TA 2017.
 - Rp1.150.599,00 merupakan Pendapatan diterima dimuka Pajak Air Bawah Tanah TA 2017.
- Pada Dishub sebesar Rp154.314.627,00 dengan rinciannya adalah sebagai berikut:
 - Ijin trayek dari pendapatan TA 2016 sebesar Rp36.908.656,00 yang masa ijinnya melebihi 31 Desember 2017;
 - Pengujian kendaraan sebesar Rp100.963.601,00;
 - Ijin trayek dari pendapatan TA 2017 sebesar Rp16.442.370,00 yang masa ijinnya melebihi 31 Desember 2017.



5.5.2.1.4. Utang Beban

Utang Beban merupakan beban-beban yang belum dibayarkan sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2017. Utang beban ini meliputi utang beban pegawai dan utang beban barang dan jasa. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.318.244.132,00 naik sebesar Rp1.227.617.541,00 dibandingkan dengan saldo Utang Beban tahun 2016 sebesar Rp8.545.861.673,00 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Beban	Saldo 2017 (Rp)	Saldo 2016 (Rp)
Utang Beban Pegawai	5.542.435.325,00	6.922.858.934,00
Utang Beban Barang dan Jasa	1.775.808.807,00	1.623.002.739,00
Jumlah	7.318.244.132,00	8.545.861.673,00

- Utang beban pegawai sebesar Rp5.542.435.325,00 terdiri dari:
 - Bertambah sebesar Rp6.854.139.844,00 merupakan utang jasa pelayanan dokter dan tenaga medis BLUD RSUD dr. M. Ashari Pemalang;
 - Bertambah sebesar Rp72.046.800,00 merupakan utang insentif pemungutan retribusi tahun 2016 pada Diskop, UKM, Perindag;
 - Berkurang sebesar Rp1.383.751.319,00 merupakan utang Dinas Kesehatan;
- Utang beban barang dan jasa merupakan utang beban air, listrik, telepon dan internet bulan Desember 2017 yang belum dibayarkan. Utang beban barang dan jasa sebesar Rp1.775.808.807,00 terdapat dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Utang Beban Barang dan Jasa 2017 (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa 2016 (Rp)
1	DINDIKBUD	8.347.542,00	7.933.379,00
2	Dinas Kesehatan	67.605.266,00	54.044.980,00
3	RSUD dr. M. Ashari	140.074.944,00	140.074.944,00
4	DPU dan Penataan Ruang	18.679.508,00	1.182.055.006,00
5	BAPPEDA	12.676.855,00	14.557.321,00
6	DISHUB	11.029.065,00	10.543.967,00
7	DLH	5.036.553,00	3.972.459,00
8	DISDUKCATPIL	15.289.068,00	14.004.021,00
9	DISNAKER	10.045.949,00	10.280.054,00
10	DISKOP,UKM,PERINDAG	13.193.200,00	10.240.892,00
11	Klr. KESBANGPOLINMAS	2.035.144,00	1.632.522,00
12	BPBD	2.077.200,00	1.799.654,00
13	SATPOL PP	2.735.145,00	1.344.265,00
14	Sekretariat Daerah	53.341.642,00	59.747.919,00
15	Sekretariat DPRD	13.941.407,00	6.374.728,00
16	BPKAD	80.096.398,00	25.458.558,00
17	INSPEKTORAT	6.304.922,00	6.149.767,00
18	BKD	11.027.036,00	7.506.048,00
19	Kec. Moga	1.556.595,00	1.504.971,00
20	Kec. Pulosari	1.527.315,00	1.109.859,00
21	Kec. Belik	904.222,00	1.053.846,00
22	Kec. Watukumpul	745.042,00	603.904,00
23	Kec. Bodeh	1.265.167,00	1.319.634,00
24	Kec. Bantarbolang	1.612.292,00	1.444.970,00
25	Kec. Randudongkal	1.161.556,00	590.118,00
26	Kec. Pemalang	8.382.645,00	1.365.639,00
27	Kec. Taman	3.514.567,00	2.625.290,00
28	Kec. Petarukan	3.294.186,00	2.363.574,00
29	Kec. Ampelgading	1.889.500,00	1.592.500,00
30	Kec. Comal	2.048.899,00	899.000,00
31	Kec. Ulujami	1.637.389,00	1.688.680,00
32	Kec. Warungpring	633.947,00	888.707,00
33	DPMPPTSP	8.410.831,00	7.681.480,00
34	Kel. Kebondalem	0,00	821.140,00
35	Kel. Pelutan	0,00	1.027.749,00
36	Kel. Sugihw aras	0,00	1.256.977,00
37	Kel. Mulyoharjo	0,00	1.875.998,00
38	Kel. Bojongbata	0,00	58.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



No	SKPD	Utang Beban Barang dan Jasa 2017 (Rp)	Utang Beban Barang dan Jasa 2016 (Rp)
39	Kel. Paduraksa	0,00	604.331,00
40	Kel. Widuri	0,00	150.140,00
41	Kel. Wanarejan Selatan	0,00	352.280,00
42	Kel. Beji	0,00	670.454,00
43	Kel. Petarukan	0,00	423.647,00
44	Kel. Purwoharjo	0,00	534.431,00
45	KKP	0,00	2.401.118,00
46	DINSOSKBPP	5.528.900,00	4.694.176,00
47	DISPERPUS & ARDA	5.611.678,00	4.248.215,00
48	DIPERTAN	2.934.950,00	2.680.657,00
49	DISPARPORA	23.621.366,00	9.821.671,00
50	DINAS PERIKANAN	6.968.525,00	6.929.099,00
51	DISKOMINFO	6.223.988,00	0,00
52	BAPENDA	8.263.794,00	0,00
53	DISPERMASDES	3.828.654,00	0,00
54	DISPERKIM	1.200.705.955,00	0,00
Jumlah		1.775.808.807,00	1.623.002.739,00

5.5.2.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp13.878.566.631,00 dan Rp6.555.688.358,00 yang terdiri dari :

- Utang di RSUD dr. M Ashari merupakan pengadaan obat, darah dan bahan laborat pada tahun 2017 guna mencukupi kebutuhan yang ada dan belum dilaksanakan pembayaran pada tahun anggaran 2017. Utang sebesar Rp6.274.970.255,00 terdiri dari:
 - Utang bahan obat-obatan-RSUD sebesar Rp4.323.052.642,00;
 - Utang bahan laboratorium-RSUD sebesar Rp1.951.917.613,00;
- Utang Jamkesda pada Dinas Kesehatan sebesar Rp7.711.363.647,00;
- Utang Jangka Pendek Lainnya berkurang sebesar Rp107.767.271,00 dikarenakan adanya kurang volume pekerjaan Dinas Kesehatan.

5.5.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

5.2.2.2.1. Utang Dalam Negeri

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017. Tahun 2017 tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang baik dari Utang Dalam Negeri maupun Utang Jangka Panjang lainnya.

5.5.3. EKUITAS

5.5.3.1. Ekuitas

5.5.3.1.1. Ekuitas

Akun ini menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu jumlah aset dikurangi dengan kewajiban yang dimiliki per tanggal neraca.

Saldo ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Ekuitas	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Ekuitas	3.204.638.010.492,67	2.954.033.132.467,38



5.6. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun 2017 dan 2016 meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris, sebagai berikut:

No	Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Aktivitas Operasi	487.427.339.239,00	180.005.450.687,00
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(335.478.422.440,00)	(229.213.529.660,00)
3	Aktivitas Pendanaan	(30.716.400.000,00)	(44.385.426.551,00)
4	Aktivitas Transitoris	55.500.000,00	20.964.362,00
5	Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas di BUD (1 s/d 4)	121.288.016.799,00	(93.572.541.162,00)
6	Kenaikan (Penurunan) Kas	121.437.732.314,00	(93.572.541.162,00)
7	Saldo Awal Kas di BUD	114.738.925.959,00	208.311.467.121,00
8	Saldo Akhir Kas (6+7)	236.176.658.273,00	114.738.925.959,00
9	Saldo Akhir Kas di BUD	172.941.136.868,00	114.738.925.959,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	52.932.000,00	55.500.000,00
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	1.006.387,00	27.718.346,00
12	Saldo Akhir Kas di BLUD	10.262.170.531,00	10.407.616.071,00
13	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN	43.210.784.709,00	41.264.660.906,00
14	Saldo Akhir Kas Dana BOS	3.973.680.865,00	7.798.044.872,00
15	Saldo Akhir Kas (9 s/d 14)	230.441.711.360,00	289.031.392.113,00

5.6.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp487.427.339.239,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

Arus Kas dari Aktivitas Operasi		2017 (Rp)	2016 (Rp)
Arus Kas Masuk			
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	64.270.887.023,00	45.544.391.390,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	27.884.961.093,00	26.018.775.115,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	15.471.278.657,00	37.153.819.470,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA	369.327.870.554,00	38.845.727.519,00
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.554.319.330.524,00	1.507.813.090.093,00
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	191.002.083.000,00	149.607.350.000,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	142.831.010.535,00	120.896.166.425,00
8	Bantuan Keuangan - LRA	29.984.584.048,00	49.691.542.000,00
9	Pendapatan Hibah	9.000.000.000,00	9.048.077.840,00
10	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	2.404.092.005.434,00	1.984.618.939.852,00
Arus Kas Keluar			
1	Belanja Pegawai	1.073.613.164.357,00	1.063.925.986.432,00
2	Belanja Barang dan Jasa	453.139.296.990,00	366.977.582.719,00
3	Belanja Bunga	0,00	14.330.850,00
4	Belanja Hibah	22.684.800.000,00	47.030.617.043,00
5	Belanja Bantuan Sosial	2.538.650.000,00	5.976.615.750,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Belanja Tak Terduga	2.262.214.045,00	599.700.000,00
8	Transfer-Bagi Hasil Pajak	4.554.438.977,00	3.731.531.001,00
9	Transfer-Bagi Hasil Retribusi	2.573.763.505,00	524.834.203,00
10	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa	353.471.993.000,00	315.141.062.840,00
11	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya	909.162.000,00	691.228.327,00
	Jumlah	1.915.747.482.874,00	1.804.613.489.165,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		488.344.522.560,00	180.005.450.687,00



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016



Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi surplus sebesar Rp487.427.339.239,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesma, Dana BOS untuk SD dan SMP, serta pencatatan penerimaan retribusi yang masih berada di Bendahara Penerimaan pada Dishub, Disparpora, dan Diskoperindag.

Arus Kas untuk BLUD, Kapitasi JKN, dan BOS seperti pada rincian berikut :

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Pendapatan BLUD	77.324.042.734,00
2	Belanja BLUD (3 s/d 5)	77.469.488.274,00
3	Belanja Pegawai BLUD	39.520.655.827,00
4	Belanja Barang Jasa BLUD	35.410.951.995,00
5	Belanja Modal BLUD	2.537.880.452,00
6	Sisa BLUD 2017 (1-2)	(145.445.540,00)
7	Sisa BLUD 2016	10.407.616.071,00
SISA KAS BLUD PER 31 DES 2016 (6+7)		10.262.170.531,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Pendapatan Kapitasi	56.768.360.523,00
2	Belanja Kapitasi (3 s/d 5)	54.822.236.720,00
3	Belanja Pegawai Kapitasi	33.996.888.734,00
4	Belanja Barang Jasa Kapitasi	10.993.203.404,00
5	Belanja Modal Kapitasi	9.832.144.582,00
6	Sisa Kas Kapitasi JKN 2017 (1-2)	1.946.123.803,00
7	Sisa Kas Kapitasi JKN 2016	41.264.660.906,00
Sisa Kas Kapitasi JKN Per 31 Des 2016 (6+7)		43.210.784.709,00

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Pendapatan BOS 2017 (2 s/d 3)	156.409.942.119,00
2	Sisa Kas BOS tahun lalu	5.586.237.785,00
3	Pendapatan BOS tahun berjalan	150.823.704.334,00
4	Belanja BOS (5 s/d 7)	152.436.261.254,00
5	Belanja Pegawai BOS	24.435.966.696,00
6	Belanja Barang Jasa BOS	95.709.879.748,00
7	Belanja Modal	32.290.414.810,00
8	Sisa Kas BOS 2017 (1 - 4)	3.973.680.865,00
Sisa Kas Dana BOS Per 31 Des 2016 (8)		3.973.680.865,00

Pendapatan BOS 2017 sebesar Rp156.409.942.119,00 terdiri dari Saldo Awal BOS tahun lalu sebesar Rp5.586.237.785,00 dan Pendapatan BOS tahun berjalan sebesar Rp150.823.704.334,00. Saldo Awal BOS tahun lalu sebesar Rp5.586.237.785,00 berupa Saldo BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp7.798.044.872,00 pada SD, SMP, SMA, dan SMK dikurangi Saldo BOS SMA dan SMK sebesar Rp2.211.807.085,00 karena SMA dan SMK menjadi bagian dari pemerintah provinsi. Sedangkan Pendapatan BOS tahun berjalan sebesar Rp150.823.704.334,00 berasal dari penyaluran provinsi sebesar Rp151.464.464.334,00 dikurangi pengembalian kas BOS pada beberapa sekolah sebesar Rp640.760.000,00. Sisa Kas BOS 2017 sebesar Rp3.973.680.865,00 terdiri dari Kas – Tunai sebesar Rp1.330.555.712,00 dan Kas di rekening Bank sebesar Rp2.643.125.153,00.

Penyajian tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 03 Laporan Arus Kas par 8, yang menyatakan bahwa definisi arus kas adalah arus masuk kas dan arus kas keluar dan setara kas pada Bendahara Umum Negara/Daerah sedangkan aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.



5.6.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi mencerminkan adanya pengadaan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah di masa yang akan datang.

Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi defisit sebesar Rp335.478.422.440,00 sudah termasuk perhitungan arus kas pendapatan selain transaksi yang melalui RKUD seperti pengelolaan BLUD pada RSUD dr. M. Ashari, Dana Kapitasi JKN pada puskesmas, dan Dana BOS untuk SD dan SMP.

Adapun Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar yang terdiri dari :

Arus Kas dari Aktivitas Investasi		2017 (Rp)	2016 (Rp)
Arus Kas Masuk			
1	Penjualan Peralatan Kantor Tak Terpakai	59.195.000,00	0,00
2	Penjualan Alat-alat Berat Tak Terpakai	0,00	0,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	1.750.000,00	0,00
4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	179.000.000,00	0,00
5	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	370.601.500,00	320.796.975,00
6	Penjualan Hasil Peternakan	0,00	0,00
Jumlah		610.546.500,00	320.796.975,00
Arus Kas Keluar			
1	Belanja Modal Tanah	11.884.647.920,00	1.392.393.450,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.680.231.826,00	52.609.547.827,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.210.358.951,00	88.997.526.329,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jarinigan	94.178.467.430,00	85.284.121.679,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.135.262.813,00	1.250.737.350,00
Jumlah		336.088.968.940,00	229.534.326.635,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(335.478.422.440,00)	(229.213.529.660,00)

Dalam tahun 2017 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sebesar Rp610.546.500,00 yang merupakan hasil penjualan/lelang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penjualan Peralatan Kantor	
	a. Peralatan Kantor (Iew at KPKNL)	35.000.000,00
	b. Peralatan Medis dan Non Medis	24.195.000,00
	Subtotal	59.195.000,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	
	a. Rongsok Kerangka Motor RC-100	1.750.000,00
	Subtotal	1.750.000,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	
	a. Dinas Bupati Toyota Kendaraan Fortuner Th. 2006	51.000.000,00
	b. Dinas Wakil Bupati Toyota Kendaraan Fortuner Th. 2010	128.000.000,00
	Subtotal	179.000.000,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
	a. Bongkaran Sekolah - Sekolah	25.401.500,00
	b. Bongkaran Pasar Petarukan	1.000.000,00
	c. Bongkaran Pasar Paduraksa	87.000.000,00
	d. Bongkaran Pasar Randudongkal	187.000.000,00
	e. Bongkaran Pasar Ulujami	400.000,00
	f. Bongkaran Puskesmas dan Pesangrahan (Iew at KPKNL)	53.800.000,00
	g. Bongkaran Dinas Kesehatan	3.000.000,00
	h. Bongkaran Terminal Grosir Comal	13.000.000,00
	Subtotal	370.601.500,00
Total Hasil Penjualan/lelang		610.546.500,00



Sedangkan Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp336.088.968.940,00 merupakan pembelian aset tetap.

5.6.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan defisit sebesar Rp30.716.400.000,00 mencerminkan adanya pengeluaran pemerintah yang terkait dengan arus kas di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan selisih dari Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar atas Aktivitas Pendanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		2017 (Rp)	2016 (Rp)
Arus Kas Masuk			
1	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat	283.600.000,00	3.468.200.000,00
	Jumlah	283.600.000,00	3.468.200.000,00
Arus Kas Keluar			
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen	31.000.000.000,00	43.615.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat	0,00	238.626.551,00
4	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga lainnya/Masyarakat	0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	31.000.000.000,00	47.853.626.551,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(30.716.400.000,00)	(44.385.426.551,00)

5.6.4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yang mencerminkan saldo penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran. Aktivitas Transitoris diantaranya adalah pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga yang berada di BUD maupun Bendahara SKPD, yaitu terdiri dari: IWP, PPh Ps 21, 22, 23, dan PPN dalam tahun 2017. Jumlah Arus Masuk PFK sebesar Rp145.166.841.215,00 sedangkan jumlah Arus Kas Keluar PFK sebesar Rp145.111.341.215,00.

Arus Kas ini terjadi sebagai konsekuensi kedudukan bendahara yang menjadi wajib pungut terhadap transaksi-transaksi yang sumber dananya berasal dari keuangan negara. Realisasi TA 2017 dan 2016 sebagai berikut :

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		2017 (Rp)	2016 (Rp)
Arus Kas Masuk			
1	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran	0,00	598.362,00
2	Penerimaan Setoran Saldo Tahun Lalu dari Bendahara Penerimaan	55.500.000,00	20.366.000,00
3	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
	Jumlah	145.166.841.215,00	158.126.172.404,00
Arus Kas Keluar			
1	Sisa UP Tahun Berjalan	0,00	0,00
2	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
	Jumlah	145.111.341.215,00	158.105.208.042,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		55.500.000,00	20.964.362,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris surplus sebesar Rp55.500.000,00 merupakan Kas pada bendahara penerimaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.167.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp1.110.000,00 dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp27.583.000,00 yang telah disetorkan pada bulan Januari 2017 serta kas di bendahara penerimaan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp25.640.000,00 yang telah disetor pada bulan Februari dan Maret 2017.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

6.1. UMUM

Pemerintah Kabupaten Pemalang berdomisili di Jalan Surohadikusumo No.1 Pemalang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundangan ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950.

Pemerintah Kabupaten Pemalang mempunyai Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016–2021, dirumuskan visi pembangunan daerah yang merupakan hasil refleksi dan proyeksi tentang arah yang hendak dituju oleh Kabupaten Pemalang selama lima tahun dalam menjalankan amanat publik untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu: “TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT, BERJATI DIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Pemalang tersebut, maka diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemalang Hebat

Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan tujuan yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera. Pemalang Hebat juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.

2. Berdaulat

Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan asas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum dan tanpa meninggalkan unsur-unsur kearifan lokal.

3. Berjati diri

Berjati diri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.

4. Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.



Rumusan misi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal dan eksternal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Berangkat dari penjelasan diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

Misi :

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan asas musyawarah mufakat, dan gotong royong.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.
7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

6.2. INFORMASI PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI TATAKERJA

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 per 1 Januari 2017, membawa pengaruh proses penyajian saldo awal tahun atau saldo 1 Januari 2017 karena adanya perbedaan SKPD antara tahun 2016 dengan tahun 2017 dimana LKPD Tahun 2016 (Audited) masih menggunakan SKPD lama sedangkan tahun 2017 sudah menggunakan SKPD baru dengan adanya SKPD yang dihapus, SKPD yang digabung dan SKPD yang dipecah di Pemerintah Daerah.

Perubahan proses penyusunan saldo 3 Januari 2017 hanya akan mempengaruhi posisi Laporan Keuangan SKPD per 1 Januari 2017 tetapi tidak mempengaruhi posisi Keuangan pemerintah daerah dimana posisi keuangan pemerintah daerah per 1 Januari 2017 sama dengan posisi 31 Desember 2016.

Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 di Kabupaten Pemalang dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pemalang, yang membawa konsekuensi berubahnya beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga penyajian saldo neraca per 3 Januari 2017 bagi SKPD perlu disusun kembali.

Dengan adanya SKPD yang dihapus, digabung dan dipecah, maka saldo akun neraca SKPD per 3 Januari 2017 atas SKPD yang dihapus, digabung dan dipecah tersebut perlu didistribusikan ke SKPD lain. Laporan SKPD yang perlu didistribusikan hanya Neraca, sedangkan LRA, LO dan LPE tidak perlu didistribusikan ke SKPD lain. Hal ini disebabkan dalam akuntansi dikenal Akun Riil dan Akun Nominal. Akun Riil adalah akun yang tidak



ditutup setiap tahunnya seperti akun yang terdapat pada Neraca sedangkan Akun Nominal adalah akun yang setiap tahun ditutup seperti akun-akun pada LRA dan LO. Oleh sebab itu saldo pada Neraca per 31 Desember 2016 dari SKPD yang dihapus, digabung dan dipecah pada tanggal 3 Januari 2017 perlu didistribusikan ke SKPD baru.

6.3. KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki posisi yang strategis, karena terletak di jalur transportasi Pantai Utara (Pantura) Jawa. Secara astronomis Kabupaten Pemalang terletak antara 109.17° – 109.40° Bujur Timur dan 8.52° - 7.20° Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, wilayah Kabupaten Pemalang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Pekalongan;
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Purbalingga;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tegal.

Luas wilayah Kabupaten Pemalang 111.530,570 Ha atau 1.115,31 Km², terdiri dari tanah sawah seluas 38.694,216 Ha dan tanah kering seluas 72.836,361 Ha.

Secara administratif, Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan dan 211 desa serta 11 kelurahan. Sedangkan jumlah dusun/lingkungan yang ada di seluruh desa dan kelurahan adalah 933 yang terdiri dari 5.969 RT dan 1.218 RW.

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari daerah dataran pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan daerah pegunungan. Dataran pantai dengan ketinggian 1–5 meter di atas permukaan laut terdapat di beberapa bagian utara Kabupaten Pemalang. Sedangkan dataran rendah dengan ketinggian 6–15 meter di atas permukaan laut juga terletak di kawasan utara, sementara itu daerah dataran tinggi dengan ketinggian 16–212 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah dan selatan Kabupaten Pemalang. Sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 213–925 meter di atas permukaan laut umumnya terletak di bagian selatan Kabupaten Pemalang.

Sementara untuk jenis tanah di wilayah Kabupaten Pemalang terdiri dari tanah *alluvial* yang umumnya terletak di dataran rendah, *regosol* batu-batuan pasir dan intermedier terdapat di daerah perbukitan sampai pegunungan. Tanah letosal yang terdiri dari batu bekuan pasir banyak terdapat di daerah bukit sampai pegunungan. Pemanfaatan tanah sebagian besar untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan yakni seluas 60.170,373 Ha atau 52,16% dari luas wilayah. Sedangkan seluas 29.972,88 Ha (26%) merupakan areal hutan negara dan hutan rakyat serta sisanya seluas 25.157,317 Ha (21,84%) digunakan untuk bangunan perumahan serta pekarangan, padang rumput dan lain-lain.

6.4. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat dan didukung dengan kualitas SDM yang tinggi diharapkan dapat menciptakan akselerasi guna tercapainya kondisi ideal dari pembangunan.

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan sebagainya. Perkembangan penduduk di Kabupaten Pemalang selama ini menunjukkan peningkatan dan ini dapat dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 sebesar 1.292.573 jiwa (hasil proyeksi berdasarkan Sensus). Secara keseluruhan jumlah penduduk



perempuan lebih besar daripada laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 639.797 jiwa sedangkan penduduk perempuan sebanyak 652.776 jiwa.

Berikut disajikan tabel dan gambar proporsi jumlah penduduk Kabupaten Pemalang per Kecamatan Tahun 2016.

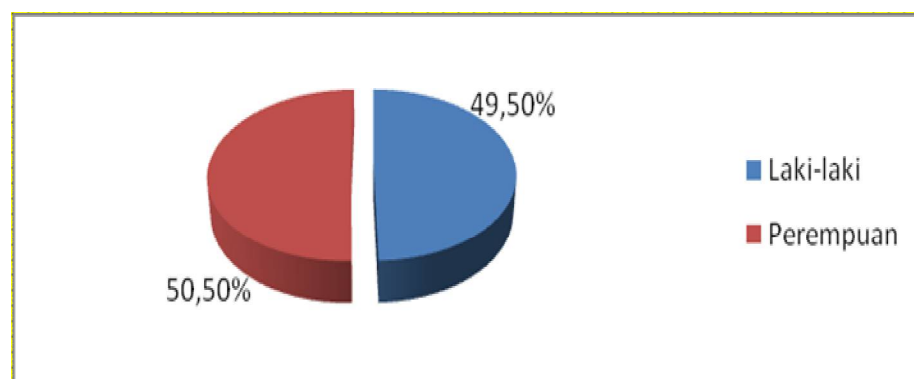
Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Moga	31.501	31.975	63.476
Warungpring	19.175	19.671	38.846
Pulosari	27.703	28.152	55.855
Belik	52.415	52.037	104.452
Watukumpul	32.222	32.551	64.773
Bodeh	27.103	27.400	54.503
Bantarbolang	34.626	37.229	71.855
Randudongkal	47.504	49.927	97.431
Pemalang	87.907	89.695	177.602
Taman	80.234	81.508	161.742
Petarukan	72.663	74.098	146.761
Ampelgading	32.717	33.751	66.468
Comal	44.170	44.633	88.803
Ulujami	49.856	50.150	100.006
Jumlah	639.797	652.776	1.292.573

Sumber : Pemalang Dalam Angka Tahun 2017

Dari Tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Pemalang menurut jenis kelamin relatif seimbang sebagaimana grafik dibawah ini:

Komposisi Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017



Sedangkan penduduk Kabupaten Pemalang berdasarkan jenis kelamin per kelompok umur sebagai berikut:



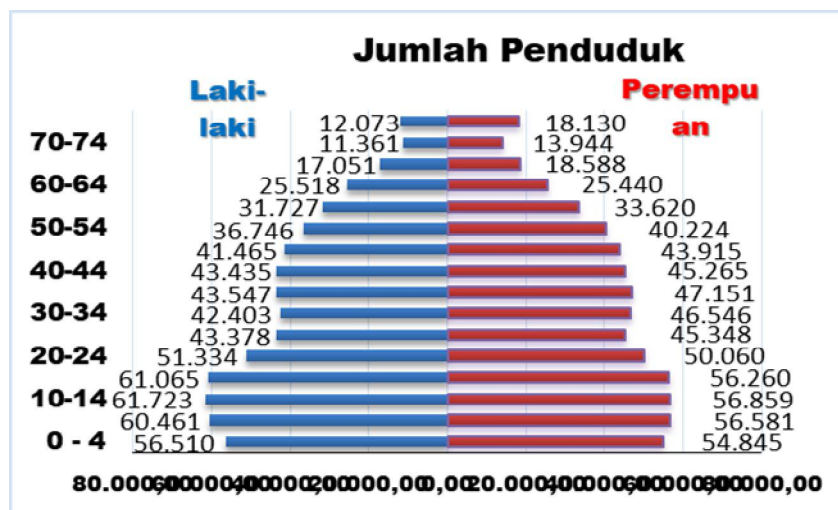
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 Kabupaten Pemalang Tahun 2017**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	56.510	54.845	111.355
5 – 9	60.461	56.581	117.042
10 – 14	61.723	56.859	118.582
15 – 19	61.065	56.260	117.325
20 – 24	51.334	50.060	101.394
25 – 29	43.378	45.348	88.726
30 – 34	42.403	46.546	88.949
35 – 39	43.547	47.151	90.698
40 – 44	43.435	45.265	88.700
45 – 49	41.465	43.915	85.380
50 – 54	36.746	40.224	76.970
55 – 59	31.727	33.620	65.347
60 – 64	25.518	25.440	50.958
65 – 79	17.051	18.588	35.639
70 – 74	11.361	13.944	25.305
75+	12.073	18.130	30.203
Jumlah	639.797	652.776	1.292.573

Sumber : Pemalang Dalam Angka Tahun 2017

Jika digambarkan dalam piramida penduduk, maka dapat disajikan sebagai berikut:

Piramida Penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2017



Sumber : Pemalang Dalam Angka Tahun 2016

Sesuai dengan piramida penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2016 dapat digambarkan banyaknya penduduk usia produktif yang cukup tinggi. Kondisi ini sekaligus mencerminkan bahwa jumlah angkatan kerja untuk Kabupaten Pemalang cukup besar.



6.5. DOKUMEN PERENCANAAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang secara integral selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang sebagai acuan pelaksanaan APBD TA 2016 adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang Tahun 2005–2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021.



BAB VII

PENUTUP

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Daerah tahun anggaran 2017 merupakan bahan audit bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah untuk memperoleh opini audit dan selanjutnya akan dijadikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang akan disampaikan kepada DPRD.

Beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Arus Kas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi bagi penyelesaian penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2017 ini dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan amanah kita membangun dan melayani masyarakat Kabupaten Pemalang yang kita cintai.

Pemalang, 2018

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI